



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018-2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
15. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat .

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah menjaga kesinambungan pembangunan melalui rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta permasalahan dan kebutuhan Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah:
 - a. memberikan arahan bagi perencanaan pembangunan daerah jangka menengah; dan
 - b. menyediakan pedoman penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahun dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

BAB II

RPJMD

Pasal 4

RPJMD merupakan penjabaran dari:

- a. Visi dan Misi Bupati;
- b. Tujuan dan Sasaran;
- c. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan daerah;
- d. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- e. Kinerja Penyelenggaraan Daerah.

Pasal 5

- (1) Visi dan Misi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan uraian visi Bupati dan Wakil Bupati dan jangka waktunya disertai misi yang merupakan penjabaran visi.
- (2) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penjabaran tujuan dan sasaran setiap misi yang dijabarkan
- (3) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan strategi dalam setiap misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijelaskan dalam arah kebijakan pada setiap strategi dan dijabarkan dalam program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahunan.
- (4) Kerangka pendanaan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kerangka pendanaan daerah

yang memuat belanja selama 5 (lima) tahun kedepan dan program perangkat daerah memuat urusan bidang disertai program 5 (lima) tahunan dan perangkat daerah penanggung jawab program.

- (5) Kinerja penyelenggaraan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pasal 6

RPJMD berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RTRW, RPJMD kabupaten/ kota sekitar.

Pasal 7

RPJMD menjadi pedoman:

- a. Penyusunan RKPD, Renstra dan Renja;
- b. Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023.

Pasal 8

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana RPJMD.
 - c. Evaluasi terhadap hasil rencana RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar. dan/atau
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Apabila dalam penyusunan RKPD, RPJMD belum tersusun, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (34/2/2019).**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2018-2023**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2023 dapat selesai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2023 disusun sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan Petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara disusun dan disempurnakan melalui beberapa tahapan yang meliputi kegiatan koordinasi dan konsultasi yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat dan Perangkat Daerah melalui wadah Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Rencana Pembangunan RPJMD. Pembahasan RPJMD telah dilakukan secara intensif bersama DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Terwujudnya Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak terkait dan Bappeda Provinsi Kalimantan

Timur yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam penyusunan RPJMD ini.

Besar harapan kami bahwa Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai panduan dalam perencanaan dan pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi pemerintah daerah dan pada akhirnya mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang maju, modern, dan religius serta kesejahteraan bagi rakyat Penajam Paser Utara.

Penajam, 18 Maret 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	xiv

Bab I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penulisan	I-10

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-12

2.1. Kondisi Geografis dan Demografi.....	II-12
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-12
A.1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-12
A.2. Topografi.....	II-16
A.3. Geologi dan Jenis Tanah	II-19
A.3.1. Daerah Pergerakan Tanah	II-22
A.4. Klimatologi	II-22
A.5. Hidrologi.....	II-23
A.6. Penggunaan Lahan	II-25
B. Potensi Pengembangan wilayah	II-27
B.1. Kawasan Peruntukan Industri	II-27
B.2. Kawasan Strategi Kabupaten	II-32
B.2.1. Ketentuan Umum Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	II-35
B.2.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi.....	II-38
B.2.2.1. Kawasan Perkotaan Petung Berada di Kecamatan Penajam	II-39
B.2.2.2. Kawasan Perkotaan Sepaku Berada di Kecamatan Sepaku	II-39
B.2.2.3. Kawasan Pariwisata Bahari Berada di Kecamatan Penajam	II-39
A. Pantai Tanjung Jumlai	II-39
B. Pantai Sipakario (Nipah-nipah)	II-40
C. Pantai Gusung.....	II-40
B.2.2.4. Kawasan Agropolitan.....	II-40
B.2.2.4.1. Kawasan Agropolitan Berbasis	

	Pertanian Tanaman Pangan .	II-40
B.2.2.4.2.	Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan.....	II-41
B.2.2.4.3.	Kawasan Agropoitan Berbasis Peternakan	II-42
B.2.2.5.	Kawasan Sekitar Jembatan Penyebrangan Penajam Balikpapan.....	II-43
B.2.2.6.	Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude Central Terminal) Beraa di Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam	II-44
B.2.2.7.	Kawasan Peruntukan Industri Buluminung di Kecamatan Penajam	II-44
B.2.2.8.	Kawasan Waterfront	II-49
B.2.3.	Rencana Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	II-49
B.2.3.1.	Kawasan Hutan Mangrove.....	II-49
B.2.3.2.	Kawasan Suaka Orang Utan dan Penelitain di Pulau Benawa Besar dan Pulau Benawa Kecil di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku	II-53
B.2.4.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .	II-53
B.2.4.1.	Pembangunan National Science Techno Park – Maritime (Pusat Penelitian Ilmu pengetahuan dan Teknologi Bidang Kelautan) – Buluminung	II-53
B.2.4.2.	Buluminung <i>Nuclear Industry-Science Technopark</i> (BNI-STP)	II-54
B.3.	Kawasan Rawan Bencana	II-55
B.3.1.	Daerah Rawan Longsor	II-56
B.3.2.	Daerah Rawan Banjir	II-56
C.	Demografi	II-58
C.1.	Kependudukan	II-58
C.2.	Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-58
C.3.	Penyebaran Penduduk	II-60
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-62
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II-62
A.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-62
A.1.	Pertumbuhan PDRB dan Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara	II-62
A.2.	Pendapatan Regional Perkapita	II-67
B.	Inflasi	II-68
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II-68
2.2.3.	Fokus Seni dan Budaya	II-70
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-67

2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	II-71
2.3.1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-71
a.	Pendidikan	II-71
a.1.	Kepemudaan dan Olahraga	II-74
b.	Kesehatan	II-74
c.	Pekerjaan Umum	II-78
1.	Jalan dan Jembatan	II-78
2.	Jaringan Irigasi	II-82
3.	Drainase	II-83
4.	Penataan Ruang	II-85
4.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	II-85
d.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-87
1.	Presentase Luas Permukiman yang tertata	II-89
2.	Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	II-89
3.	Tempat Pemakaman Umum (PPU)	II-90
4.	Air Bersih	II-91
e.	Sosial	II-94
2.3.1.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-95
a.	Tenaga Kerja	II-95
b.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-97
c.	Ketahanan Pangan	II-99
d.	Lingkungan Hidup	II-102
e.	Air Limbah	II-103
f.	Kependudukan dan Catatan Sipil	II-103
g.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-105
h.	Perhubungan	II-105
i.	Statistik	II-107
j.	Komunikasi dan Informasi	II-108
k.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	II-108
l.	Penanaman Modal	II-110
m.	Kebudayaan	II-111
n.	Perpustakaan	II-111
2.3.2.	Fokus Layanan dan Urusan Pilihan	II-112
2.3.2.1.	Kelautan dan Perikanan	II-112
2.3.2.2.	Pertanian	II-113
a.	Pertanian	II-113
b.	Peternakan	II-116
c.	Perkebunan	II-118
d.	Kehutanan	II-119
2.3.2.3.	Pariwisata	II-119
2.3.3.	Fokus Layanan Penunjang Urusan	II-120

2.3.3.1. Pengawasan	II-120
2.3.3.2. Perencanaan	II-121
2.3.3.3. Keuangan	II-121
2.3.3.4. Kepegawaian	II-123
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ..	II-125
2.4. Daya Saing Daerah.....	II-126
A. Kemampuan Ekonomi Daerah	II-126
B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-128
1. Perhubungan	II-128
2. Penataan Ruang	II-130
C. Fokus Iklim Berinvestasi	II-130
D. Fokus Sumber Daya Manusia	II-132
1. Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk	II-132
2. Rasio Ketergantungan	II-132
3. Rencana Pengembangan Kawasan	II-133

Bab III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN III-141

3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-141
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-142
3.1.1.1 Pendapatan Daerah	III-142
3.1.1.2 Belanja Daerah	III-145
3.1.2 Neraca Daerah	III-150
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	III-159
3.2.1 Kebijakan Pengelolahan Aset	III-159
3.2.2 Pengelolaan Keuangna Daerah	III-159
3.2.3 Pembiayaan Daerah	III-160
3.2.3.1 Analisis Sumber Penutup Defisit <i>Rill</i>	III-161
3.2.3.2 Analisi Ralisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	III-162
3.3. Kerangka Pendanaan	III-163
1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-163

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-171

4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-171
1. Layanan Urusan Pemerintah Wajib	IV-171
a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-171
b. Urusan Wajib Non Pelayanan Daser	IV-174
c. Fokus Layanan Urusan Pilihan	IV-177
d. Fokus Layanan Penunjang Urusan	IV-178
4.2. Isu Strategis	IV-179
4.2.1 Isu Strategis International	IV-180
4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV-183
4.2.3 Isu Strategis Regional	IV-186

4.2.4 Isu Strategis Lokal	IV-187
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-192
5.1. Visi.....	V-192
5.2. Misi	V-193
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-196
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-202
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-202
6.2. Program Pembangunan Daerah	VI-205
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-235
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-254
BAB IX PENUTUP	IX-261

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Luas Wilayah Penajam Paser Utara Menurut Kecamatan ..	II-13
2.2 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan di Rinci Perbulan	II-23
2.3 Jumlah Sungai di Kabupaten Upaten Penajam Paser Utara	II-24
2.4 Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017	II-25
2.5 Klasifikasi Pengembangan Kawasan Industri	II-28
2.6 Banyaknya Perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara	II-31
2.7 Banyaknya Pengusaha Menurut Sektor Usahanya Tahun 2016	II-31
2.8 Daftar Investor Pada <i>National Science Techno Park</i>	II-53
2.9 JumlsH Kejadian Bencana di Kabupaten Upaten PENAJAM PASER UTARA Tahun 2016	II-55
2.10 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2017 (Januari-Juli)	II-56
2.11 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2018	II-58
2.12 Penduduk Manurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 di Kabupaten Penajam Paser Utara	II-59
2.13 Penduduk , Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Upaten Penajam Paser Utara	II-60
2.14 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Kosntan (ADHK).....	II-63
2.15 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017 (%)	II-64

2.16	Produk Domestik Regional Bruto Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta)	II-66
2.17	Indikator Penyusunan IPM Kabupaten PENAJAM PASER UTARA 2013-2016	II-69
2.18	Prasarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017	II-75
2.19	Presentase Penduduk Yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Kesehatan	II-75
2.20	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018	II-76
2.21	Kinerja Pembangunan Kesehatan	II-76
2.22	Angka Kelangsungan Hidup, Usia Harapan Hidup dan Balita Gizi Buruk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017	II-78
2.23	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2018	II-80
2.24	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018	II-81
2.25	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2014-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara	II-82
2.26	Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018	II-82
2.27	Sebagai Wilayah Genangan Yang Belum Tertangani di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018	II-83
2.28	Kawasan Ruang Terbuka Hijau Yang dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 ..	II-86
2.29	Data Blacklog Perumahan dan RTLH Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018	II-87
2.30	Jenis Kegiatan Bantuan Perumahan Kabupaten Penajam Paser Utara	II-88
2.31	Persentase Luas Permukiman Yang Tertata Per Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara .	II-89

2.32	Realisasi IMB Yang Telah diterbitkan	II-90
2.33	Rasio Tempat Pemakama Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara	II-91
2.34	Jumalh Pencari Kerja	II-96
2.35	Jumlah Tenaga Kerja	II-96
2.36	Indikator dan Realisasi Ketenagakerjaan	II-97
2.37	Indikator Program Keluarga Berencana dan Realisasi Tahun 2014-2017	II-98
2.38	Data Ketersediaan Beras Penajam Paser Utara Tahun 2017	II-99
2.39	Produksi Beras Kabupaten Penajam Paser Utara	II-100
2.40	Kebutuhan Konsumsi Beras Kabupaten Upaten Penajam Paser Utara (ton)	II-101
2.41	Pelaksanaan Permeriksaaan Reguler tahun 2013-2017	II-102
2.42	Jangka Waktu Penertiban Dokumen Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara	II-104
2.43	Data Pelayanan Kependudukan	II-104
2.44	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2014-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara	II-106
2.45	Jumlah Izin Terhadap Jumlah Angkutan	II-106
2.46	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2014-2018	II-107
2.47	Indikatoor dan Realisasi UMKM Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014-2017	II-109
2.48	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Nilai Realisasi PMDM	II-110
2.49	Jumlah Perpustakaan Binaan dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018	II-111
2.50	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2018	II-112

2.51	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap/Laut Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018	II-112
2.52	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara	II-113
2.53	Produktivitas Pertanian Buah-Buahan Kabupaten Penajam Paser Utara	II-114
2.54	Produktivitas Pertanian Palawija Kabupaten Penajam Paser Utara	II-114
2.55	Produktivitas Pertanian Sayur Mayur Kabupaten Penajam Paser Utara	II-115
2.56	Jenis dan Populasi Ternak	II-116
2.57	Produktivitas Telur Unggas Kabupaten Penajam Paser Utara	II-116
2.58	Indentifikasi Lokasi Pengembangan <i>Miniranch</i> di Kabupaten Penajam Paser Utara	II-117
2.59	Luas Areal Komoditi Perkebunan Rakyat	II-118
2.60	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat	II-118
2.61	Rasio Penduduk Per TPS Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara	II-120
2.62	Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah).....	II-122
2.63	Indikator Capaian Pelaksanaan Program Bidang Kepegawaian	II-124
2.64	Jumlah Pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara	II-125
2.65	Aspek Pelayananana Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-125
2.66	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara	II-133
2.67	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara	II-136

3.1	Rata-rata Pertumbuhan Ralisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	III-143
3.2	Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017 (%)	III-144
3.3	Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017.....	III-146
3.4	Pertumbuhan Belanja langsung dan Tidak Langsung Tahun 2013-2017 Kabupaten Penajam Paser Utara (%) ..	III-148
3.5	Pertumbuhan Belanja Aparatur Daerah Tahun 2014-2017 Kabupaten Penajam Paser Utara (%)	III-149
3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Penajam Paser Utara	III-151
3.7	Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017	III-153
3.8	Rasio Keuangan Tahun 2013 s/d tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara	III-159
3.9	Surplus Defisit Pembiayaan Tahun 2013 s/d 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara	III-161
3.10	Realisasi Pembiayaan APBD Tahun 2013 s/d 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara	III-161
3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 203 s/d 2017 (Rp juta)	III-162
3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 s/d 2017 (Rp juta)	III-162
3.13	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 s/d tahun 2013	III-164
3.14	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara 2019-2023	III-166
3.15	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019-2023	III-170
5.1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Penajam Paser Utara	V-200
6.1	Visi Misi Tujuan dan Strategi Kabupaten Penajam Paser Utara	VI-214
6.2	Arah Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara	VI-217

6.3	Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Kabupaten Penajam Paser Utara	VI-223
7.1	Kerangka Pendanaan Kabupaten Penajam Paser Utara 2019-2023	VII-236
7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Penajam Paser Utara ..	VII-237
8.1	Penetapan Indikator Kerja Utama Kabupaten Penajam Paser Utara	VIII-255
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara	VIII-257

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No. 25 tahun 2004.....	I-9
1.2 Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral	I-9
1.3 Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral	I-10
2.1 Peta Batas Admisinstrasi Kabupaten Penajam Paser Utara	II-15
2.2 Peta Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara	II-17
2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Penajam Paser Utara	II-18
2.4 Peta Geologi Kabupaten Penajam Paser Utara	II-20
2.5 Peta Jenis Tanan Kabupaten Penajam Paser Utara	II-21
2.6 Peta Penggunaan Lahan	II-26
2.7 Kawasan Strategis Kab Penajam Paser Utara	II-34
2.8 Jembatan Pulau Balang	II-45
2.9 PT. Pelabuhan Penajam Benuo Taka (Astra Infaport Group)	II-47
2.10 Pt. Waskita Beton Precast	II-48
2.11 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Penajam Paser Utara	II-52
2.12 Peta Rawan Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara	II-57
2.13 Piramida Pendudukan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017	II-60
2.14 Peta Sebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017	II-61
2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2017	II-62
2.16 PDRB Per Kapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2017 (dalam Juta Rupiah)	II-68
2.17 IPM Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2016	II-69
2.18 Apk Jenjang SD,SMP, & SMA Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2017	II-72
2.19 Apm Jenjang Pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2017	II-72
2.20 Jumlah RKB Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara	II-73
2.21 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2017	II-74
2.22 Cakupan Pelayanan Air Bersih Perpipaian Menurut Wilayah Pelayanan	II-93
2.23 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara	II-94
2.24 Kenampakan Area Terdampak Longsor Dari Atas	II-95

2.25	Besaran Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara	II-97
2.26	Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi	II-99
2.27	Kontribusi Pendapatan Daerah	II-123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah didasarkan pada kondisi faktual dan karakteristik wilayah, meliputi perencanaan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada suatu perencanaan yang berlandaskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terencana dan sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dengan tetap mempertahankan kebutuhan, karakteristik dan kekhasan daerah yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah.

Dokumen perencanaan daerah disusun dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dokumen Rencana pembangunan Daerah tersebut dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD. Dokumen rencana pembangunan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode waktu lima tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Persiapan penyusunan RPJMD meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah mengenai pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan teknokratik tersebut disusun sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan muatan sistematika isi dokumen yaitu pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah.

Penyusunan rancangan awal RPJMD dilaksanakan semenjak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Rancangan awal ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman kepada visi dan misi Kepala Daerah, RPJPD dan RTRW. Perumusan rancangan awal ini mencakup :

- (1) penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD,
- (2) penjabaran visi dan misi Kepala Daerah,

- (3) perumusan tujuan dan sasaran,
- (4) perumusan strategi dan arah kebijakan,
- (5) perumusan program pembangunan Daerah,
- (6) perumusan program Perangkat Daerah,
- (7) KLHS.

Rancangan awal RPJMD kemudian dibahas dengan para pemangku kepentingan dalam sebuah forum konsultasi publik. Setelah itu rancangan awal ini diajukan untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh masukan, sehingga dapat tersusun Rancangan Awal RPJMD. Setelah rancangan awal RPJMD tersusun maka disampaikan Surat Edaran mengenai penyusunan rancangan awal Renstra kepada SKPD.

Penyusunan rancangan RPJMD dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD, yang kemudian dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD dilakukan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD. Dimana rancangan akhir RPJMD tersebut disampaikan kepada sekretaris daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 merupakan tahapan ke-4 (2020-2025) dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025. RPJMD ke-4 merupakan fase mencapai visi pembangunan Penajam Paser Utara yang mandiri dan sejahtera berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan memantapkan agribisnis dan agroindustri.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 memperhatikan pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni :

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999

- No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
 11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

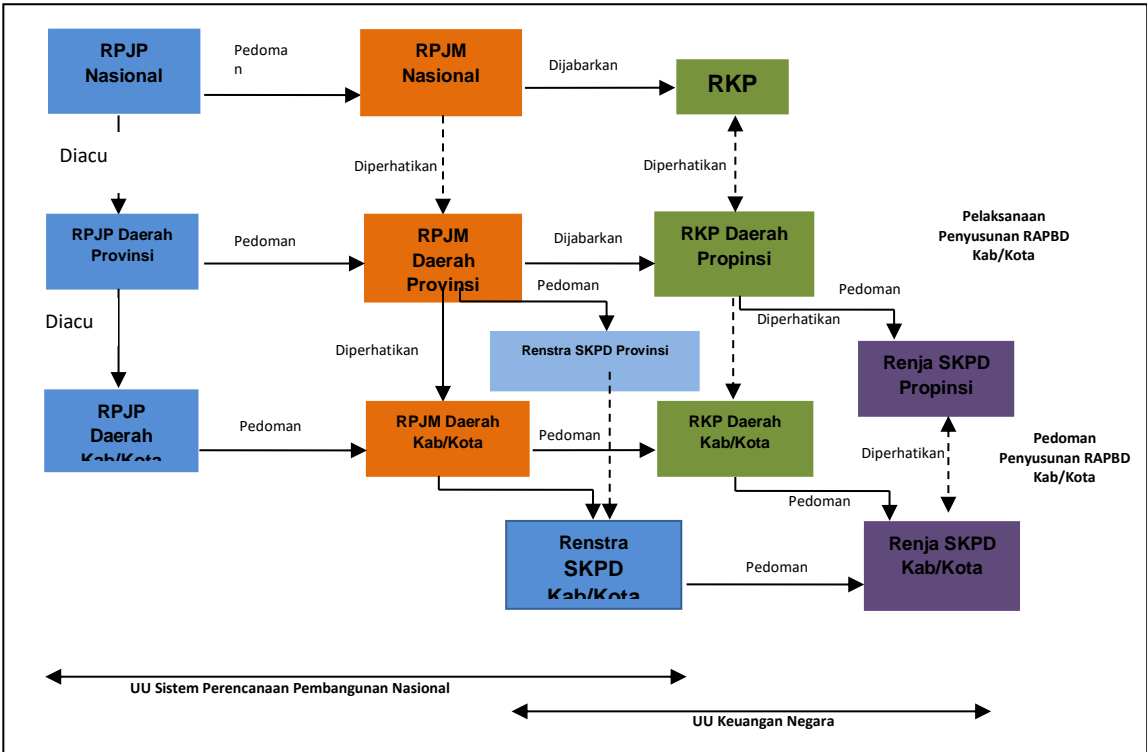
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1).

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023, didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, saling memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu sebagai berikut :

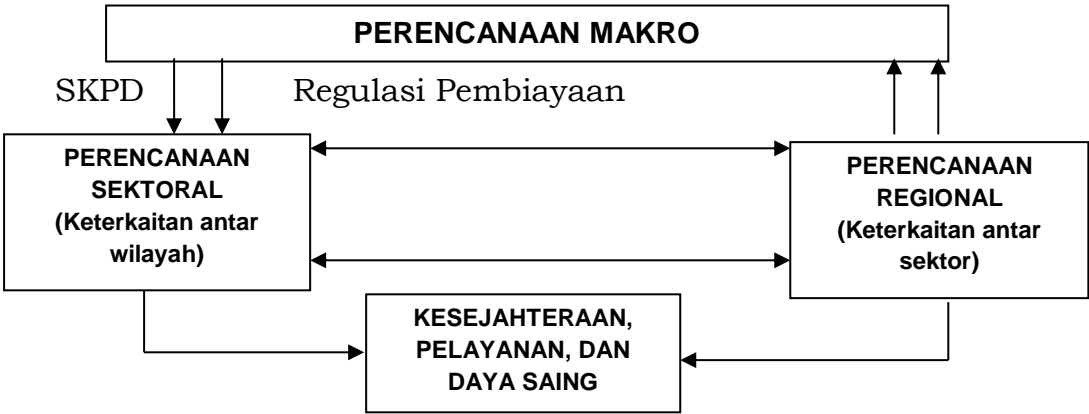
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang memuat visi dan arah pembangunan jangka panjang nasional menjadi acuan dalam penetapan kebijakan RPJP Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya menjadi acuan RPJP Kabupaten Penajam Paser Utara. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu dan menjadi satu kesatuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023. (Lihat gambar 1.1)
2. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana kerja tahunan. Diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional, dan sektoral dapat dilihat pada gambar 1.2.
3. Penyusunan dokumen RPJMD ini mengacu pada ketentuan ketentuan spasial dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, RTRW Provinsi Kaltim, dan RTRW Nasional. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dan RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Menurut UU No. 25 Thn 2004



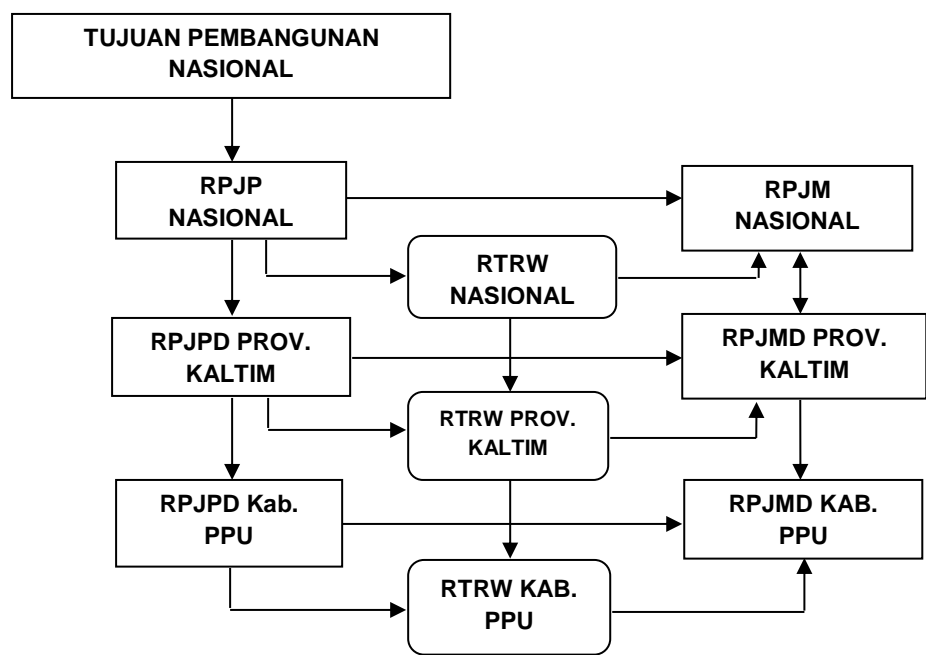
Sumber : UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 1.2.
Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Gambar 1.3.
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan kebijakan umum dan pedoman pembangunan daerah selama lima tahun dengan turut serta memuat garis besar prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.
2. Menegaskan tujuan dan sasaran program prioritas pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.
3. Menetapkan indikator capaian sasaran pembangunan beserta kerangka pendanaannya sebagai pedoman rencana strategis perangkat daerah dan perencanaan penganggaran.

- 4. Menjadi tolok ukur hasil pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 5. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Memuat visi misi Bupati Terpilih dan tujuan sasaran.
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Strategi, arah kebijakan dan Program Daerah
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat program prioritas visi misi dan seluruh

program dalam Renstra SKPD

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja Daerah

BAB IX : PENUTUP

Tabel 2.67
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpensi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	2	4	5	6	7	8	9	10
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Pertumbuhan PDRB	4.11%	4.12%	4.13%	4.14%	4.15%		
	Laju inflasi	7.46%	2.76%	0.14%	-0.45%	2.34%		
	PDRB per kapita	6,201,813.64	6,373,234.71	6,382,224.66	6,353,489.20	6,501,989.06		
	Kesejahteraan Sosial							
	Pendidikan							
	Angka melek huruf	95.81%	97.41%	97.25%	99.45%	99.60%		
	Angka rata-rata lama sekolah	7.82%	7.46%	7.59%	7.60%	7.95%		
	PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Pendidikan							
	Pendidikan dasar							
	Angka partisipasi sekolah	74.62%	64.52%	75.36%	75.36%	92.50%		
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1 : 225	1 : 205	1 : 207	1 : 208	1 : 208		
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia							
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
	APK							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpensi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	2	4	5	6	7	8	9	10
	SD / MI	90	90	90	90	100		
	SMP	90	90	90	90	100		
	APM							
	SD / MI	80	80	80	80	90		
	SMP	707	70	70	70	80		
	Rasio Guru / Siswa							
	SD	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)		
	SMP	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)		
	Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1 / D4)							
	Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 SD / MI	90	90	90	90	100		
	Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 SMP / MTs	90	90	90	90	100		
	Presentase Guru yang memenuhi Sertifikasi (S1 / D4) SD / MI	98	97	97	98	98		
	Presentase Guru yang memenuhi Sertifikasi (S1 / D4) SMP / MTs	99	96	97	98	99		
	Terwujudnya Pemerintah yang efektif efisien dan bersih KKN							
	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP		
	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136,962,015,838	136,962,015,838	136,962,015,838	136,962,015,838	136,962,015,838		
	Indeks Persepsi Korupsi	5	5	5	5	5		
	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja							
	Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	bb	bb	bb	bb	bb		
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Dasar serta Fasilitas Pelayanan Publik yang memadai							
	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	250 sambungan rumah	250 sambungan rumah	250 sambungan rumah	250 sambungan rumah	250 sambungan rumah		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpensi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	2	4	5	6	7	8	9	10
	WTP Perdesaan	5 WTP	5 WTP	5 WTP	5 WTP	10 WTP		
	Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan	100 km	100 km	100 km	100 km	150 km		
	Pembangunan Jalan	0	0	0	0	0		
	Pembangunan Jembatan							
	Panjang Jalan yang terpelihara	43,45 KM	43,45 KM	43,45 KM	43,45 KM	43,45 KM		
	Perbaikan Jalan	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km		
	Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	70%	70%	70%	70%	70%		
	Menurunya Tingkat Kemiskinan							
	Kesehatan							
	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 63,1	1 : 63,1	1 : 81,3	1 : 81,3	1 : 75,9		
	Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas per satuan penduduk	1 : 2.376	1 : 2.304	1 : 2.804	1 : 2.836	1 : 2.628		
	Penurunan Angka Kematian Balita	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus		
	Menurunya Angka Kematian Ibu Melahirkan	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus		
	Angka Harapan Hidup	71,00 Tahun	72,00 Tahun	73,00 Tahun	74,00 Tahun	71,00 Tahun		
	Angka Kematian Bayi Neonatal	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus		
	Cakupan Pelayanan Desa KLB	30%	40%	50%	60%	30%		
	Rasio Dokter / Penduduk	1 : 4.000	1 : 4.000	1 : 4.000	1 : 4.000	1 : 4.000		
	Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat	250 jenis	270 jenis	290 jenis	320 jenis	250 jenis		
	Menurunya Indeks Gini							
	Jumlah Kesadaran Ber KB	26.000 orang	30.000 orang	34.000 orang	38.000 orang	26.000 orang		
	Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	60%	70%	80%	90%	60%		
	Meningkatnya IPM	70.96%	70.96%	70.96%	70.96%	70.96%		
	Peningkatan Jumlah UMKM	3.800 UMKM	4.000 UMKM	4.300 UMKM	4.500 UMKM	3.800 UMKM		
	Peningkatan Jumlah Koperasi							
	Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM		
	Pertumbuhan Jumlah IKM	600	650	650	700	868		
	Meningkatnya Desa Swasembada	2 desa	3 desa	2 desa	4 desa	2 desa		
	Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif / Berkembang	20	23	20	20	20		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpensi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	2	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Urusan Pilihan							
	Pertanian							
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	14.554 Ha	14.202 Ha	15.516 Ha	10.808 Ha	16.680 Ha		
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	3.89%	0.93%	0.86%	-0.19%	0.24%		
	Desa Mandiri Pangan	2 desa	3 desa	4 desa	4 desa	2 desa		
	Kehutanan							
	Kerusakan Kawasan Hutan					21,30 Ha		
	Luas Tanaman Perkembunan Rakyat	117,696	117,696	117,696	117,696	117,696		
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Bencana							
	Pengujian Kualitas Air dan Udara	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi		
	Presentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Ketahanan Pangan							
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	10.000 ton	10.000 ton	10.000 ton	10.000 ton	10.000 ton		
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	5.000 ton	5.000 ton	5.000 ton	5.000 ton	5.000 ton		
	Rasio Penyuluh terhadap Desa	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1		
	DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%		
	Pertanian							
	Nilai Tukar Petani		104.37	103.47	103.47	108.92		
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
	Perhubungan							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpensi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	2	4	5	6	7	8	9	10
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,45 KM/1 Kendaraan	0,45 KM/1 Kendaraan	0,45 KM/1 Kendaraan	0,45 KM/1 Kendaraan	0,57 KM/1 Kendaraan		
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	4,02 Orang/1 Kendaraan	4,02 Orang/1 Kendaraan	4,02 Orang/1 Kendaraan	4,02 Orang/1 Kendaraan	5,34 orang/ 1 kendaraan		

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Geografis dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak antara 00°48’29” - 01°36’37” Lintang Selatan dan 116°19’30” - 116°56’35” Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km² meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 Km² dan wilayah lautan seluas 272,24 Km². Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Penajam yaitu 36,22% dari luas total wilayah kabupaten, dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Babulu yaitu 11,99% dari luas wilayah. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Penajam Paser Utara menurut Kecamatan.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)		Jumlah (Km²)	Persentase (%)
	Darat	Laut		
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,99
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62
Penajam	1.036,70	170,67	1.207,37	36,22
Sepaku	1.172,36	0,00	1.172,36	35,17
Jumlah	3.060,82	272,14	3.333,06	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Kabupaten Penajam Paser Utara secara formal terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di

Provinsi Kalimantan Timur , secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

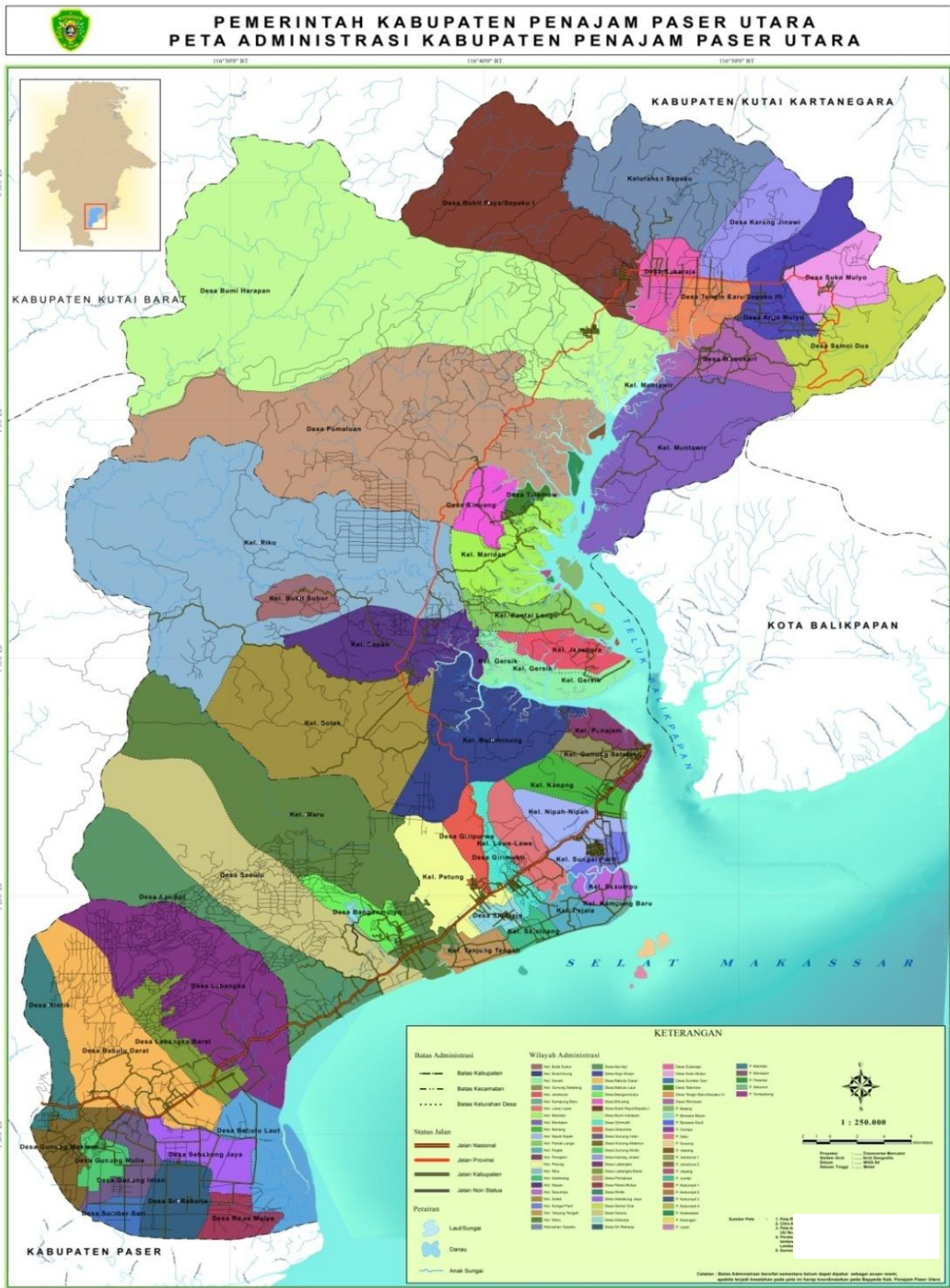
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.

Dengan letak geografis dan administratif seperti yang telah diterangkan di atas, maka Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah yang dilalui jalur transportasi darat trans Kalimantan dan alur transportasi laut yang melalui Teluk Balikpapan sehingga memegang peranan penting dalam pergerakan barang dan jasa lintas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta Kalimantan pada umumnya.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 4 Kecamatan yang terdiri atas 30 Desa dan 24 Kelurahan. Kecamatan Penajam merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 4 desa dan 19 kelurahan, Kecamatan Waru dengan 3 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Sepaku memiliki 4 Kelurahan dan 11 desa, sedangkan Kecamatan Babulu memiliki 12 desa.

Peta batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 2.1.

Peta Batas Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 - 2031

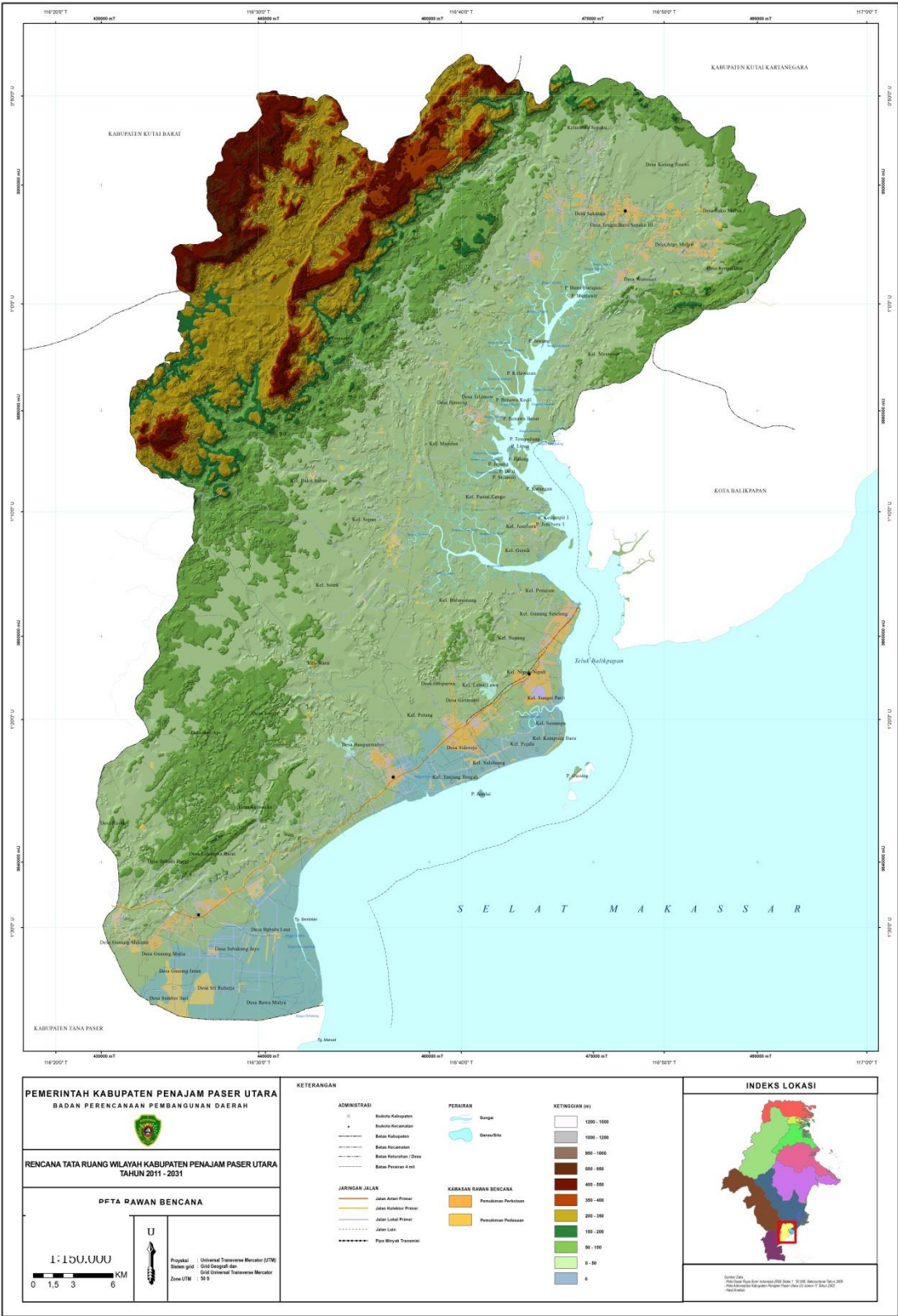
A.2 Topografi

Pada umumnya ketinggian lereng di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara yang mengalir di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas wilayah berupa daratan dan wilayah yang berupa perairan laut. Wilayah perairan laut ini tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru dan Kecamatan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Ditinjau dari kondisi topografi, dapat diketahui bahwa wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas dataran dan perbukitan.

Wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berupa dataran rendah dan perbukitan tersebut memiliki potensi dalam hal pengembangan pemanfaatan hasil produksi pertanian, perkebunan maupun usaha budidaya tanaman pangan lainnya. Selain itu dengan wilayah yang memiliki garis pantai dan wilayah perairan yang relatif luas, menyimpan potensi komoditas hasil laut yang bisa dikembangkan.

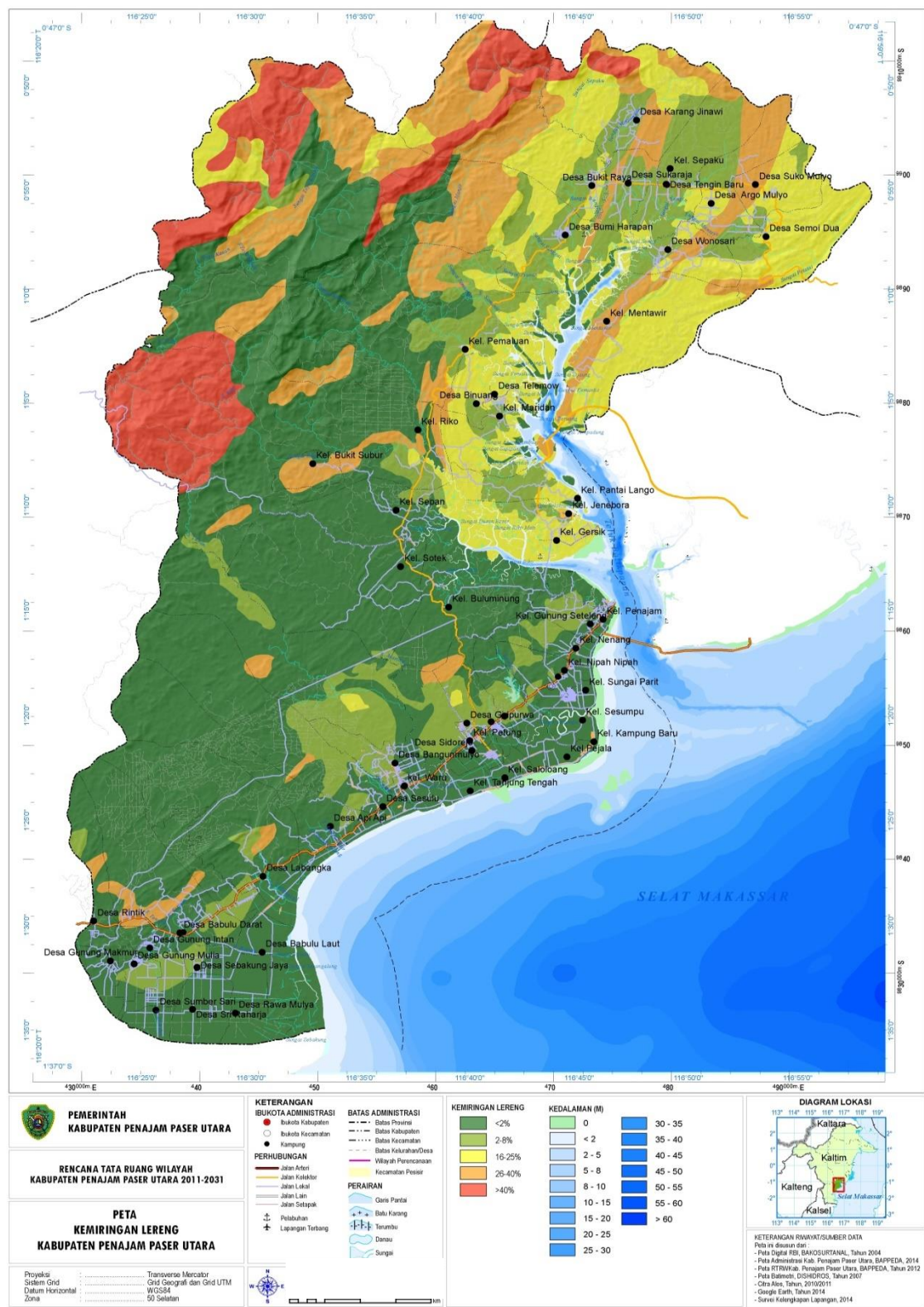
Gambar 2.2

Peta Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2031

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2011 – 2031

A.3 Geologi dan Jenis Tanah

Di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 3 (tiga) jenis tanah yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Adapun masing-masing jenis tanah dan proporsi sifat adalah sebagai berikut :

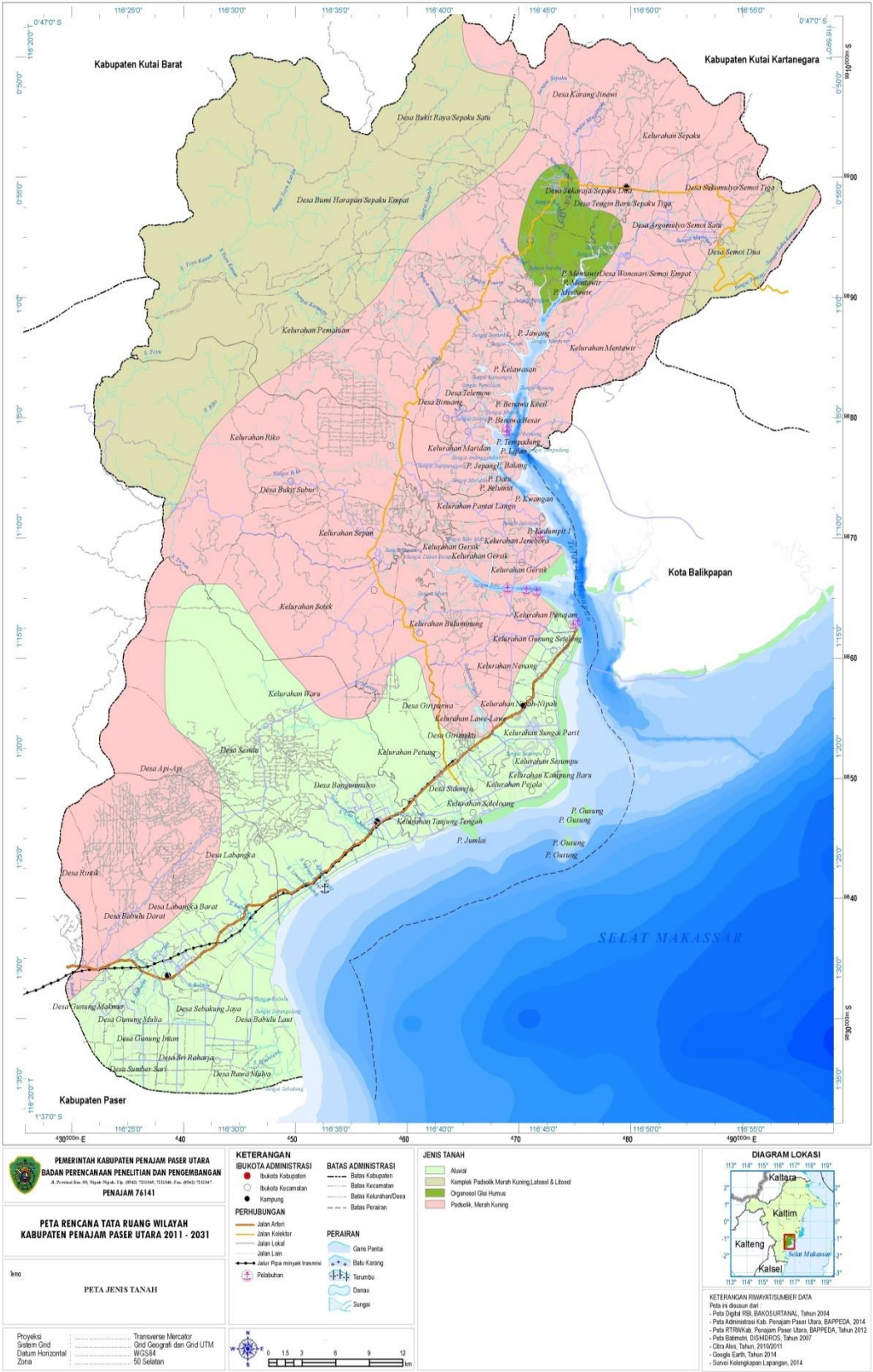
- Alluvial, bahan induk dari tanah liat dan pasir yang beraneka ragam tanah kelabu kehitam-hitaman dengan tekstur liat berat sedikit plastis. Penggunaan lahan pada umumnya berupa persawahan dengan pengairan yang sebagian besar sudah teratur dan sebagian berupa empang/tambak. Dengan ini baik untuk perluasan sawah yang dipergunakan sebagai tanaman bahan pangan.
- Kompleks mediteran, tanah jenis ini berasal dari bahan induk batu liat napal, sifat lainnya dari jenis tanah ini mempunyai kadar bahan organik rendah sampai sedang. Fisiografi daerah berupa bukit lipatan dengan bentuk wilayah berbukit sampai bergunung, sebagian besar merupakan wilayah berbukit dengan kemiringan lereng 30 %. Jenis tanah ini biasanya dipakai untuk bermacam-macam bentuk penggunaan lahan, antara lain persawahan tadah hujan dan tegalan serta galian batu gamping.
- Grumusol, jenis tanah ini berasal dari bahan induk , bahan kapur, napal dan batu liat. Tanah kelabu tua dengan tekstur liat dan struktur sangat gempal serta konsisten teguh sampai plastis. Tanah Grumusol ini tersebar di daerah bukit lipatan yang merupakan bagian bawah punggung antiklinal dan lembah-lembah sinklinal dengan bentuk wilayah bergelombang. Jenis tanah ini mempunyai kemampuan lahan untuk pertanian yang sangat terbatas oleh air.

Gambar 2.4



Sumber : Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara 2017

Gambar 2.5
Peta Jenis Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber : Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara 2017

A.3.1 Daerah Pergerakan Tanah

Terjadinya bencana gerakan tanah, disadari atau tidak akan merubah fungsi struktur masyarakat baik sarana maupun prasarananya. Upaya mengembalikan fungsi struktur masyarakat dan prasarananya yang dikenal dengan istilah rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan baik secara psikologis, sosiologis maupun secara teknis. Peran geologi dalam rehabilitasi ini diutamakan pada permasalahan teknis, yaitu dalam pengembalian fungsi sarana dan prasarana serta informasi pengembangan bencana tersebut. Untuk mengembalikan fungsi sarana dan prasarana ini perlu masukan data geologi yang beraspek keteknikan guna relokasi pemukiman, bila diperlukan.

Daerah rawan bencana gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 8.400 Ha yang terdapat di sekitar Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku.

A.4 Klimatologi

Berdasarkan hasil rekapitulasi data curah hujan rata rata di masing masing kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara 194.0425 mm/bulan. Rata-rata curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Maret berkisar antara 309.25 mm/bulan dan untuk curah hujan terendah umumnya terjadi pada bulan September dan Oktober yang hanya berkisar antara 100 mm/bulan. Untuk hari hujan per bulan sendiri rata rata terjadi 8 hari dalam satu bulan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rata Rata Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan di Rinci
per Bulan

No.	Bulan	Babulu	Waru	Penajam	Sepaku
1	Januari	171	205	171	157
2	Februari	141	104	63	155
3	Maret	381	341	216	299
4	April	181	230	186	259
5	Mei	160	410	228	360
6	Juni	179	198	199	127
7	Juli	80	313	354	126
8	Agustus	39	157	280	198
9	September	2	145	133	66
10	Oktober	6	93	86	215
11	Nopember	260	272	274	243
12	Desember	354	0	252	245
	Rata-rata 2017	162.83	205.67	203.5	204.17

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2018

Temperatur udara minimum rata-rata 26° C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5°-7°C. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober.

A.5 Hidrologi

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah pesisir, sehingga banyak yang bermuara pada selat Makasar antara Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Potensi air permukaan tanah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, yang tentunya keberadaannya didukung dengan keberadaan yang berfungsi sebagai daerah imbuhan air bawah tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Nama	
1	Penajam	<ul style="list-style-type: none"> • Kernaen • Saloloang • Riko • Sesumpu • Gununghantu • Nenang Besar • Nenang Kecil • Gersik Besar • Gersik Kecil • Serungsang • Lentup • Slimbung 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembotolang • Lemboterusan • Lembo • Sepan • Lawai • Dusan Kecil • Wan • Marambalo • Separe Tengah • Separe Ulu • Separe Ilir • Rikomati
2	Waru	<ul style="list-style-type: none"> • Muan • Tunan • Limaukembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Api-api Besar • Api-api Kecil • Serungsangbanjai
3	Babulu	<ul style="list-style-type: none"> • Ambalut • Labangka Satu • Terjun • Sarangalang • Rintik 	<ul style="list-style-type: none"> • Babulu • Sembilang • Sebakung • Masappa • Labangka Dua
4	Sepaku	<ul style="list-style-type: none"> • Manjir • Seluang • Selamayu • Trunen • Tengin • Semuntai • Baruangin • Pemaluan • Selongkuik • Telemow • Miyangau • Sepaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Maridan • Juno • Sapipanggang • Ananggambus • Seluong • Beruang • Kemantis • Sejaung • Sangai • Mangkuliu • Tempadung • Bugis

Sumber : Hasil Pembakuan Toponimi Unsur Alami, Depdagri

A.6 Penggunaan Lahan

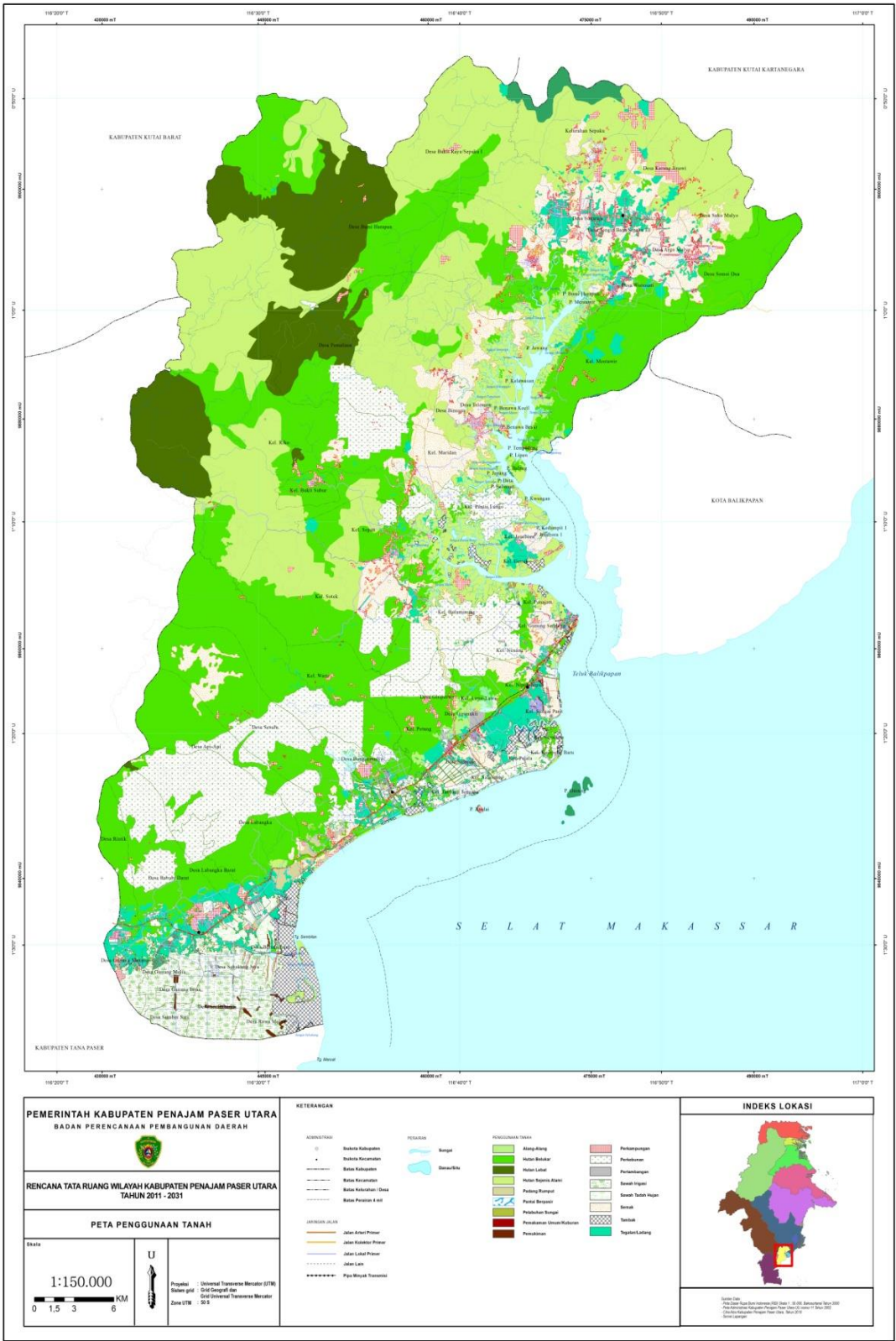
Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Permukiman, Sawah, Pertanian Tanah Kering, Perkebunan, Kolam/Tambak, Industri, Pertambangan, Hutan lebat, Hutan belukar, Hutan sejenis, Hutan rawa, Semak belukar dan lain lain. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk perkebunan yaitu sekitar 12.152,64 ha dan yang kedua adalah pertanian tanah kering yang menggunakan lahan sekitar 10.522,33 ha, dan untuk penggunaan lahan permukiman hanya menggunakan 3.190 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat di lihat pada tabel 2.4 Penggunaan lahan dan peta.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017

NO.	PENGUNAAN	TAHUN				2016
		2012	2013	2014	2015	
1.	Pemukiman	2.808	2.808	2.808	2.920	3.190
2.	Sawah	4.715	4.715	4.715	4.713,35	4.709,95
3.	Pertanian Tanah Kering	10.740	10.740	10.727,84	10.704,33	10.522,33
4.	Perkebunan	12.217	12.217	12.208,89	12.194,64	12.152,64
5.	Kolam / Tambak	709	709	-	-	
6.	Industri	290	290	4.790	4.794,9	5.019,90
7.	Pertambangan	48	48	-	-	
8.	Hutan Lebat	188.175	188.175	-	-	
9.	Hutan Belukar	50.075	50.075	-	-	
10.	Hutan Sejenis	15.253	15.253	-	-	
11.	Hutan Rawa	2.400	2.400	-	-	
12	Semak Belukar	18.320	18.320	18.313,92	18.303,23	18.039,23
13	Lain – Lain	7.810	7.810	-	-	
Jumlah		313.560	313.560	313.560	53.630	

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara 2018

Gambar 2.6
Peta Penggunaan Lahan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2011 – 2031

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Dengan kondisi dan karakteristik wilayah yang dimiliki, Kabupaten Penajam Paser Utara menyimpan potensi sumber daya alam yang besar. Potensi tersebut memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Sektor yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu bidang budidaya pertanian, budidaya hasil laut dan perikanan, pariwisata dan *ecotourism*. Selain itu pengembangan kawasan industri juga dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi wilayah.

B.1 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Penajam Paser Utara didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang ada. Berdasarkan hasil analisa ekonomi, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai potensi yang besar di sektor Pertambangan, Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan. Saat ini lahan industri yang ada pada umumnya menyatu dengan kawasan permukiman yang lebih diorientasikan pada sektor pertambangan dan kehutanan dan berkembang di sekitar kawasan kehutanan dan pertambangan.

Pengembangan infrastruktur jalan Coastal Road serta rencana pembangunan jembatan penghubung antara Penajam – Balikpapan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas di wilayah ini. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu adanya kawasan industri yang mengolah hasil sumberdaya alam yang dihasilkan. Berikut ini merupakan klasifikasi pengembangan kawasan industri.

Tabel 2.5
Klasifikasi Pengembangan Kawasan Industri

JENIS KAWASAN	KRITERIA					
	1	2	3	4	5	6
Kompleks Industri	Min 4,5 ha	Min 12 lt/dt/ha	Min 200 KVA/ha	60 org/ha	Gol 1	40 %
Estate Industri	0,1 – 4,5 ha	1-12 lt/dt/ha	Mak 200 KVA/ha	80 org/ha	Gol 1	60 %
Lahan Peruntukan Industri	Mak 3 ha	Mak 8 lt/dt/ha	Mak 80 KVA/ha	80 org/ha	Gol 2	60 %
Kawasan Berikat	0,1 – 4,5 ha	1-12 lt/dt/ha	Mak 80 KVA/ha	80 org/ha	Gol 1	60 %
Pemukiman industri kecil	Mak 100 m2	Mak 8 lt/dt/ha	Mak 80 KVA/ha	300-500 org/ha	Gol 2	60 %
Sentra Industri kecil	Tak Tertentu	Mak 8 lt/dt/ha	80 KVA/ha	300-1000 org/ha	Gol 2	60 %
Sentra Idustri Kecil	Mak 100 m2	Mak 8 lt/dt/ha	Mak 80 KVA/ha	300-500 org/ha	Gol 2	60 %

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara 2018

- Keterangan :
- 1) Luas lahan per unit usaha
 - 2) Air Bersih
 - 3) Listrik
 - 4) Jumlah tenaga kerja
 - 5) Kualitas limbah industri
 - 6) Building Coverage

Kawasan industri di Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya tersebar di beberapa wilayah dengan bidang industri kecil dan industri kerajinan. Jenis industri yang berkembang di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup beragam mulai dari industri Pertanian, Non Pertanian dan Aneka Jasa.

Arahan untuk kegiatan industri di Kabupaten Penajam Paser Utara di arahkan sebagai berikut :

1. Diversifikasi kegiatan ekonomi, sehingga semakin beragamnya kegiatan ekonomi akan semakin kuat struktur ekonominya, terutama sektor sekunder;
2. Memanfaatkan produksi sektor pertanian sebagai bahan baku sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi wilayah yang bersangkutan, terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai produk unggulan sesuai dengan konsep "*one village - one product*";
3. Menyediakan lapangan pekerjaan dengan yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai klasifikasi kemampuan tenaga kerja termasuk tenaga kerja tidak terlatih(*unskill labour*) dan tenaga kerjaterdidik (*skill labour*);
4. Dapat mendorong pertumbuhan sektor primer maupun sektor tersier;
5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
6. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Lokasi Pengembangan sentra industri dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pada umumnya menyatu dengan permukiman dengan tenaga kerja dari penduduk

lokal dan dikerjakan di tiap rumah. Sentra industri kecil diarahkan pengembangannya dengan pengendalian terhadap pengembangan pemanfaatan lahannya serta dikelola limbahnya pada tempat yang sudah berkembang.

Upaya pengembangan sentra industri melalui:

1. Perlunya peran serta pihak Pemerintah secara lebih aktif di dalam penyuluhan ketrampilan dan masalah pemasaran;
2. Perlu kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan industri kecil di dalam penyediaan dana dan distribusi pemasaran;
3. Pengembangan industri kecil ini perlu dikembangkan di tiap kecamatan dengan diversifikasi jenis industri sesuai dengan kegiatan eksisting, bahan baku dan ketersediaan sumber daya lainnya.
4. Rencana Pengembangan perindustrian di Kabupaten Penajam di rencanakan seluas 5.424 Ha pada Kawasan Industri Buluminung.

Desain Kawasan Industri di Penajam Paser Utara menitik beratkan pada keberadaan industri besar, menengah, dan industri kecil yang diharapkan dapat menjadi basis perekonomian di kawasan ini. Pola penggunaan lahan secara keseluruhan di Kawasan Industri Penajam terbagi dalam beberapa Zona yaitu sebagai berikut:

1) Pengolahan hasil Hutan

Zona ini mempunyai total luasan 1.118 Ha. Kawasan ini bersifat produktif menghasilkan produk untuk kepentingan lokal, nasional maupun internasional dalam skala besar, menengah, dan kecil.

2) Perdagangan & Jasa

Zona ini mempunyai luasan 715 Ha yang digunakan untuk kepentingan kegiatan perdagangan, perkantoran, pameran, pasar seni, pertokoan kerajinan dan makanan.

3) Transportasi & manufaktur

Zona ini memiliki total luasan 1.060 Ha. Kegiatan Industri ini digunakan untuk mendukung industri lain dalam bentuk transportasi dan pemesinan yang berguna untuk pemakai industri dan konsumen.

- 4) Pengolahan hasil tambang
- Zona ini memiliki total luasan 861 Ha yang terdiri dari kawasan industri untuk kelompok penghasil barang-barang pertambangan.
- 5) Pengolahan hasil pertanian,
- Zona ini mempunyai total luasan 710 Ha yang terdiri dari area industri yang menghasilkan produk-produk pertanian.
- 6) Pengolahan hasil migas,
- Zona ini mempunyai luasan 961 Ha. industri migas diperuntukan bagi kelompok industri yang mengasilkan minyak & gas yang menggunakan bahan baku dari sumberdaya alam.

Tabel 2.6
Banyaknya Perusahaan Di Kabupaten Penajam Paser Utara

NO	KECAMATAN	JENIS PERUSAHAAN			JUMLAH
		PERKEBUNAN	KEHUTANAN	INDUSTRI	
1	Babulu	3	-	274	277
2	W a r u	2	-	213	215
3	Penajam	5		434	439
4	Sepaku	2	5	204	211
	Jumlah	12	5	1.125	1.135

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Tabel 2.7
Banyaknya Pengusaha Menurut Sektor Usahanya

NO.	KECAMATAN	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN	INDUSTRI ANEKA JASA
1	Babulu	56	50	64
2	W a r u	76	64	72

NO.	KECAMATAN	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN	INDUSTRI ANEKA JASA
3	Penajam	39	164	123
4	Sepaku	58	49	66
Jumlah		229	327	325

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

B.2 Kawasan Strategis Kabupaten

Jenis kawasan strategis di Kabupaten Penajam Paser Utara di bedakan menjadi beberapa sudut kepentingan, yaitu kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu dipriotaskan, karena berisikan arahan yang memiliki nilai strategis nasional, Provinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional/Provinsi/kabupaten terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

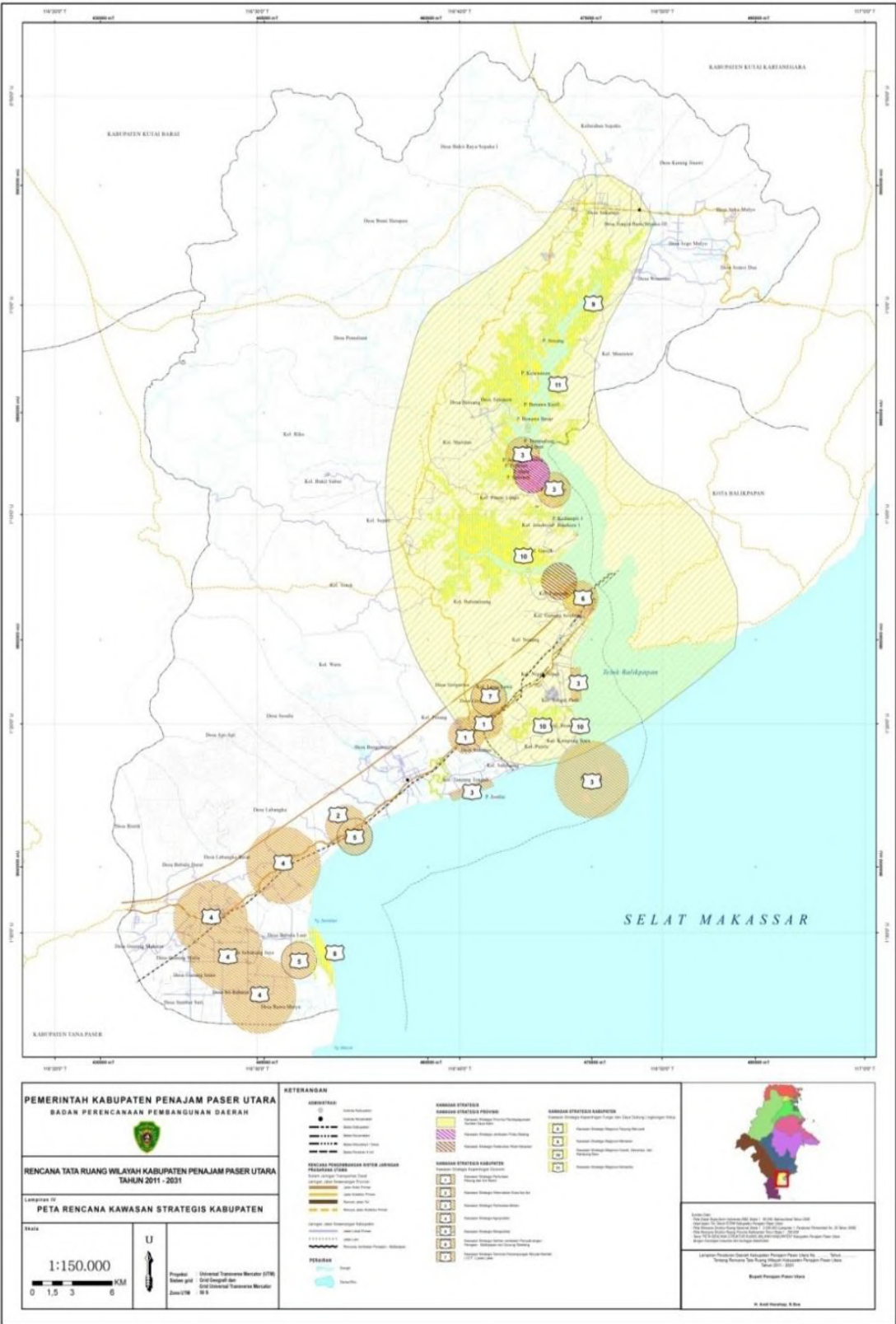
Kawasan strategis dibedakan berdasarkan kewenangannya yaitu nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kewenangan pada tiap-tiap wilayah tersebut dapat dilihat dibawah ini:

1. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

2. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
3. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Gambar 2.7
Kawasan Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 - 2031

B.2.1 Ketentuan Umum Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi:

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Nilai strategi dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategian nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. Memperhatikan kawasan strategi nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. Potensi ekspor;
 - d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
5. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan:
 - a. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. Prioritas peningkatan kualitas sosial budaya;
 - c. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

- d. Tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki:
- a. Peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa;
 - b. Sumber daya alam strategis;
 - c. Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 - d. Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - e. Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan:
- a. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
 - d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. Kawasan rawan bencana alam; atau

- g. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- 8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten; dan
- 9. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 10. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis.
Sesuai dengan ketentuan umum diatas maka kawasan strategis pada Kabupaten Penajam Paser Utara dikelompokkan dalam :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

B.2.2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

- a. Kawasan perkotaan Petung berada di Kecamatan Penajam;
- b. Kawasan perkotaan Sepaku berada di Kecamatan Sepaku;
- c. Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam;
- d. Kawasan agropolitan berbasis :
 - Pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Babulu
 - Perikanan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru
 - Perternakan berada di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku
- e. Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan;

- f. Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude Central Terminal) berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam;
 - g. Kawasan Peruntukan Industri Buluminung di Kecamatan Penajam
 - h. Kawasan *Waterfront City* di Kecamatan Penajam
- Rencana pengembangan kawasan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain meliputi :

B.2.2.1 Kawasan Perkotaan Petung berada di Kecamatan Penajam

Perkotaan Petung berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pendukung Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) pada perkotaan Penajam serta pusat perdagangan, pelayanan jasa sosial - ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peribadatan skala kabupaten.

B.2.2.2 Kawasan Perkotaan Sepaku berada di Kecamatan Sepaku

Perkotaan Sepaku berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pusat perdagangan, pelayanan jasa sosial - ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peribadatan skala kabupaten.

B.2.2.3 Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam

Wisata bahari pada Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kesatuan dari lokasi-lokasi wisata seperti Pantai Tanjung Jumlai, Pantai Sipakario dan Pulau Gusung

a. Pantai Tanjung Jumlai

Pantai Tanjung Jumlai memiliki lebar pantai kurang lebih 100-150 meter dengan bentangan pantai sepanjang 15 km. Selain pantai yang asri, kawasan Pantai Tanjung Jumlai juga memiliki potensi sebagai areal perkemahan.

b. Pantai Sipakario (Nipah-Nipah)

Pantai Sipakario yang biasa disebut dengan "Pantai Nipah-Nipah" memiliki beberapa keunggulan yaitu lokasi yang strategis sehingga mudah diakses oleh pengunjung dan memiliki pemandangan yang menawan serta didukung dengan lebar areal/bibir pantai yang memadai sehingga sangat sesuai bila digunakan sebagai lokasi *event-event* bersekala besar seperti lomba layang-layang skala internasional.

c. Pulau Gusung

Objek Wisata Pulau Gusung berada di kawasan Pantai Tanjung Jumalai memiliki 4 gugusan Pasir Gusung atau timbunan pasir laut yang dikelilingi areal terumbu karang (coral reef). Pulau Gusung memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan bila dikelola secara profesional.

B.2.2.4 Kawasan Agropolitan

B.2.2.4.1 Kawasan Agropolitan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan;

Kawasan sentra produksi pertanian dalam arti luas (agropolitan) di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebar di beberapa wilayah, terdiri dari desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada.

Pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis Pertanian Tanaman Pangan yang termasuk dalam pengembangan sistem perdesaan berada di Kecamatan Babulu yang dipusatkan di Desa Gunung Intan, Babulu Darat, Sebakung Jaya, dan Labangka. Kawasan Agropolitan di Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut dipertimbangkan berdasarkan sumber daya serta jenis perusahaan dan jumlah industri yang ada disekitarnya.

Dengan modal produksi rata-rata 4,8 ton per Ha dan luas tanam mencapai 16.899 Ha, dimana setengah dari luasan tanam tersebut berada di Kecamatan Babulu maka Kecamatan Babulu sangat berpotensi untuk dibangun industri beras (Rice Milling) yang berorientasi pada kedekatan dengan sumber bahan baku. Dengan kondisi geografis yang strategis terletak di jalur lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Peran agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya dimana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan dan lain-lain), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik, dan lain-lain, serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi, dan lain-lain).

B.2.2.4.2 Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan;

Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan (sebelumnya merupakan Kawasan Minapolitan) tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara namun dipusatkan di Babulu Laut Kecamatan Babulu, Desa Api-Api Kecamatan Waru dan di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam sebagai lokasi pusat pembenihan melalui Balai Benih Ikan.

Pengembangan kawasan Agropolitan berbasis Perikanan (Minapolitan) mendukung konsep pembangunan Ekonomi Perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pengembangannya mencakup pengembangan empat subsistem yaitu :

- a. subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya;

- b. subsistem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, dan budidaya ikan air tawar serta budidaya garam laut;
- c. subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya; dan
- d. subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Namun demikian, sebagaimana potensi yang ada maka saat ini telah tumbuh lokasi-lokasi baru pengembangan perikanan baik budidaya maupun tangkap seperti pengembangan Rumput Laut di sepanjang perairan pantai yang menghadap selat Makasar, telah membudidayakan rumput laut jenis *Eucheuma cottonii*. Juga pengembangan budidaya Udang Windu dan Udang Galah di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku yang telah memenuhi kualitas ekspor.

Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

B.2.2.4.3 Kawasan Agropolitan Berbasis Peternakan

Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, pengembangan pengelolaan peternakan perlu memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mempersatukan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan kelestarian ekologi. Dari implementasinya diharapkan adanya peningkatan produktivitas, pendapatan asli daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan bagi petani.

Kawasan agropolitan berbasis peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Desa Bumi Harapan

Kecamatan Sepaku berupa Pusat Penggemukan Sapi Trunen. Melalui kolaborasi lintas program pembangunan, kedepannya ditargetkan kegiatan di Pusat Penggemukan Sapi Trunen dapat terkelola dengan mandiri berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan infrastruktur yang telah tersedia, perkebunan Kelapa Sawit masyarakat dalam korelasinya dengan konsep integrasi Sapi-Sawit, luas lahan pendukung dan posisi strategis yang berada pada jalur lintas Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda bahkan dalam beberapa periode mendatang menjadi jalur lintas alternatif menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Wilayah pengembangan Peternakan tersebar merata di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di Kecamatan Sepaku, tepatnya di Desa Tengin Baru juga terdapat industri pengembangan pembibitan ayam yang dikelola oleh pihak swasta nasional. Potensi pengembangan peternakan dapat dilaksanakan di empat Kecamatan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan dan pakan. Ternak potensial diantaranya adalah Sapi, Kambing, Ayam Ras, Ayam Buras dan Itik.

B.2.2.5 Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan

Kawasan sekitar jembatan Penyeberangan Penajam – Balikpapan pada Kelurahan Nipah-Nipah kedepan menjadi pintu gerbang dengan Kota Balikpapan dengan aktivitas lalu lintas yang pesat apabila jembatan Penyeberangan Penajam Balikpapan telah berdiri. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan terus melanjutkan pembangunan jalan Coastal Road yang akan mejadi akses pintu utama Jembatan Tol Teluk Balikpapan menuju Kabupaten Penajam Paser Utara.

B.2.2.6 Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude Central Terminal) berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam

Pembangunan CCT Lawe-lawe ini dapat mendistribusikan hasil minyak dari dua kilang yang berdekatan, yakni pengembangan kilang "Refinery Development Master Plan" (RDMP) Balikpapan dan kilang baru "*Grass Root Refinery*" (GRR) Bontang melalui pipanisasi. Belanja modal (*capital expenditure/capex*) RDMP Balikpapan senilai 5,4 miliar dolar AS bisa dikurangi melalui pembangunan CCT Lawe-lawe. Kawasan CCT Lawe-lawe berada pada lahan seluas 1.100 hektare milik Pertamina.

B.2.2.7 Kawasan Peruntukan Industri Buluminung di Kecamatan Penajam

Kawasan Peruntukan Industri Buluminung seluas \pm 5.424 hektar. Desain Kawasan Peruntukan Industri di Penajam Paser Utara menitik beratkan pada keberadaan industri besar, menengah, dan industri kecil yang diharapkan dapat menjadi basis perekonomian di kawasan ini. Pola penggunaan lahan secara keseluruhan di Kawasan Peruntukan Industri Penajam terbagi dalam beberapa Zona yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengolahan hasil Hutan
Zona ini mempunyai total luasan 1.118 Ha. Kawasan ini bersifat produktif menghasilkan produk untuk kepentingan lokal, nasional maupun internasional dalam skala besar, menengah, dan kecil.
- 2) Perdagangan & Jasa
Zona ini mempunyai luasan 715 Ha yang digunakan untuk kepentingan kegiatan perdagangan, perkantoran, pameran, pasar seni, pertokoan kerajinan dan makanan.
- 3) Transportasi & manufaktur
Zona ini memiliki total luasan 1.060 Ha. Kegiatan Industri ini digunakan untuk mendukung industri lain dalam bentuk

transportasi dan pemesinan yang berguna untuk pemakai industri dan konsumen.

4) Pengolahan hasil tambang

Zona ini memiliki total luasan 861 Ha yang terdiri dari kawasan industri untuk kelompok penghasil barang-barang pertambangan.

5) Pengolahan hasil pertanian,

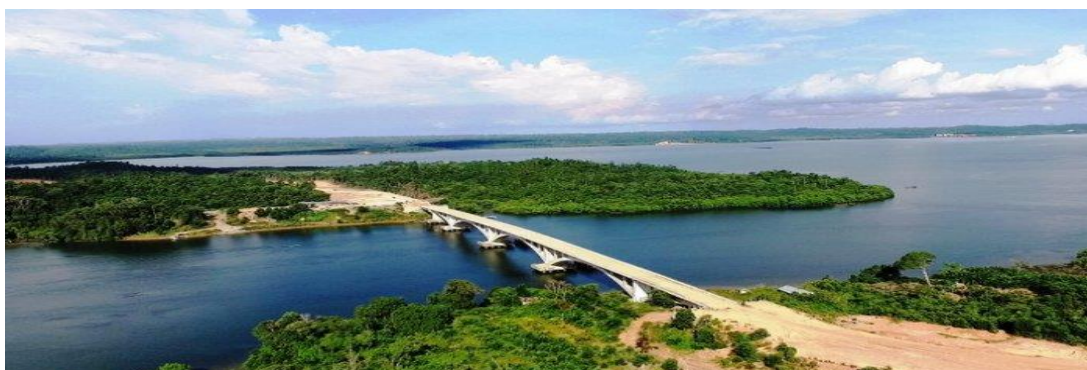
Zona ini mempunyai total luasan 710 Ha yang terdiri dari area industri yang menghasilkan produk-produk pertanian

6) Pengolahan hasil migas,

Zona ini mempunyai luasan 961 Ha. industri migas diperuntukan bagi kelompok industri yang mengasihkan minyak & gas yang menggunakan bahan baku dari sumberdaya alam.

Dalam perencanaan makro Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KPI Buluminung akan terintegrasi dengan KPI Kariangau di Kota Balikpapan. Dalam rangka integrasi Kawasan Peruntukan Industri tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membangun Jembatan Pulau Balang beserta pembebasan lahan untuk akses penghubungnya pada segmen menuju arah Kelurahan Sotek. Jalan penghubung pada segmen tersebut telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pembangunan pada segmen menuju KPI Buluminung termasuk Jembatan Riko.

Gambar 2.8
Jembatan Pulau Balang



Sampai saat ini telah terdapat 12 (dua belas) perusahaan yang telah berinvestasi di KPI Buluminung dan 5 (lima) perusahaan yang masih dalam tahap peningkatan perizinan. Keduabelas perusahaan yang telah berinvestasi tersebut yaitu :

1. PT. Agra Bareksa Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan khususnya Pulp and Paper;
2. PT. Astra Agro Lestari, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Hasil Perkebunan khususnya Kelapa Sawit. Di KPI Buluminung, PT. Astra Agro Lestari menempatkan Loading Port CPO;
3. PT. Bakal Makmur Sejahtera take over PT. Ena Sarana Energy, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perdagangan dan Jasa khususnya Batubara. Di KPI Buluminung PT. Bakal Makmur Sejahtera take over PT. Ena Sarana Energy menempatkan Barge Loading Plant;
4. PT. Kereta Api Borneo, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Transportasi dan Manufaktur khususnya untuk menunjang pengembangan transportasi Kereta Api di Kalimantan Timur pada khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya;
5. PT. Majapahit Agroindustri take over PT. Kebun Mandiri Sejahtera yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Hasil Perkebunan khususnya Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet;
6. PT. Pelabuhan Penajam Benuo Taka (Astra Infraport Group), yang sebelumnya bernama PT. Eastkal Supply Base, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perdagangan dan Jasa khususnya jasa Pelabuhan dan Pusat Logistik Berikat (PLB) bagi industri pertambangan dan migas;

Gambar 2.9
PT. Pelabuhan Penajam Benuo Taka
(Astra Infraport Group)



7. PT. Paser Prima Coal, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perdagangan dan Jasa khususnya Batubara. Di KPI Buluminung PT. Paser Prima Coal juga menempatkan Barge Loading Plant;
8. PT. Inne Dongwha Development Ltd, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan (Plywood);
9. PT. Multi Agung Sarana Anda (PT. MASA), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Jasa khususnya transportasi laut dan pelayaran (*shipyard*);
10. PT. Waskita Beton Precast, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Manufaktur khususnya pabrikasi beton;

Gambar 2.10
PT. Waskita Beton Precast



11. PT. Triteknik Kalimantan Abadi, merupakan perusahaan perkebunan budidaya Kelapa Sawit;
12. PT. Rabbani Corporindo, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perdagangan dan Jasa khususnya Batubara. Di KPI Buluminung PT. Rabbani Corporindo menempatkan Barge Loading Plant.

Sedangkan perusahaan yang masih berada dalam peningkatan perizinan diantaranya :

1. PT. Kayada Sakti Mangkuerai, merupaka perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil pertambangan;
2. PT. Smelter Nickle Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil pertambangan;
3. PT. Teraoka Trans Loader Shipyard, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri transportasi dan manufaktur;
4. PT. Usda Seroja Jaya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri transportasi dan manufaktur;

5. Perusahaan Daerah Benuo Taka, merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang nantinya akan melakukan pengelolaan pelabuhan Penajam milik Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini baru terdapat seluas \pm 20 Ha lahan milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di KPI Buluminung yang dialokasikan bagi Pelabuhan Penajam beserta infrastruktur pendukungnya. Kedepannya diupayakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki seluas \pm 100 Ha untuk dikembangkan menjadi Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

B.2.2.8 Kawasan *Waterfront city*

Kawasan *Waterfront city* merupakan kawasan yang aktivitasnya berorientasi area perairan seperti dan pantai yang berada di Kelurahan Penajam, Nenang, Nipah-nipah, Parit, Sesumpu, Kampung Baru, Pejala, Saloloang, dan Tanjung Tengah.

Perencanaannya meliputi :

1. *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
2. *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan waterfront yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
3. *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan.

B.2.3 Rencana Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

B.2.3.1 Kawasan Hutan Mangrove

Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di pesisir pantai mulai dari Selatan sampai utara yang tersebar di semua wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama wilayah yang berada di daerah pesisir

pantai. Kawasan ini merupakan kawasan tumbuhnya tanaman mangrove didaerah pesisir yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem dan aneka biota laut. Disamping itu juga untuk melindungi pantai dari abrasi dan bencana tsunami.

Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara memanfaatkan hutan mangrove di dalam kehidupan mereka.

Saat ini, sudah banyak masyarakat yang mulai mengembangkan buah dari mangrove untuk makanan dan minuman yang ternyata memiliki nilai gizi yang cukup tinggi meskipun dari segi rasa rata-rata buah mangrove tidak bisa dikatakan manis. Namun, rasa yang unik, manis sepet bahkan terkadang pahit bagi orang yang pandai mengolahnya akan menjadi perpaduan rasa baru yang khas.

Beberapa jenis mangrove yang dapat dijadikan bahan makanan antara lain pidada (*Sonneritia caseolaris*), api-api (*Avicenna spp*), nipah (*Nypa fruticans*), tumu/tancang (*Bruguiera sp*) dan lain-lain.

Beberapa jenis makanan yang dihasilkan dari bahan baku buah mangrove diantaranya :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ✓ Bolu agar-agar (api-api) | ✓ Dodol (pidada) |
| ✓ Talam (api-api) | ✓ Sirup (pidada) |
| ✓ Onde-onde (api-api) | ✓ Permen buah (pidada) |
| ✓ Gemblong (api-api) | ✓ Lempok buah (pidada) |
| ✓ Ketimus (api-api) | ✓ Manisan buah (nipah) |
| ✓ Puding (api-api) | ✓ Juice buah (pidada) |

Kawasan hutan mangrove tersebut antara lain berada di :

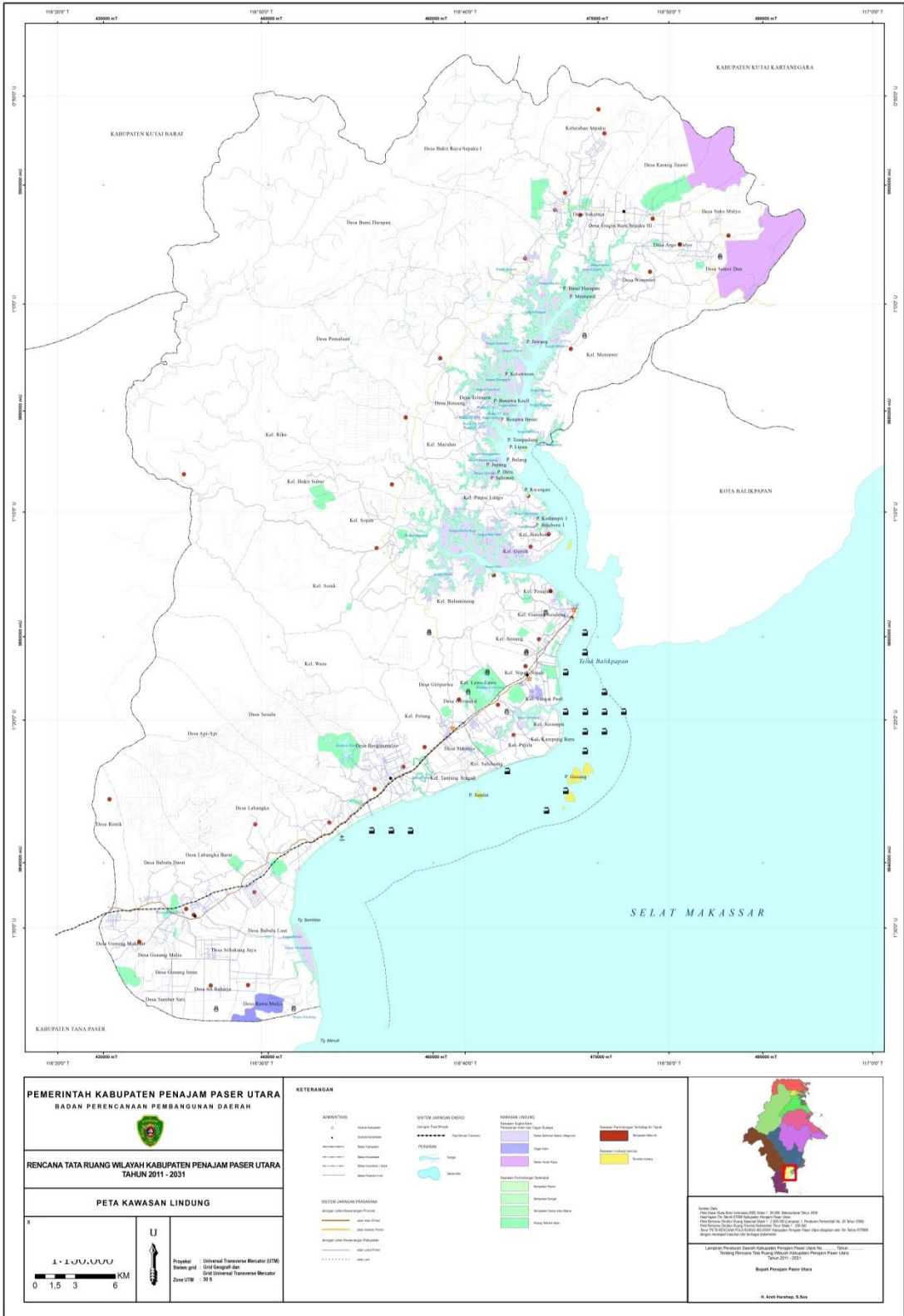
- Kawasan mangrove Gresik, Sesumpu, Kampung Baru berada di Kecamatan Penajam
- Kawasan mangrove Tanjung Maruwat berada di Kecamatan Babulu
- Kawasan mangrove Mentawir berada di Kecamatan Sepaku
- Kawasan mangrove Kemantis berada di Kecamatan Sepaku

- Kawasan mangrove pesisir dan pulau-pulau kecil berada di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku.

Pengembangan Kawasan Kehutanan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi

- Melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir;
- Pengolahan hasil hutan untuk kemakmuran rakyat;
- Mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan kawasan lindung
- Mengembangkan pola hutan tanaman industri (HTI)
- Melakukan Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain (pertambangan, perkebunan) dengan cara pendeliniasian secara tegas peruntukan kawasan hutan dengan kawasan yang lainnya.
- Reboisasi dan rehabilitasi lahan padan bekas tebangan (HPH)
- Meminimalkan kegiatan budidaya KNBK di sekitar area KBK sehingga peruntukan hutan tidak berubah
- Pembangunan “*Mangrove Tourisme Centre*” (MTC) di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam.

Gambar 2.11
Peta Kawasan Lindung Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2031.

B.2.3.2 Kawasan suaka orang utan dan penelitian berbasis ramah lingkungan hidup di pulau Benawa Besar dan Pulau Benawa Kecil Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku

Terdapat rencana suaka orang utan pada Pulau Benawa Besar dan Pulau Benawa Kecil di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku dengan tujuan penelitian satwa orang utan dengan berbasis ramah lingkungan.

B.2.4 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

B.2.4.1 Pembangunan *National Science Techno Park – Maritime* (Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Kelautan) – Buluminung

Hasil kajian lintas Kementerian/lembaga mengusulkan pembangunan *National Science Techno Park – Maritime* di Kabupaten Penajam Paser Utara. Program pembangunan tersebut dikaitkan dengan industri migas. Berikut daftar investor yang berminat untuk bergabung dalam pengembangan *National Science Techno Park – Maritime* di Penajam Paser Utara :

Tabel 2.8
Daftar Investor Pada *National Science Techno Park*

No	TECHNO PARK	INVESTOR	PERUSAHAAN	PRODUK AKHIR
1	Batubara tingkat rendah ke tingkat tinggi dengan penurunan kelembaban	bervariasi	ZEMAG, GTLE, MicroCoal, etc	Batubara kalori tinggi (briket/batu bara)
2	Kilang Olefin	Rusia	Teknologi Superflex	Etina, Propilena
3	Batubara tingkat rendah menjadi nafta	Bervariasi	Teknologi sasol	Naphtha
4	Pabrik Pipa GRE	Argentina	Petroplastik (teknologi & Investasi)	Pipa Jalir, Casing dan tubing)
5	Batubara rendah (atau biomass) menjadi bahan bakar cair/batubara ke etanol	Rusia	Energolespro m	Minyak Pyrolysis, char, gas

No	TECHNO PARK	INVESTOR	PERUSAHAAN	PRODUK AKHIR
6	Pabrik Pellets Biomass	Bervariasi	TBD	Pellet
7	Pabrik listrik Photovoltaic	Prancis	Forsee Power, URBASOLAR, PLN	Listrik
8	Terminal penyimpanan ikan beku	Indonesia	TBD	Fasilitas
9	Pabrik perumahan murah dengan 3D	China	TBD	Rumah
10	Rigid Inflatable Boats (RIBs) untuk 12 orang	Rusia	WinBoat	Kapal Karet
11	Produksi PKD (Partly knocked down) Kapal Patroli Berkecepatan Tinggi	Rusia	TBD	Kapal

Sumber Data : Data diolah Bapelitbang, 2018

Kawasan terpadu pengembangan ilmu dan teknologi kelautan, berfungsi sebagai :

- Pusat pengembangan maju ilmu dan teknologi kelautan (Center for Advanced Marine Science and Technology Development);
- Pusat teknologi maju kelautan untuk pengembangan usaha/bisnis baru (Center for Establishing a New Emerging Business in Marine Advanced Technology);
- Pusat Layanan Teknologi Maju Kelautan untuk masyarakat (Center for Marine Advanced Technology Services to Communities).

B.2.4.2 Buluminung Nuclear Industri-Science Technopark (BNI-STP)

Perusahaan pembangkit energi tenaga nuklir asal Rusia, Rosatom, siap membangun Pusat Sains, Teknologi dan Industri Nuklir di Kawasan Industri Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencana pembangunan pusat penelitian nuklir yang diberi nama The Buluminung Nuclear Industri-Science Technopark.

Lokasi pembangunan The Buluminung *Nuclear Industri-Science Technopark* atau BNI-STP itu sudah ditetapkan di Kawasan Peruntukan Industri Buluminung atau KPI Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, mendukung/menyediakan lahan untuk pembangunan BNI-STP.

Pembangunan BNI-STP tersebut dirancang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan dan telah melalui tahapan survei dalam rangka penyusunan Studi Kelayakan atau *Feasibility Study (FS)*.

B.3 Kawasan Rawan Bencana

Terdapat beberapa titik yang berpotensi terjadi bencana yang meliputi banjir, kebakaran hutan, kebakaran permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara. Setidaknya pada tahun 2016 telah terjadi 51 kali kebakaran hutan dan 16 kali kebakaran permukiman, untuk banjir terjadi di beberapa titik dan terjadi 2 kali selama tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 terhitung mulai bulan januari hingga bulan juli telah terjadi 11 kali kebakaran permukiman, 2 kali kebakaran hutan dan lahan dan 18 kali terjadi bencana banjir. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.9 dan 2.10 berikut.

Tabel 2.9
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2016

KECAMATAN	JENIS BENCANA TAHUN 2016				
	KEBAKARAN		TANAH LONGSOR	BANJIR	PUTING BELIUNG
	PERMUKIMAN	HUTAN DAN LAHAN			
Penajam	9	39			
Waru	1	6			
Babulu	3	2		1	
Sepaku	3	4		1	
Jumlah	16	51		2	

Sumber : Rekapitulasi Laporan Bulanan BPBD 2016

Tabel 2.10
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2017 (Januari – Juli)

KECAMATAN	JENIS BENCANA TAHUN 2017				
	KEBAKARAN		TANAH LONGSOR	BANJIR	PUTING BELIUNG
	PERMUKIMAN	HUTAN DAN LAHAN			
Penajam	6	1	0	2	0
Waru	2	0	0	1	0
Babulu	1	0	0	2	0
Sepaku	2	1	0	13	0
Jumlah	11	2	0	18	0

Sumber : Rekapitulasi Laporan Bulanan BPBD 2017

B.3.1 Daerah Rawan Longsor

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Kelurahan Lawe Lawe, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Buluminung (Muan), Desa Bumi Harapan, Desa Api Api, Desa Telemow, Desa Binuang, Desa Sesulu, Desa Mentawir.

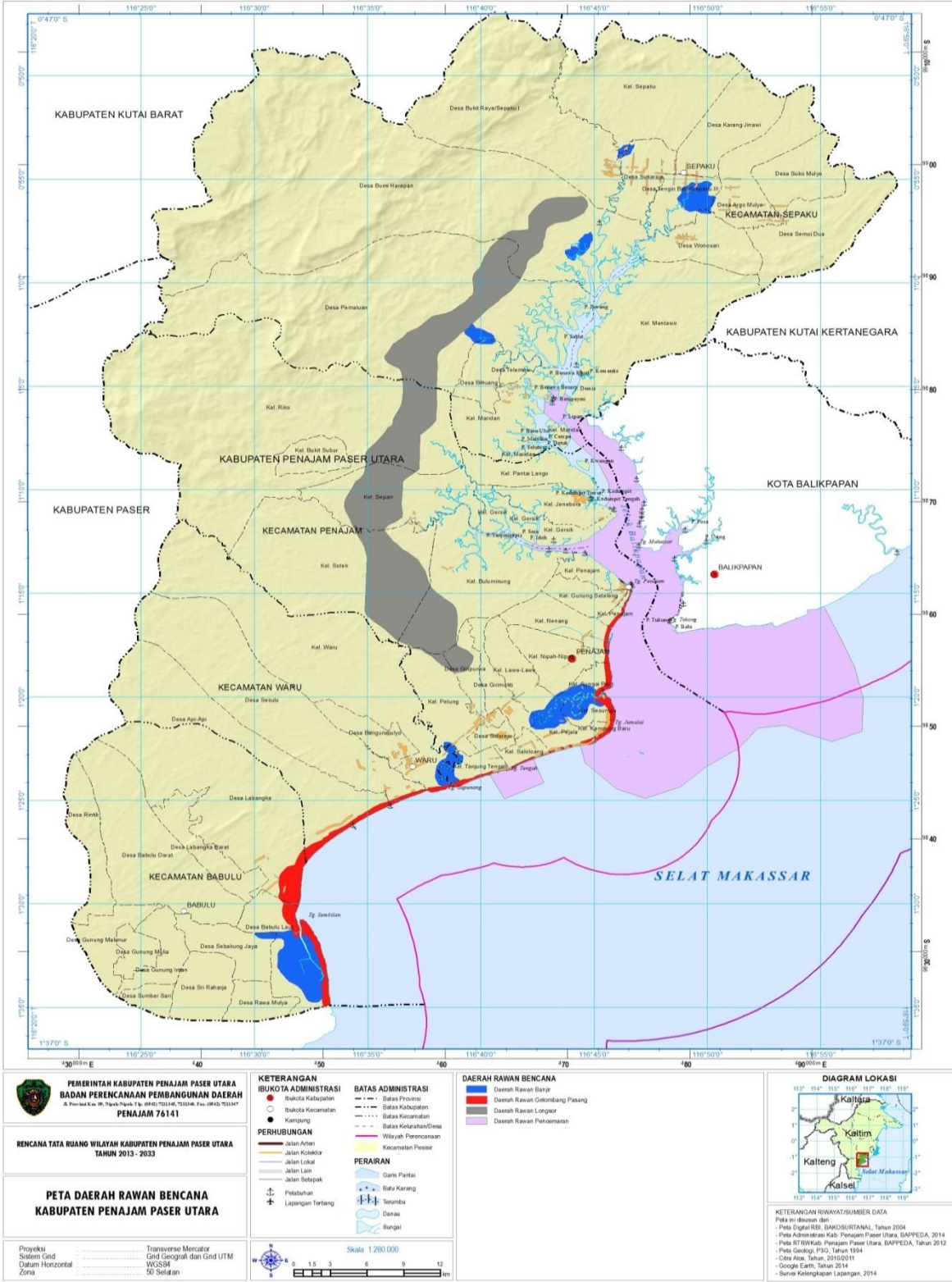
B.3.2 Daerah Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat di :

1. Desa Sebakung Jaya;
2. Desa Sri Raharja;
3. Desa Sumber Sari;
4. Desa Rawa Mulya;
5. Desa Labangka;
6. Desa Bukit Subur;
7. Kelurahan Petung (Tunan);
8. Kelurahan Riko;
9. Kelurahan Sepaku;
10. Kelurahan Pemaluan
11. Desa Sukaraja

Gambar 2.12

Peta Rawan Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2031

C. Demografi

C.1. Kependudukan

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan relatif kecil. Pada tahun 2014 jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 157.774 jiwa dengan komposisi 82.349 jiwa penduduk laki-laki dan 75.425 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 169.428 jiwa dengan komposisi 88.320 jiwa penduduk laki-laki dan 81.108 penduduk perempuan. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada akhir tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014- 2018

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Pertumbuhan Penduduk (%)
1	2014	82.349	75.425	157.774	1,39
2	2015	83.304	76.175	159.479	1,08
3	2016	86.855	79.200	166.055	4,12
4	2017	87.562	80.450	168.012	1,17
5	2018	88.320	81.108	169.428	0,84

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2019

Berdasarkan tabel 2.11 tersebut dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara relatif kecil dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,72%.

C.2. Penduduk menurut Kelompok Umur

Untuk melihat lebih detail mengenai gambaran kependudukan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 di
Kabupaten Penajam Paser Utara

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	6.177	5.635	11.812
5 – 9	8.181	7.559	15.740
10 – 14	7.661	7.151	14.812
15 – 19	7.791	7.279	15.070
20 – 24	7.731	7.017	14.748
25 – 29	7.149	6.913	14.062
30 – 34	7.442	7.029	14.471
35 – 39	8.084	7.429	15.313
40 – 44	6.758	6.224	12.982
45 – 49	5.954	5.571	11.525
50 – 54	4.941	4.485	9.426
55 – 59	3.859	3.300	7.159
60 – 64	2.753	2.186	4.939
65 - 69	1.176	1.427	3.203
70 – 74	890	815	1.705
75 keatas	1.173	1.088	2.261
Jumlah	88.320	81.108	169.428

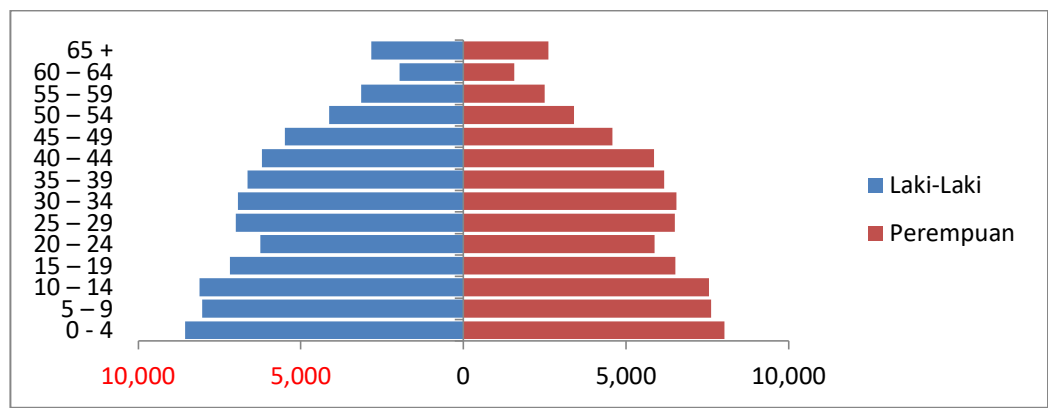
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2019

Dari data diatas dapat diketahui bahwa lebih dari 70 persen penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Kondisi tersebut merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara karena dengan formasi tersebut maka berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kontribusi tenaga kerja di sektor-sektor lapangan usaha.

Gambar 2.13

Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2017



Sumber: Data Kependudukan tahun 2018 dan diolah

C.3. Penyebaran Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduknya di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kepadatan yang relatif rendah. Secara rinci kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.13

Tabel 2.13

Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017

Kecamatan	Luas Wilayah Km2	Banyaknya Penduduk	Rata-Rata Penduduk Tiap/Km2
Babulu	399,45	36.461	86
Waru	553,88	18.804	34
Penajam	1207,37	80.811	67
Sepaku	1172,36	35.352	30

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Mengamati data tabel di atas bisa disimpulkan bahwa dari keempat kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, pada tahun 2017 kepadatan mencapai 86 orang/km². Disusul Kecamatan Penajam dengan kepadatan 67 orang/km² dan Kecamatan Sepaku adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah diantara kecamatan lain yaitu 30 orang/km².

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PETA SEBARAN PENDUDUK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

114°30'00" BT 114°40'00" BT 114°50'00" BT

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KABUPATEN KUTAI BARAT

KOTA BALIKPAPAN

SELAT MAKASSAR

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan Desa

Status Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Jalan Lain

Kepulauan

- Pulau

Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa

- 0 - 788
- 927 - 2.121
- 2.554 - 3.831
- 4.099 - 6.781
- 8.187 - 11.849

Petirisan

- Laut/Sungai
- Desa
- Akasi Sungai

Skala

0 2.5 5 7.5 Kilometers

U
S

1 : 250.000

Daftar Peta

1. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
2. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
3. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
4. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
5. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
6. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
7. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
8. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
9. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)
10. Peta Raster Raster (M1) 1 : 100.000 (M1) (M1)

KABUPATEN PASER

114°30'00" BT 114°40'00" BT 114°50'00" BT

RPJMD Penajam Paser Utara tahun 2018-2023 |

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2013-2018 diuraikan sebagai berikut:

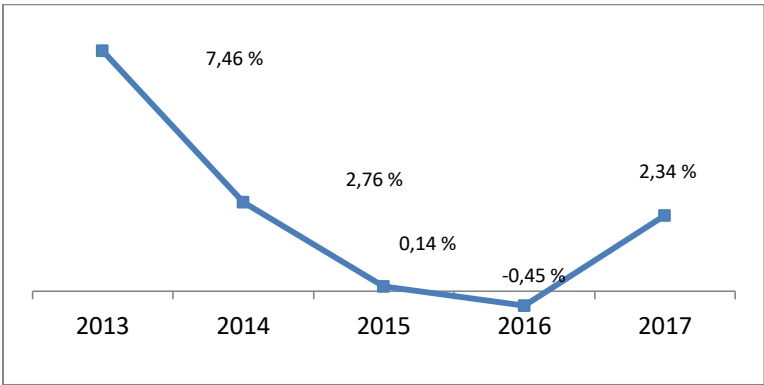
A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan ekonomi wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto.

A.1 Pertumbuhan PDRB dan Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara

Perkembangan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 2.15.

Gambar 2.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2013-2017



Sumber : Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Jika dihitung dengan migas, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 sebesar 7.46 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pertambangan dan penggalian. Ini terjadi karena adanya *multiplier effect* yang

disebabkan oleh tumbuhnya pertambangan khususnya batubara dan minyak/gas bumi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami penurunan. Dari gambar 2.15 dapat dilihat bahwa terjadi perlambatan dimulai sejak tahun 2014. Secara umum dampak krisis ekonomi global, ditambah dengan menurunnya harga komoditas utama yang menjadi andalan penerimaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu hasil dari sector migas, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam selang waktu lima tahun, laju pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir semakin mengalami perlambatan yaitu tahun 2014 sebesar 2.76 % , tahun 2015 sebesar 0,14 %, bahkan tahun 2016 tertekan hingga angka -0.45%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai pertumbuhan positif yaitu sebesar 2,34 %. Pemerintah terus melakukan upaya agar komposisi struktur ekonomi daerah tidak bergantung hanya pada sektor migas. Ekstensifikasi sumber-sumber PAD dari sektor riil lainnya seperti pertanian, perikanan, jasa dan industri terus ditingkatkan.

Selain itu pemberian insentif kepada pelaku usaha kecil juga dapat memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat pada nilai laju pertumbuhan ekonomi jika diukur tanpa memasukkan sektor migas. Nilai laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2016 masih pada angka positif yaitu 1.09%, sedikit menurun dari tahun 2015 sebesar 1.81%. Rincian mengenai perkembangan nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 - 2017 bisa dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2013	6.981.001,70	6.201.813,64
2014	7.589.458,89	6.373.234,71

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2015	7.452.308,72	6.382.224,66
2016	7.678.854,89	6.353.489,20
2017	8.450.146,56	6.501.919,06

Sumber : BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Angka Pertumbuhan sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi pada nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2013 – 2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.89	0.93	0.86	-0.19	0.24
2. Pertambangan dan Penggalan	13.02	0.50	-4.56	-3.02	2.01
3. Industri Pengolahan	4.37	6.41	6.17	4.20	1.84
4. Listrik dan Gas	4.77	21.15	32.68	9.27	6.04
5. Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah & daur ulang	10.76	-1.79	0.10	-0.08	6.85
6. Bangunan	3.26	5.02	-0.54	-4.47	6.26
7. Perdagangan Besar dan Eceran	5.28	1.40	0.75	2.01	4.62
8. Transportasi dan Pergudangan	3.95	6.35	3.53	1.91	6.22

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.86	2.93	5.61	2.44	6.77
10. Informasi dan Komunikasi	3.86	5.71	8.13	6.25	8.85
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.23	0.42	9.81	-0.77	-1.34
12. Real Estate	5.88	9.11	4.82	-0.22	3.96
13. Jasa Perusahaan	3.80	2.23	-3.30	-5.93	3.86
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5.89	10.83	2.53	-2.09	-1.32
15. Jasa Pendidikan	9.62	11.05	9.99	4.51	3.91
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.33	3.73	8.97	6.52	4.90
17. Jasa Lainnya	1.10	2.72	7.96	8.58	6.38
PDRB	7.46	2.76	0.14	-0.45	2.34

Sumber : BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum pertumbuhan nilai PDRB menurun pada tahun 2015-2016. Sempat tertekan hingga pada level negative -0.45% pada tahun 2016 namun tahun 2017 sudah menunjukkan adanya perubahan positif yaitu pada level 2.34%. Hal ini tidak lepas dari menurunnya laju pertumbuhan dari masing-masing sektor pembentuknya. Sektor Pertambangan dan Penggalan yang pada tahun 2015 sempat mengalami perlambatan pertumbuhan hingga level -4.56% dan mulai merangkak naik pada tahun 2017 tercatat sebesar 2.01%. Begitu juga sektor Jasa Perusahaan yang sempat mengalami pertumbuhan

negatif -5.93% pada tahun 2016 kini sudah mulai tumbuh kembali di level 3.86%.

Jika diperhatikan, pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara telah terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2013*	2014**	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.321.411	1.570.079	1.551.651	1.618.454	1.753.448,17
2. Pertambangan dan Penggalian	2.717.894	2.864.321	2.384.690	2.250.261	2.582.309,07
3. Industri Pengolahan	957.271,25	1.085.895,36	1.149.644	1.252.459	1.443.657,68
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.400,33	2.734,46	4.649,40	5.337.30	6.064,55
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.838,47	5.909,60	6.016,20	6.402,10	7.309,70
6. Kontruksi/ Contruction	606.369,11	689.774	740.148	757.559,50	848.023,33
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	553.212,96	567.481,32	592.263	624.218,50	698.077,97
8. Transportasi dan Pergudangan	94.038	102.934	109.375	113.435,10	123.393,29
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.627	36.347	39.498	41.535,60	48.031,30
10. Informasi dan Komunikasi	69.913	74.457,31	80.117	86.467,40	96.207,80
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	50.014	52.416	62.298	64.934,90	63.820,95
12. Real Estate	79.096,48	82.696,48	87.631	91.216,40	96.260,53
13. Jasa Perusahaan	1.380,38	1.481,13	1.462,90	1.478,50	1.573,33

Lapangan Usaha	2013*	2014**	2015	2016	2017
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	263.121,26	296.207	320.846	323.700,10	330.454,15
15. Jasa Pendidikan	178.442,02	205.041	229.126	248.800,50	270.417,71
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.615	1.702	1.938	2.193,70	2.387,24
17. Jasa Lainnya	46.361	49.983	57.405	68.657,20	78.709,79
PDRB	6.981.001,70	7.589.458,89	7.452.308,72	7.678.854,89	8.450.146,56

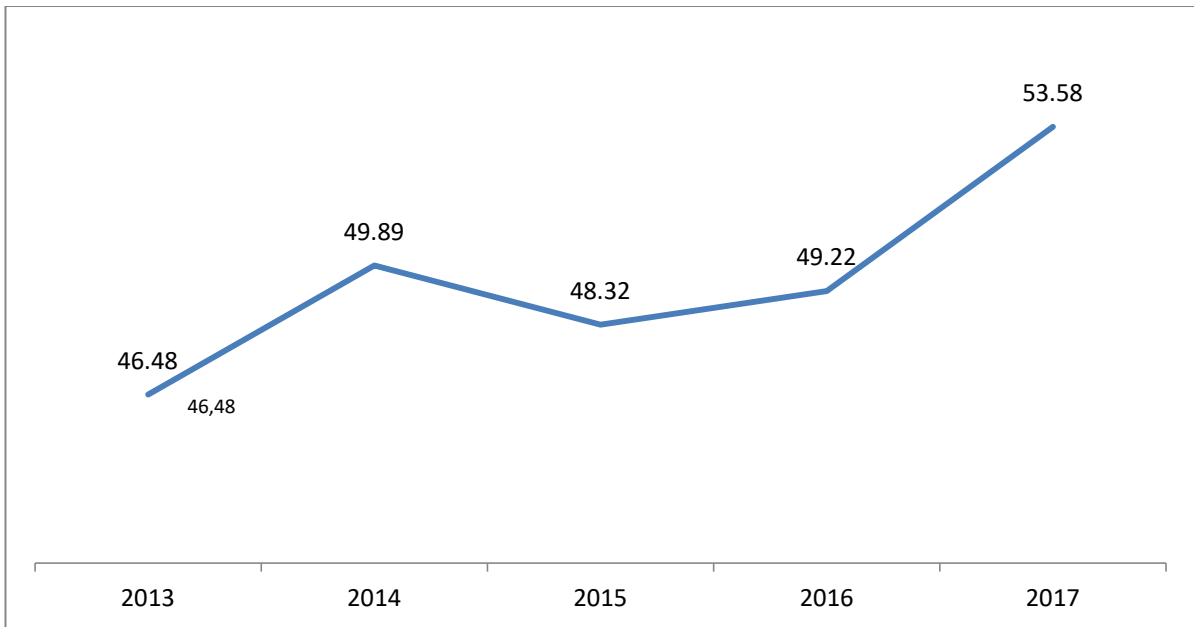
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor terbesar dalam penyusun komponen ekonomi wilayah. Namun dalam kurun waktu empat tahun terakhir sektor ini mengalami penurunan nilai. Sedangkan sektor-sektor lain mulai tumbuh seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, jasa transportasi dan perdagangan, industri pengolahan, dan beberapa sektor lainnya.

A.2 Pendapatan Regional Perkapita

PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 49,22 juta rupiah pada tahun 2016, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 48,32 juta rupiah. Meningkatnya nilai ini bisa diasumsikan pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara menghasilkan produk baik barang maupun jasa senilai 49,22 juta setahun, atau sekitar Rp134.800,- per hari. Jika unsur dari sektor migas dikeluarkan, maka nilai dari PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 34,79 juta rupiah pada tahun 2016, juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 32,85 juta rupiah, dan tahun 2014 sebesar 31,06 juta rupiah atau sekitar Rp.84.900,- per hari. Berikut grafik nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara:

Gambar 2.16
PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-
2017 (dalam juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

B. Inflasi

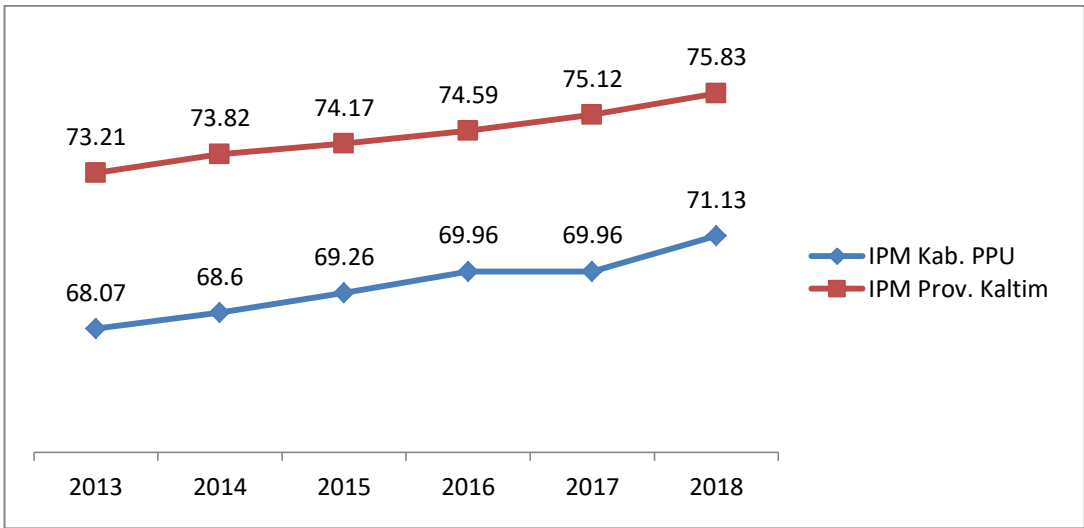
Perhitungan inflasi pada tingkat kabupaten tidak dilakukan di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu untuk mendeteksi inflasi di kabupaten Penajam Paser Utara digunakan inflasi kota Balikpapan. Laju inflasi Kota Balikpapan menjadi proksi karena wilayah Penajam Paser Utara yang berdekatan dengan wilayah Kota Balikpapan sehingga laju inflasi di wilayah Penajam Paser Utara relatif sama dengan laju inflasi Kota Balikpapan. Laju inflasi di wilayah Kota Balikpapan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 rata-rata pada angka 4 persen. Secara lebih rinci, laju inflasi di wilayah Balikpapan pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 secara berturut-turut adalah 6,26%; 4,13%; 2,45% dan 3,13%. Angka laju inflasi ini dinilai cukup tinggi bila dibandingkan dengan nilai laju inflasi di wilayah lain di Indonesia.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Nilai IPM Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 yaitu sebesar 71,13. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 70,59. Angka ini masih dibawah nilai Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 75.83 pada tahun 2018. Laju

pertumbuhan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara tiap tahunnya berkisar di angka 0,7% sampai 1%.

Gambar 2.17
IPM Kabupaten Penajam Paser Utara dan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2013-2018



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Dengan dicapainya nilai tersebut, maka Kabupaten Penajam Paser Utara dikategorikan dalam status pembangunan manusia tingkatan sedang.

Meningkatnya IPM Kabupaten Penajam Paser Utara didorong oleh meningkatnya pula komponen IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

Tabel 2.17
Indikator Penyusun IPM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Jumlah					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ***
1	IPM	Poin	68.07	68.60	69.26	69.96	70.59	71.13
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70.43	70.48	70.53	70.80	70.82	71.05

No	Indikator	Satuan	Jumlah					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ***
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.45	11.69	12.02	12.46	12.53	12.54
4	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7.30	7.46	7.59	7.60	7.95	8.03
5	Pengeluaran Per Kapita	Rp (ribu)	10.773	10.807	10.913	11.019	11.126	11.492

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

2.2.3 Fokus Seni dan Budaya

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara perlahan namun pasti sedikit berkembang. Bantuan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap seni budaya dan olahraga diantaranya:

1. Pesta adat nondoi;
2. Pesta laut;
3. Pesta Pantai Lango;
4. Tari Jepen Ampiek Muslimah;
5. Tari Kode Bura (Kera Putih);
6. Terbangunnya dan terpeliharanya Stadion sepak bola Panglima Sentik;
7. Terbangunnya dan terpeliharanya Gelanggang Olah Raga (GOR);
8. Terbangunnya Rumah adat Lou Kuta.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

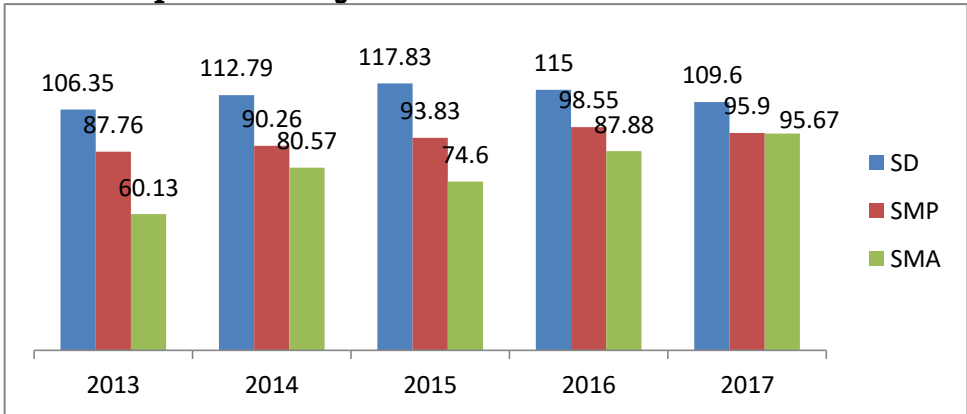
a. Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017 yaitu sebesar 12.53 tahun. Jadi artinya lamanya waktu anak sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berumur diatas 7 tahun adalah selama 12.46 tahun atau bisa diartikan sudah bisa sampai jenjang SMA. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan tren yang cukup positif perkembangannya setiap tahun yaitu 11.69 pada tahun 2014, 12.02 pada tahun 2015, 12.46 tahun 2016, dan 12.53 Tahun 2017

Selanjutnya untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal yaitu dengan angka Rata-rata Lama Sekolah. Capaian nilai angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017 yaitu sebesar 7.95 tahun. Artinya jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal adalah sekitar 7 tahun.

Indikator penting lainnya dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2017 angka partisipasi kasar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dapat dilihat pada grafik berikut:

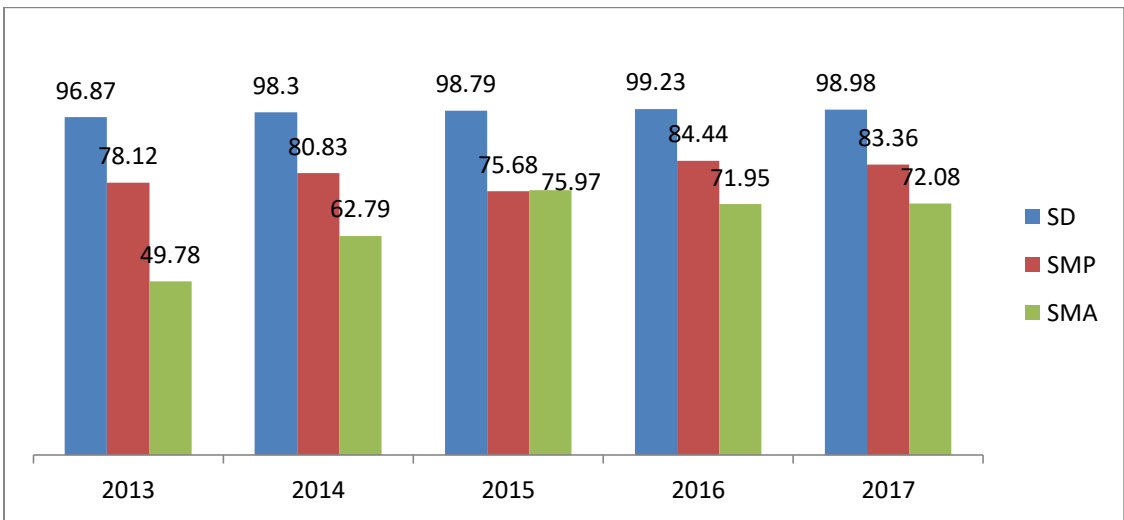
Gambar 2.18
APK jenjang SD, SMP, & SMA
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Selain Angka Partisipasi Kasar juga terdapat indikator Angka Partisipasi Murni, yaitu proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka ini menunjukkan besarnya jumlah anak pada usia tertentu yang berpartisipasi sekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya.

Gambar 2.19
APM jenjang Pendidikan di
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017



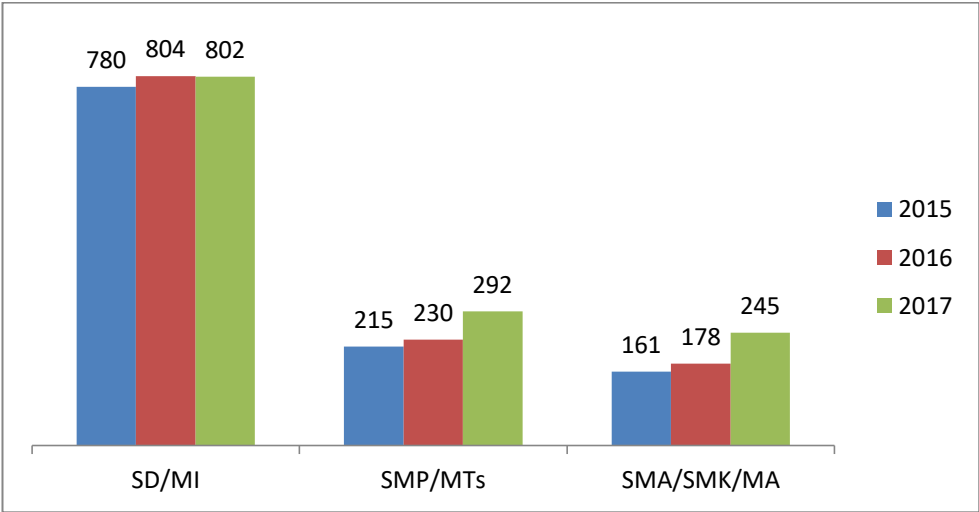
Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Angka Partisipasi ini, baik APK maupun APM adalah indikator yang menunjukkan kepedulian penduduk terhadap pentingnya mengikuti pendidikan sebagai upaya memperbaiki

kualitas hidupnya. Partisipasi bersekolah anak merupakan tanggung jawab banyak pihak terutama orang tua dan lingkungan serta pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan.

Pencapaian nilai pada beberapa indikator diatas sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan akses pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memajukan bidang pendidikan dengan cara peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pengajar dan murid. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 2.20
Jumlah RKB Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten
Penajam Paser Utara



Sumber : Disdikpora, 2018

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah ruang kelas belajar untuk tiap jenjang pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Sementara berdasarkan rasio (data rasio jumlah murid terhadap ruang kelas) (bilamana hasil data rasio tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penambahan ruang kelas maka fokus pelayanan salah satunya adalah penambahan ruang kelas) Hal ini menunjukkan bahwa usaha peningkatan penyediaan fasilitas ruang kelas selalu dilakukan.

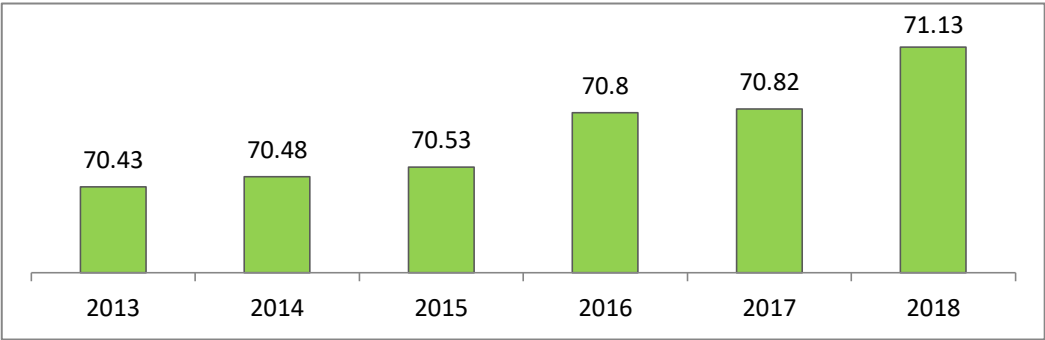
a.1 Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kepemudaan di Penajam Paser Utara ada yang merupakan organisasi Nasional (Pemuda Pancasila, GP Ansor, Laskar Merah Putih, FKPPi, AMPG, dll) dan ada juga organisasi Regional (GEPAK, GASAK-LIBAS) serta organisasi Kedaerahan [IKAPAKARTI, Kerukunan Keluarga Bone, LAP (Lembaga Adat Paser)]. Jumlah organisasi pemuda tahun yang dibina pada tahun 2018 sebanyak 5 organisasi yakni Palang Merah Remaja (PMR), Purna Prakarya Muda Indonesia, Purna Paskibraka Indonesia, KNPI, dan Pramuka. Keberadaan organisasi pemuda ini tentunya dapat menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Disamping itu, banyaknya jumlah organisasi pemuda Penajam Paser Utara menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

b. Kesehatan

Dalam 5 (lima) tahun, 2013-2018, Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami tren meningkat. AHH menerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan salah satunya melalui penyediaan

fasilitas kesehatan yang memadai. Berikut fasilitas kesehatan tahun 2013-2017 :

Tabel 2.18
Prasarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2013 – 2017

Tahun	RSUD	Rumah Sakit Pratama	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Biasa	Pusban	Pusling	Posyandu Aktif	Polindes
2013	1	-	9	2	44	11	230	39
2014	1	-	9	2	44	11	238	38
2015	1	-	9	2	44	11	254	22
2016	1	-	9	2	44	11	254	29
2017	1	1	10	2	45	11	270	33

Sumber : Dinas Kesehatan 2018

Tabel 2.19
Presentase Penduduk yang Memanfaatkan Sarana
Prasarana Kesehatan

Tahun	Presentase			
	Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas	Persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat
2013	142%	19,31%	64%	98,73%
2014	139%	22,21%	56%	97,77%
2015	171%	23,81%	82%	99,11%
2016	165%	33,12%	82%	84,82%
2017	136%	33,69%	82%	94,66%

Sumber : Dinas Kesehatan 2018

Keterjaminan pelayanan akses kesehatan bagi masyarakat juga ditentukan oleh kehandalan tenaga kesehatan. Adapun dukungan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
Penajam Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Dokter spesialis	11
2	Dokter umum	40
	Dokter Gigi	15
3	Bidan	250
4	Perawat	305
5	Analisis Lab	8
6	Fisioterapis	7
7	Apoteker	12
8	Asisten Apoteker	6
9	Rekam Medik	5
10	Sanitarian	5
11	Teknisi Elektromedis	4
12	Radiografer	6
13	Pelaksana Gizi	3
14	Perawat Gigi	3
Jumlah		179

Sumber: RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Tabel 2.21
Kinerja Pembangunan Kesehatan

Cakupan	Prosentase (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	88,60	89,51	97,05	88,90	103,80
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96,41	87,10	91,80	83,90	103,40
ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	62,36	14,44	101,74	91,70	104,10

Cakupan	Prosentase (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Ibu hamil resiko tinggi komplikasi yang ditangani	64,20	62,40	124,18	74,65	90,70
Neonatal resiko tinggi/Komplikasi	24,40	36,70	29,00	18,00	31,40
Cakupan bayi berat lahir rendah yang ditangani	2,80	5,50	3,00	2,80	3,90
Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita	21,18	13,90	67,99	67,99	0
Cakupan Peserta aktif KB	79,01	78,40	72,00	85,30	88,20
Balita bawah garis merah	7,10	5,60	3,00	4,70	4,50
Cakupan Balita mendapat kapsul vitamin A dua kali per tahun	60,50	48,20	51,80	51,00	88,20
Cakupan Ibu hamil mendapat 90 tabelt Fe	77,15	87,00	96,60	89,00	102,10
Balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan rawat jalan	177890	46633	220368	256973	132922
Cakupan rawat inap	4167	4534	2776	3147	2692
Pelayanan Gawat Darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	20,99	100,00	100,00	100,00	100,00
Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	45,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standard	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Pada tahapan akhir dari pembangunan kesehatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan penduduk dalam jangka panjang. Kondisi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai implementasi

dari pembangunan kesehatan dikemukakan dalam beberapa indikator yang disajikan pada tabel 2.22 berikut ini.

Tabel 2.22
Angka Kelangsungan Hidup, Usia Harapan Hidup dan Balita Gizi Buruk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah			
	Angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup	Angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu melahirkan per 3.500 kelahiran hidup	Angka harapan hidup waktu lahir
2013	22	10	6	3.140
2014	48	4	6	3.061
2015	50	5	3	3.293
2016	45	13	4	3.502
2017	33	2	7	3.611

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

c. Pekerjaan Umum

1. Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status jalan, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 3 (tiga) status jalan yakni: (1). Jalan Nasional di Penajam Paser Utara, dimulai dari Penajam – Kademan dengan panjang ruas 58.50 Km (Lampiran Kepmen PU 19 B tabel status jalan nasional bukan jalan tol). (2). Jalan Provinsi, jalan provinsi dimulai dari simpang Silkar Petung – Samboja dengan panjang 89,00 km (BPS, PPU dalam Angka, 2018). (3). Jalan Kabupaten, merupakan jalan yang bukan nasional dan bukan jalan provinsi. Jalan ini berupa jalan IKK dan jalan lingkungan. Panjang jalan kabupaten pada tahun 2018 tercatat 1240,96 km. Berdasar pada standar pelayanan minimal (SPM) bidang jalan pada dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa basis pengembangan SPM dibagi atas :

- Kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang)
- Tidak Macet (lancar sepanjang waktu)
- Dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan)

Memperhatikan standar tersebut, kondisi jalan di Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel 2.23. Faktor yang mempengaruhi kondisi jalan adalah kualitas material, beban yang diterima dan geometrik jalan serta prosedur saat pelaksanaan. Secara umum hingga tahun 2018 kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kondisi baik sepanjang 471,26 km, kondisi sedang sepanjang 479,80 km, kondisi sedang rusak ringan sepanjang 147,61 km dan rusak berat sepanjang 142,29 km. Berbeda saat 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2016, panjang jalan dengan kondisi baik yakni sepanjang 470,74 km, sedangkan jalan kondisi sedang sepanjang 390,52 km, rusak ringan sepanjang 195,47 km dan rusak berat sepanjang 40,75 km. Ditinjau dari data tersebut, terdapat penambahan jalan baru sepanjang 101,76 km dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni tahun 2017 sampai 2018. Penambahan jalan baru tersebut merupakan bukti nyata kinerja UPT-PU pada 4 (empat) kecamatan. Sementara berdasarkan kondisi jalan, terlihat bahwa penambahan jalan dengan kondisi baik dapat dikatakan belum signifikan yakni masih 37,98% dari keseluruhan panjang jalan kabupaten. Hal ini sebagian besar dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Beberapa wilayah yang telah mengalami peningkatan jalan dari jalan berupa agregat menjadi perkerasan kaku (*rigid pavement*) tersebar di 4 (empat) kecamatan meliputi Jalan Riko Akses Pulau Balang – Gersik – Jenebora – Pantai Lango, Jalan Jumaiyah Parit – Jembatan Sesumpu, Jalan Mesjid Ar Rahman – Kapao – Buluminung akses Jembatan Pulau balang, Jalan Mesjid Al’Ula Nenang – Ingkur, Jalan Akses Pelabuhan Benuo Taka, Jalan Babulu Darat – Babulu Laut, Jalan Babulu Darat – Rawa Sebakung, dan Jalan Semoi I (satu) – Semoi II (dua). Untuk wilayah Kecamatan Penajam, akses jalan menuju Pantai Tanjung Jumalai yang sebelumnya merupakan jalan dengan perkerasan Lapis Pondasi Bawah (LPB) saat ini kondisinya telah ditingkatkan perkerasan lentur/*Asphalt Treated Base* (ATB). Kondooso ini tentunya memberikan dampak positif pada pertumbuhan kunjungan wisata dikarenakan meningkatnya

aksebilitas menuju objek wisata, yang pada akhirnya menumbuhkan perekonomian sekitar objek wisata tersebut.

Peningkatan lapis permukaan jalan juga dilaksanakan pada wilayah permukiman yang padat penduduk seperti diwilayah Penajam, Girimukti dan Petung. Dengan semakin baiknya kondisi jalan semakin memicu tersebarnya kantong-kantong permukiman baru dan perluasan permukiman yang ada. Pada wilayah Kecamatan Babulu peningkatan jalan tidak hanya dibangun pada wilayah permukiman saja, tetapi juga pada kawasan yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan. Melihat kondisi tersebut masih diperlukan peningkatan kualitas jalan termasuk pemeliharaan rutin sepanjang tahun. Sementara untuk jalan perdesaan masih perlu mendapat dukungan UPT-PU pada 4 (empat) kecamatan.

Tabel 2.23
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2018

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kondisi Baik	423,67	469,5	470,74	471,26	471,26
2	Kondisi Sedang	331,83	352,71	348,49	437,15	479,80
3	Kondisi Rusak Ringan	184,12	160,98	195,47	88,49	145,61
4	Kondisi Rusak Berat	24,12	38,08	40,75	142,29	142,29
5	Jalan secara keseluruhan	963,74	1.021,27	1.055.45	1.139,19	1.240,96

Sumber: BPS dan DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2018

Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dapat menghubungkan seluruh desa yang ada, walaupun pada wilayah tertentu kondisi jalan yang ada masih belum memadai khususnya pada waktu musim penghujan. Wilayah-wilayah tersebut umumnya berada jauh dari pusat pertumbuhan seperti Desa Bukit Subur dan Desa Karang Jinawi.

Apabila dilihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik perkecamatan, Kecamatan Penajam mempunyai proporsi yang

paling besar yaitu sebesar 42,05% jalan baik dari total jalan yang ada. Sementara yang paling rendah adalah Kecamatan Waru sebesar 29,55%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak ruas jalan yang ada disetiap kecamatan yang perlu peningkatan lapis permukaan. Kondisi jalan berdasar jenis permukaan disajikan pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan
Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018

	Jenis Permukaan (km)				Jumlah Total	Persentase (%)
Kecamatan	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya		
Babulu	56,14	150,49	180,14	12,92	399,69	29,55
Waru	17,29	48,07	45,34	8,27	118,96	9,59
Penajam	76,99	264,72	140,74	39,34	521,79	42,05
Sepaku	62,03	107,55	30,54	0,41	200,53	16,16
Total	212,44	570,83	396,76	60,94	1240,96	100

Sumber: DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2019

Jumlah kendaraan di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun anara 2014 sampai dengan 2018, tercatat jumlah kendaraan terbanyak pada 2015 sebanyak 38.097 dan paling sedikit pada 2018 yakni di angka 34.184 unit. Bila jumlah kendaraan tersebut dibandingkan dengan panjang jalan, maka dapat dikatakan bahwa kepadatan kendaraan di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tertinggi pada tahun 2014 diangka 1:40 yang artinya setiap 1 (satu) kilometer (km) terdapat 40 kendaraan sementara pada tahun 2018, rasio tersebut menurun menjadi 1:27. Data rasio dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2014-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan	963,74	1.021,27	1.055,45	1.139,19	1.240,96
2	Kendaraan	37.316	38.097	36.169	37.115	34.184
3	Rasio	0.0258	0.0268	0.0292	0.0307	0.0363

Sumber: Samsat dan DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2018

2. Jaringan Irigasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya membangun jaringan irigasi yang tersebar di wilayah sentra pertanian seperti di Babulu Darat, Sebakung Jaya dan Labangka. Jaringan irigasi ini merupakan satu kesatuan sistem pengairan yang terintegrasi yang dibagi berdasarkan saluran primer, sekunder dan tersier. Agar operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pengelolaan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing yang terdiri dari pemerintah provinsi untuk saluran primer, pemerintah kabupaten untuk saluran sekunder dan masyarakat melalui Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) mengelola saluran tersier. Data tentang jaringan irigasi yang tersedia disajikan pada tabel 2.26.

Tabel 2.26
Jaringan Irigasi menurut Kecamatan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (m)			Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	Luas lahan budidaya (Ha)	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8=6/7)
1	Penajam	62.000	58.000	41.610	161.610	2.235	72.3
2	Waru	1.423	26.058	32.770	60.251	1.167	51.6

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (m)			Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	Luas lahan budidaya (Ha)	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
3	Babulu	118.000	111.775	134.630	364.405	7.479	48.7
4	Sepaku	-	4628	28.850	33.478	2.382	14.05
	Jumlah	181.423	200.461	237.860	619.774	12.681	48.87

Sumber : BWS, Dinas PU, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara,2018

Selain berfungsi bagi sektor pertanian jaringan irigasi di Penajam Paser Utara sangat penting untuk membantu menangani banjir yang bersifat rutin. Namun jaringan irigasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep penanganan banjir itu, akibatnya penanganan banjir masih bersifat sporadis. Hal ini disebabkan belum adanya data base pendukung bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir dan pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi dengan bidang terkait lainnya.

3. Drainase

Bangunan drainase permukiman masih sangat terbatas. Kondisi ini berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dimana masih banyak wilayah-wilayah yang mengalami genangan air, seperti tabel berikut :

Tabel 2.27
Sebagian Wilayah Genangan yang belum Tertangani Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018

No	Lokasi Genangan / Kelurahan	Wilayah Genangan					Infrastruktur*
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (Jam)	Frek. (kali/t h)	Penyebab***	Jenis
1	BTN KM. 1,5 Penajam	5	0.8	2	3	Maindrain	Drainase Sekunder
2	BTN KM. 4 Penajam	3,1	0.27	2	3	Maindrain	Drainase Sekunder

No	Lokasi Genangan / Kelurahan	Wilayah Genangan					Infrastruktur*
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (Jam)	Frek.	Penyebab***	Jenis
3	Perum Korpri Kel. Parit	6,1	0.27	2	3	Hujan / Maindrain terlalu kecil	Drainase Sekunder
4	Perum Gusung Kel. Penajam	4	0.5	3	2	Maindrain	Drainase Sekunder
5	Kel. Parit RT. 1,5 dan 6	9	0.7	2	2	Elevasi	Drainase Sekunder
6	Kel. Petung RT. 4,5,6,14,15	6,1	0.7	2	3	Elevasi	Drainase Sekunder
7	Pasar Lama Penajam	2	0.7	6	2	Hujan/ Pasang Surut Air Laut	Drainase Sekunder
8	Gg. Qomar RT.7 Penajam	0.5	0.6	6	2	Hujan/ Pasang Surut Air Laut	Drainase Sekunder
9	Gg. Buaya RT.6 Penajam	0.5	0.6	6	2	Hujan/ Pasang Surut Air Laut	Drainase Sekunder
10	RT 1 KM 2 Gn. Seteleng	5,6	0,23	2	3	Hujan. Maindrain terlalu kecil	Drainase Sekunder
11	RT 2 KM 2 Gn. Seteleng	3,6	0,23	2	3	Hujan. Maindrain terlalu kecil	Drainase Sekunder
12	Gg. Rana Gn. Seteleng	5,9	0,25	2	3	Hujan. Maindrain terlalu kecil	Drainase Sekunder
13	Pasar Waru Kec. Waru	2	0.4	3	3	Maindrain	Drainase Sekunder
14	Kel. Babulu Darat Kec. Babulu	2	1	3	3	Maindrain	Drainase Sekunder
15	Kel. Tengin Baru Kec. Sepaku	1	0.4	6	3	Maindrain	Drainase Sekunder
16	Kel. Maridan Kec. Sepaku	1	0.5	6	3	Maindrain	Drainase Sekunder
17	Kel. Sukaraja Kec. Sepaku	1	0.4	6	3	Maindrain	Drainase Sekunder
T o t a l		58,4					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara,
2017

4. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang terkait dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Terakhir, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Berdasarkan hasil analisa neraca tata ruang yang telah dibuat persentase kesesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sekitar 70%. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau yang diatur di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah. Selain itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih. Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam.

4.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara luas Ruang Terbuka Hijau masih sangat rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah. Idealnya ruang terbuka hijau seharusnya sebesar 30% dari luas keseluruhan wilayah. Sehingga dengan luas Kabupaten

Penajam Paser Utara sebesar 333.306 Ha, diharapkan memiliki total luasan RTH sebesar 5.420 Ha.

RTH tertinggi ada di kecamatan Penajam dengan RTH terendah di kecamatan Sepaku. Adapun Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2018

No	Kawasan	Total Luasan (ha)
1	Median Penajam KM 1-5 & Green Belt, Pasar Induk Penajam, Median Pasar (pulau & median jln), Taman Pasar, Taman Makam Nenang, Perum BTN KM 4, Perum BTN KM 1	2,813
2	Islamic Center (bundaran,median islamic center), Median Jl. Poros, RTH depan stadion, median samping polres, taman dome A, taman dome B, stadion, median stadion NW (A), median stadion NW (B), median stadion SW(A),median stadion SW(B), segitiga belakang PU, segitiga stadion NE, segitiga stadion NW, segitiga stadion SW, Pembibitan	12,670
3	Taman Rozeline, Taman PKK	1,416
4	Rumah Jabatan Camat, Median jalan depan Gd.Pemuda, Median jalan depan kantor Polres (A), Median jalan depan kantor Polres (B), Masjid Agung, Trotoar jalan poros, Median jalur 2 belakang masjid agung	3,365
5	Taman Segitiga Lapangan Bola, Taman Segitiga Perahu, Taman Masjid Ar Rahman	0,048
6	Jalur RSUD, Median Coastal Road, Poros kopi-kopi, Poros Coastal road	3,710
7	Fasum Korpri	0,0685
8	Median dan Trotoar Km9 (Depan Kejaksaan sampai depan kantor Bupati)	0,992

No	Kawasan	Total Luasan (ha)
9	Halaman Perkantoran	6,001
10	Hutan Kota	15
11	Petung	0,730
TOTAL LUASAN		46,814

Sumber: DPKPP, 2018

d. Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.

Masalah utama Pemerintah dalam bidang perumahan yaitu masih banyaknya jumlah backlog perumahan serta jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum teratasi. Adapun data Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29
Data Backlog Perumahan dan RTLH
Kabupaten Penajam Paser Utara 2018

No	Jenis Masalah Perumahan	Jumlah Unit
1	Backlog Perumahan	8570
2	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2579

Sumber : BKKBN, DPKPP 2018

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah tengah berjuang mengatasi masalah defisit atau *backlog* perumahan yang disebabkan tidak seimbangnya antara pasokan (suplai) dan permintaan (kebutuhan) dan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut. Diperlukan sejumlah terobosan untuk mengatasi masalah

perumahan. Kebutuhan tersebut perlu dipenuhi baik melalui pasar perumahan, subsidi pemenuhan melalui pembiayaan Pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat.

Adapun jenis kegiatan bantuan perumahan dengan pembiayaan oleh Pemerintah yang telah dilakukan antara lain seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.30
Jenis Kegiatan Bantuan Perumahan
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Jenis Kegiatan Bantuan Perumahan	Tahun (unit)			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	250	343	140	dalam bentuk material bangunan untuk peningkatan kualitas rumah
2	Rumah Khusus (Rusus)	-	-	50	untuk skala komunal, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
3	Rumah Layak Huni (RLH)	30	-	-	dalam bentuk dibangun utuh unit rumah
4	Rumah Susun (Rusun)	-	-	1 Tower	1 Tower terdiri dari 3 lantai, 42 room, tipe 36
5	Prasarana dan Sarana Umum (PSU)	1 Kawasan Perumahan	-	-	dalam bentuk jalan lingkungan

Sumber : DKPP, 2018

Sementara dari sisi keterlibatan pihak swasta, terdapat 19 perusahaan pengembang dengan 22 lokasi/areal perumahan yang memiliki tipe bervariasi, mulai tipe 36 sampai 150. Dimana sebagian perumahan tersebut diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

1. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 sudah cukup baik, tetapi belum merata (lihat tabel 2.31). Tidak meratanya luas permukiman yang tertata ini dikarenakan pembangunan masyarakat yang masih bersifat sporasi dan masih mengarah kepada *urban sprowl*, juga dipengaruhi luasan permukiman yang terbangun di wilayah kecamatan tersebut.

Tabel 2.31
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Per Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	Luas Area Permukiman Tertata (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Penajam	1.209	1.160	95.95
2	Waru	553.88	374.32	67.58
3	Babulu	399.45	385.85	96.60
4	Sepaku	3.323	3.292	99.08
	Jumlah	5.485	5.213	95.03

Sumber : BKPP, 2018

2. Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki. Rendahnya kesadaran ini terkait dengan masih kurangnya upaya sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan, dampak dari keadaan ini adalah sulitnya mendeteksi ketaatan terhadap dokumen tata ruang yang telah ada.

Tabel 2.32
Realisasi IMB yang telah diterbitkan

No	Kecamatan	Realisasi IMB Terbit			
		2015	2016	2017	2018
1	Penajam	144	78	91	70
2	Waru	13	10	6	3
3	Sepaku	31	18	15	35
4	Babulu	20	36	27	38
TOTAL		208	142	139	146

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

3. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Untuk ketersediaan tempat pemakaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan pemerataan tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat. Menurut tabel 2.33, terlihat rasio jumlah penduduk terhadap tempat pemakaman umum. Jika dilihat hanya berdasarkan jumlahnya maka angka tersebut sudah mencukupi, namun berdasarkan tingkat penyebarannya, lokasi pemakaman yang ada masih belum merata. Untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk 5 tahun kedepan perlu dipersiapkan lokasi-lokasi pemakaman baru yang sesuai dengan proporsi jumlah penduduk, tingkat dan jangkauan pelayanan yang ada disetiap wilayah.

Tabel 2.33
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten
Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Jmlh Penduduk	Tempat pemakaman umum (TPU)		Rasio TPU persatuan penduduk
			Jml	Daya tampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10=9/3)
1	Penajam	77.294	31	459	1:169
2	Waru	18.471	13	94	1:197
3	Babulu	33.799	20	199	1:170
4	Sepaku	34.990	34	228	1:154
	Jumlah	166.554	98	980	1:170

Sumber : Dukcapil, DPKPP, Tahun 2018

4. Air Bersih

Saat ini cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015 sebesar 16 % dari total jumlah penduduk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah daerah PPU telah berupaya untuk membuat pengelolaan air minum yang tidak terpusat tetapi instalasi pengolahan dibangun berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayan sesuai dengan kondisi wilayahnya selain kecukupan untuk kebutuhan debit untuk sumber airnya. Beberapa lokasi instalasi pengolahan air minum perkotaan yang telah dibangun meliputi : (1) Instalasi pengolahan air minum di Bendung Waru, (2) Instalasi pengolahan air minum di Sepaku, (3) Instalasi pengolahan air di Rawa Mulya di Babulu Laut.

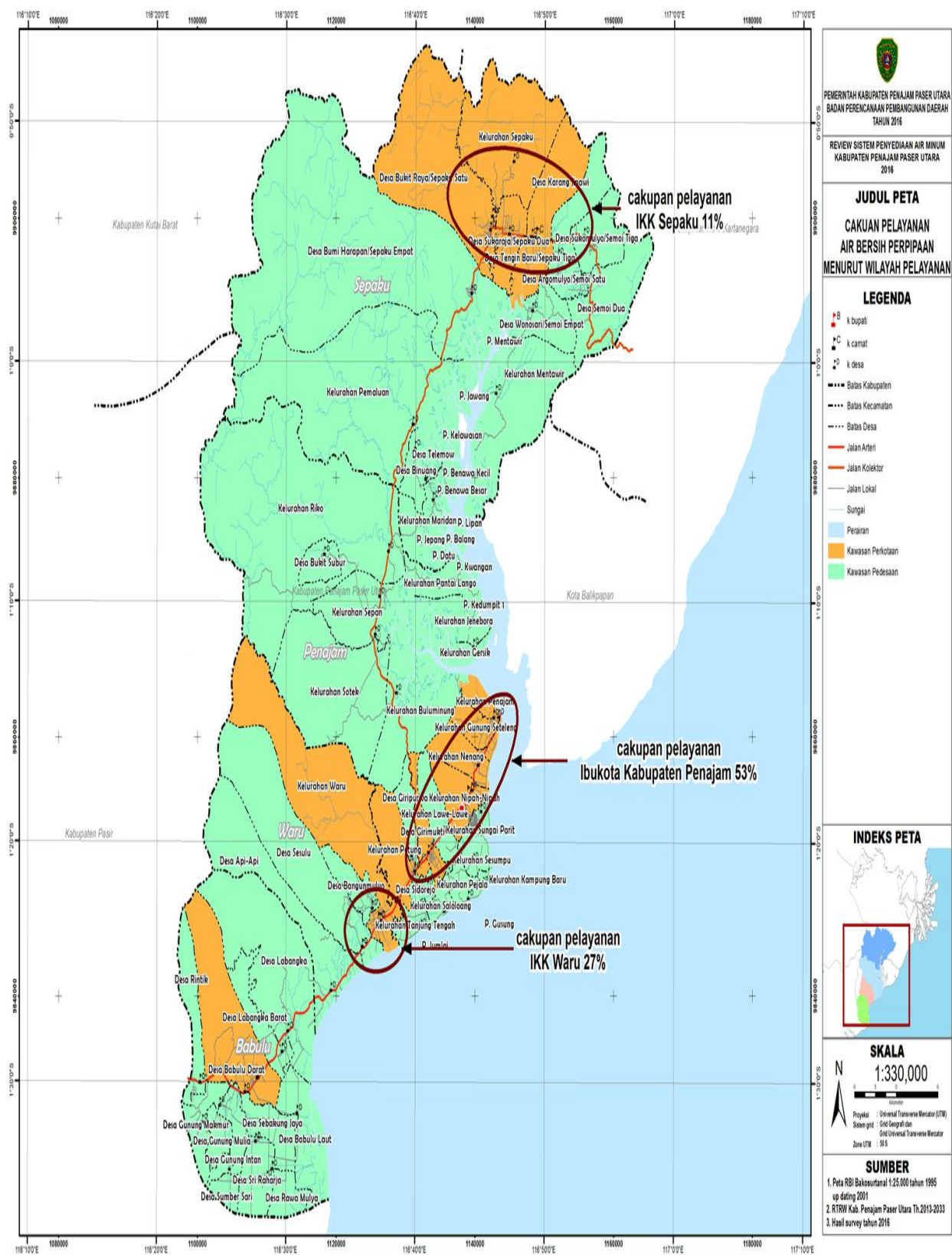
Penyediaan pelayanan SPAM pedesaan bukan jaringan perpipaan di wilayah desa Kabupaten Penajam Paser Utara sampai saat ini masih tergolong rendah. Sistem penyediaan air minum non-perpipaan (BJP) umumnya berupa air sumur yang berasal dari air tanah yang digali atau dipompa sendiri oleh masyarakat. Air sumur

yang digunakan masyarakat sebagai sumber air minum dibedakan menjadi dua, yaitu: sumur terlindung dan sumur tak terlindung/mata air. Rata-rata Masyarakat Kabupaten PPU yang berada di luar area cakupan pelayanan PDAM, yang berpotensi tidak mendapatkan akses air bersih memanfaatkan sumur baik sumur bor (WTP), sumur gali dan sumur tak terlindung/mata air sebagai sarana kebutuhan akan air bersih.

Untuk peningkatan kualitas dan pemenuhan untuk air minum maka dibangun WTP. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun 5 WTP di Kecamatan Babulu yang terbangun mulai tahun 2007 sampai 2014. Selain itu terdapat WTP yang dibangun oleh BPPT di Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam.

Gambar 2.22

Cakupan Pelayanan Air Bersih Perpipaan Menurut Wilayah Pelayanan

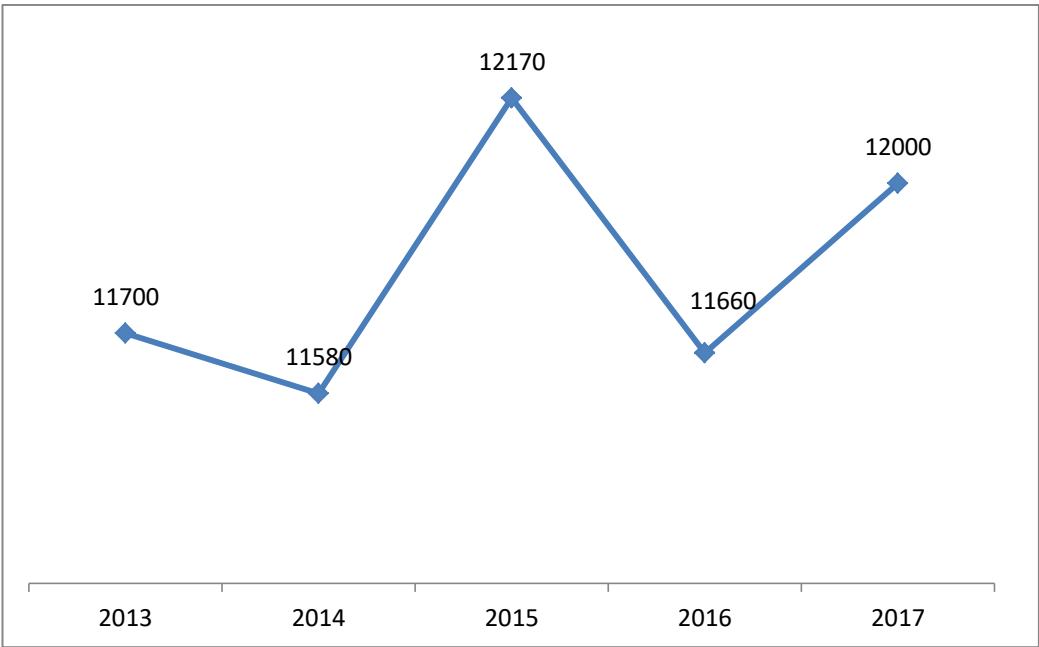


Pada tahun 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan bantuan penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan 10 Desa sasaran penerima yaitu :

- 1. Desa Rawa Mulia di Kecamatan Babulu
- 2. Desa Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu
- 3. Desa Rintik di Kecamatan Babulu
- 4. Desa Labangka di Kecamatan Babulu
- 5. Desa Sesulu di Kecamatan Waru
- 6. Desa Wonosari di Kecamatan Sepaku
- 7. Desa Semoi Dua di Kecamatan Sepaku
- 8. Desa Argo Mulyo di Kecamatan Sepaku
- 9. Desa Sukomulyo di Kecamatan Sepaku
- 10. Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku

e. Sosial

Gambar 2.23
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara



sumber : Bapelitbang, diolah

Penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Kontribusi sector pertambangan yang mengalami penurunan mempengaruhi ekonomi masyarakat di

Kabupaten Penajam Paser Utara seperti serapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin.

Kompleksitas masalah kemiskinan memerlukan rumusan kebijakan yang bersifat holistik. Program pengentasan kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat.

Gambar 2.24
Kenampakan Area Terdampak Longsor dari Atas



Sumber: Badan Geologi, 2018

2.3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Pelaksanaan pembangunan urusan bidang tenaga kerja menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditanganinya keterbatasan dalam permasalahan kesempatan kerja tentunya akan berpengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja, yang berimplikasi terhadap penurunan tingkat pengangguran dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

Potensi SDM berupa jumlah penduduk usia produktif dapat berdampak positif pada pembangunan wilayah secara umum. Banyaknya penduduk usia produktif yang mencari kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Jumlah Pencari Kerja

Tahun	Jumlah Pencari Kerja		
	Terdaftar	Laporan ditempatkan	Laporan belum ditempatkan
2013	3351	588	2763
2014	903	126	777
2015	1168	173	995
2016	917	195	722
2017	1169	181	988

Sumber : Disnakertrans, 2018

Untuk jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

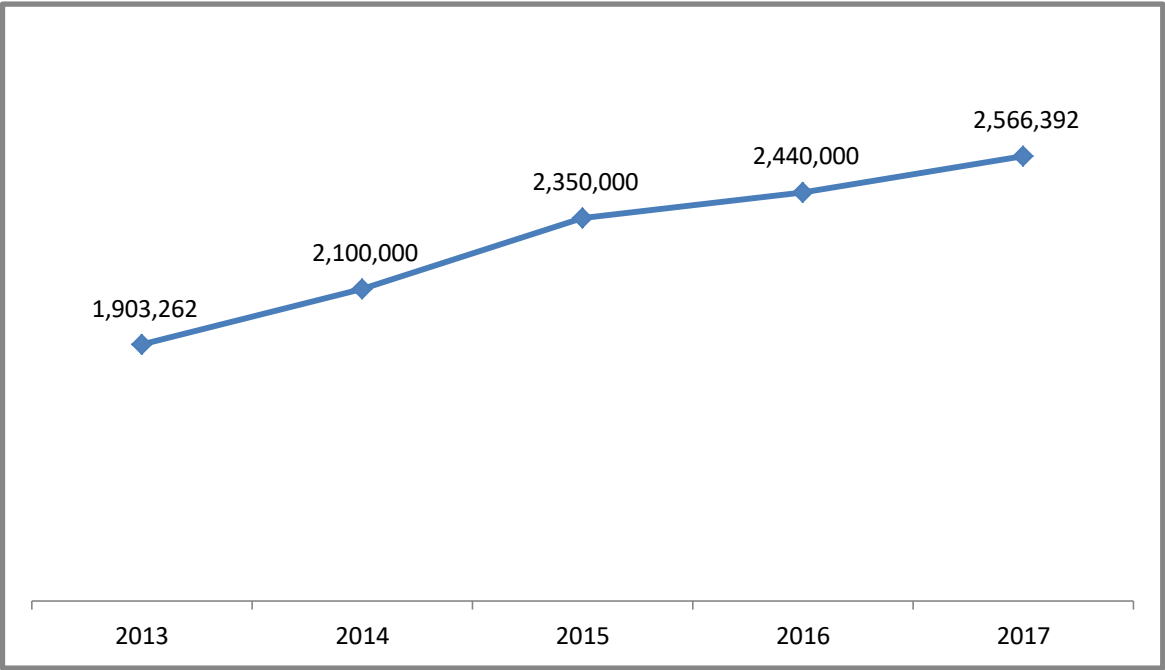
Tabel 2.35
Jumlah Tenaga Kerja

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja			
	WNI Laki-laki	WNI Wanita	WNA Laki-laki	WNA Wanita
2013	1655	1696	0	0
2014	546	357	0	0
2015	812	356	0	0
2016	562	355	5	0
2017	818	351	6	0

Sumber : Disnakertrans, 2018

Besaran upah minimum Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini merupakan respon terhadap kebutuhan penghidupan layak bagi para pekerja.

Gambar 2.25
Besaran Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber : Disnakertrans, 2018

Beberapa indikator lainnya yaitu :

Tabel 2.36
Indikator dan Realisasi Ketenagakerjaan

No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
1	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	76	80	100	225
2	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan (%)	100	37	100	100
3	Peningkatan Kesempatan Kerja (%)	87	100	21	259

Sumber : Disnakertrans, 2018

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera. Sementara itu penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan dalam mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dan memperhatikan hak anak dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan. Secara umum peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang telah memperoleh hasil positif, namun demikian masih diperlukan peningkatan posisi dan peran perempuan terutama pada bidang strategis.

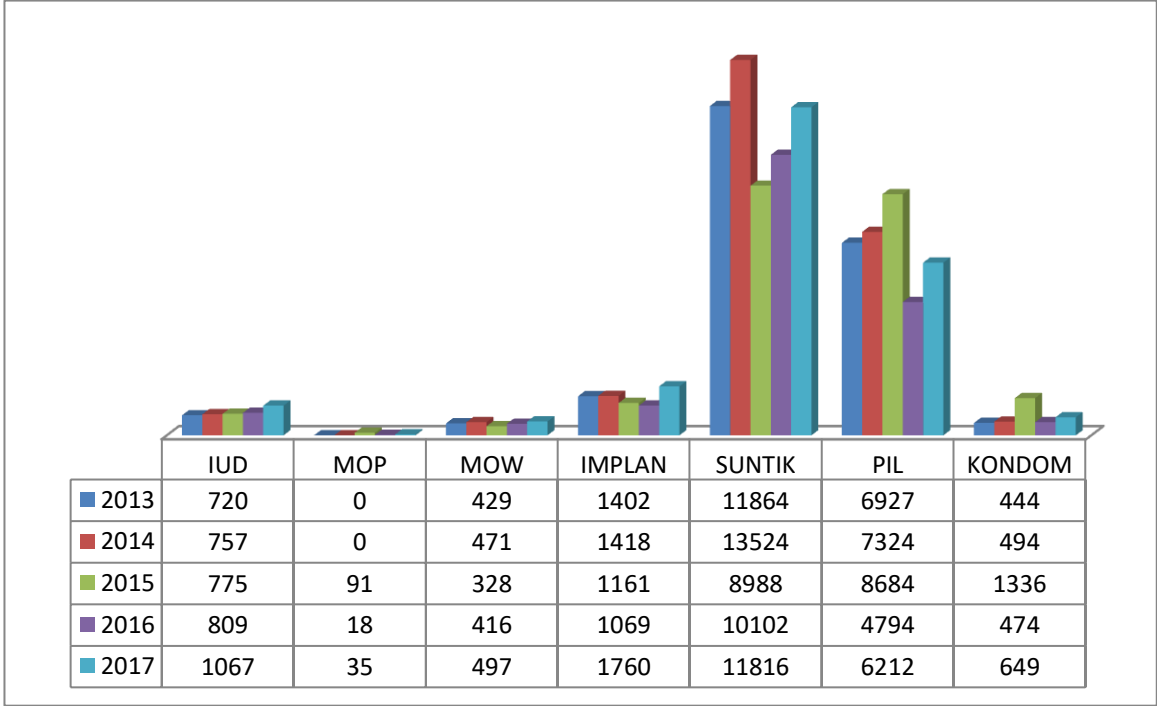
Tabel 2.37
Indikator Program Keluarga Berencana dan Realisasi
Tahun 2014-2017

No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
1	Tenaga Pendamping bagi kelompok bina keluarga	6	6	2	6
2	Jumlah PIK Remaja	4	5	0	2
3	Peningkatan capaian KB aktif (alakon)	3145	3328	5891	2418
4	Jumlah kesadaran ber KB (akseptor)	29776	30435	27301	22.036
5	Jumlah pendampingan korban KDRT dan kekerasan anak	21	21	21	22
6	Menjadikan kabupaten layak anak	-	1	1	1

No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
7	Angka partisipasi perempuan	186	200	193	200
8	Jumlah pembinaan bagi organisasi perempuan	2	2	4	4
9	Penurunan jumlah kejadian KDRT	-	-	11	5

Sumber : Dinas P3AP2KB, 2018

Gambar 2.26
Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi



Sumber : Dinas P3AP2KB, 2018

c. Ketahanan Pangan

Tabel 2.38
Data Ketersediaan Beras Penajam Paser Utara Tahun 2017

	PENAJAM	WARU	BABULU	SEPAKU
JANUARI	364.42	29.24	4.50	22.49
FEBRUARI	701.84	137.22	195.71	326.18
MARET	182.21	218.20	8,775.27	1,091.00

	PENAJAM	WARU	BABULU	SEPAKU
APRIL	1,268.71	794.07	6,078.13	722.09
MEI	404.91	78.73	1,180.98	512.88
JUNI	314.93	2.25	2,112.27	0.00
JULI	1,091.00	697.34	3,068.31	564.62
AGUSTUS	1,439.68	890.80	5,556.25	1,581.39
SEPTEMBER	971.78	1,129.25	1,462.17	1,165.24
OKTOBER	44.99	314.93	4,876.90	0.00
NOVEMBER	296.93	0.00	0.00	0.00
DESEMBER	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	7,081.40	4,292.03	33,310.49	5,985.89

Sumber : Disketapang, 2018

Ketersedian Beras berdasarkan produksi di 4 kecamatan menunjukan korelasi berbanding lurus dengan luas panen, produksi gabah kering panen, gabah kering giling dan produksi beras.

Produksi Beras sebesar 52.415,24 Ton dikurangi kebutuhan beras untuk pakan ternak, kebutuhan industri dan tercecer sebesar 1.745,43 ton menghasilkan ketersediaan beras sebesar 50.669,81 Ton. Untuk lebih detail dapat dicermati pada tabel 2.39

Tabel 2.39
Produksi Beras Kabupaten Penajam Paser Utara

	PENAJAM	WARU	BABULU	SEPAKU
JAN	376.97	30.25	4.65	23.27
FEB	726.00	141.95	202.45	337.41
MAR	188.49	225.72	9088.55	1128.59
APR	1312.42	821.42	6287.50	746.96
MEI	418.86	81.44	1221.66	530.55
JUN	325.78	2.33	2185.03	0.00
JUL	1128.59	721.36	3174.00	584.07
AGUS	1489.27	921.48	5747.64	1635.87
SEP	1005.26	1168.14	1512.54	1205.38
OKT	46.54	325.78	5044.89	0.00

	PENAJAM	WARU	BABULU	SEPAKU
NOP	307.16	0.00	0.00	0.00
DES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	7325.34	4439.87	34468.91	6192.10

Sumber : Disketapang, 2018

Kebutuhan beras mengacu kebutuhan konsumsi 113 Kg/tahun/kapita. Dari sebaran penduduk di 4 kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.40
Kebutuhan Konsumsi Beras
Kabupaten Penajam Paser Utara (ton)

	PENAJAM	WARU	BABULU	SEPAKU
JAN	747.00	174.00	318.00	329.00
FEB	747.00	174.00	318.00	329.00
MAR	747.00	174.00	318.00	329.00
APR	747.00	174.00	318.00	329.00
MEI	747.00	174.00	318.00	329.00
JUN	747.00	174.00	318.00	329.00
JUL	747.00	174.00	318.00	329.00
AGUS	747.00	174.00	318.00	329.00
SEP	747.00	174.00	318.00	329.00
OKT	747.00	174.00	318.00	329.00
NOP	747.00	174.00	318.00	329.00
DES	747.00	174.00	318.00	329.00
JUMLAH	8964.00	2088.00	3816.00	3948.00

Sumber : Disketapang, 2018

Kebutuhan konsumsi keseluruhan dengan jumlah penduduk tahun 2017 kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 166.554 jiwa kebutuhan beras dalam 1 tahun sebesar 18.821 Ton. Kebutuhan Konsumsi tertinggi terdapat di Kecamatan Penajam.

d. Lingkungan Hidup

Persampahan masih menjadi permasalahan utama yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2017, sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung hanya sekitar 25,52% atau sebanyak 46.546 m³. Memperhatikan dari sisi sebaran penduduk, kapasitas tampungan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat dilihat dari rasio kapasitas TPS terhadap timbulan. Data dimaksud per kecamatan disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Rasio Penduduk per TPS Menurut Kecamatan Tahun 2017
Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Kecamatan	Penduduk	Timbulan sampah (m3/hari)	TPS		Rasio Kapasitas TPS terhadap Timbulan Sampah
				Jumlah	Kapasitas (m3/hari)	
1	Penajam	79,294	238	161	512.5	2.15
2	Waru	18,471	55	8	43	0.78
3	babulu	33,799	101	14	67	0.66
4	sepaku	34,990	105	57	357	3.40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2018

Rasio kapasitas TPS terhadap timbulan di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar 2,15 dan 3,4 hal ini menggambarkan ketersediaan TPS pada kedua kecamatan tersebut sangat mencukupi untuk menampung sampah per hari.

Sedangkan pada kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu, untuk rasio yang sama angkanya kurang dari yang berarti kapasitas TPS masih belum memadai.

Kendala terkait persampahan antara lain terbatasnya truk sampah/armada angkut dan biaya operasional serta cakupan wilayah pelayanan yang terlalu luas/jauh. Disamping itu kesadaran masyarakat untuk memilah dan mereduksi sampah masih rendah serta belum adanya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemberlakuan daur ulang sampah, dll).

Selain persampahan, pembahasan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari penerapan amdal. Terdapat 59 kegiatan usaha yang telah memiliki izin lingkungan, dimana 39 kegiatan usaha memiliki dokumen UKL-UPL, 15 kegiatan dengan dokumen amdal dan 8 dokumen DPLH/DELH.

e. Air Limbah

Kondisi sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada dasarnya berupa pelayanan sanitasi sistem setempat (individual) untuk limbah tinja berupa pengumpulan limbah tinja dari septik tank ke pengolahan akhir. Pada saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dilengkapi 1 (satu) unit mobil layanan sedot tinja di TPA Buluminung, Kecamatan Penajam. Akan tetapi pelayanan mobil sedot tinja tersebut masih terbatas pada fasilitas umum milik pemerintah. Secara umum pengelolaan limbah tinja di Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara individual, sedangkan limbah cair langsung ke saluran drainase/lingkungan.

f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembahasan mengenai kependudukan tidak terlepas dari pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2007 yang mengatur standar rentang waktu proses pengerjaan dokumen kependudukan.

Tabel 2.42
Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan Kabupaten
Penajam Paser Utara

No.	Dokumen Kependudukan	Jangka Waktu Penerbitan
1	KK dan KTP	14 hari kerja
2	Surat keterangan pindah	14 hari kerja
3	Surat keterangan pindah datang	14 hari kerja
4	Surat keterangan pindah keluar negeri	14 hari kerja
5	Surat keterangan datang dari luar negeri	14 hari kerja
6	Surat keterangan Tempat Tinggal Orang Asing	14 hari kerja
7	Surat Keterangan Kelahiran	14 hari kerja
8	Surat Keterangan Lahir Mati	14 hari kerja
9	Surat Keterangan Kematian	03 hari kerja
10	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	07 hari kerja
11	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	07 hari kerja

Sumber: PeraturanDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 17 tahun 2007.

Pelayanan kependudukan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun, dari 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2.43
Data Pelayanan Kependudukan

No	Tahun	Jenis Pelayanan				
		Akta Kelahiran	Akta Perkawinan	Akta Kematian	Akta Perceraian	eKTP
1	2013	11.033	39	130	-	-
2	2014	8.315	58	229	-	-
3	2015	6.193	57	375	-	99.980
4	2016	5.942	84	758	4	703.614
5	2017	6.702	58	1.049	3	109.746

Sumber: Dinas Dukcapil, 2018

- Tahun 2016 telah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya akta kematian sehingga menyebabkan pengurusan akta kematian meningkat ditahun berikutnya.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Lebih daripada itu, pemberdayaan adalah tata kelola pemerintahan yang mampu “mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal dengan memperkuat peran masyarakat”. Titik berat pemberdayaan adalah peran pemerinah dalam memfasilitasi masyarakat alam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga paa akhirnya masyarakat mampu mencari solusi dan mengatasi persoalan dengan caranya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan beberapa elemen terkait diantaranya organsasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan sebagainya.

Lembaga maupun organisasi yang berperan aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terbatas pada organisasi yang memiliki keterkaitan dengan unsur pemerintahan, baik pemerintah kabupaten seperti PKK maupun pemerintah desa seperti BPD. Keterbatasan lembaga ataupun organisasi masyarakat antara lain disebabkan keterbatasan anggaran selama lima taun terakhir dan minimnya keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.

h. Perhubungan

Pelayanan pulik di bidang perhubungan erat kaitannya dengan penyelenggaraan layanan angkutan umum, disamping penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memenuhi standar keamanan. Pada kabupaten Penajam Paser Utara penyediaan layanan angkutan umum masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun dari sisi akses keterjangkauan layanan. Hal ini menjadi pemicu menurunnya jumlah arus penumpang seperti terlihat pada tabel 2.44.

Tabel 2.44
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Tahun 2014-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara

NO.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penumpang Umum	154.965	128.057	195.061	71.835	6.480
2	Jumlah Penumpang Bus	-	7.238	10.512	18.484	3.240
3	Kendaraan Bermotor	32.414	38.097	30.780	31.386	28.542
4	Jumlah Penumpang Speed Boat	190.538	190.538	72.465	170.480	115.521

Sumber: Dinas Perhubungan,Tahun 2018

Jumlah izin trayek yang diterbitkan selama 5 (lima) tahun tidak ada perubahan atau stagnan. Dapat dikatakan peran angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara belum memberikan pelayanan yang signifikan, mengingat luas dan kondisi wilayah serta minimnya jagkauan pelayanan angkutan umum.

Tabel 2.45
Jumlah Izin Trayek terhadap jumlah angkutan

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Izin Trayek perkotaan	12	12	12	12	12
2.	Izin Trayek perdesaan	85	85	85	85	85
Jumlah Izin Trayek		97	97	97	97	97

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Disamping angkutan umum melalui darat, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara juga memanfaatkan angkutan laut/. Terdapat angkutan laut berupa kapal fery, angkutan klotok dan speed boat. Dimana kapal fery melayani arus penumpang dan barang dari pelabuhan penajam ke pelabuhan Balikpapan yang berlokasi di Kariangau, untuk pelayanan angkutan klotok dimiliki

oleh swasta/perorangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan. Lain halnya dengan pelayanan angkutan speed boat yang melayani antar Kabupaten/Kota, dimana terdapat pelabuhan speed boat yang dimiliki pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ada pula yang dimiliki perorangan/swasta kendali demikian, dari sisi kelaikan, fasilitas dermaga speed boat milik pemerintah masih sangat terbatas.

Urusan perhubungan, pelayanan yang juga bersifat prioritas adalah ketersediaan pengujian kendaraan yang memadai.

Tabel 2.46
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Tahun 2014-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara

Angkutan umum	2014	2015	2016	2017	2018
Mobil penumpang umum	330	333	323	310	55
Mobil bus	100	123	112	141	35
Mobil barang	3.977	4.781	4.911	3.725	1.066
Kereta tempelan	2	2	2	2	2
Jumlah	4.409	5.239	5.348	4.178	1.158

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2018

i. Statistik

Namun demikian masih terdapat data detail yang memang tidak tersedia dalam Statistik tetapi tersedia di SKPD terkait. Buku Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka selama periode 2014-2018 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerinahan, kependudukan dan tenaga kerja, pertanian serta industri. Dimana data di SKPD lebih berkaitan dengan tujuan pengambilan kebijakan yang mendesak dan detail.

j. Komunikasi dan Informatika

Dalam penyediaan layanan komunikasi dan informasi, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki beberapa website di antaranya :

- www.bapelitbang.penajamkab.go.id;
- www.bkd.penajamkab.go.id;
- www.disdikpora.penajamkab.go.id, dan lain-lain.

Dengan ketersediaan layanan komunikasi dan informasi, diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi dan perkembangan teknologi antara masyarakat di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat.

Jaringan telepon genggam di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat sebanyak 8 unit dan angka ini tetap sama dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Sementara jaringan telepon stasioner berjumlah 55 dan angka ini pun tidak berubah dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Keberadaan jaringan komunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi di masyarakat, tanpa memperhitungkan ruang dan waktu.

Dengan perbandingan jumlah penduduk sebanyak 166.554 jiwa maka, persentase penduduk dalam penggunaan HP di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 93.38%.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM telah terbukti mampu bertahan terhadap gejolak eksternal. Meskipun kondisi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara sempat mengalami pertumbuhan negatif, namun jumlah koperasi aktif maupun jumlah UMKM tetap menunjukkan tren yang meningkat.

Tabel 2.47
Indikator dan Realisasi UMKM Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2014-2017

No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan Jumlah UMKM	1295	1377	2736	3005
2	Peningkatan Jumlah koperasi	223	237	243	243
3	Peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha	31	34	22	26
4	Pertumbuhan Jumlah IKM	698	719	779	851
5	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru (WUB)	-	80	80	150
6	Pertumbuhan jumlah pedagang	1624	1628	2650	1911
7	Penanganan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	98	117	80	167

Sumber : LKPJ AMJ 2013-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari jumlah koperasi aktif selama lima tahun terakhir didominasi oleh Koperasi Serba Usaha disusul oleh Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pertanian yang banyak didirikan oleh petani padi yang banyak berada di Kecamatan Babulu, Koperasi Simpan Pinjam, kemudian koperasi perkebunan yang banyak didominasi oleh petani sawit dan perusahaan perkebunan, koperasi nelayan yang beranggotakan para nelayan, Koperasi Sekolah dan jenis koperasi lainnya.

Peningkatan UMKM tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 98,69% atau bertambah 1.359 UMKM. Peningkatan tersebut salah satunya dipicu dengan melemahnya perekonomian

khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB (30,56%). Hal ini menimbulkan dampak berupa pengurangan tenaga kerja, dimana umumnya perusahaan memberikan pesangon kepada tenaga kerja tersebut.

Kondisi ini menyebabkan bergesernya struktur perekonomian dengan beralihnya kalangan pekerja menjadi pedagang sehingga jumlah UMKM mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Demikian pula halnya dengan indikator pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM). Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.

Dari sisi Perdagangan, peningkatan jumlah pedagang seiring dengan meningkatnya jumlah pasar desa setiap tahunnya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberadaan pasar desa tersebut merupakan sarana bagi pedagang untuk berjualan dan mendekatkan akses pasar kepada masyarakat. Selain itu perkembangan perdagangan juga terlihat dengan semakin berkembangnya toko modern di Kabupaten Penajam Paser Utara baik retail/eceran maupun grosir.

1. Penanaman Modal

Realisasi PMDN selama 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan dari sisi jumlah, sementara dari nilai investasi terdapat kecenderungan meningkat namun pada 2018 angkanya menurun hampir 50%.

Tabel 2.48
Jumlah Investor, Nilai Investasi, dan Nilai Realisasi PMDN

NO	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Indikator Berskala Nasional	PMA : 7	PMA : 6	PMA : 15	PMA : 20	PMA : 15
		PMDN : 7	PMDN : 5	PMDN : 23	PMDN : 34	PMDN : 36
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	PMA : 23.717.701 US\$	PMA : 11.719.500 US\$	PMA : 18.052.800 US\$	PMA : 8.916.500 US\$	PMA : 989.200 US\$
		PMDN : 356.071.900.000	PMDN : 375.001.000.000	PMDN : 697.635.000.000	PMDN : 771.528.400.000	PMDN : 315.473.800.000
3	Jumlah Dokumen Izin yang Dikeluarkan	148 Izin	548 Izin	399 Izin	325 Izin	789 Izin

Sumber: DPMPTSP, data diolah 2018

m. Kebudayaan

Upaya pemerintah dalam pembinaan kebudayaan dapat dilihat dari ketersediaan ruang berekspresi bagi masyarakat pecinta budaya.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain berupa pembangunan Lou Kuta Adat Paser (Rumah Adat Suku Paser), pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kebudayaan, pembinaan sanggar tari dan pendampingan dalam bentuk lainnya.

Kendati demikian, pembangunan Lou Kuta tersebut maka perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya. Untuk pembinaan kebudayaan, disamping Pemerintah Daerah perlu keterlibatan unsur swasta dan masyarakat.

n. Perpustakaan

Peran perpustakaan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat terbatas mengingat minimnya jumlah perpustakaan yang berada di desa/kelurahan. Di samping itu, Kabupaten Penajam Paser Utara juga belum memiliki gedung perpustakaan.

Tabel 2.49
Jumlah Perpustakaan Binaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Gedung
1.	Desa/Kelurahan	33	1
2.	SD/MI	107	35
3.	SMP/MTs	40	22
Jumlah		180	58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Jenis produksi perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara ada 2 yaitu Perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai produksi ini diperkirakan karena adanya perubahan struktur produksi perikanan tangkap di Penajam.

Produksi perikanan budidaya, sejak tahun 2013 hingga 2018, tercatat fluktuatif. Tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat kenaikan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan, metode penghitungan produksi rumput laut yang tadinya dihitung dalam kondisi kering, menjadi dihitung dalam kondisi basah.

Tabel 2.50
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018

No.	Tahun	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
1	2013	8.045,76
2	2014	2.558,10
3	2015	4.133,45
4	2016	2.445,89
5	2017	13.412,70
6	2018	16.514,40

Sumber : Dinas Perikanan, 2019

Tabel 2.51
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap/Laut
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah	Satuan (Ton)
2013	4.340,3	Ton
2014	4.401,5	Ton
2015	4.463,2	Ton

Tahun	Jumlah	Satuan (Ton)
2016	5.981,20	Ton
2017	6.071,00	Ton
2018	6.162,00	Ton

Sumber : Dinas Perikanan, 2019

2.3.2.2 Pertanian

a. Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam membangun perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara. Dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara setelah sektor pertambangan dan penggalian atau sebesar 20,75% dari total PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Peningkatan produktivitas pertanian akan menjadi penyangga ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Jenis tanaman	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi sawah	5.12	4.97	4.48	2.88	4.07	3.43
2	Padi ladang	2.66	2.67	2.43	2.09	1.69	2.29
3	Palawija	5.77	5.68	5.56	6.28	7.42	8.63

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Terjadi penurunan produksi dan produktivitas tahun 2016 diakibatkan terjadinya kemarau panjang, dimana persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan sistem tadah hujan (tergantung cuaca), selain itu juga disebabkan ketersediaan benih yang tidak tepat waktu. Permasalahan produktivitas pertanian tidak saja bersumber dari ketersediaan lahan secara kuantitas namun juga kualitas. Salah satunya lahan yang degradasi disebabkan menurunnya kualitas tanah, air dan sumber daya alam lainnya.

Tabel 2.53
Produktivitas Pertanian Buah-Buahan
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Jenis Tanaman	Tanaman		Produksi		Produktifitas	
		Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
1	Alpukat	Pohon	1960	Kuintal	3327	Kuintal/Pohon	2.60
2	Anggur	Pohon	-	Kuintal	-	Kuintal/Pohon	-
3	Apel	Pohon	-	Kuintal	-	Kuintal/Pohon	-
4	Belimbing	Pohon	1571	Kuintal	1536	Kuintal/Pohon	0.50
5	Duku/Langsar/Kokos	Pohon	33	Kuintal	30	Kuintal/Pohon	0.86
6	Durian	Pohon	1073	Kuintal	1173	Kuintal/Pohon	1.09
7	Jambu Air	Pohon	726	Kuintal	222	Kuintal/Pohon	23.90
8	Jambu Biji	Pohon	2155	Kuintal	920	Kuintal/Pohon	0.40
9	Jengkrol	Pohon	538	Kuintal	273	Kuintal/Pohon	0.25
10	Jeruk Besar	Pohon	262	Kuintal	199	Kuintal/Pohon	0.70
11	Jeruk Siam/Keprok	Pohon	14329	Kuintal	11366	Kuintal/Pohon	0.80
12	Mangga	Pohon	1486	Kuintal	1295	Kuintal/Pohon	0.80
13	Manggis	Pohon	-	Kuintal	-	Kuintal/Pohon	-
14	Markisa/Konyal	Pohon	-	Kuintal	-	Kuintal/Pohon	-
15	Melinjo	Pohon	1146	Kuintal	397	Kuintal/Pohon	0.10
16	Nangka/Cempedak	Pohon	6837	Kuintal	5176	Kuintal/Pohon	0.30
17	Nenas	Rumpun	12502	Kuintal	824	Kuintal/Rumpun	0.06
18	Pepaya	Pohon	7114	Kuintal	4054	Kuintal/Pohon	0.29
19	Petai	Pohon	533	Kuintal	224	Kuintal/Pohon	0.26
20	Pisang	Rumpun	155010	Kuintal	53831	Kuintal/Rumpun	0.30
21	Rambutan	Pohon	3337	Kuintal	2231	Kuintal/Pohon	2.10
22	Salak	Rumpun	27860	Kuintal	2091	Kuintal/Rumpun	0.07
23	Sawo	Pohon	2564	Kuintal	2265	Kuintal/Pohon	0.60
24	Sirsak	Pohon	563	Kuintal	232	Kuintal/Pohon	0.30
25	Sukun	Pohon	789	Kuintal	620	Kuintal/Pohon	0.60

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Tabel 2.54
Produktivitas Pertanian Palawija
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi	Produktifitas
1	Jagung	1037.90	26.97	2799
2	Kedelai	194.50	12.65	246
3	Kacang Tanah	19.80	8.08	16
4	Kacang Hijau	-	-	-
5	Ubi Kayu	128.10	198.52	2543
6	Ubi Jalar	108.20	114.51	1239

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Tabel 2.55
Produktivitas Pertanian Sayur Mayur
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Jenis Sayuran	Luas Panen	Produksi	Rata-Rata Hasil
1	Bawang Daun	19	661	34.8
2	Bawang Merah	5	264	52.8
3	Bawang Putih	-	-	-
4	Bayam	86	1573	18.3
5	Blewah	-	-	-
6	Buncis	27	979	36.3
7	Cabai Besar	53	3056	57.7
8	Cabai Rawit	191000	7962	41.7
9	Jamur	1850	5580	3
10	Kacang Merah	-	-	-
11	Kacang Panjang	75	7633	101.8
12	Kangkung	85	2311	27.2
13	Kembang Kol	-	-	-
14	Kentang	-	-	-
15	Ketimun	46	14136	307.3
16	Kubis	2	315	157.5
17	Labu Siam	1	90	90
18	Lobak	-	-	-
19	Melon	7	691	98.7
20	Paprika	-	-	-
21	Petsai/Sawi	80	1949	24.4
22	Semangka	54	6226	115.3
23	Stroberi	-	-	-
24	Terung	55	5310	96.5
25	Tomat	75	10015	133.5
26	Wortel	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

b. Peternakan

Perkembangan sektor peternakan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berpeluang untuk dikembangkan kegiatan peternakan.

Komoditas ayam ras masih menjadi komoditas yang banyak diusahakan oleh masyarakat. Sementara sapi memiliki perkembangan populasi yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Berikut data populasi hewan ternak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2.56
Jenis dan Populasi Ternak

No	Tahun	Jenis Ternak					Keterangan
		Sapi	Kambing	Ayam Ras	Ayam Buras	Itik	
1	2014	11,629	4,377	1,769,788	363,807	19,717	jumlah Populasi (ekor)
2	2015	14,299	4,568	1,596,359	372,538	20,277	
3	2016	16,318	4,858	1,642,549	380,479	20,656	
4	2017	16,888	4,749	1,825,000	393,449	20,525	jumlah Populasi (ekor)
5	2018	17,479	4,844	1,879,750	409,252	20,936	

Sumber : Dinas Pertanian, 2018

Sementara itu produksi telur unggas dari tahun 2013 hingga tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Produktivitas Telur Unggas Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Tahun	Jenis Ternak		
		Ayam Ras	Ayam Buras	Itik
1	2013	11,480,800	2,229,508	723,696
2	2014	13,491,974	3,826,277	1,002,486
3	2015	15,293,691	3,911,649	973,296

No	Tahun	Jenis Ternak		
		Ayam Ras	Ayam Buras	Itik
4	2016	17,327,691	4,005,530	1,001,040
5	2017	18,162,739	4,141,717	992,927
6	2018	14,641,365	4,163,208	1,071,744

Sumber : Dinas Pertanian, 2018

Untuk pengembangan mini ranch di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Identifikasi Lokasi Pengembangan Miniranch
di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Lokasi		Jumlah Peternak	Jumlah Kelompok	Luasan (ha)	Sapi (ekor)
	Desa/ Kelurahan	Kecamatan				
1	Buluminung	Penajam	1	1	100	59
2	Petung	Penajam	1	1	3	5
3	Saloloang	Penajam	62	4	129.25	406
4	Tanjung tengah	Penajam	56	6	96.5	252
5	Sesumpu	Penajam	36	4	31.5	187
6	Pejala	Penajam	4	2	10.5	42
7	Siderejo	Penajam	15	0	18	46
8	Riko	Penajam	3	1	18	20
9	Nenang	Penajam	8	1	12.75	30
10	Gunung steleng	Penajam	1	1	1	3
11	Gersik	Penajam	1	1	1	3
12	Gunung mulia	Babulu	1	1	1	6
13	Gunung makmur	Babulu	2	2	7	24
		Jumlah	191	25	429.5	1083

Sumber : Dinas Pertanian, 2018

c. Perkebunan

Produksi sektor perkebunan dalam hal ini adalah perkebunan oleh masyarakat (perkebunan rakyat) dan perkebunan perusahaan baik swasta besar maupun swasta kecil.

Data luas areal komoditi perkebunan rakyat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Luas Areal Komoditi Perkebunan Rakyat

No	Komoditi	Luas Areal Tanaman (Ha)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kelapa sawit	16,659.00	16,880.00	17,007.00	17,131.00	17,234.35	19,272.70
2	Karet	6,676.00	6,784.07	6,874.00	6,889.75	6,770.80	6,670.80
3	Kelapa dalam	4,945.00	4,947.00	4,936.99	4,908.09	4,318.04	4,284.00
4	Lada	1,369.01	1,399.50	1,427.99	1,264.69	1,275.40	1,275.40
5	Kakao	14.98	13.75	13.35	15.90	12.50	10.90
6	Kopi	27.01	24.26	21.50	18.90	15.01	15.00

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Adapun data produktivitas perkebunan rakyat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kelapa sawit	79,351.00	102,160.49	114,345.25	125,975.18	127,965.78	192,337.65
2	Karet	747.00	1,115.70	1,688.86	1,805.68	1,720.95	2,824.69
3	Kelapa dalam	2,601.76	2,732.06	2,741.92	2,171.10	1,855.60	1,877.33
4	Lada	1,028.00	1,090.10	1,195.84	1,306.25	1,266.71	2,160.81
5	Kakao	8.70	7.36	5.24	3.36	2.97	6.43
6	Kopi	11.00	10.70	10.42	7.14	6.14	3.18

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Komoditi kelapa sawit perkebunan rakyat mengalami peningkatan yang pesat baik luas areal tanam dan juga produksinya, sehingga komoditi kelapa sawit merupakan salah satu unggulan tanaman perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

d. Kehutanan

Urusan kehutanan ditangani oleh Provinsi Kaltim, dalam hal ini tugas pokok fungsinya berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim semenjak tahun 2017. Pelaksanaan urusan kehutanan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kewenangan urusan kehutanan di kabupaten hanya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA). Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas TAHURA sebesar 9.472,20 hektar yang berlokasi di kecamatan Sepaku.

2.3.2.3 Pariwisata

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi objek wisata yang sangat banyak khususnya objek wisata alam kawasa pantai dan pegunungan. Wisata pantai berada pada wilayah pesisir Kecamatan Penajam antara lain Pantai Sipakan Nipah-Nipah, Pantai Kelurahan Sesumpu, Pantai dan Ekowisata Mangrove Kampung Baru, Pantai Corong di Kelurahan Tanjung Tengah dan Wisata Gusun di areal Pantai Tanjung Jumlai.

Pada wisata pantai umumnya masih dibutuhkan penanganan akses jalan serta fasilitas pendukung seperti MCK, tempat ibadah (mushola), dan lain-lain. Untuk wisata alam yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain gua, air terjun, pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni.

Namun untuk gua dan air terjun berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan swasta. Sehingga perlu komitmen bersama dengan pihak perusahaan untuk objek wisata tersebut.

2.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan

2.3.3.1 Pengawasan

Urusan pengawasan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait pencegahan pelanggaran internal instansi pemerintah.

Tabel 2.61
Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler 2013 – 2017

Tahun	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler			
	Terselesaikan	Dalam Proses	Belum Selesai	Temuan
2013	165	12	17	150
2014	275	42	7	214
2015	165	44	22	160
2016	772	103	123	429
2017	196	74	79	209

Sumber : Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Dalam hal pencegahan pelanggaran, diperlukan pengendalian internal yang terpadu. Hal ini dimunculkan dalam penilaian maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, yang masuk dalam tugas pengawasan. Dengan dimilikinya maturitas sistem pengendalian yang baik, organisasi akan mempunyai rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan tersebut secara efektif dalam seluruh aktivitasnya. Rangkaian pengawasan tersebut dilaksanakan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi yang terarah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan tanggapan positif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2.3.3.2 Perencanaan

Perencanaan Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sejumlah kajian peraturan perencanaan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah memiliki legalitas hukum dan masih berlaku hingga tahun 2018, di antaranya adalah:

1. Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara (tahun 2005-2025);
2. Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara (tahun 2011-2031);
3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara (tahun 2016-2036).

2.3.3.3 Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, satu diantaranya menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Dimana Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal diperoleh dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

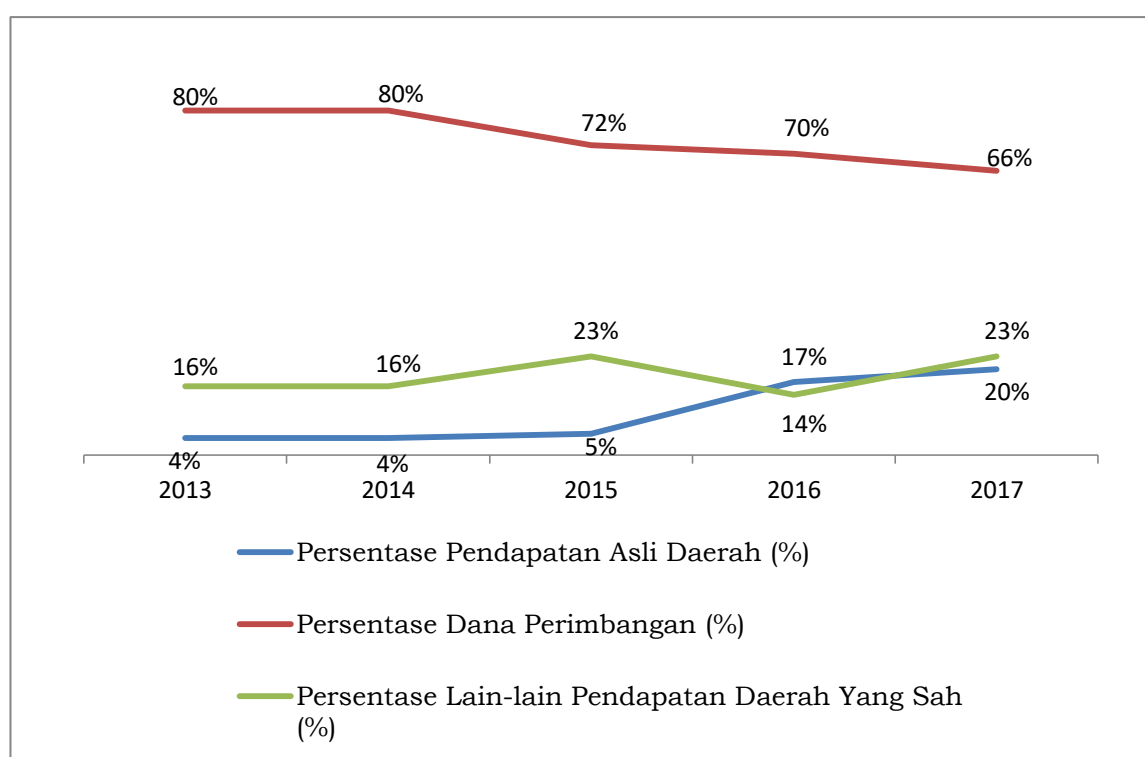
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2013	51.204.182.224,70	1.328.318.638.464,70	3,85	Sangat kurang
2014	57.919.614.222,27	1.336.874.591.787,27	4,33	Sangat kurang
2015	65.567.382.369,11	1.317.257.179.744,80	4,98	Sangat kurang
2016	224.652.811.860,67	1.332.878.403.780,36	16,85	Kurang
2017	103.537.296.662,84	991.971.801.676,84	10,44	Kurang
Rata-rata	100.576.257.467,92	1.261.460.123.090,79	8,05	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa kinerja kemampuan keuangan daerah dalam membiayai desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini menggambarkan bahwa kemandirian pemerintah masih sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerah melalui PAD, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat tergantung pada dana yang diberikan pusat.

Memperhatikan Pendapatan Daerah pada tahun 2013 sampai dengan 2017, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan yakni di kisaran 66% hingga 80%. Data kontribusi sumber Pendapatan Daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.27
Kontribusi Pendapatan Daerah



Sumber: Ringkasan laporan Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Th.2013-2017 Kabupaten Penajam Paser Utara

Tingginya kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah sangat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini mengakibatkan bilamana pusat mengalami penurunan pendapatan maka akan berimbas pada berkurangnya pendapatan daerah. Seperti yang dialami Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015 sampai tahun 2017.

Untuk itu, agar peristiwa serupa tidak berulang ke depannya, maka perlu upaya penggalan sumber-sumber potensi PAD pada sektor non migas.

2.3.3.4 Kepegawaian

Reformasi Birokrasi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas para pegawai di lingkungan pemerintahan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam hal reformasi birokrasi di bidang kepegawaian ini yaitu agar terpenuhinya pelayanan oleh

pegawai yang berkualitas dan professional. Urusan Kepegawaian Daerah tahun 2014-2018 diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan.

Berikut data indikator capaian pelaksanaan program bidang kepegawaian dan jumlah pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2.63
Indikator Capaian Pelaksanaan Program Bidang Kepegawaian

No	Uraian Capaian Indikator	Satuan	Realisasi (s/d 2018 tw I)
1	Proses Kenaikan Pangkat	Orang	1.275
2	Proses Satyalencana Karya Satya	Berkas	345
3	Penetapan Angka Kredit PNS bagi jabatan fungsional (tenaga penyuluh, bidan dan perawat)	Berkas	295
4	Proses Karis/Karsu dan Karpeg	Proses Usulan	305
5	Assesmen Pegawai	Orang	54
6	Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Orang	210
7	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Orang	10

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2018

Tabel 2.64
Jumlah Pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PNS Struktural (Pejabat Ess dan Staf)	1804	1900	2000	1533	1499
2	PNS Fungsional	1971	2054	2044	2090	2064
3	Non PNS	Tidak ada Data disetor ke BKPP			1909	2195
4	Jumlah PNS	3775	3954	4044	3623	3563
5	Jumlah Non PNS	Tidak ada Data disetor ke BKPP			1909	2195

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2018

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2014-2017 pada masing-masing indikator disajikan pada tabel 2.65.

Tabel 2.65
Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri

No	Indikator	Satuan	T A H U N			
			2014	2015	2016	2017
1	Penurunan Jml pelanggaran Perda	Kegiatan	7	4	10	2
2	Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan (%)	Kegiatan	100	100	100	100

Sumber: Laporan AMJ Bupati, 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi penurunan jumlah pelanggaran Perda mengalami naik turun selama 4 tahun terakhir. Naik turunnya ini terjadi karena faktor tidak diimbangnya ketersediaan sarana dan prasarana personil/SDM serta belum terpetakannya daerah rawan konflik dan rawan gangguan ketertiban dan keamanan.

2.4 Daya Saing Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam (*natural resources*) melimpah seperti mineral & batubara, minyak bumi & gas, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografi yang berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan, dimana menjadi jalur penghubung antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, sebagai kota yang berdimensi Jasa dan Industri serta sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara dan laut serta dibidang informasi dan teknologi, yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal aksesibilitas informasi dan transportasi.

Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicermati dari kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek ke dua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Penajam Paser Utara menunjukkan tanda semakin membaik, terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif.

Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB PPU (ADHB) selama periode 2013-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2013, PDRB PPU (ADHB) sebesar Rp 6,98 triliun dan mencapai Rp 8,45 triliun pada tahun 2017.

Meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya daya beli. Hal ini akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) mendorong kenaikan belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013, setiap rumah tangga di PPU menghabiskan dana sekitar 68,56 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi berupa makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga menjadi 84,40 juta rupiah pada tahun 2017. Sementara itu, rata-rata konsumsi rumah tangga menurut ADHK 2010 per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2,64 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,49 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Penajam Paser Utara meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga. Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 9,07 persen pada tahun 2013.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung melambat dan pada tahun 2017 menjadi 2,16 persen. Seiring melambatnya pertumbuhan total konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi per kapita juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2013 pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita mencapai 7,50 persen, dan pada tahun 2017 pertumbuhannya hanya sebesar 1,05 persen.

Berdasarkan keterangan di atas nampak bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga secara “*riil*” lebih tinggi daripada peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Perhubungan

Berdasarkan RTRW Nasional, Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Kawasan Andalan dari Kawasan Bontang – Samarinda – Tenggarong, Balikpapan - Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam), dengan sektor unggulan berupa industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pariwisata. Dengan masuknya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kawasan Andalan, maka Sistem transportasi yang lancar dan nyaman adalah yang terpenting demi memperlancar arus penumpang, barang dan jasa. Sistem transportasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan baik melalui darat maupun laut/perairan. Untuk transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kota Balikpapan.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi darat dan memiliki peran penting dalam mobilitas antar 54 desa/kelurahan, 4 kecamatan, antar 3 Kabupaten serta Kota bahkan lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun jalan sepanjang 1.240,96 km. Pemerintahan di tingkat Desa juga memberikan andil dalam membuka aksesibilitas antar Desa, dalam

hal ini UPT PU sebagai garda terdepan dalam mempercepat pelayanan infrastruktur di tingkat pedesaan/kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan.

Pada tahun 2017, kendaraan sepeda motor di Kalimantan Timur berjumlah sekitar 32.006 unit meningkat sekitar 0,19 persen dari tahun sebelumnya. Mobil penumpang, truk dan bus juga mengalami peningkatan walaupun tidak sebanyak pada kendaraan sepeda motor. Berdasarkan rasio jalan dengan jumlah kendaraan maka didapat hasil rata-rata setiap 300 meter melintas 1 kendaraan. Kondisi tersebut belum menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan yang ramai lalu lintas (jalan poros Penajam – Babulu, dan simpang silkar Petung- Sotek – Sepaku).

Rel Kereta Api juga akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat 2 jalur kereta api yakni pertama yang dibangun pihak swasta yaitu kereta api borneo (dibangun oleh Russian railways), yang kedua dibangun oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perkeretapian. Kereta api yang digunakan untuk barang dan penumpang. Untuk jalur kereta api borneo melalui kawasan industri Buluminung menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Sedangkan jalur kereta api yang dibangun oleh kementerian perhubungan dari Kabupaten Kutai Timur, melalui Penajam menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan kota Balikpapan dipisahkan teluk. Pembangunan jembatan Pulau Balang, rencana pembangunan jembatan Nipah-Nipah – Melawai merupakan salah satu cara menghubungkan antar wilayah yang dipisahkan oleh teluk. Saat ini transportasi laut menuju dari dan ke Kota Balikpapan dilakukan dengan menaiki Fery, Speed boat dan perahu kelotok. Jumlah penumpang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penumpang yang melalui dermaga speed dan kelotok maka kebutuhan pelayanan penyeberangan sangat perlu ditingkatkan seiring kemajuan teknologi konstruksi guna

memperpendek waktu tempuh berupa pembangunan jembatan penyeberangan antar kabupaten.

2. Penataan Ruang

Berdasarkan identifikasi kondisi lahan yang ada, Penajam Paser Utara memiliki kawasan produktif yang masih sangat luas untuk dikembangkan. Dari luas kawasan budidaya yang meliputi 288.623 Ha, baru 12,03% yang dimanfaatkan (Pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030). Luas wilayah industri berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030 adalah seluas 842 Ha, sedangkan luas budi daya adalah seluas 288.621 ha. Jadi rasio luas wilayah industri per luas budidaya adalah sebesar 0,29 %. Dari rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa luasan kawasan industri hanya seluas 0,29 % dari luas total seluruh budi daya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas \pm 8.400 Ha. Wilayah yang rawan banjir pada umumnya berada di wilayah pesisir Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku serta Kelurahan Bukit Subur sedangkan lahan yang rawan gerakan tanah yaitu di sekitar Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Bukit Raya (sumber : Review RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara). Di sisi lain, Luas lahan kering tanaman pangan yang terdapat dalam pola ruang RTRW sebesar 22.285 Ha. Sedangkan, luas wilayah perkotaan berdasarkan pola ruang RTRW adalah seluas 7.359 Ha, sehingga rasionya sebesar 2,55 %.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka menarik minat investasi, Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perbaikan, pembenahan sarana dan prasarana baik berupa penyiapan kawasan seperti penetapan kawasan industri buluminung maupun kelengkapan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur serta kebijakan. Infrastruktur dimaksud diantaranya akses jalan yang memadai, kesediaan air baku untuk air bersih, dan energi listrik. Supra struktur merupakan

variable keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan kebijakan dilakukan untuk untuk memperbaiki iklim penanaman modal berupa pelayanan terpadu satu pintu.

Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan jenis permukaan tahun 2018, bahwa total jalan yang masuk kondisi mantap sebesar 43 persen lebih. Dengan kondisi akses dengan tingkat kemantapan tersebut maka, perlu peningkatan kondisi jalan sebagai salah satu penarik investor untuk masuk mengembangkan usaha yang mengolah banyak potensi salah satunya potensi perkebunan. Selanjutnya ketersediaan bendung Lawe-Lawe yang diharapkan rampung tahun ini, mampu menyuplai kebutuhan air bersih wilayah penajam dan sekitarnya serta menyuplai kawasan industri Buluminung kedepannya. Surplus energi listrik melalui sambungan barito dan sambungan Mahakam diharapkan mampu menarik investor masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Iklim investasi yang kondusif didukung dengan faktor keamanan dan ketertiban umum.

Kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan kondusif. Dimana tidak pernah terjadi konflik horisontal selama Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2018.

Banyaknya aksi demonstrasi selama 5 tahun terakhir bila diambil rata-rata per tahunnya berkisar 2 aksi yang umum terjadi dengan pengerahan massa yang tidak terlalu banyak. Aksi demonstrasi yang terjadi adalah pada saat hari buruh menuntut upah minimum kerja (UMK) dan aksi masyarakat yang menuntut ganti rugi. Demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini di Kabupaten Penajam Paser Utara relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Terkait kebijakan pelayanan publik secara prima, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meluncurkan pelayan

administrasi terpadu kecamatan (paten) pada tahun 2015. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik terus diciptakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk

penghitungan rasio tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara adalah berdasarkan data pada tahun 2017, dimana Jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.934 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 157.711, sehingga diperoleh Rasio Lulusan sebesar 254,64 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 122 orang yang berpendidikan S1/S2/S3.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting, dimana semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan demikian, semakin besar beban yang ditanggung, maka semakin kecil peluang menyisihkan pendapatan.

Tabel 2.66
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara

URAIAN	TAHUN	
	2017	2018
Jumlah Penduduk Usia <15 thn + Usia > 64	53.312	49.533
Jumlah Penduduk 15 s/d 64	104.399	119.895
Rasio Ketergantungan	0,511	0,413

Sumber: Dukcapil dan Bapelitbang, data diolah

Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2018 mengalami penurunan nilai Rasio yang artinya mengalami pengurangan beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2018, dengan nilai Rasio Ketergantungan sebesar 41,3 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang (dianggap belum dan tidak produktif).

3. Rencana Pengembangan Kawasan

Rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu 2014 - 2018 diarahkan kepada pengembangan wilayah pesisir, namun juga tidak mengesampingkan pengembangan pada wilayah-wilayah lainnya.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang termasuk paling banyak ditinggali manusia. Wilayah ini pula yang umumnya merupakan wilayah yang pertama dikembangkan. Hal ini disebabkan potensinya dalam berbagai aspek, termasuk ketersediaan sumber daya air, kekayaan alam, ekosistem yang melimpah (merupakan habitat dari ratusan bahkan ribuan spesies), letak geografis yang strategis sebagai jalur lalu lintas perairan, fungsi ekologis sebagai penahan (*buffer*) ombak dari laut, dan lain-lain.

Alternatif pengelolaan wilayah pesisir yang dikembangkan, salah satunya adalah konsep penataan & pengembangan wilayah dengan pendekatan *water front city*, yaitu perencanaan dan pengelolaan kota pesisir yang mengedepankan fungsi air sebagai sumber daya utama sekaligus daya tarik wisata bagi pengembangan kota tersebut. Sumber daya air (dalam hal ini perairan pesisir – pantai dan estuari) dijadikan titik sentral pengembangan aspek-aspek lain dalam pembangunan, seperti kegiatan ekonomi, industri, aktivitas sosial, arsitektur kota, pariwisata, dan lain-lain.

Pembangunan kota-kota pesisir dengan konsep penataan & pengembangan wilayah dengan pendekatan *water front city* ini berpijak pada paradigma dan cara pandang yang baru terhadap sumber daya air, yaitu sebagai sumber daya primer untuk pengembangan sebuah kawasan. Dengan cara pandang yang baru ini konservasi sumber daya air menjadi kepentingan semua pihak di kawasan tersebut.

Konsep pengembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dijabarkan kedalam 4 Zona yaitu :

1. **Zona SATU** adalah wilayah sepanjang jalur teluk balikpapan yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku yaitu sepanjang Mentawir, Semoi-Sepaku dan wilayah Maridan (ITCI). Kawasan ini merupakan wilayah yang dikhususkan untuk perkembangan kegiatan industri perkayuan, perkebunan kelapa sawit (beserta produk turunannya), peternakan, dan sebagian berfungsi sebagai pelabuhan batubara, secara fungsi merupakan masuk zona “*working waterfront*”.
2. **Zona KEDUA** adalah zona Industri, pelabuhan dan penelitian meliputi wilayah sepanjang teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kelurahan Buluminung, Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan sekitarnya. Akses penghubung yang digunakan adalah Jembatan Pulau Balang. Investasi yang telah masuk antara lain adalah pelabuhan CPO Astra, Supply Base Eiscal, Pelabuhan

Pemda, Pelabuhan atau Terminal Khusus Batubara PT. Penajam Prima Coal, PT. BMS, PT. Cipaganti Resources dan Perusda Benuo Taka. Investasi yang akan masuk antara lain : Pabrik Ethanol , Smelter Nikel, dan Pusat Penelitian Kelautan BPPT.

3. **Zona KETIGA** adalah gabungan antara:

- a) *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, pendidikan dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
- b) *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan *waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
- c) *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan. Lokasinya adalah sepanjang jalur *coastal road* yang berada di wilayah Nipah-nipah, Parit, hingga wilayah pelabuhan penyeberangan ferry. Bahkan dalam perencanaan ke depan akan diperluas hingga ke Pantai Tanjung Jumalai. Penghubung yang direncanakan adalah Jembatan PPU – Balikpapan, Jalur Nipah nipah – Melawai, menghubungkan dua *Coastal Road* antar dua wilayah.

4. **Zona EMPAT** adalah zona yang meliputi wilayah pesisir pantai yang langsung menghadap dengan Selat Makassar, wilayah tersebut meliputi Kecamatan Babulu dan Waru yang secara khusus akan menjadi pengembangan sektor budidaya perikanan dan sejenisnya, termasuk juga akan dikembangkan sebagai sentral pertanian yang diharapkan akan jadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun di masa lalu.

3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow program* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan undang-undang tersebut, bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sub bab berikut menguraikan mengenai pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

3. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertum buhan (%)
PENDAPATAN	1.328.318.638.464,70	1.336.874.591.787,27	1.276.706.291.344,11	1.338.434.761.879,67	991.971.801.676,84	(6,23)
Pendapatan Asli Daerah	51.204.182.224,70	57.919.614.222,27	65.567.382.369,11	224.652.811.860,67	103.537.296.662,84	53,76
Hasil Pajak Daerah	5.693.858.766,30	9.179.662.866,39	14.921.554.610,07	168.047.799.861,33	21.452.726.597,88	265,69
Hasil Retribusi Daerah	3.104.788.785,95	2.927.826.891,35	2.854.377.002,28	7.708.979.248,60	6.967.701.711,50	38,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.048.635.160,75	5.261.236.063,84	3.920.303.033,26	3.323.618.808,88	4.957.163.549,44	(1,14)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.356.899.511,70	40.550.888.400,69	43.871.147.723,50	45.572.413.941,86	70.159.704.804,02	19,39
Dana Perimbangan	1.066.500.255.872,00	1.062.910.530.365,00	915.114.469.925,00	933.077.032.470,00	655.451.904.284,00	(10,51)
Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	870.544.568.872,00	872.534.744.365,00	770.781.663.925,00	617.922.529.470,00	308.927.397.744,00	(20,32)
Dana Alokasi Umum	194.579.185.000,00	188.713.598.000,00	138.285.466.000,00	254.752.550.000,00	255.066.428.000,00	13,65
Dana Alokasi Khusus	1.376.502.000,00	1.662.188.000,00	6.047.340.000,00	60.401.953.000,00	44.613.032.600,00	289,31
Dana Alokasi Khusus Non Fisik					46.845.045.940,00	-
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	210.614.200.368,00	216.044.447.200,00	296.024.439.050,00	180.704.917.549,00	232.982.600.730,00	7,39
Pendapatan Hibah	81.170.568,00	-	-	-	20.498.000.000,00	-
Dana Darurat		-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	106.585.514.800,00	96.379.621.200,00	144.444.315.050,00	76.384.782.000,00	95.844.224.000,00	4,66
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	34.480.615.000,00	40.920.526.000,00	60.197.010.000,00	57.146.378.299,00	71.251.936.000,00	21,35
Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	69.466.900.000,00	78.744.300.000,00	91.383.114.000,00	47.173.757.250,00	45.388.440.730,00	(5,69)

Pendapatan Daerah selama tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami rata-rata pertumbuhan negatif yakni sebesar -6,23%, dimana Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan negatif dimaksud dengan dibukukannya rata-rata pertumbuhan negatif di angka -10,51%. Kendati demikian, penurunan tersebut diimbangi dengan dukungan kinerja positif yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencatatkan kenaikan pada angka rata-rata pertumbuhan sebesar 53,76% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 7,39%.

Tingginya kinerja PAD ditopang dari Hasil Pajak Daerah yang pada tahun 2016 membukukan pendapatan sebesar Rp. 168.047.799.248,60, yang bersumber dari penerimaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PT. Pertamina senilai Rp. 150.000.000.000,-. Namun peningkatan tersebut bersifat tentatif, dimana di tahun berikutnya realisasi pendapatan dari Hasil Pajak Daerah turun drastis menjadi Rp. 21.452.726.597,88.

Berdasarkan struktur penerimaan Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan masih mendominasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama 2013 sampai dengan 2017 di kisaran 66,08% sampai 80,29%. Disusul Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah yang berkisar di angka 13,5% sampai 23,49%. Selanjutnya PAD membukukan penerimaan di kisaran angka 3,85% sampai 16,78% terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.2
Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017
(%)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	3,85	4,33	5,14	16,78	10,44
Hasil Pajak Daerah	11,12	15,85	22,76	74,80	20,72
Hasil Retribusi Daerah	6,06	5,05	4,35	3,43	6,73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,81	9,08	5,98	1,48	4,79
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	71,00	70,01	66,91	20,29	67,76
Dana Perimbangan	80,29	79,51	71,68	69,71	66,08
Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	81,63	82,09	84,23	66,22	47,13
Dana Alokasi Umum	18,24	17,75	15,11	27,30	38,91
Dana Alokasi Khusus	0,13	0,16	0,66	6,47	6,81
Dana Alokasi Khusus Non Fisik					7,15
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15,86	16,16	23,19	13,50	23,49
Pendapatan Hibah					

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	0,04	-	-	-	8,80
Dana Darurat		-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	50,61	44,61	48,79	42,27	41,14
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	16,37	18,94	20,34	31,62	30,58
Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	32,98	36,45	30,87	26,11	19,48

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Meskipun memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menggunakan Dana Perimbangan sebagai penyangga utama dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan Dana Perimbangan merupakan kebijakan pemerintah pusat, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu lebih proaktif dalam mengoptimalkan PAD yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Peningkatan PAD dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam jangka pendek, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui intensifikasi dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD. Sedangkan pada jangka menengah atau panjang dapat dilakukan ekstensifikasi dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian yang serius adalah menggali potensi pajak dan retribusi dari sektor pertanahan yang sangat potensial bagi daerah, berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana upaya ini sedang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga diharapkan terdapat peningkatan terhadap pajak dan retribusi daerah di tahun-tahun mendatang.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

provinsi atau Kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran;
- b. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- c. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan
- d. Analisis proyeksi belanja daerah.

Berikut digambarkan Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017 pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
BELANJA					
Belanja Tidak Langsung	409.903.838.527,00	478.524.613.634,00	554.265.176.488,00	546.330.518.626,40	447.443.180.758,00
Belanja Pegawai	317.785.917.253,00	381.769.085.755,00	426.442.547.656,00	437.176.215.086,00	330.500.892.180,00
Belanja Bunga		-	-	-	-

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Subsidi		-	-	-	-
Belanja Hibah	41.664.596.000,00	39.328.404.928,00	26.119.701.768,00	14.701.289.966,40	36.877.854.934,00
Belanja Bantuan Sosial	597.000.000,00	1.611.000.000,00	482.000.000,00	-	-
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten /kota Dan Pemerintahan Desa		-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten / kota Dan Pemerintahan Desa	49.856.325.274,00	55.481.203.602,00	101.198.747.064,00	93.862.013.574,00	79.674.433.644,00
Belanja Tidak Terduga	-	334.919.349,00	22.180.000,00	591.000.000,00	390.000.000,00
Belanja Langsung	984.230.205.130,32	965.277.745.903,00	837.310.427.670,00	760.891.447.407,48	564.874.684.615,76
Belanja Pegawai	93.796.231.175,00	109.559.684.936,00	110.976.513.831,00	103.589.994.796,00	93.229.565.686,00
Belanja Barang Dan Jasa	240.589.949.011,32	293.638.128.864,00	276.340.644.807,00	249.310.802.581,00	211.719.037.838,76
Belanja Modal	649.844.024.944,00	562.079.932.103,00	449.993.269.032,00	407.990.650.030,48	259.926.081.091,00

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2016 namun menurun pada tahun 2017. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan berkurangnya Belanja Pegawai, dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 317.785.917.253,00 dan terus mengalami peningkatan hingga 2016 di angka Rp. 437.176.215.086,00, namun kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp. 330.500.892.180,00. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan penurunan nilai Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai sebesar 25%. Sebaliknya, Belanja Hibah mengalami penurunan sejak tahun 2013 hingga 2016, dan meningkat di 2017. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial tercatat cukup fluktuatif dan hanya dianggarkan pada tahun 2013 sampai dengan 2015.

Sementara Belanja Langsung membukukan angka yang bervariasi, baik dari pos Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, maupun Belanja Modal. Namun ketiga komponen belanja tersebut memiliki satu kesamaan, yakni mengalami penurunan di tahun 2017. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan daerah yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurunnya proporsi belanja modal berakibat pada rendahnya belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana

dan prasarana bagi pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan perekonomian di masyarakat. Guna meminimalisir dampak penurunan pendapatan daerah, pada akhir tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pinjaman dana kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Adapun pinjaman tersebut dipergunakan untuk membiayai pembangunan proyek strategis daerah yang dapat menunjang peningkatan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam pengalokasian anggaran, pada pos Belanja langsung, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap memprioritaskan belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan infrastruktur pembangunan guna pemenuhan layanan publik dan penggerakan roda ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari komposisi Belanja Modal yang mendapatkan alokasi terbesar dibandingkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2013-2017 Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

Uraian	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
BELANJA				
Belanja Tidak Langsung	16,74	15,83	-1,43	-18,10
Belanja Langsung	-1,93	-13,26	-9,13	-25,76

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Tabel diatas memperlihatkan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang menunjukkan pertumbuhan negatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja tidak langsung paling tinggi berada pada tahun anggaran 2013-2014 yang mencapai angka 16,74%.

Berikut secara rinci ditunjukkan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pada pos belanja pegawai di sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Belanja Aparatur Daerah Tahun 2014-2017
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

No	Uraian	2014-2015	2015-2016	2016-2017
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Gaji dan tunjangan	8,91%	7,06%	-8,60%
2	Belanja Tambahan Penghasilan	49,49%	-4,51%	-40,56%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	-2,03%	-20,76%	43,23%
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	-80,69%	-99,04%	-100,00%
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Honorarium PNS	-13,56%	-13,48%	-35,95%
2	Belanja Uang Lembur	14,61%	-37,06%	29,76%
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-35,39%	-54,12%	-11,60%
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-24,33%	-67,43%	-0,13%
5	Belanja Premi Asusransi Kesehatan	-100,00%		344,42%
6	Belanja Makanan dan Minuman pegawai	2,91%	-24,79%	-8,17%
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	-16,12%	-42,83%	-47,17%
8	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	4,25%	-24,79%	-24,42%
9	Belanja perjalanan Dinas	-34,42%	-11,31%	-8,59%
10	Belanja perjalanan Pindah Tugas		-100,00%	
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)	-19,94%	-9,33%	-36,29%

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Pertumbuhan belanja aparatur tidak jauh berbeda dengan belanja lainnya. Hampir pada semua belanja mengalami kondisi terjun bebas. Kondisi keuangan daerah menyebabkan daerah harus meminimalkan belanja-belanja yang dianggap belum prioritas sehingga dengan anggaran yang ada tetap dapat membiayai program kegiatan prioritas daerah. Tabel 3.5 menunjukkan di sektor belanja tidak langsung terjadi peningkatan belanja tambahan penghasilan pada tahun 2015 sebesar 49,49% namun kembali turun pada tahun berikutnya. Kemudian pada sektor belanja langsung belanja honorarium PNS dan Uang Lembur mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dimana kegiatan yang memang menyangkut tugas pokok dan fungsi yang melekat pada organisasi perangkat daerah baik secara organisasi maupun jabatan, tidak perlu diberikan alokasi anggaran honorarium. Begitu juga dengan

uang lembur, diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga mengurangi tingkat lembur. Belanja beasiswa pendidikan PNS juga terus mengalami penurunan, dimana PNS tetap diberi kesempatan melanjutkan pendidikan namun dengan biaya sendiri melalui Izin Belajar yang diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara, sedangkan untuk tugas belajar diharapkan dapat memanfaatkan beasiswa yang dibuka oleh kementerian melalui APBN. Belanja kursus atau pelatihan juga dikurangi kecuali yang dianggap sangat mendesak. Belanja Premi Asuransi Kesehatan nilainya meningkat yaitu untuk asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja bagi Aparatur Sipil Negara. Belanja pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu bagi ASN ditiadakan sejak tahun 2016 terkecuali bagi kepala daerah dan anggota DPRD. Anggaran perjalanan dinas juga nilainya terus menurun. Diharapkan perjalanan dinas hanya benar-benar diperuntukkan bagi kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak, serta dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan kebutuhan urusan perjalanan dinas.

Belanja modal juga mengalami penurunan drastis sehingga pada hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi dan pemanfaatan barang semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi pengadaan barang baru seperti komputer, printer, kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4, meubelair kantor dan lain sebagainya. Bahkan yang dibiayai dari APBD hanya untuk belanja STNK dan jasa KIR. Sedangkan untuk perbaikan kendaraan dan belanja BBM hanya diberikan bagi kendaraan dinas Kepala OPD. Semua upaya ditempuh guna terciptanya efisiensi pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum, Belanja Aparatur Daerah Tahun 2014-2017 Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan yang negatif atau menurun.

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Penajam Paser Utara

No .	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2015	1.000.234.069.517,00	1.734.636.445.694,00	57,66
2	Tahun anggaran 2016	938.408.774.064,00	1.451.460.330.194,00	64,65
3	Tahun anggaran 2017	674.520.336.637,00	1.625.979.255.466,00	41,48

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Secara proporsi terhadap total pengeluaran, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2015 sampai dengan 2017 berfluktuasi dikisaran 40% hingga 64% lebih. Hal ini menunjukkan kemampuan pengeluaran pemerintah untuk masyarakat masih terbatas. Guna meningkatkan anggaran belanja ke masyarakat, selain melakukan efisiensi belanja aparatur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga perlu mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah; yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama dua tahun berturut-turut berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahun-tahun sebelumnya hal ini masih sulit diraih yang disebabkan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya permasalahan yang menjadi penghambat. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah penyajian aset daerah yang belum tepat.

Tabel 3.7
Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	262,562,619,757.73	142,241,332,767.32	9,647,558,093.17	38,076,440,799.69	10,285,587.20	13.91
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,277,409,356.00	5,507,564,561.00	814,223,731.00	88,367,337.68	70,603,541.00	(13.16)
Kas di Bendahara Penerimaan	222,620,003.56				42,100.00	(25.00)
Kas di Bendahara Dana Kapitasi		971,514,041.00				(25.00)
Kas di BLUD	3,222,136,684.12	7,957,991,350.80	11,664,702,028.06	13,621,113,730.65	21,619,026,912.67	67.26
Kas Pengelola Dana Alsintan			2,475,575,488.00	6,661,902,358.03	8,423,783,195.72	48.89
Kas pengelola Dana UKM						-
Investasi Jangka Pendek						-
Piutang Pajak	88,717,611.00	897,353,879.20	6,401,970,874.08	7,257,231,087.07	7,715,220,479.85	386.14
Piutang Retribusi	33,899,401.79	267,970,163.47	186,456,743.23	555,515,385.79	275,760,792.79	201.91
Piutang Transfer-Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	42,366,108,250.00					(25.00)
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara						-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah						-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat						-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya						-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran						-
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan						-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi						-

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Piutang BLUD	1,915,897,350.34	1,471,520,109.00				(30.80)
Piutang Lainnya		223,120,600.00	26,505,425,118.95	18,689,361,282.64	74,864,296,088.09	3,012.62
Persediaan	9,557,169,475.22	14,169,572,784.84	8,539,097,662.52	12,639,616,442.11	9,371,616,269.24	7.67
Belanja Dibayar dimuka	4,558,345,745.01	198,252,605.63		916,585,500.00		(73.91)
A Jumlah Aset Lancar	326,804,923,634.77	173,906,192,862.26	66,235,009,739.01	98,506,133,923.66	122,350,634,966.56	(8.94)
						-
INVESTASI JANGKA PANJANG						-
INVESTASI NON PERMANEN						-
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara						-
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah						-
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya						-
Investasi Dalam Surat Utang Negara						-
Investasi dalam Proyek Pembangunan						-
Investasi Non Permanen Lainnya	9,948,041,894.00	9,759,332,046.30	8,539,097,662.52	8,108,948,447.87	6,913,890,014.10	(8.54)
B Jumlah Investasi Non Permanen	9,948,041,894.00	9,759,332,046.30	8,539,097,662.52	8,108,948,447.87	6,913,890,014.10	(8.54)
						-
INVESTASI PERMANEN						-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	75,609,099,699.13	78,915,844,582.87	95,969,231,922.53	93,753,946,601.75	97,200,903,213.70	6.84
Investasi Permanen Lainnya						-
C Jumlah Investasi Permanen	75,609,099,699.13	78,915,844,582.87	95,969,231,922.53	93,753,946,601.75	97,200,903,213.70	6.84
D Jumlah investasi Jangka Panjang (B+C)	85,557,141,593.13	88,675,176,629.17	104,508,329,585.05	101,862,895,049.62	104,114,793,227.80	5.29
						-
ASET TETAP						-
Tanah	423,203,641,436.00	447,899,072,079.00	444,740,237,908.00	540,299,862,652.45	566,178,937,470.45	7.85
Peralatan dan Mesin	486,776,094,178.86	683,036,727,916.42	750,314,699,516.29	743,014,464,488.84	765,834,663,574.30	13.07
Gedung dan Bangunan	705,655,980,390.13	829,282,629,394.28	923,472,606,976.31	1,280,706,474,671.63	1,413,488,845,784.57	19.48

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,470,084,510,539.04	1,608,978,108,772.70	1,698,003,434,178.70	2,011,839,182,540.08	2,352,331,785,490.59	12.60
Aset Tetap Lainnya	35,906,357,196.00	35,810,746,817.17	38,542,020,050.87	43,416,620,786.20	46,780,886,563.20	6.94
Konstruksi Dalam Pengerjaan	687,202,249,805.96	785,893,253,571.35	1,023,362,642,683.35	626,518,819,005.00	714,462,875,461.00	4.96
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	(1,498,561,236,656.34)	(1,836,724,416,212.94)	(2,080,512,378,875.44)	8.96
E Jumlah Aset Tetap	3,808,828,833,545.99	4,390,900,538,550.92	3,379,874,404,657.18	3,409,071,007,931.26	3,778,565,615,468.67	0.99
						-
DANA CADANGAN						-
Dana Cadangan						-
F Jumlah Dana Cadangan						-
						-
ASET LAINNYA						-
Tagihan Penjualan Angsuran						-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan						-
Tagihan Tuntutan Tuntutan Ganti Rugi						-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga						-
Aset Tak Berwujud	62,189,367,671.37	75,169,111,917.13	77,374,710,717.13	18,983,882,548.25	7,676,859,487.87	(27.81)
Aset Lain-lain	6,349,926,531.12	20,739,350,125.86	45,959,380,060.61	41,771,908,545.33	39,829,542,131.32	83.61
G Jumlah Aset Lainnya	68,539,294,202.49	95,908,462,042.99	123,334,090,777.74	60,755,791,093.58	47,506,401,619.19	(1.00)
H Jumlah Aset (A+D+E+F+G)	4,289,730,192,976.38	4,749,390,370,085.34	3,673,951,834,758.98	3,670,195,827,998.12	4,052,537,445,282.22	(0.40)
						-
KEWAJIBAN						-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						-
Utang kepada Pihak Ketiga (FPK)	106,667,444.00	213,879,116.00		36,667,507.00	40,324,092.00	2.62
Utang BLUD	2,803,548,928.00	3,143,481,992.12		6,003,886,898.00	11,182,170,000.00	(0.41)
Utang Bunga						-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						-

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			77,374,710,717.13			(25.00)
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi						-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya			77,374,710,717.13			(25.00)
Utang Belanja				26,720,018,990.53	443,408,364,333.53	389.87
Utang Jangka Pendek Lainnya	7,825,339,303.01	8,129,944,853.01	45,959,380,060.61		70,213,243,111.00	92.30
I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10,735,555,675.01	11,487,305,961.13	123,334,090,777.74	32,760,573,395.53	524,844,101,536.53	602.32
						-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						-
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						-
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank						-
Utang Dalam Negeri - Obligasi						-
Utang Jangka Panjang Lainnya						-
J Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
K Jumlah Kewajiban (I+J)	10,735,555,675.01	11,487,305,961.13	123,334,090,777.74	32,760,573,395.53	524,844,101,536.53	602.32
						-
EKUITAS DANA						-
EKUITAS DANA LANCAR						-

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	267,955,498,353.85	156,464,523,604.12				(35.40)
Pendapatan yang Ditangguhkan	222,620,003.56	-				(25.00)
Cadangan Piutang						-
Cadangan Persediaan						-
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(10,628,888,231.01)	(11,273,426,845.13)				(23.48)
L Jumlah Ekuitas Dana Lancar	257,549,230,126.40	145,191,096,758.99	-	-	-	(35.91)
						-
EKUITAS DANA INVESTASI				3,637,432,247,347.60	3,527,692,939,141.27	(0.75)
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	85,557,141,593.13	88,675,176,629.17				(24.09)
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	3,808,828,833,545.99	4,390,900,538,550.92				(21.18)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	68,539,294,202.49	95,908,462,042.99				(15.02)
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-				-
M Jumlah Ekuitas Dana Investasi	3,962,925,269,341.61	4,575,484,177,223.08	-	-	-	(21.14)
						-
EKUITAS DANA CADANGAN						-
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan						-
N Jumlah Ekuitas Dana Cadangan						-
O Jumlah Ekuitas Dana (L+M+N)	4,220,474,499,468.01	4,720,675,273,982.07	-	-	-	(22.04)
P Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (K+O)	4,231,210,055,143.02	4,732,162,579,943.20	123,334,090,777.74	32,760,573,395.53	524,844,101,536.53	335.77

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Dilihat dari Neraca Daerah, ternyata lebih dari 91% dari nilai total aset berupa aset tetap. Namun demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal usulnya, nilainya maupun status kepemilikannya.

Penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah:

1. Kebanyakan Pengelola Aset di daerah (sesuai istilah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007), belum memahami perbedaan definisi aset/barang daerah dengan barang inventaris.
2. Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak (misalnya tidak pernah dilakukan pengecekan/inventarisasi secara periodik).
3. Konsepsi penyajian aset/barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang inventaris. Biasanya nilai yang dicantumkan dalam Neraca bukan nilai perolehan tetapi nilai pasar/taksiran. Sementara menurut kaidah akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar/taksiran hanya saat menyusun neraca awal saja (khususnya untuk aset yang lama).
4. Pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan kode rekening atas Belanja Modal (BM). Seharusnya setiap BM harus menambah aset tetap, namun karena belanja barang yang dilakukan tidak digunakan/dimiliki untuk operasional oleh pemerintah daerah sendiri namun disumbangkan/dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga BM tersebut tidak menambah jumlah aset daerah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Aset

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengoptimalkan pengelolaan barang daerah adalah:

- 1. Melakukan kegiatan penataan aset;
- 2. Melakukan penghapusan barang daerah;
- 3. Melakukan instalasi program SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) di SKPD;
- 4. Mengikutsertakan pengelola aset dalam diklat aset daerah;
- 5. Menaikkan insentif pengurus barang daerah;
- 6. Melakukan inventarisasi dan klarifikasi aset daerah sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK.
- 7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rasio Keuangan Tahun 2013 s/d 2017
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		%	%	%	%	%
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	3044,14	1513,90	57,48	300,68	23,31
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	2955,11	1390,55	955,65	262,09	21,53
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,25	0,24	0,50	0,89	12,95
4	Rasio hutang terhadap modal	0,25	0,24	3,24	0,90	14,88
5	Rata-rata umur piutang	-	-	-	-	-
6	Rata-rata umur persediaan	-	-	-	-	-

Sumber: Neraca Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel 3.8 dapat terlihat bahwa rasio lancar Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2013 dan 2014 sangat tinggi yakni 3044,14%, dan 1513,90%. Tetapi pada tahun berikutnya rasio lancar sangat rendah yaitu pada tahun 2015 sebesar 57,48%, tahun 2016 berada di angka 300,68%, dan tahun 2017 sebesar 23,31%. Rasio lancar digunakan untuk mengungkapkan jaminan keamanan terhadap kemampuan kabupaten untuk melunasi utang jangka pendeknya. Jika rasio lancar berada di bawah 100% dapat dikatakan kabupaten mengalami kesulitan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Jadi berdasarkan tabel diatas pada tahun 2015 dan 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kesulitan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Di sisi lain, rasio cepat Kabupaten Penajam Paser Utara juga sangat tinggi. Besaran rasio cepat pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2016 yakni berturut-turut sebesar 2955,11%, 1390,55%, 955,65% dan 262,09. Tetapi pada tahun 2017 rasio cepat menurun sangat jauh menjadi 21,53%. Angka ini dapat memperlihatkan kecepatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membayar atau melunasi utang lancarnya. Namun rasio lancar dan rasio cepat yang sangat tinggi dan terus naik dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang efisien dalam mengelola aktiva lancar dan persediaannya. Dengan kata lain, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesehatan keuangan yang belum baik.

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang

dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.2.3.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan

Tabel 3.9
Surplus Defisit Pembiayaan Tahun 2013 s/d 2017
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp juta)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan	1.328.318.638.465	1.336.874.591.787	1.276.706.291.344	1.338.434.761.880	991.971.801.677
Belanja	1.394.134.043.657	1.443.802.359.537	1.391.575.604.158	1.307.221.966.034	1.012.317.865.374
Belanja Tidak Langsung	409.903.838.527	478.524.613.634	554.265.176.488	546.330.518.626	447.443.180.758
Belanja Langsung	984.230.205.130	965.277.745.903	837.310.427.670	760.891.447.407	564.874.684.616
Surplus (Defisit) (A-B)	(65.815.405.193)	(106.927.767.750)	(114.869.312.814)	31.212.795.846	(20.346.063.697)

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel 3.9 dapat terlihat pembiayaan netto Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015 dan 2017, terjadi defisit. Hanya, pada tahun anggaran 2016 yang mengalami surplus. Defisit anggaran ini menandakan kekurangan dalam kas keuangan disebabkan adanya ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan dan pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan APBD Tahun 2013 s/d 2017
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp juta)

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Pembiayaan Netto
1	2013	362.724	28.953	333.770
2	2014	267.955	4.563	263.392
3	2015	156.464	17.000	139.464
4	2016	24.595	-	24.595
5	2017	55.808	7.981	47.826

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel 3.10 dapat terlihat realisasi pembiayaan APBD tahun 2013 hingga tahun 2017. Pembiayaan netto yang merupakan hasil dari formula penerimaan pembiayaan daerah dikurangi

pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan netto yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami surplus pada tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017. Artinya penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah.

3.2.3.2 Analisis Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 s/d 2017
(Rp juta)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	362.724	267.955	156.464	24.595	55.808
2	Pencairan Dana Cadangan			-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan			-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah			-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	267.955	156.464	24.595	55.808	27.480

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 s/d 2017
(Rp juta)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SILPA	362.724	267.955	156.464	24.595	55.808
2	Pelampauan penerimaan PAD	-		-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-		-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapat daerah yang sah	-		-	-	-
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	362.724	267.955	156.464	24.595	55.808
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-				

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Pada tahun anggaran 2013 terlihat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) cukup besar yakni 362,724,088,279.47 Sedangkan pada tahun anggaran 2014,

terdapat surplus Silpa sebesar 267,955,498,353.85. Adanya sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat baik. Namun, adanya Silpa yang tinggi justru mengindikasikan buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di daerah itu sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yakni lemahnya perencanaan program, kinerja birokrasi yang menurun serta upaya kesengajaan untuk memperbesar Silpa.

3.3 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan, salah satu unsur yang menjadi penentu adalah ketersediaan anggaran. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan proyeksi pendapatan yang mampu memberikan gambaran pendanaan selama lima tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan dan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

(1) Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
4. Kebijakan dibidang keuangan negara

Sementara perkiraan belanja disusun dengan memperhatikan gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan serta belanja pembangunan daerah.

Tabel 3.13
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019 s/d tahun 2013

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	2,91%	1.420.954.535.696,00	1.423.259.553.523,70	1.476.491.447.552,07	1.533.011.008.772,09	1.593.045.227.792,34
1,1	Pendapatan Asli Daerah	5,00%	136.962.015.838,00	143.810.116.629,90	151.000.622.461,40	158.550.653.584,47	166.478.186.263,69
1.1.1	Pajak daerah	5,00%	18.202.500.000,00	19.112.625.000,00	20.068.256.250,00	21.071.669.062,50	22.125.252.515,63
1.1.2	Retribusi daerah	5,00%	6.775.945.800,00	7.114.743.090,00	7.470.480.244,50	7.844.004.256,73	8.236.204.469,56
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,00%	5.040.179.924,00	5.292.188.920,20	5.556.798.366,21	5.834.638.284,52	6.126.370.198,75
1.1.4	lain-lain PAD yang sah	5,00%	106.943.390.114,00	112.290.559.619,70	117.905.087.600,69	123.800.341.980,72	129.990.359.079,76
1,2	Dana perimbangan	3,17%	1.036.286.301.000,00	1.068.210.081.850,00	1.101.730.020.242,50	1.136.925.955.554,62	1.173.881.687.632,36
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	5,00%	638.475.017.000,00	670.398.767.850,00	703.918.706.242,50	739.114.641.554,63	776.070.373.632,36
1.2.2	Dana alokasi umum	0,00%	282.770.235.000,00	282.770.235.000,00	282.770.235.000,00	282.770.235.000,00	282.770.235.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	0,00%	115.041.049.000,00	115.041.079.000,00	115.041.079.000,00	115.041.079.000,00	115.041.079.000,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,93%	247.706.218.858,00	211.239.355.043,80	223.760.804.848,18	237.534.399.633,00	252.685.353.896,30
1.3.1	Hibah	0,00%	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi hasil pajak dari	10,00%	113.831.361.858,00	125.214.498.043,80	137.735.947.848,18	151.509.542.633,00	166.660.496.896,30

	provinsi dan pemerintah daerah lainnya						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00%	34.774.857.000,00	34.774.857.000,00	34.774.857.000,00	34.774.857.000,00	34.774.857.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-12,07%	99.100.000.000,00	51.250.000.000,00	51.250.000.000,00	51.250.000.000,00	51.250.000.000,00
2	BELANJA	2,79%	1.380.877.801.180,00	1.383.182.819.007,70	1.424.389.134.864,07	1.480.908.696.084,09	1.540.942.915.104,34
2,1	Belanja Tidak Langsung	1,59%	632.259.379.163,00	655.819.872.550,25	661.169.362.588,96	667.025.967.340,46	673.351.463.477,83
2.1.1	Belanja Pegawai	3,19%	440.425.559.155,00	470.812.692.666,25	479.743.957.101,96	489.121.784.759,46	498.968.503.799,83
2.1.2	Belanja Bunga	-21,98%	27.664.407.913,00	20.837.767.789,00	17.255.993.392,00	13.734.770.486,00	10.213.547.583,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	0,00%	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00%	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2,2	Belanja Langsung	3,83%	748.618.422.017,00	727.362.946.457,45	763.219.772.275,11	813.882.728.743,63	867.591.451.626,51
2.2.1	Belanja Pegawai	0,00%	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00
2.2.2	Belanja Barang Jasa	4,90%	200.643.720.838,72	196.646.371.040,31	208.286.557.689,79	224.733.252.456,00	242.168.693.123,32
2.2.3	Belanja Modal	4,38%	426.367.906.782,28	409.109.781.021,14	433.326.420.189,32	467.542.681.891,63	503.815.964.107,19
3	PEMBIAYAAN	7,50%	(40.076.734.516,00)	(52.102.312.688,00)	(52.102.312.688,00)	(52.102.312.688,00)	(52.102.312.688,00)
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0,00%	-	-	-	-	-

3,2	Pengeluaran Pembiayaan	7,50%	40.076.734.516,00	52.102.312.688,00	52.102.312.688,00	52.102.312.688,00	52.102.312.688,00
-----	---------------------------	-------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara 2019 - 2023

URAIAN PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022	2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	1,420,954,565,696.00	1,423,259,553,523.70	1,476,491,447,552.07	1,533,011,008,772.09	1,593,045,227,792.34
PENDAPATAN ASLI DAERAH	136,962,015,838.00	143,810,116,629.90	151,000,622,461.40	158,550,653,584.47	166,478,186,263.69
Hasil Pajak Daerah	18,202,500,000.00	19,112,625,000.00	20,068,256,250.00	21,071,669,062.50	22,125,252,515.63
Hasil Retribusi Daerah	6,775,945,800.00	7,114,743,090.00	7,470,480,244.50	7,844,004,256.73	8,236,204,469.56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,040,179,924.00	5,292,188,920.20	5,556,798,366.21	5,834,638,284.52	6,126,370,198.75
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	106,943,390,114.00	112,290,559,619.70	117,905,087,600.69	123,800,341,980.72	129,990,359,079.76
DANA PERIMBANGAN	1,036,286,331,000.00	1,068,210,081,850.00	1,101,730,020,242.50	1,136,925,955,554.62	1,173,881,687,632.36
BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	638,475,017,000.00	670,398,767,850.00	703,918,706,242.50	739,114,641,554.63	776,070,373,632.36
Bagi Hasil Pajak	80,927,738,000.00	84,974,124,900.00	89,222,831,145.00	93,683,972,702.25	98,368,171,337.36
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	64,043,901,000.00	65,965,218,030.00	67,944,174,570.90	69,982,499,808.03	72,081,974,802.27
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	16,883,837,000.00	17,390,352,110.00	17,912,062,673.30	18,449,424,553.50	19,002,907,290.10
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	557,547,279,000.00	574,273,697,370.00	591,501,908,291.10	609,246,965,539.83	627,524,374,506.03
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7,063,167,000	7,275,062,010.00	7,493,313,870.30	7,718,113,286.41	7,949,656,685.00

URAIAN PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022	2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
Dana Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)	2,699,121,000.00	2,780,094,630.00	2,863,497,468.90	2,949,402,392.97	3,037,884,464.76
Dana Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)	300,378,527,000.00	309,389,882,810.00	318,671,579,294.30	328,231,726,673.13	338,078,678,473.32
Dana Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Hasil Perikanan	983,593,000.00	1,013,100,790.00	1,043,493,813.70	1,074,798,628.11	1,107,042,586.95
Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	246,422,871,000.00	253,815,557,130.00	261,430,023,843.90	269,272,924,559.22	277,351,112,295.99
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00
Dana Alokasi Umum	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00
Dana Alokasi Umum	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00
Dana Alokasi Khusus	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00
DAK Reguler Bidang Pendidikan	3,269,575,000.00	3,269,575,000.00	3,269,575,000.00	3,269,575,000.00	3,269,575,000.00
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	11,264,335,000.00	11,264,335,000.00	11,264,335,000.00	11,264,335,000.00	11,264,335,000.00
DAK Penugasan Bidang Air Minum	1,403,413,000.00	1,403,413,000.00	1,403,413,000.00	1,403,413,000.00	1,403,413,000.00
DAK Penugasan Bidang Irigasi	3,223,117,000.00	3,223,117,000.00	3,223,117,000.00	3,223,117,000.00	3,223,117,000.00
DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	1,587,004,000.00	1,587,004,000.00	1,587,004,000.00	1,587,004,000.00	1,587,004,000.00
DAK Reguler Bidang Pertanian	1,674,521,000.00	1,674,521,000.00	1,674,521,000.00	1,674,521,000.00	1,674,521,000.00
DAK Penugasan Bidang Jalan	27,056,678,000.00	27,056,678,000.00	27,056,678,000.00	27,056,678,000.00	27,056,678,000.00
DAK Penugasan Bidang Pasar	4,448,291,000.00	4,448,291,000.00	4,448,291,000.00	4,448,291,000.00	4,448,291,000.00
DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	808,817,000.00	808,817,000.00	808,817,000.00	808,817,000.00	808,817,000.00
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	60,305,328,000.00	60,305,328,000.00	60,305,328,000.00	60,305,328,000.00	60,305,328,000.00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2,730,600,000.00	2,730,600,000.00	2,730,600,000.00	2,730,600,000.00	2,730,600,000.00

URAIAN PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022	2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
Tunjangan Profesi Guru	41,640,040,000.00	41,640,040,000.00	41,640,040,000.00	41,640,040,000.00	41,640,040,000.00
Tambahan Penghasilan Guru	810,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00
Tunjangan Khusus Guru	227,628,000.00	227,628,000.00	227,628,000.00	227,628,000.00	227,628,000.00
Bantuan Operasional Kesehatan	11,283,239,000.00	11,283,239,000.00	11,283,239,000.00	11,283,239,000.00	11,283,239,000.00
Akreditasi Puskesmas	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
Jaminan Persalinan	535,000,000.00	535,000,000.00	535,000,000.00	535,000,000.00	535,000,000.00
Bantuan Operasional KB	1,334,835,000.00	1,334,835,000.00	1,334,835,000.00	1,334,835,000.00	1,334,835,000.00
Dana Administrasi Kependudukan	893,786,000.00	893,786,000.00	893,786,000.00	893,786,000.00	893,786,000.00
BOP Pendidikan Kesetaraan	290,200,000.00	290,200,000.00	290,200,000.00	290,200,000.00	290,200,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	247,706,218,858.00	211,239,355,043.80	223,760,804,848.18	237,534,399,633.00	252,685,353,896.30
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	113,831,361,858.00	125,214,498,043.80	137,735,947,848.18	151,509,542,633.00	166,660,496,896.30
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13,183,850,923.00	14,502,236,015.30	15,952,459,616.83	17,547,705,578.51	19,302,476,136.36
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13,321,307,988.00	14,653,438,786.80	16,118,782,665.48	17,730,660,932.03	19,503,727,025.23
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	77,175,885,697.00	84,893,474,266.70	93,382,821,693.37	102,721,103,862.71	112,993,214,248.98
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	225,759,448.00	248,335,392.80	273,168,932.08	300,485,825.29	330,534,407.82
Bagi Hasil Pajak Rokok	9,924,557,802.00	10,917,013,582.20	12,008,714,940.42	13,209,586,434.46	14,530,545,077.91
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00
DANA OTONOMI KHUSUS	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00
Alokasi Dana Desa	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00
BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	99,100,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00

URAIAN PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022	2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
Bantuan Keuangan Provinsi	99,100,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00
Bantuan Keuangan Provinsi	99,100,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel 3.13 dapat diketahui bahwa proyeksi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan per tahun. Peningkatan pada belanja tidak langsung dipengaruhi kenaikan belanja pegawai setiap tahunnya, dimana diperkirakan terdapat penambahan jumlah pegawai mengingat masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Jika diperhatikan dari sisi proporsionalitas, belanja tidak langsung masih lebih rendah dibandingkan belanja langsung. Hal ini menunjukkan bawah Pemerintah Penajam Paser Utara menyediakan alokasi lebih dari 50% yang diperuntukkan bagi belanja untuk masyarakat.

(2) Proyeksi sisa Lebih riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel berikut maka dapat di proyeksikan besaran SiLPA dari tahun 2018-2023 setiap tahunnya. Dilihat pada tabel di bawah ini bahwa di tahun 2018 pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai SiLPA sebesar Rp. 21.223.332.617,- sedangkan pada tahun selanjutnya mempunyai SiLPA nihil seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun Dasar 2018	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	21.223.332.617	0	0	0	0	0
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi	348.167.577.875	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Pembayaran Bunga Pinjaman	28.619.374.901	36.076.734.516	48.102.312.688	48.102.312.688	48.102.312.688	48.102.312.688

Sementara pembayaran bunga pinjaman yang tertera pada tahun 2018 s.d 2023 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pinjaman kepada PT. SMI dengan jangka waktu selama 8 (delapan) tahun yang harus ditunaikan mulai 2018.

BAB IV

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

4.1 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat untuk mengatasi hasil kompilasi masalah yang ditemukan. Identifikasi masalah juga didasarkan pada kriteria tertentu sehingga menghasilkan fakta yang aktual tentang permasalahan pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang diangkat adalah :

1. Cakupan masalah yang luas
2. Permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan membesar dan berdampak negatif pada pemerintah daerah
3. Memerlukan penanganan yang konsisten dan melibatkan banyak pihak

Secara umum permasalahan di Kabupaten Penajam Paser Utara diuraikan dalam permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Urusan Pemerintah Wajib

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- Minimnya fasilitas perpustakaan dan laboratorium.
- Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas masih rendah.
- Kurangnya jumlah dan kualitas Sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pemuda dan olahraga yang layak.

2. Kesehatan

- Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

- Kurangnya ketersediaan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan beserta sarana prasarana pendukung.
- Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- Kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok masyarakat masih belum optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

- Kualitas jalan terbangun masih rendah (jenis permukaan jalan masih didominasi untuk tanah timbunan dan agregat)
- Belum meratanya Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan
- Rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi
- Belum tersedianya data dasar daerah irigasi beserta jaringannya yang berbasis teknologi informasi
- Belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
- Belum terlaksananya peraturan tentang sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu
- Masih minimnya kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
- Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika pembangunan
- Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat

- Belum ditetapkan peraturan turunan perda RTRW guna mendukung rencana pengembangan wilayah dan dinamika pembangunan
- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- Masih banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni.
- Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Persentasi kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan kategori baik belum mencapai 100%.
- Masih banyak bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
- Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
- Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cakupan wilayah yang cukup luas merupakan kendala bagi Satuan Pamong Praja untuk melakukan pemantauan secara maksimal.
- Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- Infrastruktur penanganan bencana belum memadai.
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih belum tersentral pada ibukota Kabupaten.
- Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan.

- Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban belum memadai.

6. Sosial

- Belum tersediannya *database* permasalahan sosial yang komprehensif dan terkini.
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan masih belum maksimal.
- Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi pada berbagai sektor.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Tingkat Pengangguran masih relatif tinggi.
- Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.
- Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum berperan secara maksimal.
- Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan.

3. Pangan

- Tingginya ketergantungan penduduk pada bahan pangan beras.
- Pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan belum terbentuk sepenuhnya.

4. Lingkungan Hidup

- Peran serta masyarakat dan sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan.
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan air limbah.

5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Data kependudukan belum akurat dan mutakhir.
- Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kurang optimalnya pendampingan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok usaha ekonomi pedesaan.
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal.
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Terdapatnya beberapa wilayah kelurahan yang berdasarkan kriteria pemekaran wilayah perlu diubah menjadi desa.
- Teknologi tepat guna belum dimanfaatkan secara optimal.
- Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi.

7. Perhubungan

- Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan.
- Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat.
- Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dll).

8. Komunikasi dan Informatika

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.
- *E-government* belum diimplementasikan secara optimal.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Belum adanya penilaian kesehatan bagi koperasi maupun usaha kecil dan menengah.
- Belum adanya kerjasama antara koperasi, UKM dan lembaga keuangan (Perbankan).
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola dan kesadaran anggota koperasi.
- Minimnya pendampingan yang bersifat menyeluruh/terintegrasi bagi UMKM, mulai dari sisi kualitas SDM pelaku UMKM, akses terhadap sumber daya produktif, permasalahan infrastruktur, pemasaran hingga kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam pembinaan dan pendampingan UMKM.
- Inovasi dan penerapan teknologi masih tergolong rendah.
- Rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan koperasi .

10. Penanaman Modal

- Kurangnya data potensi unggulan daerah
- Data potensi penanaman modal belum memadai.
- Dibutuhkan dukungan infrastruktur dan regulasi.
- Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral antar Perangkat Daerah

11. Kebudayaan dan Pariwisata

- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menjadi daya tarik yang khas untuk

mengundang kunjungan dari luar daerah dan dunia internasional.

- Kurangnya promosi objek wisata.
- Destinasi pariwisata belum dikembangkan secara optimal.
- Masih kurangnya sarana dan prasana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.
- Keterbatasan aksesibilitas dalam menjangkau obyek wisata.
- Peran serta masyarakat masih cukup rendah dalam pengembangan obyek wisata setempat.

12. Perpustakaan

- Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk kantor belum memadai..
- Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif
- Rendahnya minat baca masyarakat.
- Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
- Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran masyarakat.

c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

- Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan sarana tangkap yang ramah lingkungan.
- Sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas.
- Keterbatasan tenaga penyuluh.
- Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

2. Pertanian

- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

- Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air pada lahan pertanian.
- Produktivitas peternakan masih belum optimal.
- Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah dari pengolahan hasil peternakan masih sangat rendah.

3. Ketahanan Pangan

- Ketergantungan terhadap konsumsi pangan beras lebih tinggi daripada jenis pangan karbohidrat lainnya .
- Rendahnya ketahanan pangan terutama masyarakat miskin.

d. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Pengawasan

- Kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- Masih rendahnya penerapan pengendalian internal pemerintah pada tiap Perangkat Daerah.

2. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dokumen perencanaan belum optimal.
- Proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi belum terlaksana dengan baik.
- Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- Proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

3. Keuangan

- Pengelolaan aset daerah masih belum optimal.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian

- Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) masih relatif rendah.
- Distribusi dan jumlah ASN belum seimbang dengan beban kerja.
- Masih terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- Masih terbatasnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
- Jumlah jabatan fungsional masih sangat terbatas.

5. Pemerintahan Umum

- Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal.
- Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan daerah lain dan pihak swasta, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang dalam jangka pendek dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Belum optimalnya sistem pengawasan internal pada masing-masing perangkat daerah.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis ini berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan, baik isu dari dunia internasional, nasional, maupun regional.

Isu strategis yang terdapat dalam RPJMD ini ditetapkan dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.

Untuk melengkapi upaya di dalam penentuan isu strategis, juga dilakukan dengan menelaah agenda pembangunan internasional dan agenda pembangunan nasional untuk memberikan arah dan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Selain isu internal, dalam penyelenggaraan pembangunan juga memiliki sejumlah masalah dan isu yang bersifat eksternal yang berasal dari dunia internasional.

4.2.1.1 AFTA (ASEAN *Free Trade Area*)

Isu strategis internasional yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah perdagangan bebas dan AFTA yang dimulai pada tahun 2015 akan menjadi tantangan besar bagi daerah. Terbukanya pasar bebas ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa investasi dan tenaga kerja antar negara ASEAN sudah tidak ada hambatan lagi. Dengan adanya AFTA tentunya perdagangan internasional akan meningkat, terbukanya peluang kerja yang lebih banyak, meningkatkan kompetensi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha lokal untuk bisa “*go internasional*” dan juga meningkatkan nilai ekspor. Hal ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.

4.2.1.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah masyarakat yang masuk dalam kawasan ekonomi AFTA, atau negara negara yang masuk dalam AFTA. Dengan adanya MEA maka menjadi kesempatan bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk daerah serta kualitas sumber daya manusianya.

Dari sisi industri hulu, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk menjadi produsen yang berasal dari sektor pertanian, kelautan dan perkebunan. Guna menghadapi pasar bebas, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu meningkatkan daya saing produk. Untuk itu, perlu dikembangkan industri yang berbasis nilai tambah.

4.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDG's)

SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan negara – negara di seluruh dunia, baik negara maju dan negara berkembang. Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut :

1. Mengentaskan kemiskinan dalam dalam segala bentuk;
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua;
 7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
 8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi;
 10. Mengurangi ketimpangan di dalam sesuatu dan negara-negara lainnya;
 11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
 12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
 14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan pesisir untuk pembangunan yang berkelanjutan;
 15. Melindungi, mengembalikan, meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
 16. Meningkatkan ketentraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan;
- Secara garis besar 17 (tujuh belas) tujuan SDG's di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia,

pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan *governance*. Pilar pembangunan manusia menjadi isu yang penting bagi pemerintah daerah yaitu : peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Upaya pencapaian SDG's di pilar pembangunan ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dari visi tersebut kemudian ditetapkan 7 misi untuk mewujudkan yang meliputi :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara maritime.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan agenda Nawacita dengan sub agenda sebagai berikut :

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
 - a. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
 - b. Penguatan sistem pertahanan.
 - c. Memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
 - d. Meningkatkan kualitas perlindungan warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
 - e. Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran.
 - f. Memperkuat peran dan kerjasama global dan regional.
 - g. Meminimalisasi dampak globalisasi.
 - h. Membangun industri pertahanan nasional.
 - i. Membangun polri yang professional.
 - j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan.
- 2) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis dan terpercaya.
 - a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik.
 - b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.
 - c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
 - d. Penyempurnaan dan peningkataan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
 - e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
 - a. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris.
 - b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia.
 - c. Penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 - a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan.
 - b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - c. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
 - d. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah.
 - e. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
 - a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
 - b. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Indonesia Pintar.
 - c. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat.
 - d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
 - a. Membangun konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.
 - b. Membangun transportasi massal perkotaan.
 - c. Membangun infrastruktur/prasarana dasar.
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pembiayaan infrastruktur.
 - e. Memperkuat peran investasi.
 - f. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan.

- g. Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi.
 - h. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
 - i. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
 - j. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- 7) Peningkatan kedaulatan pangan.
- a. Peningkatan kedaulatan pangan.
 - b. Peningkatan ketahanan air.
 - c. Melestarikan sumber daya alam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
 - d. Penguatan sektor keuangan.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
- Meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat Negara.

4.2.3 Isu Strategis Regional

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Kalimantan Timur 2015-2025

Visi Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan kondisi Kalimantan Timur saat ini, dan 20 tahun mendatang adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.
- Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.
- Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.

- Mewujudkan efisien dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan
- Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

4.2.4 Isu Strategis Lokal

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Penajam Paser Utara 2015-2025

Dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2015, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 adalah : **Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui delapan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) **Mewujudkan revitalitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.** Penajam Paser Utara dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

- 2) Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.** Posisi Penajam Paser Utara yang berhadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk arah Samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi.
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.** Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggungjawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.** Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran. Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem pemasaran.
- 5) Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri.** Keterlibatan

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum UMKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu menyerap tenaga kerja. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan.

- 6) Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.** Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 7) Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik.** Masyarakat yang maju dan berakhlak baik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan.
- 8) Mewujudkan jaringan intrastruktur transportasi dan prasarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.** Termasuk didalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu tersediannya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor-sektor ekonomi.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan dasar. Untuk urusan Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Penajam Paser Utara telah memiliki dokumen SPM yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

3. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem informasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem informasi.

Sejalan dengan isu internasional, nasional, regional maupun lokal, serta memperhatikan permasalahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya dalam kurun waktu 2019 – 2023, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan;
2. Pemenuhan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

3. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan social dan pengangguran;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan jangkauan aksesibilitas layanan infrastruktur;
5. Penyediaan utilitas permukiman seperti air bersih, drainase, persampahan maupun air limbah;
6. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
7. Peningkatan perekonomian dengan memperhatikan potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat serta lembaga-lembaga ekonomi setempat;
8. Pengembangan industri khususnya sektor sekunder dan tersier yang berdasarkan peningkatan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
9. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dengan didukung pengembangan teknologi informasi
10. Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian berkeadilan;
11. Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi;
12. Penguatan UKM dan Koperasi secara menyeluruh;
13. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan *good governance*.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Sedangkan tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

5.1 Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2018-2023, adalah : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS"**.

Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **maju** adalah: Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
2. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **modern** adalah: Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **religius** : Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederhana dan seimbang dunia & akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara

sesama pemeluk agama dilandaskan Lakumdukkum Waliyadin dan Pancasila.

5.2. Misi

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam 11 (sebelas) Misi , yakni :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Maksud misi ini adalah :

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan mendapatkan bantuan pendampingan dan stimulan dana.

2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Maksud misi ini adalah :

Pembangunan infrastruktur dasar akan menarik investasi masuk ke kawasan industri Buluminung (KIB) dan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kalimantan Timur.

3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,

Maksud misi ini adalah :

A. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki pendidikan tinggi sehingga berdaya saing di tingkat regional , nasional bahkan internasional.

B. Mewujudkan pelayanan kesehatan secara optimal terutama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.

Maksud misi ini adalah :

- A. Mewujudkan peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan air baku irigasi yang mencukupi sehingga target 3 x panen dalam setahun dapat tercapai.
 - B. Mekanisasi pengolahan lahan hingga produksi.
- 5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan
Maksud misi ini adalah :
 - A. Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor.
 - B. Kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan dalam peningkatan pertumbuhan.
- 6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.
Maksud misi ini adalah :
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kelurahan melalui pembangunan desa dan kelurahan.
- 7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman,
Maksud misi ini adalah :
 - A. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing dan iklim investasi.
 - B. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat.

- C. Mewujudkan penataan ruang dan perumahan serta permukiman yang layak bagi masyarakat.
8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.
Maksud misi ini adalah :
- A. Meningkatkan penerimaan PAD dari sumber-sumber yang belum tergali secara optimal.
 - B. Meningkatkan sumber pendapatan non migas dengan mengembangkan hilirisasi industri.
9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.
Maksud misi ini adalah :
Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pelayanannya kepada masyarakat melalui optimalisasi kemampuan sumber daya aparatur dalam lembaga pemerintahan guna peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih KKN, professional, akuntabel dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah muslimin yang mayoritas masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara beragama Islam.
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
Maksud misi ini adalah :
Melalui pengembangan sistem informasi tentunya akan mempermudah dalam mengakses layanan informasi terkait pemerintahan dan ekonomi daerah
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.
Maksud misi ini adalah :

Kerukunan umat beragama merupakan modal dasar terciptanya kondusifitas kehidupan bermasyarakat ditengah keberagaman yang ada. Dengan meningkatnya kerukunan umat beragama tentunya menjadi modal dasar dan alat pemersatu, yang akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang solid dan mampu bersinergi, guna mendukung pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing, berbasis teknologi dan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan beragama.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran 11 (sebelas) Misi dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran,

Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
- Pengurangan angka pengangguran

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan perekonomian masyarakat
- Mengurangi angka pengangguran

2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu.

Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan investasi di kawasan industri

3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan.

Tujuan yang akan dicapai :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
- Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.

Tujuan yang akan dicapai :

- Mewujudkan ketahanan pangan yang handal

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
- Meningkatkan distribusi pangan

5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan.

Tujuan yang akan dicapai :

- Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan daya saing daerah
- Meningkatkan kerjasama perekonomian

6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

Tujuan yang akan dicapai :

- Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan

Sasaran yang akan dicapai :

- Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya

air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.

Tujuan yang akan dicapai :

- Memantapkan infrastruktur daerah
- Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW

Sasaran yang ingin dicapai :

- Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman

8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas, bertujuan Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang mandiri melalui pengembangan UMKM baik perorangan maupun kelompok, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan ekonomi..

Tujuan yang akan dicapai :

- Optimalisasi PAD

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.

Tujuan yang akan dicapai :

- Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan

Sasaran yang ingin dicapai :

- Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web

11.Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Tujuan yang akan dicapai :

- Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan
- Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan

Tabel 5.1
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran	Tujuan : 1.1. Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran : 1.1.1 Meningkatkan perekonomian masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.13	3.13 ± 1	3.13 ± 1	3.13 ± 1	3.13 ± 1	3.13 ± 1	3.13 ± 1	Rp. 4,455,900,000.00	Dinas KUKPerindag
	Tujuan : 1.2. Pengurangan angka pengangguran	Sasaran : 1.2.1 Mengurangi angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.90%	2.875%	2.85%	2.825%	2.80%	2.75%	2.75%		
MISI 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu	Tujuan 2.1 : Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan investasi di kawasan industri	Nilai investasi	-	14,038,517,774	57,415,400,000	101,584,950,000	196,967,000,000	80,228,000,000	450,233,867,774	450,233,867,774	Diabub
Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	Tujuan : 3.1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Sasaran : 3.1.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)		14.77	14.85	14.92	15.07	15.07	15.07	425,000,000	Diadik
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)		10.6	10.7	10.79	10.88	10.96	10.96		
			Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.82	71.00	71.50	71.75	72.00	72.50	72.50	3,143,984,708	Diskes
		Sasaran : 3.1.2. Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan Nasional	-	2 medali	2 medali	3 medali	3 medali	3 medali	3 medali		Diadik
		Sasaran : 3.1.3. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	50.30	65.94	69.38	72.82	76.26	79.70	79.70	586,501,156	DP3AP2KB
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas	Tujuan : 4.1. Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Sasaran : 4.1.1 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	624.17 poin	624.2 poin	635 poin	640 poin	650 poin	660 poin	660 poin	110,446,317	DP3AP2KB
Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin- mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agriindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan	Tujuan : 5.1. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Sasaran : 4.1.2 Meningkatkan distribusi pangan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	10.26%	11%	11.50%	12%	12.50%	13%	13%	Rp 21,197,895,461	Ketpang
		Sasaran : 5.1.1 Meningkatkan daya saing daerah	penetapan skor pola pangan harapan	82.8	85.24	87.64	90.04	92.44	94.84	94.84	Rp 2,005,160,000	Ketpang
MISI 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan keurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpicil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan keurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan keurahan	Tujuan : 6.1. Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan keurahan	Sasaran : 6.1.1. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan keurahan	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	72,328	72,328	75,944	80,501	86,136	93,027	407,937	Rp 3,041,650,000	Diabudpar
			NTP	103	103	103	104	104	105	105	Rp 3,660,442,150	Ketpang
			Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif	150	0	130	137	140	145	3127	Rp 4,455,900,000.00	Dinas KUKPerindag
			Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani	744	400 izin	450 izin	500 izin	550 izin	600 izin	2500 izin	Rp 6,648,500,000.00	DPMPPTSP
			Status Desa		Mandiri = 0 Maju = 4 Berkembang = 24 tertinggal = 2 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 5 Berkembang = 25 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 1 Maju = 8 Berkembang = 21 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	150,000,000	DPMD
Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman	Tujuan : 7.1. Memantapkan infrastruktur daerah	Sasaran : 7.1.1. Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 keurahan dan 30 desa	24 keurahan dan 30 desa	24 keurahan dan 30 desa	24 keurahan dan 30 desa	24 keurahan dan 30 desa	24 keurahan dan 30 desa	24 keurahan dan 30 desa		UPT PU, 4 kecamatan
			Desa dan Kelurahan	79.03%	80%	82%	86%	92%	100%	100%	Rp 100,143,794,088.96	DPUPR
			Persentase kemiskinan	7.63	7.5	7.36	7.05	6.5	6.2	6.2		
			Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik / Mantan	485	43	163.71	181	196.93 KM	135.79 KM	1,206.06 KM	Rp 2,201,819,450,554.72	DPUPR
			luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)	4,000	6,000	37,035	35,990	36,740	36,565	152,330	143,492,067,000.00	DPUPR
	Tujuan : 7.2. Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTKW	Sasaran : 7.2.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Persentase pemukiman yang tertata	99.63%	99.70%	99.75%	99.80%	99.85%	99.90%	99.90%	Rp 556,450,000.52	DPKPP
			Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat	220	510	200	200	200	200	1,310	Rp 6,558,513,000.00	DPKPP
			jumlah bangunan/gedung terbangun	36	5	3	3	3	3	17	1,099,792,655,352.00	DPUPR
			Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	76	10	9	9	9	9	46	3,430,274,000.00	Diabub
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	na	68.5	69.50	70.50	71.50	73.50	75.65	5,180,353,750.00	DLH
Misi 8 : Peningkatan perrimasan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	Tujuan : 7.3. Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Sasaran : 7.3.1 Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	89.55%	90.05%	90.55%	91.00%	91.55%	92.05%	92.05%	910,000,000.00	DPUPR
			luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	2990.32	20	20	20	25	25	110	Rp 2,577,778,110.00	DPKPP
			Persentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana	52%	60%	70%	75%	80%	85%	85%		
			Rata-rata waktu respon kejadian bencana	<24 jam	<24 jam	<24 jam	<12 jam	<12 jam	<6 jam	<6 jam		
			Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca-bencana	70%	75%	76%	77%	78%	80%	80%		Damkar
			Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca-bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13,576,893,750.00	DPUPR
			Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan	-	-	120 Ha	150 Ha	180 Ha	200 Ha	200 Ha		
Misi 8 : Peningkatan perrimasan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	Tujuan : 8.1. Optimalisasi PAD	Sasaran : 8.1.1. Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan PAD	134,191,044,743	155,661,611,902	180,567,469,806	286,105,533,454	343,691,472,714	398,682,108,348	1,364,708,196,224	25,666,525,000	Badan Keuangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 9 : Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	Tujuan : 9.1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sasaran : 9.1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	CC	B	B	B	B	B	B		Diskominfo
Misi 10 :Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah	Tujuan : 10.1 Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Sasaran : 10.1.1 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	38 Aplikasi	38 Aplikasi	43 Aplikasi	50 Aplikasi	58 Aplikasi	68 Aplikasi	68 Aplikasi		Diskominfo
Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat kenaiam paser utara yang maju	Tujuan : 11.1 Meningkatkan nilai nilai luhur keagamaan	Sasaran : 11.1.1.Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Kasus/konflik yang bernuansa agama	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus		KECAMATAN SEPAKU
	Tujuan : 11.2 Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Sasaran : 11.2.1 Meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	83%	85%	86%	87%	88%	89%	90%		Satpol PP

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.

Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

1. **Misi 1** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran.

Strategi :

1. Peningkatan Taraf Hidup dan Kesehatan Masyarakat.
2. Pengurangan Angka Pengangguran.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Mengurangi angka pengangguran.

2. **Misi 2** : Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu.

Strategi :

1. Mewujudkan infrastruktur & konektivitas kawasan serta utilitas di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan investasi di kawasan industri.

3. **Misi 3** : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,

Strategi :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
2. Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. **Misi 4** : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.

Strategi :

1. Mewujudkan ketahanan pangan yang handal

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas).
2. Meningkatkan distribusi pangan.

5. **Misi 5** : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Strategi :

1. Meningkatkan produksi pertumbuhan ekonomi dalam bidang agribisnis, agroindustry, pariwisata, perdagangan dan jasa untuk menambah nilai tambah, daya saing dan kontribusi ekspor.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan daya saing daerah.
2. Meningkatkan kerjasama perekonomian.

6. **Misi 6** : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan

dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

Strategi :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan.

Arah Kebijakan :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan.

7. **Misi 7** : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.

Strategi :

1. Memantapkan infrastruktur daerah.

Arah Kebijakan :

1. Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW.
3. Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana.

8. **Misi 8** : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.

Strategi :

1. Optimalisasi PAD

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

9. **Misi 9** : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Strategi :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

10. **Misi 10** : Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.

Strategi :

1. Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan.

Arah Kebijakan :

1. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web.

11. **Misi 11** : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Strategi :

1. Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan.
2. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan.

6.2. Program Pembangunan Daerah

Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran.

Program Prioritas :

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha.
3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
5. Peningkatan Kesempatan Kerja.

Misi 2 : Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Program Prioritas:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
2. Program Penataan Struktur Industri.
3. Program Penataan Kawasan Strategis.
4. Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar.
5. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,

Program Prioritas :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.
4. Program Pendidikan Non Formal.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
8. Program Peningkatan Layanan Perpustakaan.
9. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
12. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
13. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
14. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
17. Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olahraga.
18. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.

20. Program Keluarga Berencana.
21. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
22. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
23. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
24. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.

Program Prioritas:

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
3. Program Peningkatan Produksi.
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
5. Program Pembangunan Usaha Perkebunan.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
9. Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
10. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
11. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
12. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
13. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
14. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan.
15. Program Pembangunan Taman Laut Penajam.
16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.

Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Program Prioritas :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
3. Program Pengembangan kemitraan pariwisata.
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
5. Program Pengembangan Nilai Budaya.
6. Program peningkatan kesejahteraan petani.
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
8. Program Produksi Hasi Peternakan.
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Peternakan Lapangan.
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
11. Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan.
12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
13. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
14. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
15. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
16. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.
17. Program Pengembangan Logistik Hasil Perikanan.
18. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
19. Program Pengembangan Pengolahan, Diverifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk.
20. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Misi 6 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

Program Prioritas :

1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

4. Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
9. Program Pro-PPK-PPU.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Program Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan.
12. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.

Program Prioritas :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
5. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana.
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
7. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
8. Program pengendalian banjir.
9. Program penyediaan dan pengolahan air baku.
10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
12. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
13. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

14. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
15. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan.
16. Program pengelolaan areal pemakaman.
17. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
18. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
19. Program Pengembangan Perumahan.
20. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan.
21. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
22. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
23. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
24. Program peningkatan pelayanan angkutan.
25. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas.
26. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
27. Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
28. Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan.
29. Program Pembangunan Kawasan mangrove sebagai pusat restorasi.
30. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
31. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
32. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
33. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
34. Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah.
35. Program perencanaan dan pengembangan Hutan.
36. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

37. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
38. Program Perencanaan Tata Ruang.
39. Program Pemanfaatan Ruang.
40. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
41. Program Pengendalain Pemanfaatan Ruang.
42. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (peningkatan kasus tanah yang terselesaikan).
43. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
44. Program Penataan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
45. Pogram Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (terselesaikannya konflik-konflik pertanahan).
46. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
47. Program Penanggulangan Kebakaran.
48. Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan.
49. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.
50. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
51. Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana.
52. Program Pengendalian Penanganan Bencana.
53. Program Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana.
54. Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
55. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong.
56. Prgram Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
57. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.

Program Prioritas:

1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi 9 : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Program Prioritas :

1. Program Pengembangan Data/Informasi.
2. Program Penataan Administrasi kependudukan.
3. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
4. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
5. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
11. Program Kerjasama Pembangunan.
12. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
14. Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian.
15. Program Penanganan Bidang hukum.
16. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
17. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

Misi 10 : Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.

Program Prioritas :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
2. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
3. Program Sistem Data Gender dan Anak.
4. Program Keluarga Berencana.
5. Program sistem PBDKI (Basis Data Keluarga Indonesia).
6. Program sistem Pelaporan SR F/I/DALL dan F/ II/ KB.
7. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Program Prioritas :

1. Program Pembinaan Keagamaan.
2. Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba.
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
4. Program ketahanan sosial dan ekonomi.
5. Program pendidikan politik masyarakat.
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
7. Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak criminal.
8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Dan Strategi Kabupaten Penajam Paser Utara

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran		
1.1 Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	1.1.1 Meningkatkan perekonomian masyarakat	Pengembangan ekonomi masyarakat dengan perluasan lapangan kerja
1.2 Pengurangan angka pengangguran	1.2.1 Mengurangi angka pengangguran	
Misi 2 : Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu.		
2.1 Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	2.1.1 Meningkatkan investasi di kawasan industri	Pembangunan infrastruktur dasar di kawasaan industri Buluminung
Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan.		
3.1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	3.1.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	1. Peningkatan kualitas pendidikan
	3.1.2 Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	
	3.1.3 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Peningkatan kualitas kesehatan
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas		
4.1 Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	4.1.1 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Peningkatan produksi pangan
	4.1.2 Meningkatkan distribusi pangan	
Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta		
5.1 Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	5.1.1 Meningkatkan daya saing daerah	Peningkatan produksi pertumbuhan ekonomi bidang agribisnis,agro industri, pariwisata, perdagangan dan jasa
	5.2.1 Meningkatkan kerjasama perekonomian	

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 6 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta		
6.1 Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	6.1.1 Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Pengembangan ekonomi kerakyatan
Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air,		
7.1 Memantapkan infrastruktur daerah	7.1.1 Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Peningkatan infrastruktur daerah dan pengelolaan lingkungan serta penataan ruang dan perumahan dan permukiman
7.2. Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	7.2.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	
7.3. Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	7.3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	
Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas		
8.1 Optimalisasi PAD	8.1.1. Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan pendapatan daerah
Misi 9 : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas		
9.1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	9.1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas
Misi 10 : Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan		
10.1 Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	10.1.1. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Peningkatan layanan publik

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 11 : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas		
11.1 Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	11.1.1. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Peningkatan sumber daya aparatur
11.2 Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	11.2.1 Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023

STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran					
Strategi 1 : Pengembangan ekonomi masyarakat dengan perluasan lapangan kerja					
Arah Kebijakan:					
1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi	√	√	√	√	√
Strategi 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang bersaing global					
Arah Kebijakan:					
1 Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah	√	√	√	√	√
Strategi 3 : Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu					
Arah Kebijakan:					
1 Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah	√	√	√	√	√
2 Perluasan dan penyediaan lapangan kerja	√	√	√	√	√
Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM	√	√	√	√	√
4 Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial	√	√	√	√	√
Misi 2 : Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu					

STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Strategi: Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri Buluminung					
Arah Kebijakan:					
1 Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah	√	√	√	√	√
STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan					
Strategi 1 : Peningkatan kualitas pendidikan					
Arah Kebijakan:					
1 Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	√	√	√	√	√
2 Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya	√	√	√	√	√
3 Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD)	√	√	√	√	√
4 Peningkatan kualitas tenaga pengajar	√	√	√	√	√
5 Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa	√	√	√	√	√
Strategi 2 : Peningkatan kualitas kesehatan					
Arah Kebijakan:					
1 Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√
2 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya	√	√	√	√	√
3 Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	√	√	√	√	√
4 Pengembangan lingkungan sehat	√	√	√	√	√

STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
5 Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	√	√	√	√	√
STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas					
Strategi: Peningkatan produksi pangan					
Arah Kebijakan:					
1 Peningkatan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan	√	√	√	√	√
2 Pemenuhan air baku irigasi	√	√	√	√	√
3 Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian	√	√	√	√	√
4 Pengembangan kualitas petani	√	√	√	√	√
Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan					
Strategi : Peningkatan produksi pertumbuhan ekonomi bidang agribisnis,agro industri, pariwisata, perdagangan dan jasa					
Arah Kebijakan:					
1 Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri	√	√	√	√	√
2 Penetapan dan pengembangan potensi wisata	√	√	√	√	√
3 Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya	√	√	√	√	√
4 Peningkatan kerjasama investasi	√	√	√	√	√
STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023

STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Misi 6 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan					
Strategi: Pengembangan ekonomi kerakyatan					
Arah Kebijakan:					
1 Peningkatan iklim investasi	√	√	√	√	√
2 Peningkatan stimulan UMKM	√	√	√	√	√
3 Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	√	√	√	√	√
4 Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES	√	√	√	√	√
Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman					
Strategi: Peningkatan infrastruktur daerah dan pengelolaan lingkungan serta penataan ruang dan perumahan dan permukiman					
Arah Kebijakan:					
1 Peningkatan infrastruktur dasar	√	√	√	√	√
2 Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana	√	√	√	√	√
3 Peningkatan pengelolaan lingkungan	√	√	√	√	√
4 Penataan ruang daerah	√	√	√	√	√
5 Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak	√	√	√	√	√
STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas					

STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Strategi 1 : Peningkatan pendapatan daerah					
Arah Kebijakan:					
1 Optimalisasi pendapatan daerah	√	√	√	√	√
Strategi 2 : Peningkatan potensi sumber-sumber PAD					
Arah Kebijakan:					
1 Intensiikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD	√	√	√	√	√
Misi 9 : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas					
Strategi: Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas					
Arah Kebijakan:					
1 Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi	√	√	√	√	√
2 Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan	√	√	√	√	√
3 Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	√	√	√	√	√
STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Misi 10 : Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah					
Strategi: Peningkatan layanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informatika					
Arah Kebijakan:					

STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1 Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa	√	√	√	√	√
2 Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik	√	√	√	√	√
3 Penyebarluasan informasi	√	√	√	√	√
Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat panajam paser utara yang maju, modern dan religius					
Strategi: Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi					
Arah Kebijakan:					
1 Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah	√	√	√	√	√
2 Otimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat	√	√	√	√	√

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Dan Pagu Indikatif
Kabupaten Penajam Paser Utara 2018 - 2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran																	
Tujuan : 1.1. Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat																	
Sasaran : 1.1.1 Meningkatkan perekonomian masyarakat																	
	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RK7)	1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,750,000	1 dokumen	16,537,500	1 dokumen	17,364,375	1 dokumen	18,232,594	5 dokumen	82,884,469	Disnakertrans	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah UKM pertahun	2400	50	19,100,000	50	137,800,000	50	140,556,000	50	143,367,120	50	146,234,462	200	567,957,582.40	Dinas KUKPerindag	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru yang kompetitif	150	0	0	0	0	20	100,000,000	20	102,000,000	20	104,040,000	60	306,040,000.00	Dinas KUKPerindag	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Perentase Koperasi Aktif	55	4	10,000,000	6	26,700,000	1,970	30,000,000	1,990	30,600,000	2,000	31,212,000	5,966	118,512,000.00	Dinas KUKPerindag	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan jumlah Kelompok yang mendapat fasilitas pemodalan/peralatan	10	10	15,900,000	10	15,900,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	40	75,900,000.00	Dinas KUKPerindag	
		Peningkatan Jenis Produk Unggulan	0	5		10	250,000,000	50	255,000,000	50	260,100,000	50	265,302,000	160	1,030,402,000.00	Dinas KUKPerindag	
	Program Penataan Struktur Industri	Penyediaan Dokumen Regulasi Pengembangan Industri	1	0	10,000,000	0	0	20	20,000,000	20	20,400,000	20	20,808,000	60	61,208,000.00	Dinas KUKPerindag	
Tujuan : 1.2. Pengurangan angka pengangguran																	
Sasaran : 1.2.1 Mengurangi angka pengangguran																	
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan untuk Tenaga Kerja	80 orang	80 orang	310,300,000	85 orang	325,815,000	90 orang	342,105,750	95 orang	359,211,038	100 orang	377,171,589	450 orang	1,714,603,377	Disnaker	
	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	85%	85%	130,850,000	88%	137,392,500	91%	144,262,125	94%	151,475,231	97%	159,048,993	97%	723,028,849	Disnaker	
	Peningkatan Kesempatan Kerja	Tersedianya Data Base Pencari Kerja	1500 Kartu	1500 Kartu	10,000,000	1600 kartu	12,000,000	1700 kartu	14,400,000	1800 kartu	17,280,000	2000 kartu	20,736,000	8600 kartu	74,416,000	Disnaker	
		Tersedianya informasi lowongan kerja	250 Lowongan	250 Lowongan	11,500,000	260 Lowongan	12,650,000	270 Lowongan	13,915,000	280 Lowongan	15,306,500	290 Lowongan	16,837,150	1350 lowongan	70,208,650	Disnaker	
MISI 2: Pembangunan Infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu																	
Tujuan : 2.1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sebagai utilitas di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri																	
Sasaran : 2.1.1. Membangun infrastruktur																	
	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan besar	Terpenuhinya Perencanaan dokumen perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar	0	0	-	-	1 dok	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1	Rp 1,000,000,000	DPUPR	
		Koordinasi penyelenggaraan tata ruang (kali)	10 kali	10 kali	-	10 kali	210,000,000	10 kali	220,000,000	10 kali	230,000,000	10 kali	250,000,000	50 kali	Rp 910,000,000	Dinas KUKM Perindag, BAKOSURTABAL	
		dokumen tata ruang(RTRW,ROTR) yang ditetapkan Penda	1	1 dok	-	1 dok	210,000,000	1 dok	220,000,000	1 dok	230,000,000	1 dok	250,000,000	5 dokumen	Rp 910,000,000	DPUPR	
Tujuan : 2.2 Melengkapi dan Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur di KPI Buluminung dalam Rangka Integrasi Dengan Kawasan Industri Karangau (KI) Balikpapan																	
Sasaran : 2.2.1 Melengkapi Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas KPI Buluminung																	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	0	14,038,517,774	8	4,250,000,000	8	4335000000	8	4421700000	8	4,510,134,000	8	Rp 31,555,351,774	Dishub	
Tujuan : 2.3 Peningkatan Minat Investasi																	
Sasaran : 2.3.1 Meningkatkan investasi di KPI Buluminung																	
	Program Penataan Kawasan Strategis	Luas lahan penunjang Infrastruktur Kawasan KPI Buluminung (M2)	150,000	0	0	0	66,667	10,000,000,000	133,333	10,000,000,000	300,000	20,000,000,000	500,000	Rp 40,000,000,000.00	DPUPR		
		Luas lahan penunjang Infrastruktur Kawasan Strategis Lainnya (M2)	150.000 di Babulu + 2.000.000 di Bumi Harapan	0	0	0	0	150,000	10,000,000,000	200,000	10,000,000,000	620,000	20,000,000,000	3,120,000	Rp 40,000,000,000.00	DPUPR	

Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan															
Tujuan : 3.1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter															
Sasaran : 3.1.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14.77	14.77		14.85		14.92		15.07		15.07		15.07		
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10.6	10.6		10.7		10.79		10.88		10.96		10.96		
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.82	71.00		71.50		71.75		72.00		72.50		72.50		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 3-6 tahun	76.78%	78%	167,800,000	79%	171,156,000	80%	179,713,800	81%	188,699,490	81.50%	198,134,465	81.50%	905,503,755	Diidik
	bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	126 Lembaga	136 Lembaga		146 Lembaga		156 Lembaga		167 Lembaga		177 Lembaga		177 Lembaga		Diidik
	meningkatnya Jumlah lembaga PAUD berakreditasi B	50 Lembaga	100 Lembaga		125 Lembaga		150 Lembaga		175 Lembaga		200 Lembaga		200 Lembaga		Diidik
	Bertambahnya PAUD/TKN baru yang terbangun	2 Satpen	0		1 Satpen		1 Satpen		0		0		4 Lembaga		Diidik
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD berakreditasi A	55.98%	59.07%	62,989,188,600	62.16%	64,248,972,372	65.25%	72,469,748,012	68.34%	66,093,235,413	71.43%	69,397,897,184	71.43%	335,199,041,581	Diidik
	Persentase (SMP) berakreditasi A	50%	55%		86%		86.50%		87%		87.50%		87.50%		Diidik
	Banyaknya SD yg melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi	-	32		48		64		80		96		96		Diidik
	Banyaknya (SMP) yg melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi	-	8		45		55		65		75		75		Diidik
	Jumlah SD inklusi	16	16		20		24		28		32		32		Diidik
	Jumlah (SMP) inklusi	6	8		10		12		14		16		16		Diidik
	Jumlah SD e-Pembelajaran	16	32		64		80		96		112		112		Diidik
	Jumlah (SMP) e-Pembelajaran	6	10		45		50		55		60		60		Diidik
	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	94.82%	94.85%		94.88%		94.90%		94.92%		95%		95%		Diidik
	Sekolah (SMP)/MTs kondisi bangunan baik	98.74%	98.79%		98.84%		98.90%		98.95%		99%		99%		Diidik
	Jumlah (SD/SMP)N baru yang terbangun	1	0		1		2		3		3		3		Diidik
Program Pendidikan Non Formal	Banyaknya Kelurahan/desa VOKASI	14 Kelurahan	17 Kelurahan	400,590,000	20 Kelurahan	408,601,800	23 Kelurahan	429,031,890	27 Kelurahan	450,483,485	31 Kelurahan	473,007,659	31 Kelurahan	2,161,714,833	Diidik, DPUPR
	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.96%	99.96%		99.96%		99.97%		99.97%		99.98%		99.98%		Diidik
	Jumlah Kelembagaan PKBM yang berakreditasi minimal B	-	7 Lembaga		9 Lembaga		11 Lembaga		13 Lembaga		15 Lembaga		15 Lembaga		Diidik
	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	-	1 Lembaga		2 Lembaga		3 Lembaga		4 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		Diidik
	Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	5 orang	10 orang		15 orang		20 Orang		25 orang		30 Orang		30 Orang		Diidik
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru berkeualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD	87%	90%	10,946,400,000	90%	11,165,328,000	93%	11,723,594,400	95%	12,309,774,120	98%	12,925,262,826	98%	59,070,359,346	Diidik
	Guru berkeualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI	84.79%	80.50%		90.50%		100%		100%		100%		100%		Diidik
	Guru berkeualifikasi S1/D-IV Jenjang (SMP)N/MTs	92.29%	95.50%		98.50%		100%		100%		100%		100%		Diidik
	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berprestasi (lokalat nasional/Nasional)	3 orang	3 orang		4 orang		4 orang		5 orang		5 orang		24 orang		Diidik
	Persentase guru TK bersertifikasi	95%	96%		97%		97%		98%		98%		98%		Diidik
	Persentase guru SD bersertifikasi	95%	96%		97%		97%		98%		98%		98%		Diidik
	Persentase guru (SMP)N bersertifikasi	95%	96%		96%		97%		98%		99%		99%		Diidik
	Rasio guru terhadap murid (SD)	544,61/(1:18)	544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		Diidik
	Rasio guru terhadap murid per kelas (SD)	1,702/(1:20:32)	1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		Diidik
	Rasio guru terhadap murid (SMPN)	700,71/(1:17)	700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		Diidik
	Rasio guru terhadap murid per kelas (SMPN)	2,366/(1:17:30)	2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		Diidik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	APM SD/MI	96.63%	91.80%	511,490,000	91.20%	521,719,800	90.70%	547,805,790	90.40%	575,196,080	90%	603,955,883	90%	2,760,167,553	Disdik	
	APK SD/MI	113.13%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdik	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.01%	0.02%		0.02%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		Disdik	
	Angka Kelulusan SD/MI	99.98%	99.98%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdik	
	APM (SMPJN/MTs	86.03%	81.10%		80.70%		80.50%		80.20%		80%		80%		Disdik	
	APK (SMPJN/MTs	118.01%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdik	
	Angka Putus Sekolah (APS) (SMPJN/MTs	0.04%	0.07%		0.07%		0.06%		0.06%		0.06%		0.06%		Disdik	
	Angka Kelulusan (SMPJN/MTs	99.95%	99.82%		99.85%		99.85%		99.90%		99.90%		99.90%		Disdik	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMPJN/MTs	102.38%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdik	
	Rasio APM P/L SD/MI	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdik	
	Rasio APM P/L (SMPJN/MTs	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdik	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	-		2 Medali		597,830,000		2 Medali		609,786,600		3 Medali		640,275,930	3 Medali
Jumlah Siswa yang berprestasi SD/SMP		-	4 Siswa	4 Siswa	5 Siswa	5 Siswa		6 Siswa	6 Siswa	Disdik						
Jumlah Siswa SD/SMP yang mengikuti pembibitan dan Pembinaan		-	40 Siswa	40 Siswa	50 Siswa	50 Siswa		60 Siswa	60 Siswa	Disdik						
Jumlah Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga		-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	Disdik						
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Mitra Olahraga Kepemudaan	-	3 Kegiatan	191,839,000	3 Kegiatan	195,675,780	4 Kegiatan	205,459,569	4 Kegiatan	215,732,547	4 Kegiatan	226,519,175	4 Kegiatan	1,035,226,071	4 Kegiatan	Disdik
	Jumlah Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan terpelbata	3 gedung	3 gedung		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan					
Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan terpelbata	3 gedung	3 gedung	698,530,000	3 gedung	712,500,600	4 gedung	748,125,630	4 gedung	785,531,912	4 gedung	824,808,507	4 gedung	849,067,581	4 gedung	Disdik
	Meningkatkan partisipasi pemuda dibidang kewirausahaan serta meningkatkan iptek dan inteq pemuda	-	-		275 orang		400,000,000		325 orang		404,000,000		375 orang		408,040,000	
Program Pengembangan dan Manajemen Kepemudaan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	10 kegiatan	10 kegiatan	9,965,525,000	10 kegiatan	9,965,525,000	10 kegiatan	10,164,835,500	10 kegiatan	10,368,132,210	10 kegiatan	10,575,494,854	50 kegiatan	51,039,512,564	SETKAB	
	Meningkatnya minat baca	2 dokumen	4 dokumen	395,555,000	4 dokumen	399,510,550	4 dokumen	415,332,750	4 dokumen	415,332,750	4 dokumen	436,099,388	20 dokumen	2,061,830,438	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	80%	85%	80,000,000	88%	231,053,256	92%	181,053,256	95%	81,053,256	100%	85,105,919	100%	658,265,687	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	Meningkatnya IKM terhadap Pelayanan Kesehatan BLUD	49,000	78,600	30,000,000,000	81,200	32,000,000,000	82,800	32,320,000,000	85,400	32,643,200,000	88,000	32,969,632,000	88,000	32,969,632,000	RSUD	
Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat kab. Penajam Paser Utara	85%	85%	2,118,908,000	90%	2,161,286,160	95%	2,204,511,883	100%	2,248,602,121	100%	2,293,574,163	100%	11,026,882,327	Diskes	
	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan	26%	21440 org	1,492,187,000	21440 org	1,522,030,740	21440 org	1,598,132,277	21440 org	1,630,094,923	21440 org	1,662,696,821	21440 org	7,905,141,761	Diskes	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Kecamatan/Desa/Kelurahan yang sehat	55%	60%	329,570,000	70%	336,161,400	85%	342,884,628	95%	349,742,321	100%	356,737,167	100%	356,737,167	Diskes	
	Meningkatnya wilayah bebas endemis penyakit	100%	100%	1,973,610,500	100%	2,013,082,710	100%	2,053,344,364	100%	2,094,411,251	100%	2,136,299,477	100%	10,270,748,302		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Pembayaran Iuran BPJS bagi peserta Penduduk yang didaftarkan pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara	16.697 Jiwa	80.000 Jiwa	21,369,914,448	92.000 Jiwa	21,269,914,448	101.200 Jiwa	22,333,410,170	111.320 Jiwa	23,450,080,679	116.886 Jiwa	24,622,584,713	116.886 Jiwa	26,838,378,000		
	Cakupan Pasien yang dilayani di Rumah Sakit	1.000 Jiwa	1.000 Jiwa	5,120,660,250	1.000 Jiwa	5,223,073,455	1.000 Jiwa	5,327,534,924	1.000 Jiwa	5,434,085,623	1.000 Jiwa	5,542,767,335	5.000 Jiwa	26,648,121,587		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Sarana Rumah Sakt yang di jalin kerjasama oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	4 RS	5 RS	2,770,660,250	5 RS	80,000,000	5 RS	85,000,000	5 RS	90,000,000	5 RS	90,000,000	5 RS	90,000,000		
	Menurunnya Jumlah Rujukan (pasien)	910	910	813,000,000	890	813,000,000	850	810,000,000	820	810,000,000	790	810,000,000	790	4,056,000,000	RSUD	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat	90%	95%	85,010,000	100%	86,710,200	100%	88,444,404	100%	90,213,292	100%	92,017,558	100%	442,395,454	Diskes	
	Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas/Pusban dan Jaringannya	90%	92%	8,602,499,000	94%	8,774,548,980	96%	8,950,039,960	98%	9,129,040,759	100%	9,311,621,574	100%	44,767,750,272	Diskes	
Sasaran : 3.1.2. Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	-	2 Medali	597,830,000	2 Medali	609,786,600	3 Medali	640,275,930	3 Medali	672,289,727	3 Medali	705,904,213	3 Medali	3,226,086,469	Disdik	
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	-	2 Medali		2 Medali		3 Medali		3 Medali		3 Medali		Disdik			
	Jumlah Siswa yang berprestasi SD/SMP	-	4 Siswa		4 Siswa		5 Siswa		5 Siswa		6 Siswa		6 Siswa		Disdik	
	Jumlah Siswa SD/SMP yang mengikuti pembibitan dan Pembinaan	-	40 Siswa		40 Siswa		50 Siswa		50 Siswa		60 Siswa		60 Siswa		Disdik	
	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		Disdik	

	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Mitra Organisasi Kepemudaan	-	3 Kegiatan	191,839,000	3 Kegiatan	195,675,780	4 Kegiatan	205,459,569	4 Kegiatan	215,732,547	4 Kegiatan	226,519,175		1,035,226,071	Disdik	
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan				Disdik	
	Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan terpelihara	3 gedung	3 gedung	698,530,000	3 gedung	712,500,600	4 gedung	748,125,630	4 gedung	785,531,912	4 gedung	824,808,507	4 gedung	849,067,581	Disdik	
Sasaran : 3.1.3 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
	Program Keluarga Berencana	Jumlah tenaga pelayanan KB terlatih	17 orang	11 orang	2,608,515,000	11 orang	2,660,685,300	11 orang	2,713,899,006	11 orang	2,768,176,986	11 orang	2,823,540,526	55 orang	13,574,816,818	DP3AP2KB	
		Penyusutan Lalu Perumbuhan Penduduk	1.73%	1.72%		1.71%		1.70%		1.72%		1.75%		1.75%		DP3AP2KB	
		Total Fertility Rate (TFR)	2.35	2.3		2.26		2.18		2.1		2		2		DP3AP2KB	
		Contraceptive Prevalence rate (CPR)	78.80%	79%		79.20%		79.40%		79.65%		80.00%		80.00%		DP3AP2KB	
		Target angka nolus (D0)	17.66%	17.65%		17.63%		17.62%		17.60%		17.60%		17.60%		DP3AP2KB	
		Unmet Need	9.49%	9.09%		8.60%		8.20%		7.80%		7.40%		7.40%		DP3AP2KB	
		CPR/Unmet Need	8.30%	8.57%		8.88%		9.46%		10.10%		10.81%		10.81%		DP3AP2KB	
		Akseptor MKIP	15.50	23.50		24.50		25.50		26.50		27.50		27.50		DP3AP2KB	
		ASFR (Age Specific Fertility Rate)	23	22		19		17		15		13		13		DP3AP2KB	
		Peningkatan kualitas hidup perempuan	Persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan	49.90%	56.10%	541,836,410	62.40%	552,673,138	68.70%	563,726,601	74.90%	575,001,133	81.20%	586,501,156	81.20%	586,501,156	DP3AP2KB
			Peningkatan IPG	86.31	87.14		87.97		88.58		89.63		90.46		90.46		DP3AP2KB
			Peningkatan IDG	50.30	65.94		69.38		72.82		76.26		79.70		79.70		
Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknis	3.92		4.0		5.0		8.0		10		12		12		DP3AP2KB		
Penerapan Anggaran Responsif Gender pada OPD	21.21%		36.36%		51.52%		66.67%		81.82%		100%		100%		DP3AP2KB		
Persentase legislatif perempuan yang terpilih	8%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		DP3AP2KB		
Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terwujudnya KLA	624,17 poin	624,2 poin	19,988,000	635 poin	20,387,760	640 poin	21,407,148	650 poin	22,477,505	660 poin	23,601,381	700 poin	107,861,794	DP3AP2KB		
Promosi kesehatan ibu/bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	Terbentuknya Poktan	115	70	-	70	54,000,000	15	-	-	-	-	-	85	54,000,000	DP3AP2KB		
Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase keluarga rentan yang tertangani	0	7.4206	72,989,000	7.4206	74,448,780	7.4206	75,937,756	7.4206	77,456,511	7.4206	79,005,641	7.4206	79,005,641	DP3AP2KB		
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas																	
Tujuan : 4.1 Mewujudkan ketahanan pangan yang handal																	
Sasaran : 4.1.1 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)																	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	15 kelompok tani	15 kelompok tani	730,000,000	20 kelompok tani	20,030,000,000	25 kelompok tani	744,600,000	30 kelompok tani	759,492,000	30 kelompok tani	774,681,840	30 kelompok tani	Rp 23,038,773,840	Distan	
		Rasio penyuluh peningkatan sumber daya penyuluh pertanian bagi pemberdayaan petani	1 : 1	1 : 1	98,070,000	1 : 1	94,920,000	1 : 1	96,818,400	1 : 1	98,754,768	1 : 1	100,729,863	1 : 1	Rp 489,293,031	Distan	
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan	Meningkatnya produksi petani dalam usaha perkebunan (ton)	87,745	145,856	114,200,000	146,232	114,200,000	146,647	105,000,000	147,047	135,738,120	147,434	138,452,882	147,434	Rp 607,591,002	Distan	
		Persentase tertanganinya gangguan usaha perkebunan (jumlah kasus yang tertangani dibanding kasus yang terjadi) (%)	50%	50%	492,900,000	55%	492,900,000	60%	492,900,000	60%	492,900,000	60%	492,900,000	60%	Rp 2,464,500,000	Distan	
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam																
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase pendataan hasil produksi pertanian/perkebunan	100%	100%	476,600,000	100%	303,000,000	100%	309,060,000	100%	315,241,200	100%	321,546,024	100%	Rp 1,725,447,224	Distan	
		Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	0	30 Kelompok	137,295,000	30 Kelompok	137,295,000	30 Kelompok	140,050,000	30 Kelompok	142,851,000	30 Kelompok	145,708,020	120 Kelompok	Rp 703,199,020	Distan	
		Persentase skor pola pangan harapan	82.8	85.24	305,160,000	87.64	350,000,000	90.04	400,000,000	92.44	450,000,000	94.84	500,000,000	94.84	Rp 2,005,160,000	Ketpang	
Sasaran : 4.1.2 Meningkatkan distribusi pangan																	
	program Peningkatan Pemasaran hasil produksi Pertanian/ perkebunan	tingkat stabilitas harga komoditas pangan/Meningkatkan daya beli masyarakat	6 Desa Stunting	10	643,042,000	10	643,043,000	10	643,043,000	10	643,043,000	10	643,043,000	10	Rp 3,215,214,000	Ketpang	

	Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	7	8	115,000,000	10	83,012,500	12	150,000,000	13	153,000,000	15	156,060,000	15	Rp	657,072,500	Dinas Perikanan
	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Nelayan Sadar Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut	380	380	0	426	0	426	100,000,000	426	100,000,000	427	100,000,000	2,085	Rp	300,000,000	Dinas Perikanan
	Program pengembangan budidaya perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	30,994.3	6,200	1,623,949,000	6,400	2,453,028,600	6,600	150,000,000	6,800	153,000,000	7,000	156,060,000	33,000	Rp	4,536,037,600	Dinas Perikanan
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	pengembangan kawasan budidaya	1	1	32,500,000	1	300,000,000	1	150,000,000	1	153,000,000	1	156,060,000	5	Rp	791,560,000	Dinas Perikanan
	Program pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	22,330.52	4,400	2,191,740,000	4,600	248,847,300	4,800	150,000,000	5,000	153,000,000	5,200	156,060,000	24,000	Rp	2,899,647,300	Dinas Perikanan
	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Cakupan Nelayan Yang Terbina	60	175	34,550,000	200	65,850,000	200	67,167,000	200	68,510,340	200	69,880,547	200	Rp	305,957,887	Dinas Perikanan
	Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan	Penyuluh yang dilatih (orang)	0	1	89,924,000	1	17,162,300	1	17,500,000	1	17,850,000	1	18,207,000	5	Rp	160,643,300	Dinas Perikanan
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan populasi ternak (ekor)	12,956	17,411	617,000,000	17,911	414,600,000	18,111	422,892,000	18,375	431,349,840	18,644	439,976,837	18,644	Rp	2,325,818,677	Distan
	Program produksi hasil peternakan				0		521,565,000		400,000,000		408,000,000		416,160,000		Rp	1,745,725,000	Distan
	Program peningkatan produksi hasil peternakan				519,065,000								0		Rp	519,065,000	Distan
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				Penerapan teknologi		0		0		0		1 kelompok		270,000,000	1 kelompok	274,563,000
Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan																	
Tujuan : 5.1 Meningkatkan produksi pertumbuhan ekonomi dalam bidang agribisnis, agroindustri, pariwisata, perdagangan dan jasa untuk menambah nilai tambah, daya saing dan kontribusi ekspor																	
Sasaran : 5.1.1 Meningkatkan daya saing daerah																	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Perkembangan Kunjungan Wisata (orang)	72,328	72,328	25,000,000	75,944	214,500,000	80,501	220,000,000	86,136	224,400,000	93,027	228,888,000	407,937	Rp	912,788,000	Disbudpar
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	2	1	579,600,000	2	123,228,000	2	126,000,000	1	128,520,000	1	131,090,400	5	Rp	1,088,438,400	Disbudpar
	Program Pengembangan Kemitraan	Hubungan Kemitraan dengan POKDARWIS	2 kelompok	10 kelompok	30,000,000	11 kelompok	773,896,800	12 kelompok	790,000,000	14 kelompok	805,800,000	16 kelompok	821,916,000	16	Rp	3,221,612,800	Disbudpar
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Keragaman Budaya Yang Dikelola	2	2	95,000,000	3	729,565,000	3	740,000,000	3	754,800,000	3	769,896,000	3	Rp	3,089,261,000	Disbudpar
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Nilai Budaya Lokal Yang Dikembangkan	1	4	1,206,300,000	4	114,140,000	4	116,500,000	4	118,830,000	4	121,206,600	4	Rp	1,676,976,600	Disbudpar
	Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha agribisnis	37	0	0	10	200,000,000	10	204,000,000	10	208,080,000	10	212,241,600	40	Rp	824,321,600	Ketpang
		Prosentase Pelaksanaan NTP	100%	100%	661,577,500	100%	1,409,357,500	100%	675,000,000	100%	688,500,000	100%	702,270,000	100%	Rp	4,136,705,000	Dinas Pertanian
		terbangunnya pabrik beras	0	0	0	1	10,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	1	Rp	12,000,000,000	Distan, DPUKR
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	tingkat stabilitas harga komoditas pangan/Meningkatkan daya beli masyarakat	6 Desa Stunting	10	643,042,000	10	87,036,920	10	88,777,658	10	90,553,212	10	92,364,276	10	Rp	1,001,774,066	Dinas Pertanian
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi pertanian (ton)	64,414	69,325	3,831,245,000	70,956	1,022,549,000	72,682	500,000,000	74,308	510,000,000	75,962	520,200,000	75,962	Rp	6,383,994,000	Dinas Pertanian
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan IKM terbina Pertaahun	851.00	17.00	110,000,000.00	51.00	545,589,000.00	51.00	550,000,000.00	53.00	561,000,000.00	54.00	572,220,000.00	209.00		2,228,809,000.00	Dinas KUKMPerindag
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pedagang terfasilitasi	1911	1930	4,352,601,000	1,950	1,137,050,000	15	1,150,000,000	20	1,173,000,000	25	1,196,460,000	2,010		4,656,510,000.00	Dinas KUKMPerindag
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyelesaian Kasus konsumen yang terselesaikan (%)	100%	100%	1,540,880,000	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	Rp	1,680,880,000	Dinas KUKMPerindag
		Jumlah Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan tera ulang	10	50		60	50,000,000	70	70,000,000	80	100,000,000	90	150,000,000	360	Rp	370,000,000	Dinas KUKMPerindag
	Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	Cakupan pedagang yang dibina (%)	95.55	-	-	38.22	17,200,000.00	20.00	17,500,000.00	20.00	17,850,000.00	30.00	18,207,000.00	108.22		70,757,000.00	Dinas KUKMPerindag
	Program Pengembangan logistik hasil perikanan	Peningkatan logistik hasil perikanan	0	0	0	0	0	30	7,000,000,000	45	7,000,000,000	60	7,000,000,000	150	Rp	21,000,000,000	Dinas Perikanan
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan olahan ikan kemasan (jenis)	16	17	46,026,000	37	83,350,000	39	85,017,000	41	86,717,340	43	88,451,687	174	Rp	389,562,027	Dinas Perikanan
	Pengembangan Pengolahan, Diversifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk Perikanan	Peningkatan Diversifikasi dan Mutu Olahan ikan Kemasan (%)	0	0	0	0	43.75%	1,080,000,000	75%	1,851,428,571	87.50%	2,160,000,000	87.50%	Rp	5,091,428,571	Dinas Perikanan	
	Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Jumlah Nelayan yang terdaftar mengikuti Asuransi Nelayan	544	0	0	544	0	1,088	90,000,000	1,632	120,000,000	2,722	150,000,000	2,722	Rp	360,000,000	Dinas Perikanan

Sasaran : 5.1.2 Meningkatkan kerjasama perekonomian																
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyediaan data administrasi investasi, realisasi investasi	1	2	464,645,000	2	75,000,000	2	67,500,000	2	70,000,000	2	75,000,000	10	Rp	752,145,000.00	DPMP TSP
	Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani	744	400 izin		450 izin	1,688,500,000	500 izin	1,485,000,000	550 izin	1,854,000,000	600 izin	1,621,000,000	2500 izin	Rp	6,648,500,000.00	DPMP TSP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	PMA dan PMDN serta nilai investasi yang diperoleh	PMA : Rp.6.237.700.000 PMDN : Rp.186.368.900.000	PMA : Rp.12.500.000.000 PMDN : Rp.100.000.000.000	302,100,000	PMA : Rp.27.500.000.000 PMDN : Rp.250.000.000.000	394,500,000	PMA : Rp.45.000.000.000 PMDN : Rp.450.000.000.000	447,500,000	PMA : Rp.65.000.000.000 PMDN : Rp.700.000.000.000	486,000,000	PMA : Rp.87.500.000.000 PMDN : Rp.1.000.000.000.000	529,000,000	PMA : Rp.87.500.000.000 PMDN : Rp.1.000.000.000.000	Rp	2,159,100,000.00	DPMP TSP
	Jumlah penanaman modal	1 PMA, 49 PMDN	1 PMA,20 PMDN		1 PMA,30 PMDN		1 PMA,40 PMDN		1 PMA,50 PMDN		1 PMA,60 PMDN		6 PMA, 249 PMDN			
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Informasi data potensi daerah	0	0	0	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	212,500,000	1 dokumen	227,500,000	4 dokumen	Rp	1,090,000,000.00	DPMP TSP
MISI 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpendid dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan																
Tujuan : 6.1 Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan																
Sasaran : 6.1.1 Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 4 Berkembang = 24 tertinggal = 2 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 5 Berkembang = 25 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0		Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0		Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0		Mandiri = 1 Maju = 8 Berkembang = 21 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0		Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0		Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0			
	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	24 kelurahan dan 30 desa		24 kelurahan dan 30 desa		24 kelurahan dan 30 desa		24 kelurahan dan 30 desa		24 kelurahan dan 30 desa		24 kelurahan dan 30 desa			
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	cakupan pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan	79.03%	80%	16,403,301,189	82%	16,403,301,189	86%	24,000,000,000	92%	24,480,000,000	100%	24,969,600,000	100%	Rp	106,256,202,378.00	DPUPR (UPT)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana pembangunan dan usulan kegiatan secara partisipatif dan berskala prioritas	1 kegiatan	1 kegiatan	13,750,000	1 kegiatan	13,750,000	1 kegiatan	14,437,500	1 kegiatan	15,159,375	1 kegiatan	15,917,344	5 kegiatan	73,014,219	KECAMATAN SEPAKU	
		1 kegiatan	1 kegiatan	4,050,000	2 kegiatan	4,131,000	3 kegiatan	4,213,620	4 kegiatan	4,424,301	5 kegiatan	4,645,516	6 kegiatan	17,414,437	KECAMATAN WARU	
		1 kegiatan	1 kegiatan	13,850,000	1 kegiatan	14,542,500	1 kegiatan	14,833,350	1 kegiatan	15,575,018	1 kegiatan	16,353,768	5 kegiatan	75,154,636	KECAMATAN PENAJAM	
		1 kegiatan	1 kegiatan	7,000,000	1 kegiatan	28,000,000	1 kegiatan	28,560,000	1 kegiatan	29,131,200	1 kegiatan	29,713,824	5 kegiatan	122,405,024	KECAMATAN BABULU	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya pembangunan di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		24 Kelurahan	11,753,450,000	24 Kelurahan	11,753,450,000	24 Kelurahan	11,753,450,000	24 Kelurahan	11,753,450,000	24 Kelurahan	11,753,450,000	24 Kelurahan	11,753,450,000	Kecamatan Penajam, Waru, Sepaku, UPT PU	
Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS mendapatkan Bantuan	90%	90%	58,250,000	92%	61,162,500	94%	64,220,625	96%	67,431,656	98%	70,803,239	98%	321,868,020	Dmsos	
	Jumlah Panti Asuhan yang dibina	93%	95%	11,000,000	95%	35,000,000	95%	35,000,000	95%	38,500,000	95%	42,350,000	95%	161,850,000	Dmsos	
	Jumlah Fakir Miskin yang dibina (orang)	95%	98%	745,090,000	98%	782,344,500	98%	821,461,725	98%	862,534,811	98%	905,661,552	98%	4,117,092,588	Dmsos	
Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Mandiri = 0 Maju = 4 Berkembang = 24 tertinggal = 2 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 5 Berkembang = 25 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	83,365,000	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	125,500,000	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	135,000,000	Mandiri = 1 Maju = 8 Berkembang = 21 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	145,000,000	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	150,000,000			150,000,000	DPMD
		1 dokumen (terbangun 366 Rumah)	1 dokumen		1 dokumen		2,300,000		1 dokumen		2,300,000					
	masyarakat yang mendapat keterampilan dan bantuan peralatan	-	-		40 orang	350,000,000	60 orang	500,000,000	80 orang	750,000,000	100 orang	1,000,000,000	280 orang	2,600,000,000	DPMD	
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk/dibina/dilatih	-	-		30 Lembaga	100,000,000	30 Lembaga	102,000,000	30 Lembaga	104,040,000	30 Lembaga	114,444,000	120 Lembaga	420,484,000	DPMD	
	Pendidikan dan Pelatihan bagi aparat desa	-	-		30 desa	150,000,000	30 desa	153,000,000	30 desa	156,060,000	30 desa	171,666,000	30 desa	199,650,000	DPMD	
	Terselenggaranya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	70%	75%	5,700,000	78%	15,000,000	80%	15,300,000	82%	15,606,000	85%	15,918,120	85%	6,928,386	KECAMATAN WARU	
		1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,000,000	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	80,000,000	1 Kegiatan	84,000,000	1 Kegiatan	88,200,000	1 Kegiatan	332,200,000	KECAMATAN SEPAKU	
		65%	75%	62,300,000	85%	63,546,000	95%	64,816,920	95%	66,113,258	100%	67,435,524	100%	75,726,039	KECAMATAN BABULU	

	Program Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Inovasi/TTG yang diciptakan	7 Jenis	9 Jenis	1,092,660,000	10 Jenis	1,092,660,000	13 Jenis	1,092,660,000	15 Jenis	1,092,660,000	18 Jenis	1,092,660,000	65 Jenis	4,370,640,000	DPMD
		Inovasi/TTG yang dimanfaatkan	5 Jenis	7 Jenis		9 Jenis		11 Jenis		13 Jenis		15 Jenis		55 Jenis	-	DPMD
		Angka partisipasi masyarakat	15.000 Orang	16.000 Orang		17.000 Orang		18.000 Orang		19.000 Orang		20.000 Orang		20.000 Orang	82,678,735	DPMD
		Terciptanya sinergisitas program antar desa	50%	55%		60%		70%		75%		80%		80%	250,000,000	DPMD
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Berikembangnya lembaga ekonomi pedesaan	23 Bumdes aktif	23 Bumdes aktif	86,440,000	24 Bumdes aktif	86,440,000	25 bumdes aktif	86,440,000	27 bumdes aktif	86,440,000	30 bumdes aktif	86,440,000	30 bumdes aktif		DPMD
			13 pasar desa aktif	13 pasar desa aktif		14 pasar desa aktif		15 pasar desa aktif		16 pasar desa aktif		17 pasar desa aktif		17 pasar desa aktif		DPMD
		Jumlah Prudes	-	-		10 Prudes	200,000,000	10 Prudes	210,000,000	10 Prudes	220,000,000	10 Prudes	230,000,000	10 Prudes		DPMD
	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Meningkatnya peran perempuan di pedesaan	pkk aktif 113	115 PKK aktif	204,270,000	117 PKK aktif	220,500,000	118 PKK aktif	225,000,000	119 PKK aktif	230,000,000	120 PKK aktif	240,000,000	120 PKK aktif	240,000,000	DPMD
			kelompok binaan pkk 562	580 kelompok binaan pkk		600 kelompok binaan PKKK		620 kelompok binaan PKK		640 kelompok binaan PKK		660 kelompok binaan PKK		660 Kelompok binaan PKK		DPMD
	Program Pro-PPK-PPU	Terwujudnya program pembangunan pemberdayaan desa dan kelurahan	-	11	1,700,000,000	22	1,000,000,000	33	1,000,000,000	44	1,000,000,000	54	1,000,000,000			DPMD
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terbinanya dan terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa	30	6	90,500,000	12	150,000,000	18	175,000,000	24	200,000,000	30	225,000,000			DPMD
	Program pendampingan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan	Terlaksanainya pendampingan terhadap masyarakat pedesaan	-	-	-	Tersebar 4 kecamatan	5,000,000,000	Tersebar 4 kecamatan	5,000,000,000	Tersebar 4 kecamatan	5,000,000,000	Tersebar 4 kecamatan	5,000,000,000	Tersebar 4 kecamatan	20,000,000,000	DPMD
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemekaran Desa (kajian dan proses)	Usulan = 6 Penetapan = 0	-	-	Usulan = 15 Penetapan = 4	200,000,000	Usulan = 15 Penetapan = 4	200,000,000	Usulan = 15 Penetapan = 4	200,000,000	Usulan = 15 Penetapan = 3	200,000,000	Usulan = 15 Penetapan = 15	800,000,000	DPMD
		Perubahan status kelurahan menjadi desa	Usulan = 10 Penetapan = 0	-	-	Usulan = 8 Penetapan = 2	125,000,000	Usulan = 8 Penetapan = 2	125,000,000	Usulan = 8 Penetapan = 2	125,000,000	Usulan = 8 Penetapan = 2	125,000,000	Usulan = 8 Penetapan = 8	500,000,000	DPMD
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Adanya kejelasan batas-batas wilayah antar Desa dan kelurahan	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	39,925,000	1 kegiatan	40,723,500	1 kegiatan	42,759,675	1 kegiatan	44,897,659	1 kegiatan	168,305,834	KECAMATAN WARU
			-	-	-	1 kegiatan	22,885,000	1 kegiatan	23,342,700	1 kegiatan	24,509,835	1 kegiatan	25,735,327	5 kegiatan	96,472,862	KECAMATAN PENAJAM

Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman																
Tujuan : 7.1. Memantapkan infrastruktur daerah																
	Sasaran : 7.1.1 Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik (km)	485.32	43.45 KM	249,370,910,051	114.59 KM	500,835,061,300	126.60 KM	559,985,061,300	137.85 KM	477,861,524,000	95.05 KM	359,301,040,000	720.73 KM	Rp 2,147,353,596,651.00	DPUPR
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik (km)	485	43	249,370,910,051	163.71	38,000,000,000	181	50,000,000,000	196.93 KM	51,000,000,000	135.79 KM	52,020,000,000	1,206.06 KM	Rp 440,390,910,051.00	DPUPR
					62,520,000		0		0		0		0		Rp 62,520,000.00	DPUPR
					3,284,156,651		31,415,736,651		50,000,000,000		51,000,000,000		52,020,000,000		Rp 187,719,893,302.00	DPUPR
					4,393,770,000		3,666,475,000		10,000,000,000		10,200,000,000		10,404,000,000		Rp 38,664,245,000.00	DPUPR
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Panjang Jalan dan Jembatan Lingkungan Mantab (meter)	755,272,000	200	400,000,000	0	-	200	500,000,000	200	510,000,000	200	475,440,000	1,000	Rp 1,885,440,000.00	DPKPP

	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan yang memiliki drainase	13%	19%	Rp 21,911,608,000.00	30%	Rp 5,693,600,000.00	40%	Rp 10,000,000,000.00	50%	Rp 10,200,000,000.00	61%	Rp 10,404,000,000.00	61%	Rp 58,209,208,000.00	DPUPR
	Program pengendalian banjir				Rp 465,400,000.00		Rp 1,700,000,000.00		Rp 4,000,000,000.00	50%	Rp 4,080,000,000.00		Rp 4,161,600,000.00		Rp 14,407,000,000.00	DPUPR
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	jumlah bangunan/gedung terbangun	36	5	54,070,422,982	3	44,500,000,000	3	55,000,000,000	3	56,100,000,000	3	57,222,000,000	17	Rp 266,892,422,982.00	DPUPR
		Terbangunnya Sekolah Tinggi Pertanian & Perikanan	-	-	-	1 dokumen	300,000,000	2 Ha	2,000,000,000	1	10,000,000,000	-	-	1	12,300,000,000	Dindik
		titik PIU terpasang	573	550	10,150,000,000	550	8,000,000,000	550	8,000,000,000	550	8,000,000,000	550	8,000,000,000	3323	Rp 42,150,000,000.00	DPUPR
		Peningkatan Kepemilikan Rumah Layak Huni Terbangun melalui Sumber Dana Pemerintah (unit)	92	15	1,326,500,000	0		50	500,000,000	50	510,000,000	50	0	165	Rp 2,336,500,000.00	DPKPP
	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	panjang jalan yang tertangani akibat bencana (m)	500	0	0	1,000	0	1,000	1,000,000,000	1,000	1,020,000,000	1,000	1,040,400,000	4.5 KM	Rp 3,060,400,000.00	DPUPR
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya Dokumen pemetaan dan Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	0	8 dok	320,000,000	8 dok	320,000,000	3 dok	326,400,000	3 dok	332,928,000	22 dok	Rp 1,299,328,000.00	DPUPR
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	panjang normalisasi sungai (m1)	6,500	2,000	11,052,867,000	4,000	7,814,050,000	5,000	10,000,000,000	4,000	10,200,000,000	2,000	10,404,000,000	23,500	Rp 49,470,917,000.00	DPUPR
		jumlah air yang berfungsi	2	3		26 unit	9,100,000,000	26 unit	9,100,000,000	25 unit	8,750,000,000	25 unit	8,750,000,000	105 unit	Rp 35,200,000,000.00	DPUPR
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase penduduk berakses air minum	31.22%	32.00%	81,849,121,052	50.00%	0	65.00%		70%	0	75%	0	75%	Rp 81,849,121,052.00	DPUPR
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	panjang penganan pantai terbangun (m)	1450 m	0	0	250 m	0	250 m	1,000,000,000	250 m	1,020,000,000	250 m	1,040,400,000	2,450	Rp 3,060,400,000.00	DPUPR
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah kelompok masyarakat pengelola SPAM Berbasis Masyarakat	0	10	44,258,987,800	15	3,000,000,000	20	5,000,000,000	25	5,100,000,000	30	5,202,000,000	30	Rp 62,560,987,800.00	DPUPR
	Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan	titik PIU terpasang	573	550	10,150,000,000	550	11,500,000,000	550	50,000,000,000	550	51,000,000,000	550	52,020,000,000	3323	Rp 174,670,000,000.00	DPUPR
		persentase titik PIU terawat (titik)	65%	72%	145,200,000	79%	626,150,000	86%	500,000,000	93%	510,000,000	100%	200,000,000	100%	Rp 1,581,350,000.00	DPKPP
	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Operasional Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana	12 bulan	12 bulan	722,523,627	12 bulan	722,523,627	12 bulan	725,000,000	12 bulan	739,500,000	12 bulan	754,290,000	100%	Rp 3,663,837,254.00	Dihub
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAI	Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAI (unit)	306	7	115,000,000	40	669,400,000	50	680,000,000	100	693,600,000	95	707,472,000	292	2,865,472,000.00	Dihub
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Izin Trayek	100	0	147,055,000	25	761,008,000	25	770,000,000	25	785,400,000	25	801,108,000	100	3,264,571,000.00	Dihub
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Darat (kasus)	76	10	239,274,000	10	1,626,488,000	15	1,650,000,000	11	1,683,000,000	10	1,716,660,000	46	6,915,422,000.00	Dihub
	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan telah uji KIR	5000	5000	0	5000	-	5050	250,000,000	5100	260,000,000	5200	270,000,000	5200	780,000,000	Dihub
	Tujuan : 7.2 Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW															
	Sasaran : 7.2.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	25.27%	40%	8,720,308,000	60%	9,592,338,800	70%	10,551,572,680	80%	11,606,728,948	90%	12,767,402,943	3	Rp 53,238,352,370.80	DLH
	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air (titik)	tersedianya bangunan konservasi tanah dan air (titik)	NA	190	990,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190	990,460,000.00	DLH
	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan	Luas penanaman mangrove (Ha)	0	80	983,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80	983,150,000.00	DLH
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pencampahan	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	25.27%	40%	8,720,308,000	60%	9,401,458,000.00	0.70	9,401,458,000.00	0.80	9,589,487,160.00	0.90	9,781,276,903.20	3.40	46,893,988,063.20	DLH

RPJMD Penajam Paser Utara tahun 2018-2023 - 231

Tujuan : 7.3 Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana																	
Sasaran : 7.3.1 Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana	52%	60%		70%		75%		80%		85%		85%				
	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	<24 Jam	<24 Jam		<24 Jam		<12 Jam		<12 Jam		<6 jam		<6 jam				
	Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		75%		76%		77%		78%		80%		80%				
	Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan	-	-		120 Ha		150 Ha		180 Ha		200 Ha		200 Ha				
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran	85%	85%	76,400,000	88%	662,150,000	90%	770,257,500	95%	785,662,650	100%	900,000,000	100%	3,194,470,150	DPKP		
Program Penanggulangan Kebakaran	Terciptanya penanggulangan kebakaran yang cepat, tepat dan efisien	78%	80%	38,000,000	83%	50,000,000	87%	55,000,000	92%	60,500,000	95%	66,550,000	100%	270,050,000	DPKP		
Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	Terciptanya kesiapsiagaan dan pencegahan penyelamatan	85%	88%	17,100,000	90%	25,000,000	93%	26,250,000	96%	27,562,500	100%	30,000,000	100%	125,912,500	DPKP		
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	2 Kelompok	-	-	2 Kelompok	60,000,000	2 Kelompok	63,000,000	2 Kelompok	66,150,000	2 Kelompok	69,457,500	8 Kelompok	258,607,500	DPKP		
	Meningkatnya kualitas lingkungan sekitar hutan	66%	-	-	67%	-	68%	-	69%	-	70%	-	70%	-	DPKP		
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersusunnya dokumen pencegahan penanggulangan korban bencana alam yang akurat	5 dokumen	5 dokumen	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000	BPBD		
Program Kesiapsiagaan dan pencegahan dalam menghadapi Bencana	Tersusunnya dokumen pencegahan penanggulangan korban bencana alam yang akurat	5 dokumen	-	-	5 dokumen	120,750,000.00	5 dokumen	126,787,500	5 dokumen	133,126,875	5 dokumen	139,783,219	5 dokumen	399,697,594	BPBD		
Program Pengendalian Penanganan Bencana	Terpenuhiya persediaan peralatan kebencanaan	35 unit	35 unit	879,800,800	35 unit	897,396,816	40 unit	942,266,657	40 unit	989,379,990	40 unit	1,038,848,989	190 unit	3,850,296,436	BPBD		
Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Terlaksananya Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	perbaikan rumah 9 unit	perbaikan rumah 10 unit	143,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	143,030,000	BPBD		
Program rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Terlaksananya Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	perbaikan rumah 9 unit	-	-	perbaikan rumah 10 unit	150,181,500	perbaikan rumah 15 unit	157,690,575	perbaikan rumah 17 unit	165,575,104	perbaikan rumah 20 unit	173,853,859	perbaikan rumah 20 unit	497,119,538	BPBD		
Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas																	
Tujuan : 8.1 Optimalisasi PAD																	
Sasaran : 8.1.1. Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Terbit Administrasi laporan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	89,100,000	2 Dokumen	89,100,000	2 Dokumen	89,100,000	2 Dokumen	89,100,000	2 Dokumen	89,100,000	2 Dokumen	89,100,000	Rp	445,500,000.00	Badan Keuangan
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				Badan Keuangan
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	PAD (Rp)	134,191,044,743	155,661,611,902	5,133,305,000	180,567,469,806	5,133,305,000	286,105,533,454	435,000,000	343,691,472,714	435,000,000	398,682,108,348	435,000,000	1,364,708,196,224	11,571,610,000		Badan Keuangan	
	Sambungan Reguler bagi Masyarakat (Penyertaan Modal PDAM Danum Taka) (SR)	8,200	500	2,500,000,000	3,000	9,000,000,000	3,000	9,000,000,000	3,000	9,000,000,000	3,000	9,000,000,000	20,700	38,500,000,000		Badan Keuangan	
	Peningkatan PAD dari Usaha Daerah (Penyertaan Modal PERUMDA Benuw Taka) Rp.	451,895,358	500,000,000		550,000,000	0	600,000,000	2,000,000,000	650,000,000	0	700,000,000	0	3,451,895,358	2,000,000,000		Badan Keuangan	
	Peningkatan PAD dari Usaha Daerah Melalui PI 10% Wilayah Kerja Migas (Penyertaan Modal PERUMDA Benuw Taka Energy - PBTE) Rp.	0	0	2,500,000,000	5,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	35,000,000,000	12,500,000,000		Badan Keuangan	
	Sambungan Jargas (Penyertaan Modal PERUMDA Benuw Taka Energy - PBTE) Rp.	4260	5000		5000	200,000,000	5000	200,000,000	5000	200,000,000	5000	200,000,000	29260	800,000,000		Badan Keuangan	
Misi 9 : Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas																	
Tujuan : 9.1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan																	
Sasaran : 9.1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat Akuntabilitas (LKUP)	CC	B		B		B		B		B		B		-	-	
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan		75%	449,800,000	80%	458,796,000	85%	481,735,800	90%	505,822,590	95%	531,113,720	95%	2,427,268,110		BAPELUTBANG	
Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase dokumen kependudukan yang terlayani	79%	85%	1,537,396,292	89%	1,537,396,292	93%	1,537,396,292	96%	1,600,000,000	98%	1,600,000,000	100%	7,812,188,876		DISDUCAPIL	
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terpeliharanya sistem administrasi yang baik dan sistematis dalam kearsipan	4 dokumen	2 dokumen	27,237,500	5 dokumen	27,237,500	3 dokumen	28,599,375	3 dokumen	28,599,375	3 dokumen	30,029,344	16 dokumen	141,703,094		Perpustakaan & Arsip	
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip daerah	-	-	-	-	-	1	75,000,000	-	50,000,000	-	-	1 unit	125,000,000		Perpustakaan & Arsip	
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengelola Kearsipan	0	0	-	0	2,500,000,000	2	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2 orang	10,000,000,000		Perpustakaan & Arsip	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Perentase laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	80%	85%	396,700,000	88%	404,634,000	92%	412,736,680	95%	420,981,214	100%	429,400,838	100%	2,064,442,731		Inspektorat	

	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terwujudnya pembangunan zona integritas	-	WBK	30,400,000	WBK	31,008,000	WBK	31,628,160	WBK	32,260,723	WBK	32,905,938	WBK	158,202,821	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terpenuhiya jumlah auditor dan P2UPD yang bersertifikasi	17 orang	12 orang	155,000,000	12 orang	158,100,000	15 orang	161,262,000	15 orang	164,487,240	20 orang	167,776,985	20 orang	806,626,225	Inspektorat
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target	70%	75%	2,352,790,000	85%	2,399,845,800	90%	2,519,838,090	95%	2,645,829,995	100%	2,778,121,494	100%	12,696,425,378.73	BAPELITBANG
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan	70%	-	-	80%	449,800,000	85%	458,796,000	90%	467,971,920	95%	477,331,358	95%	1,853,899,278	BAPELITBANG
		Persentase capaian tindak lanjut kerjasama		-	-	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	BAPELITBANG
	Program Kerjasama Pembangunan	Fasilitasi terwujudnya pembangunan sekolah menengah vokasi dan sekolah tinggi/ perguruan tinggi yang terakreditasi dengan potensi daerah		1 Dokumen Kerjasama	50,000,000	1 Dokumen Kerjasama	50,000,000	-	-	0	-	0	-	2 Dokumen Kerjasama	100,000,000	BAPELITBANG
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	424 orang	424 orang	2,500,140,000	1393 orang	2,525,141,400	1393 orang	2,550,392,814	1393 orang	2,575,896,742	1393 orang	2,601,655,710	5996 orang	12,753,226,666	BKPP
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang dibina	-	577 orang	2,495,677,000	589 orang	2,545,590,540	600 orang	2,596,502,351	611 orang	2,648,432,398	625 orang	2,701,401,046	3002 orang	12,987,603,334	BKPP
		tertangannya kasus pelanggaran pegawai	5 Orang	5 Orang	140,000,000	5 Orang	142,800,000	5 Orang	140,000,000	5 Orang	140,000,000	5 Orang	140,000,000	20 orang	702,800,000	BKPP
	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	Terketolanya data kepegawaian yang mutakhir dan akurat	12 bulan	12 bulan	365,400,000	12 bulan	372,708,000	12 bulan	391,343,400	12 bulan	410,910,570	12 bulan	431,456,099	12 bulan	1,971,818,069	BKPP
	Program Penanganan Bidang Hukum	Terselenggaranya kegiatan penanganan bidang hukum	100%	100%	801,388,000	100%	801,400,000	100%	809,414,000	100%	817,508,140	100%	825,683,221	100%	4,055,393,361	Setkab
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Legislati Daerah (Perda) terhadap Prolegda	48%	55%	303,600,000	62%	373,600,000	70%	381,072,000	75%	388,693,440	80%	396,467,309	80%	1,843,432,749	Sekretariat DPRD
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	18 Perda	20 Perda	19,695,950,500	22 Perda	17,848,779,000	24 Perda	18,205,754,580	26 Perda	18,569,869,672	28 Perda	18,941,267,065	10 perda	93,261,620,817	Sekretariat DPRD
Misi 10 :Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah																
Tujuan : 10.1 Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan																
	Sasaran : 10.1.1 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	38 Aplikasi	38 Aplikasi		43 Aplikasi		50 Aplikasi		58 Aplikasi		68 Aplikasi		68 Aplikasi		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Jumlah OPD yang menerapkan Tatakelola keamanan informasi	0 OPD	11 OPD	6,871,025,000	19 OPD	6,871,025,000	24 OPD	7,214,576,250	29 OPD	7,575,305,063	34 OPD	7,954,070,316	34 OPD	8,351,773,831	Diskominfo
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan Data Statistik di Kab.PPU	80%	80%	477,275,000	85%	477,275,000	90%	501,138,750	95%	526,195,688	100%	552,505,472	100%	626,319,983	Diskominfo
	Program Sistem Data Gender dan Anak	aplikasi SIGA (Sistem informasi Gender dan Anak)	49.35%	58.44%	39,711,700	67.53%	40,505,934	76.62%	42,531,231	85.71%	44,657,792	100%	46,890,682	100%	214,297,339	DP3AP2KB
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KBKR yang mandiri	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	63,067	69,373	37,000,000	76,310	50,000,000	83,941	50,000,000	92,335	50,000,000	101,568	50,000,000	101,568	237,000,000	DP3AP2KB
	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Meningkatnya program/kegiatan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100%	100%	138,600,000	100%	138,600,000	100%	138,600,000	100%	145,530,000	100%	152,806,500	100%	714,136,500	setkab
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya jumlah pelayanan publik yang didukung TIK	100%	100%	2,467,675,000	100%	2,517,028,500	100%	2,567,369,070	100%	2,618,716,451.40	100%	2,671,090,780	100%	2,999,474,385	setkab
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Memberikan mutu yang baik pada kinerja Pemerintah dengan saling memberi dukungan dan informasi	85%	87%	597,654,000	88%	597,654,000	90%	609,607,080	95%	640,087,434	98%	672,091,806	98%	726,452,172	setkab
Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam pasar utara yang maju, modern dan religius																
Tujuan : 11.1 Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan																
	Sasaran : 11.1.1.Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Kasus/konflik yang bernuansa agama	0 kasus	0 kasus		0 kasus		0 kasus		0 kasus		0 kasus		0 kasus		
	Program Pembinaan Keagamaan	terselenggaranya kegiatan keagamaan	Juara 2 Juara 4 Juara 3 Juara 1	Juara 1 Juara 2 Juara 1 Juara 1	161,950,000 45,300,000 50,000,000 1,437,413,400	Juara 1 Juara 2 Juara 2 Juara 1	1,661,950,000 46,206,000 60,000,000 1,466,161,668	Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1	1,678,569,500 47,330,120 63,000,000 1,495,484,901	Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1	1,695,355,195 49,486,626 66,150,000 1,525,904,599	Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1	1,712,308,747 51,960,957 69,457,500 1,555,902,491.37	Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1	6,910,133,442 194,783,703 60,775,313 7,480,357,060	KECAMATAN PENAJAM KECAMATAN WARU KECAMATAN SEPAKU KECAMATAN BABULU

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang memadai. Guna menjaga keselarasan pencapaian target selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD, perlu ditetapkan target yang dijabarkan dalam kebijakan tahunan yang wajib dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan di tahun berkenaan.

Untuk itu, dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD beserta informasi target per tahun. Dimana disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan
Kabupaten Penajam Paser Utara 2019-2023

Kapabilitas Riil/Belanja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA	1.380.877.801.080,00	1.383.182.819.007,70	1.424.389.134.864,07	1.480.908.696.084,09	1.540.942.915.104,34
BELANJA TIDAK LANGSUNG	632.259.379.063,00	655.819.872.550,25	661.169.362.588,96	667.025.967.340,46	673.351.463.477,83
BELANJA PEGAWAI	440.425.559.155,00	470.812.692.666,25	479.743.957.101,96	489.121.784.759,46	498.968.503.799,83
BELANJA BUNGA	27.664.407.813,00	20.837.767.789,00	17.255.993.392,00	13.734.770.486,00	10.213.547.583,00
BELANJA HIBAH	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00
BELANJA BANTUAN SOSIAL					
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	748.618.422.017,00	727.362.946.457,45	763.219.772.275,11	813.882.728.743,63	867.591.451.626,51
BELANJA PEGAWAI	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00
BELANJA BARANG JASA	200.643.720.838,72	196.646.371.040,31	208.286.557.689,79	224.733.252.456,00	242.168.693.123,32
BELANJA MODAL	426.367.906.782,28	409.109.781.021,14	433.326.420.189,32	467.542.681.891,63	503.815.964.107,19

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

1,944,489,030

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Penajam Paser Utara

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		Rp
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
URUSAN WAJIB																
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				78,155,447,600		80,019,156,552		90,663,458,933		93,045,600,763		87,145,781,061		426,109,015,841		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1,631,780,000	12 bulan	1,664,415,600	12 bulan	1,697,703,912	12 bulan	1,731,657,990	12 bulan	1,766,291,150	12 bulan	8,491,848,652	DISDIK	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	20,000,000	12 bulan	21,000,000	12 bulan	22,000,000	12 bulan	23,000,000	12 bulan	24,000,000	12 bulan	110,000,000	DISDIK	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 3-6 tahun	76.78%	78%	167,800,000	79%	171,156,000	80%	179,713,800	81%	188,699,490	81.50%	198,134,465	81.50%	905,503,755	DISDIK	
	bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	126 Lembaga	136 Lembaga		146 Lembaga		156 Lembaga		167 Lembaga		177 Lembaga		177 Lembaga		DISDIK	
	meningkatnya jumlah lembaga PAUD berakreditasi B	50 Lembaga	100 Lembaga		125 Lembaga		150 Lembaga		175 Lembaga		200 Lembaga		200 Lembaga		DISDIK	
	Bertambahnya PAUD/TKN baru yang terbangun	2 Satpam	0		1 Satpam		1 Satpam		0		0		4 Lembaga		DISDIK	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD berakreditasi A	55.98%		59.07%		62,989,188,600		62.16%		64,248,972,372		65.25%		72,469,748,012	68.34%
	Persentase (SMP) berakreditasi A	50%	55%	86%	86.50%	87%		87.50%	87.50%	DISDIK						
	Banyaknya SD yg melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi	-	32	48	64	80		96	96	DISDIK						
	Banyaknya (SMP) yg melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi	-	8	45	55	65		75	75	DISDIK						
	Jumlah SD Inklusi	16	16	20	24	28		32	32	DISDIK						
	Jumlah (SMP) Inklusi	6	8	10	12	14		16	16	DISDIK						
	Jumlah SD e-Pembelajaran	16	32	64	80	96		112	112	DISDIK						
	Jumlah (SMP) e-Pembelajaran	6	10	45	60	55		60	60	DISDIK						
	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	94.82%	94.85%	94.88%	94.90%	94.92%		95%	95%	DISDIK						
	Sekolah (SMP)/MTs kondisi bangunan baik	98.74%	98.79%	98.84%	98.90%	98.95%		99%	99%	DISDIK						
	Jumlah (SD/SMP/MI) baru yang terbangun	1	0	1	2	3		3	3	DISDIK						
Program Pendidikan Non Formal	Banyaknya Kelurahan/desa VOKASI	14 Kelurahan	17 Kelurahan	400,590,000	20 Kelurahan	408,601,800	23 Kelurahan	429,031,890	27 Kelurahan	450,483,485	31 Kelurahan	473,007,659	31 Kelurahan	2,161,714,833	DISDIK	
	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.96%	99.96%		99.96%		99.97%		99.97%		99.98%		99.98%		DISDIK	
	Jumlah Kelembagaan PKBM yang berakreditasi minimal B	-	7 Lembaga		9 Lembaga		11 Lembaga		13 Lembaga		15 Lembaga		15 Lembaga		DISDIK	
	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	-	1 Lembaga		2 Lembaga		3 Lembaga		4 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		DISDIK	
	Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	5 orang	10 orang		15 orang		20 Orang		25 orang		30 Orang		30 Orang		DISDIK	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru ber kualifikasi S1/D-IV jenjang PAUD	87%	90%	10,946,400,000	90%	11,165,328,000	93%	11,723,594,400	95%	12,309,774,120	98%	12,925,262,826	98%	59,070,359,346	DISDIK	
	Guru ber kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	84.79%	80.50%		90.50%		100%		100%		100%		100%		DISDIK	
	Guru ber kualifikasi S1/D-IV jenjang (SMP)/N/MTs	92.29%	95.50%		98.50%		100%		100%		100%		100%		DISDIK	
	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi/Nasional	3 orang	3 orang		4 orang		4 orang		5 orang		5 orang		24 orang		DISDIK	
	Persentase guru TK bersertifikasi	95%	96%		97%		97%		98%		98%		98%		DISDIK	
	Persentase guru SD bersertifikasi	95%	96%		97%		97%		98%		98%		98%		DISDIK	
	Persentase guru (SMP)/N bersertifikasi	95%	96%		96%		97%		98%		99%		99%		DISDIK	

	Rasio guru terhadap murid (SD)	544,61/(1:18)	544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		544,61/(1:18)		DISDIK		
	Rasio guru terhadap murid per kelas (SD)	1,702/(1:20:32)	1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		1,702/(1:20:32)		DISDIK		
	Rasio guru terhadap murid (SMPN)	700,71/(1:17)	700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		700,71/(1:17)		DISDIK		
	Rasio guru terhadap murid per kelas (SMPN)	2,366/(1:17:30)	2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		2,366/(1:17:30)		DISDIK		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	APM SD/MI	96.63%	91.80%	511,490,000	91.20%	521,719,800	90.70%	547,805,790	90.40%	575,196,080	90%	603,955,883	90%	2,760,167,553	DISDIK
	APK SD/MI	113.13%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.01%	0.02%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		
	Angka Kelulusan SD/MI	99.98%	99.98%		100%		100%		100%		100%		100%		
	APM (SMPN)/MTs	86.03%	81.10%		80.70%		80.50%		80.20%		80%		80%		
	APK (SMPN)/MTs	118.01%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Angka Putus Sekolah (APS) (SMPN)/MTs	0.04%	0.07%		0.07%		0.06%		0.06%		0.06%		0.06%		
	Angka Kelulusan (SMPN)/MTs	99.95%	99.82%		99.85%		99.85%		99.90%		99.90%		99.90%		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMPN)/MTs	102.38%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Rasio APM P/L SD/MI	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
Rasio APM P/L (SMPN)/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	-	2 Medali	597,830,000	2 Medali	609,786,600	3 Medali	640,275,930	3 Medali	672,289,727	3 Medali	705,904,213	3 Medali	3,226,086,469	DISDIK
	Jumlah Siswa yang berprestasi SD/SMP	-	4 Siswa		4 Siswa		5 Siswa		5 Siswa		6 Siswa		6 Siswa		
	Jumlah Siswa SD/SMP yang mengikuti pembinaan dan pembinaan	-	40 Siswa		40 Siswa		50 Siswa		50 Siswa		60 Siswa		60 Siswa		
	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		
	Jumlah Mitra Organisasi Kepemudaan	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		
Program pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan terpelihara	3 gedung	3 gedung	698,530,000	3 gedung	712,500,600	4 gedung	748,125,630	4 gedung	785,531,912	4 gedung	824,808,507	4 gedung	849,067,581	DISDIK
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		
Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan terpelihara	3 gedung	3 gedung	698,530,000	3 gedung	712,500,600	4 gedung	748,125,630	4 gedung	785,531,912	4 gedung	824,808,507	4 gedung	849,067,581	DISDIK
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya Sekolah Tinggi Pertanian & Perikanan	-	-	-	1 dokumen	300,000,000	2 Ha	2,000,000,000	1	10,000,000,000	-	-	1	12,300,000,000	DISDIK & PUPR
Program Pengembangan dan Manajemen Kepemudaan	Meningkatkan partisipasi pemuda dibidang kewirausahaan serta meningkatkan iptek dan imbas pemuda	-	-	-	275 orang	400,000,000	325 orang	404,000,000	375 orang	408,040,000	425 orang	412,120,400	425 orang	1,624,160,400	DISDIK
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pendidikan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	-	-	-	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	10,000,000,000	DISDIK
KESEHATAN				126,959,430,237		50,339,150,532		52,115,367,324		53,917,366,173		55,788,124,574		164,263,726,799	
Dem Kesehatan				79,933,590,237		50,339,150,532		52,115,367,324		53,917,366,173		55,788,124,574		164,263,726,799	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terfaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	5,556,079,528	12 bulan	5,667,201,119	12 bulan	5,780,545,141	12 bulan	5,896,156,044	12 bulan	6,014,079,165		28,914,060,996	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercakupnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	338,556,000	12 bulan	345,327,120	12 bulan	352,233,662	12 bulan	359,278,336	12 bulan	366,463,902		1,761,859,020	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	kapasitas sumber daya aparatur meningkat	12 bulan	12 bulan	26,100,000	12 bulan	26,622,000	12 bulan	27,953,100	12 bulan	29,350,755	12 bulan	30,818,293		140,844,148	
Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat kab. Penajam Paser Utara	85%	85%	2,118,908,000	90%	2,161,286,160	95%	2,204,511,883	100%	2,248,602,121	100%	2,293,574,163	100%	11,026,882,327	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya wilayah bebas endemis penyakit	100%	100%	1,973,610,500	100%	2,013,082,710	100%	2,053,344,364	100%	2,094,411,251	100%	2,136,299,477	100%	10,270,748,303	
	Cakupan Pembayaran iuran BPJS bagi peserta Penduduk yang terdaftar pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara	16.697 jiwa	80.000 jiwa	21,369,914,448	92.000 jiwa	21,269,914,448	101.200 jiwa	22,333,410,170	111.320 jiwa	23,450,080,679	116.886 jiwa	24,622,584,713	116.886 jiwa	26,838,378,000	
	Cakupan Pasien yang dilayani di Rumah Sakit	1.000 jiwa	1.000 jiwa	5,120,660,250	1.000 jiwa	5,223,073,455	1.000 jiwa	5,327,534,924	1.000 jiwa	5,434,085,623	1.000 jiwa	5,542,767,335	5.000 jiwa	26,648,121,587	
	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang di jalan kerjasama oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	4 RS	5 RS	2,770,660,250	5 RS	80,000,000	5 RS	85,000,000	5 RS	90,000,000	5 RS	90,000,000	5 RS	90,000,000	

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat	90%	95%	85,010,000	100%	86,710,200	100%	88,444,404	100%	90,211,292	100%	92,017,558	100%	442,395,454	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kecamatan/Desa/Kelurahan yang sehat	-	60%	444,570,000	70%	453,461,400	85%	462,530,628	95%	471,783,241	100%	481,216,865	100%	2,313,560,134	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan	26%	21440 org	1,492,187,000	21440 org	1,522,030,740	21440 org	1,598,132,277	21440 org	1,630,094,923	21440 org	1,662,696,821	21440 org	7,905,141,761	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas/Posban dan jaringannya	90%	92%	8,602,499,000	94%	8,774,548,980	96%	8,950,039,960	98%	9,129,040,759	100%	9,311,621,574	100%	44,767,750,272	
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatnya angka harapan hidup	70.82	71.00	2,586,564,000	71.50	2,715,892,200	71.75	2,851,686,810	72.00	2,994,271,151	72.50	3,143,984,708	72.50	3,143,984,708	
Program Upaya Kesehatan Esensial				2,735,396,000											
Program Upaya Kesehatan Lainnya				2,478,340,168											
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya				1,117,154,304											
Program Pelayanan Kesehatan				21,030,630,789											
Program Pengawasan Obat dan Makanan				42,050,000											
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiw				44,700,000											
Rumah Sakit Umum Daerah				46,037,307,000		46,085,152,000		51,434,629,159	86,320	52,081,884,715		52,741,479,502	88,790	117,528,752,376	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	10,191,932,000	12 bulan	12,266,932,000	12 bulan	12,512,360,440	12 bulan	12,762,505,649	12 bulan	13,017,755,762	12 bulan	60,751,375,851	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercakupinya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	560,000,000	12 bulan	560,000,000	12 bulan	571,200,000	12 bulan	582,624,000	12 bulan	594,276,480	12 bulan	2,868,100,480	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	12 bulan	12 bulan	245,230,000	12 bulan	345,230,000	12 bulan	362,491,500	12 bulan	380,616,075	12 bulan	399,646,879	12 bulan	1,733,214,454	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan kedisiplinan aparatur	12 bulan	12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	22,500,000	12 bulan	-	12 bulan	-			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jawa/RS Poru- poru/RS Mata	Terpeliharanya Peralatan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	4,027,145,000	12 bulan	-	12 bulan	60,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000		4,227,145,000	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya data laporan kinerja SKPD dan laporan keuangan	11 dokumen	-		11 dokumen	100,000,000	11 dokumen	100,000,000	11 dokumen	110,000,000	11 dokumen	110,000,000	11 dokumen		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Jumlah Rugikan (pasien)	910	910	813,000,000	890	813,000,000	850	810,000,000	820	810,000,000	790	810,000,000	790	810,000,000	
Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	Terpeliharanya Peralatan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	200,000,000											
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya IKM terhadap Pelayanan Kesehatan BLUD	49,000	78,600	30,000,000,000	81,200	32,000,000,000	82,800	32,320,000,000	85,400	32,643,200,000	88,000	32,969,632,000	88,000	32,969,632,000	
Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan	12 bulan	12 bulan		-	-	12 bulan	4,676,177,219	12 bulan	4,722,938,991	12 bulan	4,770,168,381	12 bulan	14,169,284,591	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				505,123,602,182	5,733	190,053,806,033	223,423	320,597,210,000	398,110	325,600,354,200	923,721	351,743,161,284	3,658,187	1,697,018,133,699	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1,969,316,373	12 bulan	3,218,389,566	12 bulan	3,230,000,000	12 bulan	3,294,600,000	12 bulan	3,360,492,000	60 bulan	15,072,797,939.00	DPUPR
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				50,000,000		1,449,100,000		1,500,000,000		1,530,000,000		1,560,600,000		6,089,700,000.00	DPUPR
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				249,370,910,051		38,000,000,000		50,000,000,000		51,000,000,000		52,020,000,000		440,390,910,051.00	DPUPR
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				62,520,000		0		0		0		0		62,520,000.00	DPUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik (km)	485	43	3,284,156,651	163.71	31,415,736,651	181	50,000,000,000	196.93 KM	51,000,000,000	135.79 KM	52,020,000,000	1,206.06 KM	187,719,893,302.00	DPUPR
Program peningkatan sarana dan prasarana lebinamangan				4,393,770,000		3,666,475,000		10,000,000,000		10,200,000,000		10,404,000,000		38,664,245,000.00	DPUPR
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	panjang normalisasi sungai (mt)	6,500	2,000	11,052,867,000	4,000	7,814,050,000	5,000	10,000,000,000	4,000	10,200,000,000	2,000	10,404,000,000	23,500	49,470,917,000.00	DPUPR
Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase penduduk berakses air minum	31.22%	32.00%	81,849,121,052	50.00%	0	65.00%		70%	0	75%	0	75%	81,849,121,052.00	DPUPR
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah kelompok masyarakat pengelola SPAM berbasis Masyarakat	0	10	41,758,987,800	15	3,000,000,000	20	5,000,000,000	25	5,100,000,000	30	5,202,000,000	30	62,060,987,800.00	DPUPR
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan yang memiliki	13%	19%	21,911,608,000	30%	5,693,600,000	40%	10,000,000,000	50%	10,200,000,000	61%	10,404,000,000	61%	58,209,208,000.00	DPUPR

Program pengendalian banjir	drainase			465,400,000		1,700,000,000		4,000,000,000		4,080,000,000		4,161,600,000		Rp	14,407,000,000.00	DPUPR
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	jumlah bangunan/gedung terbangun	36	5	54,070,422,982	3	44,500,000,000	3	55,000,000,000	3	56,100,000,000	3	57,222,000,000	17	Rp	266,892,422,982.00	DPUPR
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	cakupan pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan	79.03%	80%	16,403,301,189	82%	16,403,301,189	86%	24,000,000,000	92%	24,480,000,000	100%	24,969,600,000	100%	Rp	106,256,202,378.00	DPUPR
Program Perencanaan Tata Ruang	Revisi RTRW	1 dokumen	1 dokumen	262,210,000	1 dokumen	1,882,210,000	1 dokumen	1,882,210,000	1 dokumen	1,919,854,200	1 dokumen	1,958,251,284	5 dokumen	Rp	7,904,735,484.00	DPUPR
Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah advis yang terbit	13 dok	13 dok	550,630,000	13 dok	395,630,000	13 dok	400,000,000	13 dok	408,000,000	13 dok	416,160,000	65 dokumen	Rp	2,170,420,000.00	DPUPR
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Operasional Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana	12 bulan	12 bulan	722,523,627	12 bulan	722,523,627	12 bulan	725,000,000	12 bulan	739,500,000	12 bulan	754,290,000	100%	Rp	3,663,837,254.00	DPUPR
Program Penataan Kawasan Strategis	Luas lahan penunjang Infrastruktur Kawasan KPI Bulumungung (M2)	150,000	0	0	0	0	66,667	10,000,000,000	133,333	10,000,000,000	300,000	20,000,000,000	500,000	Rp	40,000,000,000.00	DPUPR
	Luas lahan penunjang Infrastruktur Kawasan Strategis Lainnya (M2)	150.000 di Babulu + 2.000.000 di Bumi Harapan	0	0	0	0	150,000	10,000,000,000	200,000	10,000,000,000	620,000	20,000,000,000	3,120,000	Rp	40,000,000,000.00	DPUPR
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luasan lahan yang terbebas	0	4 ha	8,695,857,457	28 ha	17,850,000,000	2 ha	20,000,000,000	2 ha	20,400,000,000	-	20,808,000,000	57	Rp	87,753,857,457.00	DPUPR
Program pembinaan dan pengembangan bidang letenagalisirikan	titik PIU terpasang	573	550	10,150,000,000	550	11,500,000,000	550	50,000,000,000	550	51,000,000,000	550	52,020,000,000	3323	Rp	174,670,000,000.00	DPUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan terkait pemanfaatan ruang sesuai peraturan	1 dok	0	0	1 dok	102,790,000	1 dok	100,000,000	1 dok	102,000,000	1 dok	104,040,000	1 dok	Rp	408,830,000.00	DPUPR
Program Pembangunan turap/halus/bronjong	terbangunnya turap /bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (m)	2600 m	0	0	1250 m	0	1250 m	1,000,000,000	1250 m	1,020,000,000	1250 m	1,040,400,000	7600	Rp	3,060,400,000.00	DPUPR
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	panjang jalan yang tertangani akibat bencana (m)	500	0	0	1,000	0	1,000	1,000,000,000	1,000	1,020,000,000	1,000	1,040,400,000	4.5 KM	Rp	3,060,400,000.00	DPUPR
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	panjang pengaman pantai terbangun (m)	1450 m	0	0	250 m	0	250 m	1,000,000,000	250 m	1,020,000,000	250 m	1,040,400,000	2,450	Rp	3,060,400,000.00	DPUPR
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya Dokumen pemetaan dan Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan/perencanaan sukuntern pemukiman pembangunan kota-kota	0	0	0	8 dok	320,000,000	8 dok	320,000,000	3 dok	326,400,000	3 dok	332,928,000	22 dok	Rp	1,299,328,000.00	DPUPR
Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan besar	koordinasi penyelenggaraan tata ruang (kali)	10 kali	10 kali		10 kali	210,000,000	10 kali	220,000,000	10 kali	230,000,000	10 kali	250,000,000	50 kali		910,000,000.00	DPUPR
	dokumen tata ruang(RTRW,RDR) yang ditetapkan Perda	1	1 dok		1 dok	210,000,000	1 dok	220,000,000	1 dok	230,000,000	1 dok	250,000,000	5 dokumen		910,000,000.00	DPUPR
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				100,000,000												
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan				12,385,655,320	68,120	8,462,500,000	80,634	8,840,000,000	86,801	9,016,800,000	92,943	9,721,333,691	96,877		48,626,289,011	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran (bulan)	12	12	715,146,160	12	941,432,000	12	960,000,000	12	979,200,000	12	715,146,160	60	Rp	4,310,924,320.00	DPKPP
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	12	12	12,000,000	12	310,000,000	12	320,000,000	12	326,400,000	12	12,000,000	60	Rp	980,400,000.00	DPKPP
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Cakupan Sanitasi (Septik Komunal) Pemukiman Terbangun (%)	20%	1.6%	106,450,000	0.8%	703,000,000	0.8%	500,000,000	0.8%	510,000,000	0.8%	112,500,000	4.7%	Rp	1,929,950,000.00	DPKPP
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Panjang Jalan dan Jembatan Lingkungan Mantab (meter)	755,272,000	200	400,000,000	0		200	500,000,000	200	510,000,000	200	475,440,000	1,000	Rp	1,885,440,000.00	DPKPP
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong Permukiman terbangun (meter)	61,420	67,562	3,000,000,000	67,562		79,846	500,000,000	85,988	510,000,000	92,130	510,000,000	92,130	Rp	4,520,000,000.00	DPKPP
Program pembinaan dan pengembangan bidang letenagalisirikan	persentase titik PIU terawat (titik)	65%	72%	145,200,000	79%	626,150,000	86%	500,000,000	93%	510,000,000	100%	200,000,000	100%	Rp	1,981,350,000.00	DPKPP
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Persentase Peningkatan Lembaga/Pengembang Perumahan dalam komunitas Perumahan Kab. PPU	21 Lembaga	48%	0	48%	58,000,000	48%	60,000,000	48%	61,200,000	48%	19,399,325	50 Lembaga 238%	Rp	198,599,325.00	DPKPP
Program pengelolaan areal pemakaman	peningkatan areal pemakaman yang dikelola (TPU)	10	2	816,595,000	2	668,995,000	2	500,000,000	2	510,000,000	2	970,604,817	10	Rp	3,466,194,817.00	DPKPP
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang terkelola (%)	100%	100%	3,667,106,160	100%	3,426,418,000	100%	2,000,000,000	100%	2,040,000,000	100%	4,358,722,382	100%	Rp	15,492,246,541.78	DPKPP
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan Kepemilikan Rumah Layak Huni Terbangun melalui Sumber Dana Pemerintah (unit)	92	15	1,326,500,000	0		50	500,000,000	50	510,000,000	50	0	165	Rp	2,336,500,000.00	DPKPP
Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni (unit)	920	300	182,800,000	300	599,500,000	300	600,000,000	300	612,000,000	300	217,276,080	1,500	Rp	2,211,576,080.00	DPKPP

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Peningkatan Sambungan Rumah Tangga Terpusang (SR)	220	510	1,453,413,000	200		200	500,000,000	200	510,000,000	200	1,464,100,000	1,310	Rp	3,927,513,000.00	DPKP
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanian	Peningkatan kasus tanah yang terselesaikan (kasus)	8	10	94,545,000	10	485,900,000	10	500,000,000	10	510,000,000	10	112,376,187	50	Rp	1,702,821,187.00	DPKP
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	luas lahan milik pemerintah yang telah terinventarisir (Ha)	2990.32	20	465,900,000	20	845,105,000		900,000,000	25	918,000,000	25	553,768,740	90	Rp	3,682,773,740.00	DPKP
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				8,866,734,000		12,600,692,840	12	9,041,309,982	12	9,291,392,456	11	8,812,071,384	13		48,612,200,065	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,613,042,000	100%	1,645,302,840	100%	1,727,567,982	100%	1,813,946,381	100%	1,904,643,700	100%		8,704,502,903	DPKP
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	cakupan peningkatan sarana dan prasarana	100%	100%	363,052,000	100%	5,578,990,000	100%	1,565,892,000	100%	1,034,465,000	100%	1,142,866,000	100%		9,685,265,000	DPKP
Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	-	-	-	-	100%	250,000,000	100%	800,000,000	-	-	100%		1,050,000,000	DPKP
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran	85%	85%	76,400,000	88%	662,150,000	90%	770,257,500	95%	785,662,650	100%	900,000,000	100%		3,194,470,150	DPKP
Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Menurunnya jumlah korban kebakaran	10,825,000	100%	5,000,000	100%	150,000,000	100%	100,000,000	100%	170,000,000	100%	110,000,000	100%		535,000,000	DPKP
Program Penanggulangan Kebakaran	Terciptanya pengurangan kebakaran yang cepat, tepat dan efisien	78%	80%	38,000,000	83%	50,000,000	87%	55,000,000	92%	60,500,000	95%	66,550,000	100%		270,050,000	DPKP
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan	80%	83%	578,660,000	88%	200,000,000	93%	204,000,000	96%	208,080,000	100%	212,241,600	100%		1,402,981,600	DPKP
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Meningkatnya kualitas lingkungan sekitar hutan	80%			86%	60,000,000	89%	63,000,000	92%	66,150,000	95%	69,457,500	100%		258,607,500	DPKP
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Terkendalinya serta tertanganinya penanggulangan kebakaran hutan	85%	85%	6,131,480,000	88%	4,009,250,000	92%	4,049,342,500	95%	4,089,835,925	100%	4,130,734,284	100%		22,410,642,709	DPKP
Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	Terciptanya kesiapsiagaan dan pencegahan penyelamatan	85%	88%	17,100,000	90%	25,000,000	93%	26,250,000	96%	27,562,500	100%	30,000,000	100%		125,912,500	DPKP
Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan, penyelamatan	Meningkatnya kesiapsiagaan, pencegahan, penyelamatan	-	-	-	70%	100,000,000	80%	102,000,000	90%	104,040,000	100%	106,120,800	100%		412,160,803	DPKP
Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan	-	-	-	120 Ha	60,000,000	150 Ha	65,000,000	180 Ha	65,000,000	200 Ha	70,000,000	100%		260,000,000	DPKP
Program Pengendalian Penanganan Bencana	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	2 Kelompok	2 Kelompok	44,000,000	2 Kelompok	-	2 Kelompok	-	2 Kelompok	-	2 Kelompok	-	8 Kelompok		44,000,000	DPKP
	Meningkatnya kualitas lingkungan sekitar hutan	66%	66%		67%		68%		69%		70%		70%			DPKP
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	2 Kelompok	-	-	2 Kelompok	60,000,000	2 Kelompok	63,000,000	2 Kelompok	66,150,000	2 Kelompok	69,457,500	8 Kelompok		258,607,500	DPKP
	Meningkatnya kualitas lingkungan sekitar hutan	66%	-		67%		68%		69%		70%		70%			DPKP
Satuan Polisi Pamong Praja				6,406,782,000		6,410,192,960	2	7,111,837,875	2	7,288,797,769	2	8,238,053,157	2		8,238,053,157	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	3,967,020,000	1 tahun	4,046,360,400	1 tahun	4,290,400,000	1 tahun	4,357,000,000	1 tahun	4,757,000,000	1 tahun		4,757,000,000	Satpol PP
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	9%	11%	1,120,556,000	12%	703,000,000	13%	1,000,000,000	14%	1,000,000,000	15%	1,500,000,000	15%		1,500,000,000	Satpol PP
Program peningkatan disiplin aparatur	meningkatnya kedisiplinan aparatur	197 anggota	197 anggota	772,956,000	197 anggota	314,675,000	197 anggota	850,000,000	197 anggota	900,000,000	197 anggota	900,000,000	197 anggota		900,000,000	Satpol PP
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	tercapainya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	83%	85%	227,050,000	86%	692,800,000	87%	300,012,000	88%	343,975,100	89%	376,488,855	90%		376,488,855	Satpol PP
Program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Capaian Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat	100%	95%	43,250,000	96%	211,290,000	97%	215,090,000	98%	218,890,000	99%	222,690,000	100%		222,690,000	Satpol PP
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pektas)	Razia Penyakit Masyarakat	12 kali	12 kali	42,750,000	24 kali	81,367,500	24 kali	85,435,875	24 kali	89,707,669	24 kali	94,193,052	24 kali		94,193,052	Satpol PP
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Wilayah bencana yang tertanggulangi	±100 ha	±100 ha	28,600,000	±100 ha	56,300,000	±100 ha	63,200,000	±100 ha	70,160,000	±100 ha	77,183,000	±100 ha		77,183,000	Satpol PP
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Anggota Satpol PP yang terlatih	43 anggota	43 anggota	204,600,000	90 anggota	306,400,000	90 anggota	307,700,000	90 anggota	309,065,000	90 anggota	310,498,250	90 anggota		310,498,250	Satpol PP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah						2,887,732,500			3,010,378,050	0		3,116,963,532	0		3,228,146,621				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan			1,495,781,700	12 bulan	1,525,697,334	12 bulan	1,556,211,281	12 bulan	1,587,335,506	12 bulan	1,666,702,282	12 bulan	6,306,030,769	BPBD		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan			274,120,000	12 bulan	279,602,400	12 bulan	293,582,520	12 bulan	308,263,646	12 bulan	323,674,728		1,199,638,894	BPBD		
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersusunnya dokumen pencegahan penanggulangan korban bencana alam yang akurat	5 dokumen	5 dokumen		-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000	BPBD		
Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	terusunnya dokumen pengamanan yang kondusif	2 dokumen	2 dokumen			15,000,000	2 dokumen	15,750,000	2 dokumen	17,325,000	2 dokumen	19,057,500	2 dokumen	25,000,000	15 kegiatan	76,382,500	BPBD		
Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Terlaksananya Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	perbaikan rumah 9 unit	perbaikan rumah 10 unit		-	143,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	143,030,000	BPBD		
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya kesiapsiagaan serta penyebaran informasi kepada masyarakat	25%	25%			20,000,000	27%	21,000,000	28%	23,100,000	29%	25,410,000	30%	27,951,000	30%	96,461,000	BPBD		
Program Pengendalian Penanganan Bencana	Terpenuhiya persediaan peralatan kebencanaan	35 unit	35 unit			879,800,800	35 unit	897,396,816	40 unit	942,266,657	40 unit	989,379,990	40 unit	1,038,848,989	190 unit	3,850,296,436	BPBD		
Program Kesiapsiagaan dan pencegahan dalam menghadapi Bencana	Tersusunnya dokumen pencegahan penanggulangan korban bencana alam yang akurat	5 dokumen	-		-	5 dokumen	120,750,000,00	5 dokumen	126,787,500	5 dokumen	133,126,875	5 dokumen	139,783,219	5 dokumen	399,697,594	BPBD			
Program rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Terlaksananya Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	perbaikan rumah 9 unit	-		-	perbaikan rumah 10 unit	150,181,500	perbaikan rumah 15 unit	157,690,575	perbaikan rumah 17 unit	165,575,104	perbaikan rumah 20 unit	173,853,859	perbaikan rumah 20 unit	497,119,538	BPBD			
Dinas Sosial						1,928,785,000		2,675,761,960	10		3,221,766,151	10		3,351,750,998					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%			731,803,000	100%	746,439,060	100%	783,761,013	100%	822,949,064	100%	864,096,517	100%	3,949,048,653	DINSOS		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	95%			58,587,000	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,500,000	100%	231,525,000	100%	930,612,000	DINSOS		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang dibina (orang)	95%	98%			745,090,000	98%	782,344,500	98%	821,461,725	98%	862,534,811	98%	905,661,552	98%	4,117,092,588	DINSOS		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Menurunya jumlah PMKS	88%	90%			88,220,000	92%	89,984,400	94%	91,784,088	96%	93,619,770	98%	95,492,165	98%	459,100,423	DINSOS		
Program pembinaan anak terlantar	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	88%	90%			12,280,000	92%	12,894,000	94%	13,538,700	96%	14,215,635	98%	14,926,417	98%	67,854,752	DINSOS		
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat yang dibina	93%	95%			6,080,000	95%	200,000,000	95%	232,000,000	95%	232,000,000	95%	232,000,000	95%	902,080,000	DINSOS		
Program pembinaan pensi asuhan/ pensi jompo	Jumlah Pensi Asuhan yang dibina	93%	95%			11,000,000	95%	35,000,000	95%	35,000,000	95%	38,500,000	95%	42,350,000	95%	161,850,000	DINSOS		
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyandang penyakit Sosial yang dibina	95%	95%			200,000,000	98%	400,000,000	98%	400,000,000	98%	450,000,000	98%	450,000,000	98%	1,900,000,000	DINSOS		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunya jumlah PMKS	92%	92%			17,475,000	95%	147,937,500	95%	570,000,000	95%	550,000,000	95%	470,000,000	95%	1,755,412,500	DINSOS		
Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS mendapatkan Bantuan	90%	90%			58,250,000	92%	61,162,500	94%	64,220,625	96%	67,431,656	98%	70,803,239	98%	321,868,020	DINSOS		
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																			
TENAGA KERJA																			
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						1,175,588,000		1,831,197,400	1		1,936,020,270	1		2,026,090,584	1		2,131,757,343	1	9,090,653,596
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			662,838,000	12 Bulan	695,979,900	12 Bulan	730,778,895	12 Bulan	767,317,840	12 Bulan	805,683,732	12 Bulan	3,662,598,366	Dinasaker		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan			15,100,000	12 Bulan	16,610,000	12 Bulan	18,271,000	12 Bulan	20,098,100	12 Bulan	22,107,910	12 Bulan	92,187,010	Dinasaker		
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan untuk Tenaga Kerja	80 orang	80 orang			310,300,000	85 orang	325,815,000	90 orang	342,105,750	95 orang	359,211,038	100 orang	377,171,589	450 orang	1,714,603,377	Dinasaker		
Peningkatan Kesempatan Kerja	Tersedianya Data Base Pencari Kerja	1500 Kartu	1500 Kartu			10,000,000	1600 kartu	12,000,000	1700 kartu	14,400,000	1800 kartu	17,280,000	2000 kartu	20,736,000	8600 kartu	74,416,000	Dinasaker		
	Tersedianya informasi lowongan kerja	250 Lowongan	250 Lowongan			11,500,000	260 Lowongan	12,650,000	270 Lowongan	13,915,000	280 Lowongan	15,306,500	290 Lowongan	16,837,150	1350 lowongan	70,208,650	Dinasaker		
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	85%	85%			130,850,000	88%	137,392,500	91%	144,262,125	94%	151,475,231	97%	159,048,993	97%	723,028,849	Dinasaker		
Program Transmigrasi Lokal		2 kawasan	2 kawasan			20,000,000	1 kegiatan	615,000,000	1 kegiatan	645,750,000	1 kegiatan	678,037,500	1 kegiatan	711,939,375	1 kegiatan	2,670,726,875	Dinasaker		
Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	1 dokumen	1 dokumen			15,000,000	1 dokumen	15,750,000	1 dokumen	16,537,500	1 dokumen	17,364,375	1 dokumen	18,232,594	5 dokumen	82,884,469	Dinasaker		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						4,098,637,410		4,813,081,888		4,877,167,486		4,999,135,251	101,806	5,125,171,376	101,891	21,189,135,584			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan			390,495,000	12 bulan	398,304,900	12 bulan	418,220,145	12 bulan	439,131,152	12 bulan	461,087,710	12 bulan	2,107,238,907	DP3AP2KB		

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	79,720,000	12 bulan	81,314,400	12 bulan	89,445,840	12 bulan	98,390,424	12 bulan	108,229,466	12 bulan	457,100,130	DP3AP2XB
Program Sistem Data Gender dan Anak	aplikasi SIGA (Sistem informasi Gender dan Anak)	49.35%	58.44%	39,711,700	67.53%	40,505,934	76.62%	42,531,231	85.71%	44,657,792	100%	46,890,682	100%	214,297,339	DP3AP2XB
Peningkatan kualitas hidup perempuan	Persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan	49.90%	56.10%	541,836,410	62.40%	552,673,138	68.70%	563,726,601	74.90%	575,003,133	81.20%	586,501,156	81.20%	586,501,156	DP3AP2XB
	Peningkatan IPG	86.31	87.14		87.97	88.58		89.63		90.46		90.46		DP3AP2XB	
	Peningkatan IDG	50.30	65.94		69.38	72.82		76.26		79.70		79.70		DP3AP2XB	
	Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknologi	3.92	4.0		5.0	8.0		10		12		12		DP3AP2XB	
	Penerapan Anggaran Responsif Gender pada OPD	21.21%	36.36%		51.52%	66.67%		81.82%		100%		100%		DP3AP2XB	
	Persentase legislatif perempuan yang terpilih	8%	30%		30%	30%		30%		30%		30%		DP3AP2XB	
					30%	30%		30%		30%		30%		DP3AP2XB	
Program peningkatan Kualitas keluarga	Persentase keluarga rentan yang tertangani	0	7.4206	72,989,000	7.4206	74,448,780	7.4206	75,937,756	7.4206	77,456,511	7.4206	79,005,641	7.4206	79,005,641	DP3AP2XB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KBKR yang mandiri	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	63,067	69,373	37,000,000	76,310	50,000,000	83,941	50,000,000	92,335	50,000,000	101,568	50,000,000	101,568	237,000,000	DP3AP2XB
Program Keluarga Berencana				2,608,515,000		2,660,685,300		2,713,899,006		2,768,176,986		2,823,540,526		13,574,816,818	DP3AP2XB
	Jumlah tenaga pelayanan KB terlatih	17 orang	11 orang		11 orang			11 orang			11 orang		55 orang		DP3AP2XB
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.23%	1.22%		1.21%		1.19%		1.17%		1.15%		1.15%		DP3AP2XB
	Total Fertility Rate (TFR)	2.35	2.3		2.26		2.18		2.1		2		2		DP3AP2XB
	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	78.80%	79%		79.20%		79.40%		79.65%		80.00%		80.00%		DP3AP2XB
	Tingkat putus pakai (DO)	17.66%	17.65%		17.64%		17.63%		17.62%		17.60%		17.60%		DP3AP2XB
	Unmet Need	9.49%	9.09%		8.60%		8.20%		7.80%		7.40%		7.40%		DP3AP2XB
	CPR/Unmet Need	8.30%	8.57%		8.88%		9.46%		10.10%		10.81%		10.81%		DP3AP2XB
	Akseptor MKUP	15.50	23.50		24.50		25.50		26.50		27.50		27.50		DP3AP2XB
	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	23	22		19		17		15		13		13		DP3AP2XB
															DP3AP2XB
Program Penyajian tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	14.81%	-	-	48.15%	760,000,000	68.41%	775,200,000	83.33%	790,704,000	100%	806,518,080	100%	3,132,422,080	DP3AP2XB
Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	Terbentuknya Poktan	115	70	-	70	54,000,000	15	-	-	-	-	-	85	54,000,000	DP3AP2XB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentasi kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standar	7.89%	28%	73,000,000	24%	74,460,000	20%	78,183,000	16%	82,092,150	12%	86,196,758	12%	393,931,908	DP3AP2XB
Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Presentasi anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan perlindungan khusus	39.47%	19.57%	45,393,800	19.57%	46,301,676	19.57%	48,616,760	19.57%	51,047,598	21.74%	53,599,978	21.74%	244,959,811	DP3AP2XB
Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terwujudnya KLA	624.17 poin	624.2 poin	19,988,000	635 poin	20,387,760	640 poin	21,407,148	650 poin	22,477,505	660 poin	23,601,381	700 poin	107,861,794	DP3AP2XB
Program pelayanan kontrasepsi	Akseptor MKUP	24.50	24.50	54,600,000	24.50	55,692,000	24.50	56,805,840	24.50	57,941,957	24.50	59,100,796	24.50	284,140,593	DP3AP2XB
Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Presentasi kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standar	24.00	24.00	135,388,500	25.00	138,096,270	26.00	140,858,195	27.00	143,675,359	28.00	146,548,866	28.00	704,567,191	DP3AP2XB
LINGKUNGAN HIDUP															
Dasar Lingkungan Hidup															
				12,522,851,000	71	11,063,876,309	72	10,826,731,000	73	11,043,266,400	75	11,264,130,932	414	56,720,854,861	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran (bulan)	12 bulan	12 bulan	640,353,000	12 bulan	885,676,000	12 bulan	900,000,000	12 bulan	918,000,000	12 bulan	936,360,000	60 bulan	4,280,389,000.00	DLH
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)			27,680,000		84,000,000		85,680,000		87,393,600		89,141,472	60 bulan	373,895,072.00	DLH
Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	tersedianya bangunan konservasi tanah dan air (itik)	NA	190	990,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190	990,460,000.00	DLH
Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan	Luas penanaman mangrove (Ha)	0	80	983,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80	983,150,000.00	DLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	25.27%	40%	8,720,308,000	60%	9,401,458,000	70%	9,401,458,000	80%	9,589,487,160	90%	9,781,276,903	3	46,893,988,063.20	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan Penusakan Lingkungan Hidup	IKLH	na	68.5	219,593,000	69.50	479,692,309	70.50	219,593,000	71.50	223,984,860	73.50	228,464,557	75.65	1,371,327,726.20	DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				44,132,000		164,822,000		170,000,000		173,400,000		176,868,000		729,222,000.00	DLH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	tersedianya informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	1 (dokumen)	1	14,850,000	1	48,228,000	1	50,000,000	1	51,000,000	1	52,020,000	5	216,098,000,00	DUH
Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	Luas penanaman bambu/pohon pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah (Ha)	NA	60	882,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60	882,325,000,00	DUH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPPL															
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2,865,048,720	1	2,897,418,609	2	3,019,179,795	2	3,122,566,530	2	3,166,428,011	2	15,050,635,665	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	1,068,494,428	1 tahun	1,089,864,317	1 tahun	1,111,661,603	1 tahun	1,133,894,835	1 tahun	1,156,572,732	1 tahun	5,560,487,914	DISKAPAIL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	1 tahun	238,158,000	1 tahun	239,158,000	1 tahun	251,115,900	1 tahun	263,671,695	1 tahun	276,855,280	1 tahun	1,269,958,875	DISKAPAIL
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya data laporan kinerja SKPD dan laporan keuangan	6 Laporan	-	-	6 Laporan	31,000,000	6 Laporan	40,000,000	6 Laporan	42,000,000	6 Laporan	45,000,000	36 Laporan	158,000,000	DISKAPAIL
Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase dokumen kependudukan yang terlayani	79%	85%	1,537,396,292	89%	1,537,396,292	93%	1,537,396,292	96%	1,600,000,000	98%	1,600,000,000	100%	7,812,188,876	DISKAPAIL
Program Pengembangan dan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	tersedianya pelayanan administrasi kependudukan yang modern dan inovatif	-	-	-	-	-	100%	79,000,000	100%	83,000,000	100%	88,000,000	100%	250,000,000	DISKAPAIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				3,661,450,000		9,326,745,300	52	9,543,792,206	69	9,861,978,850	145	10,196,298,427	85	33,439,052,518	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 TAHUN	12 BULAN	391,515,000	12 BULAN	399,345,300	12 BULAN	407,332,206	12 BULAN	415,478,850	60	423,788,427		2,037,459,783	DMPD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 TAHUN	12 BULAN	12,500,000	12 BULAN	25,000,000	12 BULAN	30,000,000	12 BULAN	35,000,000		35,000,000		197,500,000	DMPD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Mandiri = 0 Maju = 4 Berkebang = 24 tertinggal = 2 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 5 Berkebang = 25 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	83,565,000	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkebang = 24 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	125,500,000	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkebang = 22 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	135,000,000	Mandiri = 1 Maju = 8 Berkebang = 21 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	145,000,000	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkebang = 18 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	150,000,000		150,000,000	DMPD
	Tersedianya data rumah layak huni bagi keluarga miskin	1 dokumen (terbangun 366 Rumah)	1 dokumen		1 dokumen	2,300,000	1 dokumen	2,300,000	1 dokumen	2,300,000	1 dokumen	2,300,000		9,200,000	DMPD
	masyarakat yang mendapat keterampilan dan bantuan peralatan	-	-		40 orang	350,000,000	60 orang	500,000,000	80 orang	750,000,000	100 orang	1,000,000,000	280 orang	2,600,000,000	DMPD
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk/dibina/dilatih	-	-		30 Lembaga	100,000,000	30 Lembaga	102,000,000	30 Lembaga	104,040,000	30 Lembaga	114,444,000	120 Lembaga	420,484,000	DMPD
	Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur desa	-	-		30 desa	150,000,000	30 desa	153,000,000	30 desa	156,060,000	30 desa	171,666,000	30 desa	199,650,000	DMPD
Program Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Inovasi/TTG yang diciptakan	7 Jenis	9 Jenis	1,092,660,000	10 Jenis	1,092,660,000	13 Jenis	1,092,660,000	15 Jenis	1,092,660,000	18 Jenis	1,092,660,000	65 Jenis	4,370,640,000	DMPD
	Inovasi/TTG yang dimanfaatkan	5 Jenis	7 Jenis		9 Jenis		11 Jenis		13 Jenis		15 Jenis		55 Jenis	-	DMPD
	Angka partisipasi masyarakat	15.000 Orang	16.000 Orang		17.000 Orang		18.000 Orang		19.000 Orang		20.000 Orang		20.000 Orang	82,678,735	DMPD
	Terciptanya sinergisitas program antar desa	50%	55%		60%		70%		75%		80%		80%	250,000,000	DMPD
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan	23 Bumdes aktif	23 Bumdes aktif	86,440,000	24 Bumdes aktif	86,440,000	25 bumdes aktif	86,440,000	27 bumdes aktif	86,440,000	30 bumdes aktif	86,440,000	30 bumdes aktif	86,440,000	DMPD
		13 pasar desa aktif	13 pasar desa aktif		14 pasar desa aktif		15 pasar desa aktif		16 pasar desa aktif		17 pasar desa aktif		17 pasar desa aktif		DMPD
	Jumlah Prudes	-	-	-	10 Prudes	200,000,000	10 Prudes	210,000,000	10 Prudes	230,000,000	10 Prudes	230,000,000	10 Prudes	230,000,000	DMPD
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Meningkatnya peran perempuan di pedesaan	pkk aktif 113	115 PKK aktif	204,270,000	117 PKK aktif	220,500,000	118 PKK aktif	225,000,000	119 PKK aktif	230,000,000	120 PKK aktif	240,000,000	120 PKK aktif	240,000,000	DMPD
		kompek binaan pkk 562	580 Kelompok binaan PKK		600 Kelompok binaan PKK		620 Kelompok binaan PKK		640 Kelompok binaan PKK		660 Kelompok binaan PKK		660 Kelompok binaan PKK		DMPD
Program Pro-PKK-PPU	Terwujudnya program pembangunan pemberdayaan desa dan kelurahan	-	11	1,700,000,000	22	1,000,000,000	33	1,000,000,000	44	1,000,000,000	54	1,000,000,000	54	1,000,000,000	DMPD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terbangun dan terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa	30	6	90,500,000	12	150,000,000	18	175,000,000	24	200,000,000	30	225,000,000	30	225,000,000	DMPD
	Terbik administrasi aset desa	-	-	-	30 desa	100,000,000	30 desa	100,000,000	30 desa	100,000,000	30 desa	100,000,000	30 desa	100,000,000	DMPD

Program Pendampingan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan	Telaksananya pendampingan terhadap masyarakat pedesaan	-	-	-	Tersebar 4 kecamatan	5,000,000,000	Tersebar 4 kecamatan	5,000,000,000	Tersebar 4 kecamatan	5,000,000,000	Tersebar 4 kecamatan	5,000,000,000	Tersebar 4 kecamatan	20,000,000,000	DMPD	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemekaran Desa (bajian dan proses)	Usulan = 6 Penetapan = 0	-	-	Usulan = 15 Penetapan = 4	200,000,000	Usulan = 15 Penetapan = 4	200,000,000	Usulan = 15 Penetapan = 4	200,000,000	Usulan = 15 Penetapan = 3	200,000,000	Usulan = 15 Penetapan = 15	800,000,000	DMPD	
	Perubahan status kelurahan menjadi desa	Usulan = 10 Penetapan = 0	-	-	Usulan = 8 Penetapan = 2	125,000,000	Usulan = 8 Penetapan = 2	125,000,000	Usulan = 8 Penetapan = 2	125,000,000	Usulan = 8 Penetapan = 2	125,000,000	Usulan = 8 Penetapan = 8	500,000,000	DMPD	
PERHUBUNGAN																
Dinas Perhubungan						16,734,527,734	5,107	10,317,150,000	5,172	10,725,000,000	5,268	10,944,500,000	5,362	11,168,190,000	5,766	59,889,967,794
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran (bulan)	12	12	1,989,680,960	12	2,482,221,000	12	2,500,000,000	12	2,550,000,000	12	2,550,000,000	12	2,601,000,000	60	12,122,901,960
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	12	12	205,000,000	12	528,033,000	12	540,000,000	12	540,800,000	12	550,800,000	12	561,816,000	60	2,385,649,000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	0	14,038,517,774	8	4,250,000,000	8	4,335,000,000	8	4,335,000,000	8	4,421,700,000	8	4,510,134,000	8	31,555,351,774
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LUAI	Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LUAI (unit)	306	7	115,000,000	40	669,400,000	50	680,000,000	100	680,000,000	95	693,600,000	95	707,472,000	292	2,865,472,000
Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah lain Trayek	100	0	147,055,000	25	761,008,000	25	761,008,000	25	770,000,000	25	785,400,000	25	801,108,000	100	3,264,571,000
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Darat (kasus)	76	10	239,274,000	10	1,626,488,000	15	1,626,488,000	11	1,650,000,000	11	1,683,000,000	10	1,716,660,000	46	6,915,422,000
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan telah uji KIR	5000	5000	0	5000	-	5050	250,000,000	5100	250,000,000	5100	260,000,000	5200	270,000,000	5200	780,000,000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian						8,165,038,700		13,615,649,200	2	12,024,537,660	2	12,453,931,143	2	12,904,860,960	2	24,741,921,825
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	614,088,700	12 bulan	614,088,700	12 bulan	614,088,700	12 bulan	644,793,135	12 bulan	677,032,792	12 bulan	710,884,431	12 bulan	3,260,887,758
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	49,050,000	12 bulan	49,540,500	12 bulan	49,540,500	12 bulan	52,017,525	12 bulan	54,618,401	12 bulan	57,349,321	12 bulan	262,575,748
Program kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab. Ponorogo Paser Utara baik didalam daerah maupun luar daerah	100%	100%	141,600,000	100%	141,600,000	100%	141,600,000	100%	148,680,000	100%	156,114,000	100%	163,919,700	100%	172,115,685
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Jumlah OPD yang menerapkan Tatakelola keamanan informasi	0 OPD	11 OPD	6,871,025,000	19 OPD	6,871,025,000	24 OPD	6,871,025,000	29 OPD	7,214,576,250	29 OPD	7,575,305,063	34 OPD	7,954,070,316	34 OPD	8,351,773,831
Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian	Meningkatnya Jumlah OPD yang menerapkan Tatakelola keamanan informasi	14 OPD	22 OPD	12,000,000	33 OPD	12,120,000	33 OPD	12,120,000	33 OPD	13,332,000	33 OPD	14,665,200	33 OPD	16,131,720	33 OPD	68,248,500
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	43 Aplikasi	-	-	43 Aplikasi	1,300,000,000	43 Aplikasi	1,300,000,000	43 Aplikasi	1,300,000,000	43 Aplikasi	1,300,000,000	43 Aplikasi	1,300,000,000	43 Aplikasi	5,200,000,000
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten Bidang: Teknologi informasi; Komunikasi; Persandian; dan Statistik	-	-	-	10 Orang SDM Aparatur yang kompeten, 1 Unit LAB Komputer serta Fasilitas	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-	10 Orang SDM Aparatur yang kompeten, 1 Unit LAB Komputer serta Fasilitas	-	2,000,000,000
Program Monitoring dan Evaluasi Data Statistik	Ketersediaan data dan informasi sektoral daerah	-	-	-	5 Kegiatan	1,200,000,000	5 Kegiatan	1,200,000,000	5 Kegiatan	1,200,000,000	5 Kegiatan	1,200,000,000	5 Kegiatan	1,200,000,000	5 Kegiatan	4,800,000,000
Program Penyusunan Data Pokok Daerah	Ketersediaan data dan informasi sektoral daerah	-	-	-	2 dokumen	950,000,000	2 dokumen	950,000,000	2 dokumen	950,000,000	2 dokumen	950,000,000	2 dokumen	950,000,000	8 dokumen	
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan Data Statistik di Kab.PPU	80%	80%	477,275,000	85%	477,275,000	90%	477,275,000	95%	501,138,750	95%	526,195,688	100%	552,505,472	100%	626,319,983
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan						6,823,563,000	2,176	3,116,412,000	2,277	3,313,256,000	2,314	3,417,121,120	2,350	3,542,263,542	9,174	14,929,932,062
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	755,082,000	12 bulan	906,173,000	12 bulan	906,173,000	12 bulan	920,000,000	12 bulan	938,400,000	12 bulan	957,168,000	60 bulan	3,721,741,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terjadiya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,200,000	12 bulan	10,404,000	12 bulan	10,612,080	60 bulan	41,216,080
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah UKM pertahun	2400	50	19,100,000	50	137,800,000	50	137,800,000	50	140,556,000	50	143,367,120	50	146,234,462	200	567,957,582
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan UKM terbiasa Pertahun	851	17	110,000,000	51	545,589,000	51	545,589,000	53	550,000,000	53	561,000,000	54	572,230,000	209	2,228,809,000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan jumlah kelompok yang mendapat fasilitas pemodalan/insentive	10	10	15,900,000	10	15,900,000	10	15,900,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	40	75,900,000
	Peningkatan Jenis Produk Unggulan	0	5		10	250,000,000	50	250,000,000	50	255,000,000	50	260,100,000	50	265,302,000	160	1,030,402,000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pedagang terfasilitasi	1911	1930	4,352,601,000	1,950	1,137,050,000	15	1,137,050,000	20	1,150,000,000	20	1,173,000,000	25	1,196,460,000	2,010	4,656,510,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	55	4	10,000,000	6	26,700,000	1,970	30,000,000	1,990	30,600,000	2,000	31,212,000	5,966	118,512,000	Dinas KUR	Perindag
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyelesaian Kasus konsumen yang terselesaikan (%)	100%	100%	1,540,880,000	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	Rp 1,680,880,000	Dinas KUR	Perindag
	Jumlah Asat ukur, YAKSI, TWSING dan Perlinggapannya (LUTP) yang diterima dan dilaksanakan	10	50		60	50,000,000	70	70,000,000	80	100,000,000	90	150,000,000	360	Rp 370,000,000	Dinas KUR	Perindag
Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	Cakupan pedagang yang dibina (%)	96	0	0	38	17,200,000	20	17,500,000	20	17,850,000	30	18,207,000	108	70,757,000.00	Dinas KUR	Perindag
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru yang kompetitif	150	0	0	0	0	20	100,000,000	20	102,000,000	20	104,040,000	60	306,040,000.00	Dinas KUR	Perindag
Program Penataan Struktur Industri	Penyediaan Dokumen Regulasi Pengembangan Industri	1	0	10,000,000	0	0	20	20,000,000	20	20,400,000	20	20,808,000	60	61,208,000.00	Dinas KUR	Perindag
PENANAMAN MODAL																
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu				1,363,351,000	2	3,204,606,000	2	2,796,606,000	2	3,219,106,000	2	3,197,406,000	10	13,781,075,000		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	544,906,000	12 bulan	544,906,000	12 bulan	544,906,000	12 bulan	544,906,000	12 bulan	644,906,000	60 bulan	Rp 2,824,530,000.00	DPMP	TSP
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terjadinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	51,700,000	12 bulan	51,700,000	12 bulan	51,700,000	12 bulan	51,700,000	12 bulan	100,000,000	60 bulan	Rp 306,800,000.00	DPMP	TSP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	PMA dan PMDN serta nilai investasi yang diperoleh	PMA : Rp.6.237.700.000 PMDN : Rp.186.368.900.000	PMA : Rp.12.500.000.000 PMDN : Rp.100.000.000.000	302,100,000	PMA : Rp.27.500.000.000 PMDN : Rp.250.000.000.000	394,500,000	PMA : Rp.45.000.000.000 PMDN : Rp.450.000.000.000	447,500,000	PMA : Rp.65.000.000.000 PMDN : Rp.700.000.000.000	486,000,000	PMA : Rp.87.500.000.000 PMDN : Rp.1.000.000.000.000	529,000,000	PMA : Rp.87.500.000.000 PMDN : Rp.1.000.000.000.000	Rp 2,159,100,000.00	DPMP	TSP
	Jumlah penanaman modal	1 PMA, 49 PMDN	1 PMA,20 PMDN		1 PMA,30 PMDN		1 PMA,40 PMDN		1 PMA,50 PMDN		1 PMA,60 PMDN		6 PMA, 249 PMDN		DPMP	TSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyediaan data administrasi investasi, realisasi investasi	1	2	464,645,000	2	75,000,000	2	67,500,000	2	70,000,000	2	75,000,000	10	Rp 752,145,000.00	DPMP	TSP
	Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tangtangani	744	400 izin		450 izin	1,688,500,000	500 izin	1,485,000,000	550 izin	1,854,000,000	600 izin	1,621,000,000	2500 izin	Rp 6,648,500,000.00	DPMP	TSP
Program Penyajian potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Informasi data potensi daerah	0	0	0	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	212,500,000	1 dokumen	227,500,000	4 dokumen	Rp 1,090,000,000.00	DPMP	TSP
KEBUDAYAAN																
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				2,569,840,000	75,953	2,831,189,800	80,510	2,882,500,000	86,144	2,940,150,000	93,035	2,998,953,000	407,965	14,222,632,000		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	566,835,000	12 bulan	697,660,000	12 bulan	710,000,000	12 bulan	724,200,000	12 bulan	738,684,000	60 bulan	Rp 3,437,379,000	Disbudpar	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terjadinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	67,105,000	12 bulan	178,200,000	12 bulan	180,000,000	12 bulan	183,600,000	12 bulan	187,272,000	60 bulan	Rp 796,177,000	Disbudpar	
Program Pengembangan Nilai Budaya	Nilai Budaya Lokal Yang Dikembangkan	1	4	1,206,300,000	4	114,140,000	4	116,500,000	4	118,830,000	4	121,206,600	4	Rp 1,676,976,600	Disbudpar	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Keragaman Budaya Yang Dikelola	2	2	95,000,000	3	729,565,000	3	740,000,000	3	754,800,000	3	769,896,000	3	Rp 3,089,261,000	Disbudpar	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	2	1	579,600,000	2	123,228,000	2	126,000,000	1	128,520,000	1	131,090,400	5	Rp 1,088,438,400	Disbudpar	
Program Pengembangan Kemitraan	Hubungan Kemitraan dengan POKDARWIS	2 kelompok	10 kelompok	30,000,000	11 kelompok	773,896,800	12 kelompok	790,000,000	14 kelompok	805,800,000	16 kelompok	821,916,000	16	Rp 3,221,612,800	Disbudpar	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Perkembangan Kunjungan Wisata (orang)	72,328	72,328	25,000,000	75,944	214,500,000	80,501	220,000,000	86,136	224,400,000	93,027	228,888,000	407,937	Rp 912,788,000	Disbudpar	
PERPUSTAKAAN																
Dinas Perpustakaan dan Arsip				1,315,005,000		4,171,324,697	4	4,821,198,300	1	3,897,232,710	1	3,942,230,434	1	18,092,182,191		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	667,540,000	12 bulan	674,215,400	12 bulan	680,890,800	12 bulan	680,890,800	12 bulan	694,508,616	60 bulan	3,398,045,616	Perpustakaan & Arsip	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	41,910,000	12 bulan	262,502,098	12 bulan	862,502,098	12 bulan	62,502,098	12 bulan	113,967,688	60 bulan	1,343,383,982	Perpustakaan & Arsip	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal	5 orang	5 orang	50,000,000	10 orang	50,706,393	10 orang	51,720,521	10 orang	52,754,931	10 orang	53,810,030	45 orang	258,991,875	Perpustakaan & Arsip	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca	2 dokumen	4 dokumen	395,555,000	4 dokumen	399,510,550	4 dokumen	415,332,750	4 dokumen	415,332,750	4 dokumen	436,099,388	20 dokumen	2,061,830,438	Perpustakaan & Arsip	
Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	80%	85%	80,000,000	88%	231,053,256	92%	181,053,256	95%	81,053,256	100%	85,105,919	100%	658,265,687	Perpustakaan & Arsip	
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terpeliharanya sistem administrasi yang baik dan sistematis dalam kearsipan	4 dokumen	2 dokumen	27,237,500	5 dokumen	27,237,500	3 dokumen	28,599,375	3 dokumen	28,599,375	3 dokumen	30,029,344	16 dokumen	141,703,094	Perpustakaan & Arsip	
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip daerah	-	-	-	-	-	1	75,000,000	-	50,000,000	-	-	1 unit	125,000,000	Perpustakaan & Arsip	
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan prasarana Kearsipan		2 dokumen	-	-	1 dokumen	26,099,500	1 dokumen	26,099,500	1 dokumen	26,099,500	1 dokumen	28,709,450	4 dokumen	52,199,000	Perpustakaan & Arsip	
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengelola Kearsipan	0	0	52,762,500	0	2,500,000,000	2	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2 orang	10,052,762,500	Perpustakaan & Arsip	

URUSAN PERIKANAN																	
KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
Dinas Perikanan				7,523,172,000	12,423	4,191,797,000	13,502	9,999,834,000	14,465	10,835,859,251	15,876	11,209,719,294	63,472	43,760,381,545			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1,198,483,000	12 bulan	920,776,300	12 bulan	940,000,000	12 bulan	958,800,000	12 bulan	977,976,000	60 bulan	Rp	4,996,035,300	Dinas Perikanan	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terjadinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	409,000,000	12 bulan	19,770,000	12 bulan	20,150,000	12 bulan	20,553,000	12 bulan	20,964,060	60 Bulan	Rp	490,437,060	Dinas Perikanan	
Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	7	8	115,000,000	10		12	150,000,000	13	153,000,000	15	156,060,000	15	Rp	657,072,500	Dinas Perikanan	
Program pengembangan budidaya perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	30,994.3	6,200	1,623,949,000	6,400	2,453,028,600	6,600	150,000,000	6,800	153,000,000	7,000	156,060,000	33,000	Rp	4,536,037,600	Dinas Perikanan	
	Peningkatan jumlah kolam air tawar (unit)	0	0	0	200		300	0	300	0	200	0	1,000	Rp	-	Dinas Perikanan	
Program pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	22,330.52	4,400	2,191,740,000	4,600	248,847,300	4,800	150,000,000	5,000	153,000,000	5,200	156,060,000	24,000	Rp	2,899,647,300	Dinas Perikanan	
Program pengembangan sistem Penyuhan perikanan	Cakupan Nelayan Yang Terbina	60	175	34,550,000	200	65,850,000	200	67,167,000	200	68,510,340	200	69,880,547	200	Rp	305,957,887	Dinas Perikanan	
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Peningkatan kelompok nelayan yang dibina	2	3	0	4		5	0	5	0	6	0	15	Rp	-	Dinas Perikanan	
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	Peningkatan olahan ikan kemasan (jenis)	16	17	46,026,000	37	83,350,000 300,000,000 17,162,300	39	85,017,000	41	86,717,340	43	88,451,687	174	Rp	389,562,027	Dinas Perikanan	
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	pengembangan kawasan budidaya	1	1	32,500,000	1		1	150,000,000	1	153,000,000	1	156,060,000	5	Rp	791,560,000	Dinas Perikanan	
Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan	Penyuluh yang dilatih (orang)	0	1	89,924,000	1		1	17,500,000	1	17,850,000	1	18,207,000	5	Rp	160,643,300	Dinas Perikanan	
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Nelayan Sader Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut	380	380	0	426	0	426	100,000,000	426	100,000,000	427	100,000,000	2,085	Rp	300,000,000	Dinas Perikanan	
Pengembangan Pengolahan, Diversifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk Perikanan	Peningkatan Diversifikasi dan Mutu Olahan Ikan Kemasan (kg)	0	0	0	0	0	43.75%	1,080,000,000	75%	1,851,428,571	87.50%	2,160,000,000	87.50%	Rp	5,091,428,571	Dinas Perikanan	
Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Jumlah Nelayan yang terdaftar mengikuti Asuransi Nelayan	544	0	0	544	0	1,088	90,000,000	1,632	120,000,000	2,722	150,000,000	2,722	Rp	360,000,000	Dinas Perikanan	
Program Peningkatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terperluhinya pembebasan lahan (lokasi)	0	1	1,782,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Rp	1,782,000,000	Dinas Perikanan	
Program Pengembangan logistik hasil perikanan	Peningkatan logistik hasil perikanan	0	0	0	0	0	30	7,000,000,000	45	7,000,000,000	60	7,000,000,000	150	Rp	21,000,000,000	Dinas Perikanan	
PERTANIAN																	
Dinas Pertanian				8,290,151,496	235,102	25,169,980,496	237,643	4,531,320,400	239,733	4,640,726,928	242,043	4,723,683,467	242,043	47,355,862,787			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	612,198,996	12 bulan	629,593,996	12 bulan	645,000,000	12 bulan	657,900,000	12 bulan	671,058,000	60 bulan	Rp	3,215,750,992	Distrik	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Prosentase Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	0	30 kelompok	137,295,000	30 kelompok	137,295,000	30 kelompok	140,050,000	30 kelompok	142,851,000	30 kelompok	145,708,020	120 Kelompok	Rp	703,199,020	Distrik	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase Pelaksanaan NTP	100%	100%	661,577,500	100%	1,409,357,500	100%	675,000,000	100%	688,500,000	100%	702,270,000	100%	Rp	4,136,705,000	Distrik	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase pendataan hasil produksi pertanian	100%	100%	476,600,000	100%	303,000,000	100%	309,060,000	100%	315,241,200	100%	321,546,024	100%	Rp	1,725,447,224	Distrik, DUPR	
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	15 kelompok tani	15 kelompok tani	730,000,000	20 kelompok tani	20,030,000,000	25 kelompok tani	744,600,000	30 kelompok tani	759,492,000	30 kelompok tani	774,681,840	30 kelompok tani	Rp	23,038,773,840	Distrik	
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi pertanian (ton)	64,414	69,325	3,831,245,000	70,956	1,022,549,000	72,682	500,000,000	74,308	510,000,000	75,962	520,200,000	75,962	Rp	6,383,994,000	Distrik	
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan	Rasio penyuluh peningkatan sumber daya penyuluh pertanian bagi pemberdayaan petani	1 : 1	1 : 1	98,070,000	1 : 1	94,920,000	1 : 1	96,818,400	1 : 1	98,754,768	1 : 1	100,729,863	1 : 1	Rp	489,293,031	Distrik	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan populasi ternak (ekor)	12,956	17,411	617,000,000	17,911	414,600,000	18,111	422,892,000	18,375	431,349,840	18,644	439,976,837	18,644	Rp	2,325,818,677	Distrik	
Program produksi hasil peternakan				0		521,565,000		400,000,000		408,000,000		416,160,000		Rp	1,745,725,000	Distrik	
Program peningkatan produksi hasil peternakan				519,065,000								0		Rp	519,065,000	Distrik	
Program Pengembangan Usaha Perkebunan	Meningkatnya produksi petani dalam usaha perkebunan (ton)	87,745	145,856	114,200,000	146,232	114,200,000	146,647	105,000,000	147,047	115,738,120	147,434	138,452,882	147,434	Rp	607,591,002	Distrik	
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Prosentase tertangganya gangguan usaha perkebunan (jumlah kasus yang tertangani dibanding kasus yang	50%	50%	492,900,000	55%	492,900,000	60%	492,900,000	60%	492,900,000	60%	492,900,000	60%	Rp	2,464,500,000	Distrik	

				1,723,211,920	108	1,445,211,920	110	1,537,116,158	112	1,589,458,482	115	1,662,247,651	145	7,937,346,131	
Dinas Ketahanan Pangan															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	715,739,920	12 bulan	738,675,000	12 bulan	753,448,500	12 bulan	768,517,470	12 bulan	781,887,819	60 bulan	Rp	3,760,268,709 Ketang
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terjadinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	59,270,000	12 bulan	69,500,000	12 bulan	70,890,000	12 bulan	72,307,800	12 bulan	73,753,956	60 bulan	Rp	345,721,756 Ketang
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	pencapaian skor pola pangan harapan	82.8	85.24	305,160,000	87.64	350,000,000	90.04	400,000,000	92.44	450,000,000	94.84	500,000,000	94.84	Rp	2,005,160,000 Ketang
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	tingkat stabilitas harga komoditas pangan/Meningkatkan daya beli masyarakat	6 Desa Stunting	10	643,042,000	10	87,036,920	10	88,777,658	10	90,553,212	10	92,364,276	10	Rp	1,001,774,066 Ketang
Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha agribisnis	37	0	0	10	200,000,000	10	204,000,000	10	208,080,000	10	212,241,600	40	Rp	824,321,600 Ketang
PENUNJANG URUSAN															
INSPEKTORAT															
Inspektorat				1,215,952,570		1,246,811,621	2	1,271,747,854	2	1,297,182,811	2	1,323,126,467	2	6,354,821,323	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,600,000	12 bulan	31,212,000	12 bulan	31,836,240	12 bulan	32,472,965	12 bulan		156,121,205 Inspektorst
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terpenuhinya jumlah auditor dan PZUPD yang bersertifikat	17 orang	12 orang	155,000,000	12 orang	158,100,000	15 orang	161,242,000	15 orang	164,487,240	20 orang	167,776,985	20 orang		806,636,225 Inspektorst
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	80%	85%	396,700,000	88%	404,634,000	92%	412,726,680	95%	420,981,214	100%	429,400,838	100%		2,064,442,731 Inspektorst
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	580,852,570	12 bulan	592,469,621	12 bulan	604,319,014	12 bulan	616,405,394	12 bulan	628,733,502	12 bulan		3,022,280,101 Inspektorst
Program Penetapan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terwujudnya pembangunan zona integrasi	-	WBK	30,400,000	WBK	31,008,000	WBK	31,628,160	WBK	32,260,723	WBK	32,905,938	WBK		158,202,821 Inspektorst
Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	meningkatnya koordinasi pengawasan	-	-	23,000,000	100%	30,000,000	100%	30,600,000	100%	31,212,000	100%	31,836,240	100%		146,648,240 Inspektorst
PERENCANAAN															
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				7,325,525,685		7,090,926,299		4,438,850,974		5,196,669,216	6	4,864,875,677	7	137,895,247,719	BAPELITBANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase atas kelengkapan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	967,850,000	100%	987,207,000	100%	1,036,567,350	100%	1,088,395,718	100%	1,142,815,503	100%		5,222,835,571 BAPELITBANG
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang layak fungsi	20%	20%	776,325,000	20%	67,457,500	20%	70,830,375	20%	74,371,894	100%	78,090,488	100%		1,067,075,257.19 BAPELITBANG
Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	12 bulan	12 bulan	6,600,000	12 bulan	6,666,000	12 bulan	6,732,660	12 bulan	6,799,987	12 bulan	6,867,986	12 bulan		33,666,633.07 BAPELITBANG
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target		75%	2,352,790,000	85%	2,376,317,900	90%	2,495,133,795	95%	2,619,890,485	100%	2,750,885,009	100%		12,595,017,188.74 BAPELITBANG
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase capaian jumlah program perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar yang memenuhi target	-	75%	515,860,685	80%	526,177,899	85%	552,486,794	90%	580,111,133	95%	609,116,690	95%		2,783,753,200.83 BAPELITBANG
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu		100%	1,610,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		1,610,750,000.00 Bapelitbang
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase capaian jumlah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang memenuhi target	-	-	-	80%	2,075,000,000	85%	75,000,000	90%	375,000,000	95%	75,000,000	95%		2,600,000,000.00 BAPELITBANG
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase capaian jumlah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang memenuhi target		75%	383,500,000	80%	1,052,100,000.00	85%	202,100,000.00	90%	452,100,000.00	95%	202,100,000.00	95%		111,122,149,868.25 BAPELITBANG
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase berkurangnya daerah rawan bencana		-	-	80%	500,000,000	-	-	-	-	-	-	80%		500,000,000 BAPELITBANG
Program Peningkatan dan Penguasaan Lalu Lintas	Dokumen ANDAL lalu lintas kawasan Industri Bulutimung	-	-	-	1 dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen		300,000,000 BAPELITBANG
Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data yang valid dan memadai sebagai bahan perentu kebijakan		100%	355,960,000	100%	384,196,000	100%	412,615,600	100%	443,877,160	100%	478,264,876	100%		2,074,913,636 BAPELITBANG
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan		75%		80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	95%		- BAPELITBANG
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase capaian tindak lanjut kerjasama		-	-	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%		100,000,000 BAPELITBANG
Program Kerjasama Pembangunan	Fasilitasi terwujudnya pembangunan sekolah menengah vokasi dan sekolah tinggi/penguruan tinggi yang terakreditasi dengan potensi daerah		1 Dokumen Kerjasama	1 Dokumen Kerjasama	50,000,000	-	-	0	-	0	-	2 Dokumen Kerjasama			100,000,000 BAPELITBANG
Program Penetapan Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya perumusan kebijakan pembangunan daerah	100%	100%	365,900,000	100%	373,218,000	100%	391,878,900.00	100%	411,472,845.00	100%	432,046,487.25	100%		1,974,516,232.25 BAPELITBANG

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terbengunnya Pusat Penelitian Kelautan dan Nuklir	-	-	-	1 Kawasan	7,000,000,000	1 Kawasan	17,000,000,000	-	-	-	-	2 kawasan	24,000,000,000	BAPELTBANG		
						7,341,402,000											
KEUANGAN						7,391,502,000	186,117,477,808	19,091,502,000	296,705,541,456	16,440,882,000	354,341,480,716	14,440,882,000	409,382,116,350	14,440,882,000	1,403,160,141,544	71,805,650,000	
Badan Keuangan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran (bulan)	12 bulan	12 bulan	2,028,535,000	100%	2,028,535,000	100%	2,070,000,000	100%	2,070,000,000	100%	2,070,000,000	100%	2,070,000,000	100%	10,267,070,000	BK
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	12 bulan	12 bulan	140,562,000	100%	140,562,000	100%	145,000,000	100%	145,000,000	100%	145,000,000	100%	145,000,000	100%	716,124,000	BK
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terbit Administrasi laporan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	89,100,000	2 Dokumen	89,100,000	2 Dokumen	90,882,000	2 Dokumen	90,882,000	2 Dokumen	90,882,000	2 Dokumen	90,882,000	2 Dokumen	450,846,000	BK
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	PAD (Rp)	134,191,044,743	155,661,611,902	5,133,305,000	180,567,469,806	5,133,305,000	286,105,533,454	435,000,000	343,691,472,714	435,000,000	398,682,108,348	435,000,000	1,364,708,196,224	435,000,000	1,364,708,196,224	11,571,610,000	BK
	Sambungan Reguler bagi Masyarakat (Penyertaan Modal PDAM Danum Taka) (SR)	8,200	500		3,000	9,000,000,000	3,000	9,000,000,000	3,000	9,000,000,000	3,000	9,000,000,000	20,700	9,000,000,000		36,000,000,000	BK
	Peningkatan PAD dari Usaha Daerah (Penyertaan Modal PERUMDA Benuo Taka) Rp.	451,895,358	500,000,000		550,000,000	0	600,000,000	2,000,000,000	650,000,000	0	700,000,000	0	3,451,895,358	700,000,000	0	2,000,000,000	BK
	Peningkatan PAD dari Usaha Daerah Melalui P 10% Wilayah Kerja Migas (Penyertaan Modal PERUMDA Benuo Taka Energy - PBTE) Rp.	0	0		5,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	35,000,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	BK
	Sambungan Jangas (Penyertaan Modal PERUMDA Benuo Taka Energy - PBTE) Rp.	4260	5000		5000	200,000,000	5000	200,000,000	5000	200,000,000	5000	200,000,000	29260	200,000,000		800,000,000	BK
KEPEGAWAIAN																	
Badan Kepegawalan, Pendidikan, dan Pelatihan						6,549,000,000	6,679,980,000	1	6,861,107,000	1	7,048,232,910	1	7,241,596,526	1	7,241,596,526	1	34,257,658,631
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	1,100,585,000	12 bulan	1,122,596,700	12 bulan	1,178,726,535	12 bulan	1,237,662,862	12 bulan	1,299,546,005	12 bulan	1,299,546,005	12 bulan	5,939,117,102	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDN	terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDN	77%	80%	87,198,000	83%	88,941,960	85%	93,389,058	90%	98,058,511	93%	102,961,436	93%	102,961,436	93%	348,291,161	
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	424 orang	424 orang	2,500,140,000	1393 orang	2,550,142,800	1393 orang	2,601,145,656	1393 orang	2,653,168,569	1393 orang	2,706,231,941	5996 orang	2,706,231,941	5996 orang	13,010,828,966	
Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawalan	Terkelolanya data kepegawalan yang mutakhir dan akurat	12 bulan	12 bulan	365,400,000	12 bulan	372,708,000	12 bulan	391,343,400	12 bulan	410,910,570	12 bulan	431,456,099	12 bulan	431,456,099	12 bulan	1,971,818,009	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang dilbna	-	577 orang	2,495,677,000	589 orang	2,545,590,540	600 orang	2,596,502,351	611 orang	2,648,432,398	625 orang	2,701,401,046	3002 orang	2,701,401,046	3002 orang	12,987,603,334	
PENDUKUNG URUSAN																	
SEKRETARIAT DAERAH						49,143,661,218	50,758,534,286	51,638,788,052	52,983,925,827	54,393,328,225	55,804,660,352	57,218,891,481	58,649,002,630	60,080,113,779	61,510,224,928	62,940,336,077	246,033,566,855
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 Bulan	10,015,960,000	12 bulan	10,216,279,200	12 bulan	10,420,604,784	12 bulan	10,629,016,879.68	12 bulan	10,841,597,217	12 bulan	10,841,597,217	12 bulan	52,123,458,081	SETKAB
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	6,039,340,000	12 bulan	6,160,126,800	12 bulan	6,283,329,336	12 bulan	6,408,995,922.72	12 bulan	6,537,175,841	12 bulan	6,537,175,841	12 bulan	31,428,967,900	SETKAB
Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	12 bulan	-	-	12 bulan	354,700,000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	354,700,000	SETKAB
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program SOM aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	150,000,000	12 bulan	300,000,000	12 bulan	315,000,000	12 bulan	330,750,000	12 bulan	347,287,500	12 bulan	347,287,500	12 bulan	1,443,037,500	SETKAB
Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinya kerjasama Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Kab/Kota Se Kaltim	12 kali	12 kali	144,278,000	12 kali	144,278,000	12 kali	151,491,900	12 kali	159,066,495	12 kali	167,019,820	60 kali	167,019,820	60 kali	766,134,215	SETKAB
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya jumlah pelayanan publik yang didukung TIK	100%	100%	2,467,675,000	100%	2,517,028,500	100%	2,567,369,070	100%	2,618,716,451.40	100%	2,671,080,780	100%	2,671,080,780	100%	2,999,474,385	SETKAB
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan	7 kegiatan	7 kegiatan	519,227,500	7 kegiatan	519,227,500	7 kegiatan	545,188,875	7 kegiatan	572,448,319	7 kegiatan	601,070,735	35 kegiatan	601,070,735	35 kegiatan	2,757,162,528	SETKAB
Program Pembangunan Daerah	Terwujudnya Kesenjangan antara perencanaan Pembangunan dengan Pelaksanaan Kegiatan	1 tahun	1 tahun	1,901,099,000	1 tahun	2,064,175,000	1 tahun	2,167,383,750	1 tahun	2,275,752,938	1 tahun	2,389,540,584	5 tahun	2,389,540,584	5 tahun	10,797,911,272	SETKAB
Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah	Terwujudnya pelayanan prima kepada tamu daerah	50 Kegiatan	50 Kegiatan	400,000,000	50 Kegiatan	408,000,000	50 Kegiatan	428,400,000	50 Kegiatan	449,820,000	50 Kegiatan	472,311,000	250 kegiatan	472,311,000	250 kegiatan	2,158,531,000	SETKAB
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terwujudnya Forum Koordinasi antar Pimpinan Daerah dan dengan Pemerintah Pusat dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	5,946,702,000	1 Tahun	6,250,000,000	1 Tahun	6,375,000,000	1 Tahun	6,502,500,000	1 Tahun	6,632,550,000	5 tahun	6,632,550,000	5 tahun	31,706,752,000	SETKAB

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan kinerja pemerintah yang tersusun sesuai dengan target dan capaian	20 Dokumen	20 Dokumen	425,032,000	20 Dokumen	446,283,600	20 Dokumen	468,597,780	20 Dokumen	492,027,669	20 Dokumen	516,629,052	100 dokumen	2,348,570,101	SETKAB
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Legislasi rancangan peraturan per- UU-an	12 kegiatan	12 kegiatan	1,874,365,000	12 kegiatan	1,874,365,000	12 kegiatan	1,968,083,250	12 kegiatan	2,066,487,413	12 kegiatan	2,169,811,783	60 kegiatan	9,953,112,446	SETKAB
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tergambarnya perkembangan dan dampak pelaksanaan pemekaran daerah dalam hal perkembangan ekonomi, keuangan pemerintah, pelayanan publik, dan kapasitas pemerintahan	20 segmen & 3 sub segmen	20 segmen & 3 sub segmen	514,793,418	20 segmen & 3 sub segmen	525,089,286	20 segmen & 3 sub segmen	551,343,751	20 segmen & 3 sub segmen	578,910,938	20 segmen & 3 sub segmen	607,856,485	40 segmen & 12 sub segmen	2,777,993,878	SETKAB
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	Tersedianya data administrasi pelayanan perizinan bidang sarpras perekonomian	3 dokumen	5 dokumen	114,300,000	5 dokumen	117,300,000	5 dokumen	123,165,000	5 dokumen	129,323,250	5 dokumen	135,789,413	60 dokumen	619,777,683	SETKAB
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terwujudnya koordinasi intensif dengan instansi pengendalian penanaman modal	1 dokumen	2 dokumen	147,880,000	2 dokumen	150,837,600	2 dokumen	158,379,480	2 dokumen	166,298,454	2 dokumen	174,613,377	10 dokumen	798,008,911	SETKAB
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terwujudnya Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah serta kemudahan dalam mencari data	2848 berkas	3000 berkas	144,000,000	3000 berkas	146,880,000	3000 berkas	154,224,000	3000 berkas	161,935,200	3000 berkas	170,031,960	15000 berkas	777,071,160	SETKAB
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terbitnya administrasi tanah pemerintah	3 SK penlok	3 SK penlok	290,000,000	3 SK penlok	319,000,000	3 SK penlok	334,950,000	3 SK penlok	351,697,500	3 SK penlok	369,282,375	15 SK penlok	1,664,929,875	SETKAB
Program Energi dan Sumber Daya Mineral	Terwujudnya koordinasi lintas sektoral secara efektif dalam pengendalian kegiatan jaringan gas bumi	-	-	-	10.477 SR	15,000,000	10.477 SR	15,750,000	10.477 SR	16,537,500	10.477 SR	17,364,375	10.477 SR	64,651,875	SETKAB
Program Penanganan Bidang Hukum	Terselenggaranya kegiatan penanganan bidang hukum	100%	100%	801,388,000	100%	801,400,000	100%	809,414,000	100%	817,508,140	100%	825,683,221	100%	4,055,393,361	SETKAB
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KIDW	Tertanganinya Kasus Pengaduan	100%	100%	225,000,000	100%	225,000,000	100%	236,250,000	100%	248,062,500	100%	260,465,625	100%	1,184,778,125	SETKAB
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta peningkatan spiritualisme masyarakat melalui peningkatan iman dan taqwa	10 kegiatan	10 kegiatan	9,965,525,000	10 kegiatan	9,965,525,000	10 kegiatan	10,164,835,500	10 kegiatan	10,368,132,210	10 kegiatan	10,575,494,854	50 kegiatan	51,039,512,564	SETKAB
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya akuntabilitas dalam mewujudkan good governance	1 tahun	1 tahun	3,565,062,300	1 tahun	3,565,062,300	1 tahun	3,636,363,546	1 tahun	3,709,090,817	1 tahun	3,783,272,633	5 tahun	18,258,851,596	SETKAB
Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	Terwujudnya Sarana dan Prasarana/Fasilitas Umum	5 gedung asrama mahasiswa	5 gedung asrama mahasiswa	1,424,000,000	5 gedung asrama mahasiswa	1,495,200,000	5 gedung asrama mahasiswa	1,525,104,000	5 gedung asrama mahasiswa	1,601,359,200	5 gedung asrama mahasiswa	1,681,427,160	5 gedung asrama mahasiswa	7,727,090,360	SETKAB
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya data kepegawain yang mutakhir dan akurat	12 bulan	12 bulan	1,030,000,000	12 bulan	1,129,500,000	12 bulan	1,152,090,000	12 bulan	1,209,694,500	12 bulan	1,270,179,225	12 bulan	5,791,463,725	SETKAB
Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Meningkatnya program/kegiatan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100%	100%	138,600,000	100%	138,600,000	100%	138,600,000	100%	145,530,000	100%	152,806,500	100%	714,136,500	SETKAB
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya monitoring, evaluasi pengendalian hasil pertanian/perkebunan dan peternakan	5 dokumen	5 dokumen	99,870,000	5 dokumen	99,870,000	5 dokumen	101,867,400	5 dokumen	106,960,770	5 dokumen	112,308,809	25 dokumen	520,876,979	SETKAB
Program Pelayanan Kedisnasan	Memberikan Pelayanan Yang Baik kepada Masyarakat	85%	87%	65,000,000	88%	68,250,000	90%	69,615,000	95%	71,095,750	98%	76,750,538	98%	79,007,906	SETKAB
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Memberikan mutu yang baik pada kinerja Pemerintah dengan saling memberi dukungan dan informasi	85%	87%	597,654,000	88%	597,654,000	90%	609,607,080	95%	640,087,434	98%	672,091,806	98%	726,452,172	SETKAB
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya kepedulian perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara ramah lingkungan	1 Dokumen	2 Dokumen	52,050,000	2 Dokumen	54,652,500	2 Dokumen	55,745,550	2 Dokumen	58,532,828	2 Dokumen	61,459,469	8 Dokumen	282,440,346	SETKAB
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan HAM	80%	82%	85,000,000	84%	89,250,000	86%	91,035,000	88%	95,586,750	90%	100,366,088	90%	103,318,011	SETKAB
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri				132,730,000											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	132,730,000	12 bulan	135,384,600	12 bulan	138,090,292	12 bulan	140,854,138	12 bulan	143,671,221	12 bulan	690,732,250	Korpri
SEKRETARIAT DPRD															
Sekretariat DPRD				28,306,350,500		28,325,649,090		28,892,162,072		29,479,095,313		30,095,405,430	1	145,053,422,395	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 BULAN	12 BULAN	96,790,000	12 BULAN	591,000,000	12 BULAN	602,820,000	12 BULAN	614,876,400	12 BULAN	627,173,928	12 BULAN	2,532,660,328	SETWAN
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 BULAN	12 BULAN	1,014,740,000	12 BULAN	1,251,700,020	12 BULAN	1,276,734,020	12 BULAN	1,302,268,701	12 BULAN	1,328,314,075	12 BULAN	6,173,756,816	SETWAN
Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	12 BULAN	12 BULAN	576,000,000	12 BULAN	462,500,000	12 BULAN	471,750,000	12 BULAN	481,185,000	12 BULAN	490,808,700	12 BULAN	2,482,243,700	SETWAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertindakannya pelayanan administrasi perkantoran	12 BULAN	12 BULAN	6,149,170,000	12 BULAN	7,318,670,070	12 BULAN	7,465,043,471	12 BULAN	7,614,344,341	12 BULAN	7,766,631,228	12 BULAN	36,313,859,110	SETWAN
Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	Tertindakannya Kerjasama Terkait Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Hukum	12 BULAN	12 BULAN	470,000,000	12 BULAN	479,400,000	12 BULAN	488,988,000	12 BULAN	498,767,760	12 BULAN	508,743,115	12 BULAN	2,445,898,875	SETWAN
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Legislatif Daerah (Perda) terhadap Prolegda	48%	55%	303,600,000	62%	373,600,000	70%	381,072,000	75%	388,693,440	80%	396,467,309	80%	1,843,432,749	SETWAN
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	18 Perda	20 Perda	19,695,950,500	22 Perda	17,848,779,000	24 Perda	18,205,754,580	26 Perda	18,569,869,672	28 Perda	18,941,267,065	10 perda	93,261,620,817	SETWAN
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1,924,626,700		1,622,698,323	\$	1,655,152,289	\$	1,688,255,335	\$	1,722,020,442	\$	8,612,753,090	KESBANGPOL
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	47,000,000	12 bulan	47,940,000	12 bulan	48,896,800	12 bulan	49,876,776	12 bulan	50,874,312	12 bulan	244,589,888	KESBANGPOL
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penuntasan berbagai kasus penyakit masyarakat	80%	83%	10,000,000	85%	10,200,000	90%	10,404,000	95%	10,612,080	100%	10,824,322	100%	52,040,402	KESBANGPOL
Program ketahanan sosial dan ekonomi	Dasar Ketahanan Ekosistem & SDG versi Rekomendasinya	12 lap	12 lap	17,603,300	12 lap	162,000,000	12 lap	165,240,000	12 lap	168,544,800	12 lap	171,915,696	60 lap	685,303,796	KESBANGPOL
Program pendidikan politik masyarakat	Tenajinya Data Ketahanan Ekosistem dan ada serta Rekomendasi Kebijakan	80%	83%	832,925,000	85%	79,000,000	90%	80,580,000	95%	82,191,600	100%	83,835,432	100%	1,158,532,032	KESBANGPOL
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	83%	18,645,000	85%	163,535,855	90%	166,806,572	95%	170,142,704	100%	173,545,558	100%	692,675,688	KESBANGPOL
Program pengembangan wawasan kebangsaan	berkembangnya wawasan kebangsaan	80%	83%	20,000,000	85%	162,000,000	90%	165,240,000	95%	168,544,800	100%	171,915,696	100%	687,700,496	KESBANGPOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertindakannya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	868,353,400	12 bulan	885,720,468	12 bulan	903,434,877	12 bulan	921,503,575	12 bulan	939,933,646	12 bulan	4,518,945,967	KESBANGPOL
Program pemeliharaan ketertarikan, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	terlaksananya pemeliharaan ketertiban umum serta terjaganya situasi tentram di masyarakat	80%	83%	110,100,000	85%	112,302,000	90%	114,548,040	95%	116,839,001	100%	119,175,781	100%	572,964,822	KESBANGPOL
KEWILAYAHAN															
KECAMATAN															
KECAMATAN PENAJAM															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertindakannya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,060,680,000	12 Bulan	1,060,680,000	12 Bulan	1,081,893,600	12 Bulan	1,135,988,280	12 Bulan	1,192,787,694	12 Bulan	5,532,029,574	KECAMATAN PENAJAM
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercakupinya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	693,979,000	12 Bulan	728,677,950	12 Bulan	743,251,509	12 Bulan	780,414,084	12 Bulan	819,434,789	12 Bulan	3,765,757,332	KECAMATAN PENAJAM
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	12 Bulan	-	-	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	61,200,000	12 Bulan	62,424,000	12 Bulan	63,672,480	12 Bulan	247,296,480	KECAMATAN PENAJAM
Program Penataan Daerah Otonom Baru	Terselaksananya tapal batas desa / kelurahan	-	-	-	1 kegiatan	22,885,000	1 kegiatan	23,342,700	1 kegiatan	24,508,835	1 kegiatan	25,735,327	5 kegiatan	96,472,862	KECAMATAN PENAJAM
Program Dukungan Kelancaran Administrasi Pemerintahan	Terselenggarakan kelancaran administrasi pemerintahan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	10,241,296,000	12 Bulan	10,343,708,960	12 Bulan	10,447,146,050	12 Bulan	10,551,617,510	12 Bulan	41,583,768,520	KECAMATAN PENAJAM
Program pelayanan dan kelancaran pelaksanaan administrasi kecamatan	Tertindakannya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	10,367,096,000	12 Bulan	10,470,766,960	12 Bulan	10,575,474,630	12 Bulan	10,681,228,376	12 Bulan	10,788,041,670	12 Bulan	53,882,608,635	KECAMATAN PENAJAM
Program Pembinaan Keagamaan	Terselenggarakan pembinaan keagamaan	Juara 2	Juara 1	161,950,000	Juara 1	1,661,950,000	Juara 1	1,678,569,500	Juara 1	1,695,355,195	Juara 1	1,712,308,747	Juara 1	6,910,133,442	KECAMATAN PENAJAM
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	8,932,622,000	12 Bulan	8,932,622,000	12 Bulan	9,021,948,220	12 Bulan	9,112,167,702	12 Bulan	9,203,289,379	12 Bulan	45,202,649,301	KECAMATAN PENAJAM
	Jumlah Inovasi Kelurahan	-	-	-	Tersebar di Kecamatan Penajam	100,000,000	Tersebar di Kecamatan Penajam	100,000,000	Tersebar di Kecamatan Penajam	100,000,000	Tersebar di Kecamatan Penajam	120,000,000	Tersebar di Kecamatan Penajam	120,000,000	KECAMATAN PENAJAM
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	adanya kejelasan status dan legalitas tanah antara masyarakat maupun pemerintah	1 kegiatan	1 kegiatan	150,000,000	1 kegiatan	150,000,000	1 kegiatan	153,000,000	1 kegiatan	156,060,000	1 kegiatan	159,181,200	5 kegiatan	768,241,200	KECAMATAN PENAJAM
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	terselaksananya konflik-konflik pertanahan	-	5 lokasi	25,000,000	5 lokasi	25,000,000	5 lokasi	25,500,000	5 lokasi	26,775,000	5 lokasi	28,113,750	5 lokasi	130,388,750	KECAMATAN PENAJAM
Program perencanaan pembangunan daerah	terselenggarakan kegiatan Muarebang di kecamatan Penajam	1 kegiatan	1 kegiatan	13,850,000	1 kegiatan	14,542,500	1 kegiatan	14,833,350	1 kegiatan	15,575,018	1 kegiatan	16,353,768	5 kegiatan	75,154,636	KECAMATAN PENAJAM
Program Penataan Administrasi Kependudukan				76,000,000											
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	terwujudnya pengelolaan keuangan Kabupaten/kota	1 kegiatan	1 kegiatan	58,444,000	1 kegiatan	58,444,000	1 kegiatan	59,612,880	1 kegiatan	60,805,138	1 kegiatan	62,021,240	5 kegiatan	299,327,258	KECAMATAN PENAJAM
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggarakan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,300,000	1 kegiatan	15,606,000	1 kegiatan	15,918,120	5 kegiatan	61,824,120	KECAMATAN PENAJAM
KECAMATAN WARU															
				1,845,579,090		2,081,280,231		2,122,405,835		2,209,224,109		2,310,022,255	1	8,613,056,696	

Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	352,592,000	12 bln	359,643,840	12 bln	366,836,717	12 bln	374,173,451	12 bln	381,656,920.16	12 bln	3,482,310,928	KECAMATAN WARU
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	Tercapainya laporan Tepat Waktu	12 bln	-	-	12 bln	15,000,000	12 bln	15,000,000	12 bln	16,000,000	12 bln	16,868,250	12 bln	63,233,250	KECAMATAN WARU
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	produk-produk hasil dari usaha kecil, menengah yang ada di wilayah kecamatan dapat di kenal oleh masyarakat luas	-	-	-	1 kegiatan	8,100,000	2 kegiatan	8,262,000	3 kegiatan	8,679,100	4 kegiatan	9,108,855	5 kegiatan	34,145,905	KECAMATAN WARU
Program Pembiayaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase pemanfaatan ADD & DD secara tepat sasaran dan tepat	1 kegiatan	1 kegiatan	8,100,000	2 kegiatan	8,262,000	3 kegiatan	8,427,240	4 kegiatan	8,848,602	5 kegiatan	9,291,032	6 kegiatan	34,828,874	KECAMATAN WARU
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	4,050,000	2 kegiatan	4,131,000	3 kegiatan	4,213,620	4 kegiatan	4,424,301	5 kegiatan	4,645,516	6 kegiatan	17,414,437	KECAMATAN WARU
Program Pelayanan dan kelancaran pelaksanaan administrasi Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan administrasi kecamatan, kelurahan dan desa	1 kegiatan	1 kegiatan	657,719,030	2 kegiatan	670,873,411	3 kegiatan	684,290,879	4 kegiatan	718,505,423	5 kegiatan	754,430,694	6 kegiatan	2,828,100,406	KECAMATAN WARU
Program pembinaan keagamaan	terselenggaranya kegiatan keagamaan	juara 4	juara 2	45,300,000	juara 2	46,206,000	juara 1	47,130,130	juara 1	49,486,626	juara 1	51,960,957	juara 1	194,783,703	KECAMATAN WARU
Program peringatan hari-hari besar Daerah/Lomba	Meningkatnya Partisipasi dan Rasa Nasionalisme Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	94,910,000	2 kegiatan	96,808,200	3 kegiatan	98,744,364	4 kegiatan	103,681,582	5 kegiatan	108,865,661	6 kegiatan	408,099,808	KECAMATAN WARU
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Validasi data an hibah secara akurat dan tepat	-	-	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	KECAMATAN WARU
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan	meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan untuk terwujudnya keluarga sehat, sejahtera dan bahagia	-	-	-	1 kegiatan	44,000,000	2 kegiatan	44,880,000	3 kegiatan	47,124,000	4 kegiatan	49,480,200	5 kegiatan	185,484,200	KECAMATAN WARU
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	211,070,000	12 bulan	215,291,400	12 bulan	219,597,228	12 bulan	223,989,173	12 bulan	228,468,956	12 bulan	887,346,757	KECAMATAN WARU
Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	70%	75%	5,700,000	78%	15,000,000	80%	15,300,000	82%	15,606,000	85%	15,918,120	85%	6,928,386	KECAMATAN WARU
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.	Adanya kejelasan status legalitas lahan milik pemerintah	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	45,000,000	1 kegiatan	45,900,000	1 kegiatan	48,195,000	1 kegiatan	50,604,750	1 kegiatan	189,699,750	KECAMATAN WARU
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penyelesaian Tapal Batas	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	39,925,000	1 kegiatan	40,723,500	1 kegiatan	42,759,675	1 kegiatan	44,897,659	1 kegiatan	168,305,834	KECAMATAN WARU
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya kesadaran diri sebagai warga negara dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	13,200,000	1 kegiatan	13,464,000	1 kegiatan	14,137,200	1 kegiatan	14,844,060	1 kegiatan	55,645,260	KECAMATAN WARU
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	470,138,000	1 kegiatan	474,839,380	1 kegiatan	484,336,168	1 kegiatan	508,552,976	1 kegiatan	533,980,625	1 kegiatan	2,001,709,148	KECAMATAN WARU
	Jumlah Inovasi Kelurahan	-	-	-	Tersebar di Kecamatan Waru	25,000,000	Tersebar di Kecamatan Waru	25,000,000	Tersebar di Kecamatan Waru	25,000,000	Tersebar di Kecamatan Waru	35,000,000	Tersebar di Kecamatan Waru	55,000,000	KECAMATAN WARU
Kecamatan Segahju				4,251,292,514		4,187,017,514		4,409,540,375		4,493,642,929		4,577,570,132	-	21,325,231,277	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	49,200,000	12 bulan	49,200,000	12 bulan	51,660,000	12 bulan	54,243,000	12 bulan	56,955,150	12 bulan	261,258,150	KECAMATAN SEPAKU
Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Meningkatnya Partisipasi dan Rasa Nasionalisme Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	74,500,000	1 kegiatan	78,225,000	1 kegiatan	82,136,250	1 kegiatan	86,243,063	1 kegiatan	90,555,216	5 kegiatan	411,659,528	KECAMATAN SEPAKU
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan	12 bulan	1,880,552,000	12 bulan	1,880,552,000	12 bulan	1,918,163,040.00	12 bulan	1,956,526,301	12 bulan	1,995,656,836.82	12 bulan	9,631,450,168	KECAMATAN SEPAKU
	Jumlah Inovasi Kelurahan	-	-	-	Tersebar di Kecamatan Segahju	-	Tersebar di Kecamatan Segahju	70,000,000	Tersebar di Kecamatan Segahju	75,000,000	Tersebar di Kecamatan Segahju	80,000,000	Tersebar di Kecamatan Segahju	80,000,000	KECAMATAN SEPAKU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	374,016,614	12 bulan	380,016,614	12 bulan	387,616,946	12 bulan	395,369,285	12 bulan	403,276,671		1,940,296,130	KECAMATAN SEPAKU
Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kecamatan, kelurahan dan desa	12 bulan	12 bulan	1,758,273,900	12 bulan	1,725,273,900	12 bulan	1,742,526,639.00	12 bulan	1,759,951,905	12 bulan	1,777,551,424.44		8,763,577,769	KECAMATAN SEPAKU
Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	13,750,000	1 kegiatan	13,750,000	1 kegiatan	14,437,500	1 kegiatan	15,159,375	1 kegiatan	15,917,344	5 kegiatan	73,014,219	KECAMATAN SEPAKU
Program Pembiayaan Keagamaan	Terselenggaranya kegiatan keagamaan	Juara 3	Juara 1	50,000,000	Juara 2	60,000,000	Juara 1	63,000,000	Juara 1	66,150,000	Juara 1	69,457,500	Juara 1	60,775,313	KECAMATAN SEPAKU
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	51,000,000	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	80,000,000	1 Kegiatan	84,000,000	1 Kegiatan	88,200,000	1 Kegiatan	303,200,000	KECAMATAN SEPAKU
Program Pembiayaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	ADD Tepat Manfaat,Waktu dan Sasaran	11 Desa	11 Desa	-	11 Desa	25,000,000	11 Desa	25,500,000	11 Desa	26,010,000	11 Desa	26,530,200	11 Desa	103,040,200	KECAMATAN SEPAKU
	Terwujudnya Penganggaran yang Tepat, Partisipatif dan Berkualitas	2 OK	2 OK	-	2 OK	5,000,000	2 OK	5,100,000	2 OK	5,202,000	2 OK	5,306,040	10 OK	20,608,040	KECAMATAN SEPAKU
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Adanya kejelasan batas wilayah antar Desa dan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	10,000,000	5 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SEPAKU
Kecamatan Babulu				2,313,070,000		2,655,471,400		2,585,691,228		2,644,880,471		2,705,675,945	2	12,193,903,256	

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	524,050,000	12 bulan	534,531,000	12 bulan	545,221,620	12 bulan	556,136,052.40	12 bulan	567,348,573	12 bulan	2,727,177,346	KECAMATAN BABULU
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur	-	-	-	12 bulan	51,000,000	12 bulan	52,020,000	12 bulan	53,060,400	12 bulan	54,121,608	12 bulan	210,202,008	KECAMATAN BABULU
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercakupnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	106,806,600	12 bulan	108,942,732	12 bulan	111,121,587	12 bulan	116,677,666	12 bulan	122,511,549	12 bulan	566,060,134	KECAMATAN BABULU
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	tersesainya konflik-konflik pertanahan	70%	75%	11,600,000	85%	11,832,000	90%	12,068,640	95%	13,275,504	100%	14,603,054	100%	16,983,560	KECAMATAN BABULU
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Adanya kejelasan status legalitas lahan milik pemerintah	-	-	-	12 bulan	120,480,000	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	120,480,000	KECAMATAN BABULU
Program Peningkatan Kebendayaan masyarakat pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Kebendayaan Masyarakat Pedesaan	65%	75%	62,300,000	85%	63,546,000	95%	64,816,920	100%	66,113,258	100%	67,435,524	100%	75,726,039	KECAMATAN BABULU
Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	7,000,000	1 kegiatan	28,000,000	1 kegiatan	28,560,000	1 kegiatan	29,131,200	1 kegiatan	29,713,824	5 kegiatan	122,405,024	KECAMATAN BABULU
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	ADD Tepot Manfat, Waktu dan Sasaran	12 desa	12 desa	17,400,000	12 desa	17,748,000	12 desa	18,102,960	12 desa	18,465,019	12 desa	18,834,320	12 desa	90,550,299	KECAMATAN BABULU
Program peringatan hari-hari besar nasional	Meningkatnya Partisipasi dan Rasa Nasionalisme Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	104,300,000	1 kegiatan	106,386,000	1 kegiatan	108,513,720	1 kegiatan	110,683,994	1 kegiatan	112,897,674	1 kegiatan	126,777,302	KECAMATAN BABULU
Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kecamatan, keurahan dan desa	12 bulan	12 bulan	42,200,000	12 bulan	43,044,000	12 bulan	43,904,880	12 bulan	44,782,978	12 bulan	45,678,637	12 bulan	219,610,495	KECAMATAN BABULU
Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan	-	-	-	12 bulan	103,800,000	12 bulan	105,876,000	12 bulan	111,169,800	12 bulan	116,728,290	12 bulan	437,574,090	KECAMATAN BABULU
Program Pembinaan keagamaan	terselenggaranya kegiatan keagamaan	Juara 1	Juara 1	1,437,413,400	Juara 1	1,466,161,668	Juara 1	1,495,484,901	Juara 1	1,525,394,599	Juara 1	1,555,902,491.37	Juara 1	7,480,357,060	KECAMATAN BABULU

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengukuran keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Diharapkan terciptanya pemerataan pembangunan pada seluruh lini di masyarakat berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup. Muara dari pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator Kinerja Utama yang menjadi alat ukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan beserta target capaian selama lima tahun ke depan, disajikan dalam tabel 8.1 dan tabel 8.2.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten PenajamPaser Utara

Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.13 ± 1	3.13 ± 1	3.13 ± 1	3.13 ± 1	3.13 ± 1
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.875%	2.85%	2.825%	2.80%	2.75%
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 2 : Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu						
1	Nilai investasi	14,038,517,774	57,415,400,000	101,584,950,000	196,967,000,000	80,228,000,000
Indikator		Target Tahun ke				
		1	2	3	4	5
Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan						
1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14.77	14.85	14.92	15.07	15.07
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10.6	10.7	10.79	10.88	10.96
3	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.00	71.50	71.75	72.00	72.50
4	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan Nasional	2 medali	2 medali	3 medali	3 medali	3 medali
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65.94	69.38	72.82	76.26	79.70
6	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	624,2 poin	635 poin	640 poin	650 poin	660 poin
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas						
1	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	11%	11.50%	12%	12.50%	13%
2	pencapaian skor pola pangan harapan	85.24	87.64	90.04	92.44	94.84
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan						
1	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	72,328	75,944	80,501	86,136	93,027
2	NTP	103	103	104	104	105
3	Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif	0	130	137	140	145
4	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani	400 izin	450 izin	500 izin	550 izin	600 izin
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 6 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpinggirkan dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan						
1	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 5 Berkembang = 25 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 1 Maju = 8 Berkembang = 21 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0
2	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	24 kelurahan dan 30 desa	24 kelurahan dan 30 desa	24 kelurahan dan 30 desa	24 kelurahan dan 30 desa
		80%	82%	86%	92%	100%
3	Persentase kemiskinan	7.5	7.36	7.05	6.5	6.2
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman						
1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	43	163.71	181	196.93 KM	135.79 KM
2	luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)	6,000	37,035	35,990	36,740	36,565
3	Persentase pemukiman yang tertata	99.70%	99.75%	99.80%	99.85%	99.90%
4	Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat	510	200	200	200	200
5	jumlah bangunan/gedung terbangun	5	3	3	3	3
6	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	10	9	9	9	9
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.5	69.50	70.50	71.50	73.50
8	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	90.05%	90.55%	91.00%	91.55%	92.05%
9	luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	20	20	20	25	25

Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
10	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana	60%	70%	75%	80%	85%
11	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	<24 jam	<24 jam	<12 jam	<12 jam	<6 jam
12	Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana	75%	76%	77%	78%	80%
13	Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan	-	120 Ha	150 Ha	180 Ha	200 Ha
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas						
1	Peningkatan PAD	155,661,611,902	180,567,469,806	286,105,533,454	343,691,472,714	398,682,108,348
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 9 : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas						
1	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B	B	B	B	B
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 10 : Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah						
1	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	38 Aplikasi	43 Aplikasi	50 Aplikasi	58 Aplikasi	68 Aplikasi
Indikator		Target Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara yang maju, modern dan religius						
1	Kasus/konflik yang bernuansa agama	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
2	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85%	86%	87%	88%	89%

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	kesejahteraan dan Pemerataan							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat Daerah, <u>Kepengawasan dan Persandian</u>							
	Pertumbuhan PDRB	4.15%	4.15%	4.15%	4.15%	4.15%	4.15%	4.15%
	Laju inflasi	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%
	PDRB per kapita	6,501,989.06	6,700,000.00	6,900,000.00	7,100,000.00	7,300,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Angka Pengangguran	2,90%	2.90%	2.875%	2.85%	2.825%	2,80%	2,80%
	Nilai Investasi	32,991,591,000.00	35,000,000,000.00	40,000,000,000.00	45,000,000,000.00	50,000,000,000.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
	Kesejahteraan Sosial							
	Pendidikan							
	Angka melek huruf	99.60%	99.70%	99.70%	99.70%	99.70%	99.70%	99.70%
	Angka rata-rata lama sekolah	7.95%	10.00%	14.77%	14.85%	14.91%	15.07%	15.07%
	Harapan Lama Sekolah	12,53 tahun	11 tahun	10,6 tahun	10,7 tahun	10,79 tahun	10,88 tahun	10,88 tahun
	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	p. data (KLA blm terbentuk)	624,17 poin	624,2 poin	635 poin	640 poin	650 poin	650 poin
	PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Pendidikan							
	Pendidikan dasar							
	Angka partisipasi sekolah	92.50%	84,80%	93%	93%	93%	93%	93%
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	,1 : 208	,1 : 208	,1 : 208	,1 : 208	,1 : 208	,1 : 208	,1 : 208
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia							
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
	APK							
	SD / MI	100	100	100	100	100	100	100
	SMP	100	100	100	100	100	100	100
	APM							
	SD / MI	90	91.8	91.2	90.7	90.4	90	90
	SMP	80	81.1	80.7	80.5	80.2	80	80
	Rasio Guru / Siswa							
	SD	544,61/ (1:18)	544,21/ (1:18)	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)
	SMP	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)
	Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1 / D4)							
	Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 SD / MI	84.79	80.5	90.5	100	100	100	100

Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 SMP / MTs	92.29	95.5	98.5	100	100	100	100
Presentase Guru yang memenuhi Sertifikasi (S1 / D4) SD / MI	95	96	97	97	98	98	98
Presentase Guru yang memenuhi Sertifikasi (S1 / D4) SMP / MTs	95	96	96	97	98	99	99
Terwujudnya Pemerintah yang efektif efisien dan bersih KKN							
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136.962,015.838	136,962,015,838	143,810,116,629	151,000,622,461	158,550,653,584	166,478,186,263	166,478,186,263
Indeks Persepsi Korupsi	54.9 (2017)	5	5	5	5	5	5
Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	5 kasus (2017)	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja							
Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	cc	bb	bb	bb	bb	bb	bb
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Dasar serta Fasilitas Pelayanan Publik yang memadai							
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	6319 sambungan rumah	250 sambungan rumah	250 sambungan rumah	250 sambungan rumah	250 sambungan rumah	500 sambungan rumah	1500 sambungan rumah
Jumlah SPAM dikelola masyarakat	0 Unit	0 Unit	2 Unit	4 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit
Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan	47,461 Km	48,000 Km	40,500 Km	41,000 Km	41,500 Km	42,000 Km	42,000 Km
Persentase Jalan Mantap	41,37%	37,98%	39,00%	40,00%	41,00%	42,00%	42,00%
Persentase Jembatan terpelihara	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah Backlog Rumah	8,570 Unit	8,370 Unit	8,170%	7.97%	7.77%	7.57%	7.57%
Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	89,5%	89,55%	90,05%	90,55%	91,05%	91,55%	91,55%
Menurunnya Tingkat Kemiskinan							
Kesehatan							
Rasio posyandu per satuan balita	1 : 75.9						0
Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	1 : 2.628						0
Penurunan Angka Kematian Balita	15 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	7 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 Kasus	3 Kasus
Angka Harapan Hidup	71 Tahun	71,00 Tahun	72,00 Tahun	73,00 Tahun	74,00 Tahun	75,00 Tahun	75,00 Tahun
Angka Kematian Bayi Neonatal	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus
Cakupan Pelayanan Desa KLB	30%	30%	40%	50%	60%	70%	90%
Rasio Dokter / Penduduk	1 : 4000	1 : 4.000	1 : 3.700	1 : 3.400	1 : 3.000	1 : 2.821	1 : 2.821
Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat	250 jenis	250 jenis	270 jenis	290 jenis	320 jenis	338 jenis	338 jenis
Menurunnya Indeks Gini							
Jumlah Kesadaran Ber KB	22.036 orang	26.000 orang	30.000 orang	34.000 orang	38.000 orang	42.000 orang	42.000 orang
Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	220%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya IPM	69.96%	70.96%	71.45%	72.89 %	73.78 %	74.80%	75.93%
Peningkatan Jumlah UMKM	3.672 UMKM	3.800 UMKM	4.000 UMKM	4.300 UMKM	4.500 UMKM	5.000 UMKM	5.000 UMKM
Peningkatan Jumlah Koperasi	241						
Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	26 UMKM	50 UMKM	75 UMKM	100 UMKM	125 UMKM	150 UMKM	150 UMKM
Pertumbuhan Jumlah IKM	851	868	885	902	920	938	938
Meningkatnya Desa Swasembada	1 desa (2017)	2 desa	3 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa
Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif / Berkembang	18	20	23	25	27	30	30
Pelayanan Urusan Pilihan							
Pertanian							

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/Ha)	2,86	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,00
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	10,26%	11,00%	11,50%	12,00%	12,50%	13,00%	13,00%
Desa Mandiri Pangan	2 desa	2 desa	3 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa
kehutanan							
Kerusakan Kawasan Hutan	21,30 Ha						
Luas Tanaman Perkembunan Rakyat (Ha)	29,436	29,820	300,057	30,291	30,527	30,781	30,781
Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Bencana							
Menurunnya luas areal kebakaran lahan	21,75 Ha						
Pengujian Kualitas Air dan Udara	5 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi
Presentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	100 % (2017)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Ketahanan Pangan							
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	6,000	6,200	6,400	6,600	6,800	7,000	7,000
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	5,368	4,400	4,600	4,800	5,000 ton	5,200	5,200
Rasio Penyuluh terhadap Desa	1 : 1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
DAYA SAING DAERAH							
Kemampuan Ekonomi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Hepegawaian dan Persandian							
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%
Pertanian							
Nilai Tukar Petani	103	103	103	104	104	105	105
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
Perhubungan							
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.0307	0.0363	0.04	0.042	0.044	0.046	0.046
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	5.34 orang/1 Kendaraan	5.34 orang/1 Kendaraan	5.34 orang/1 Kendaraan	5.34 orang/1 Kendaraan	5.34 orang/1 Kendaraan	5.34 orang/1 Kendaraan	5.34 orang/1 Kendaraan
Pariwisata							
Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	69,311	72,328	72,328	75,944	80,501	86,136	86,136

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara terpilih, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. RPJMD juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya selama periode tersebut.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara “Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Maju, Modern, dan Religius”, maka perlu didukung oleh (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran; (2) Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu; (3) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan; (4) Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas; (5) Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan; (6) Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan; (7) Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman; (8) Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non

migas; (9) Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas; (10) Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah; (11) Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara yang maju, modern dan religius.

Dengan demikian, maka dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan akan membawa masyarakat yang maju, modern, dan religius sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara terpilih periode 2018-2023.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD